KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

ISSN 3047-6135

INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2024

VOLUME 5, 2024



DIREKTORAT JENDERAL KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA

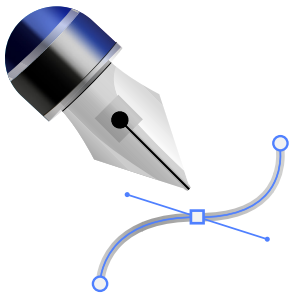
Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Tahun 2024

Direktorat Jenderal Komunikasi
Publik dan Media



ISBN :

Tim Redaksi



Pengarah : Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media

Penanggung Jawab : Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik

Koordinator Penulis : Prof. Gati Gayatri

Wakil Koordinator : Vience Mutiara Rumata

Penulis :

1. Karman
2. Mulyani
3. Hardy Kembar Pribadi
4. Meylani
5. Reaza Rahmatika
6. Linda Nihara Hayati
7. Muhammad Leozandy Swondy
8. Andry
9. Eka Cipta Nur Zain
10. Dhika Rifansyah
11. Tika Lela Ikramawati

Desain Sampul dan Isi:

1. Dhenty Febrina Sahara
2. Luthfi Herdiansyah
3. Lamdza Rahmattunnisa

Disusun dan diterbitkan pada tahun 2024

Penerbit:

Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik

Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media

Kementerian Komunikasi dan Digital

Alamat Redaksi:

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110

Telp/Fax 021-3459191

www.Kominfo.go.id

DAFTAR ISI

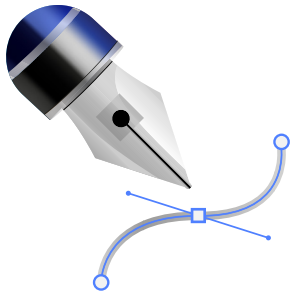
Tim Redaksi III
Daftar Isi IV
Kata Pengantar VI
Sambutan VIII
Ringkasan Eksekutif X

Bab 1. Pendahuluan 16
1.1. Latar Belakang 17
1.2. Tujuan dan Kegunaan 20
1.3. Konsep dan Definisi 20
1.4. Metodologi 27
1.5. Keterbatasan-keterbatasan 29

Bab 2. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2024 30
2.1 Dimensi Input 34
A. Pengantar 34
B. Capaian Indeks Dimensi Input di Kementerian/ Lembaga 35
1. Anggaran 35
2. Bahan Informasi 39
3. Sarana dan Prasarana 45
4. Media dan Saluran Komunikasi 48
C. Capaian Indeks Dimensi Input Dinas Kominfo Provinsi 50
1. Anggaran 50
2. Bahan Informasi 52
3. Sarana dan Prasarana 59
4. Media dan Saluran Komunikasi 62
D. Kesimpulan Dimensi Input 64

2.2 Dimensi Proses 70
A. Pengantar 70
B. Capaian Indeks untuk Dimensi Proses di Kementerian/ Lembaga 71
1. Pengumpulan Data dan Informasi 71
2. Perencanaan 73
3. Pelaksanaan 76
4. Monitoring dan Evaluasi 87
C. Capaian Indeks Dimensi Proses di Tingkat Dinas Kominfo 89
1. Pengumpulan Data dan Informasi 90
2. Perencanaan 92
3. Pelaksanaan 95
4. Monitoring dan Evaluasi 107
D. Kesimpulan Dimensi Proses 108

2.3 Dimensi Output 114
A. Pengantar 114
B. Capaian Indeks untuk Dimensi Output 114
1. Penerimaan Informasi 114
2. Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik 126
3. Penilaian Publik terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik 132
C. Capaian Indeks Untuk Dimensi Output 34 Provinsi 138
D. Kesimpulan Dimensi Output 140



2.4 Dimensi Outcome **142**

A. Pengantar **142**

B. Capaian Indeks Untuk Dimensi Outcome **142**

1. Pemahaman Publik tentang Hak untuk Tahu (*Right To Know*) **143**

2. Partisipasi Publik Dalam Proses-Proses Kebijakan Pemerintah **144**

3. Dampak Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah **148**

4. Penilaian Publik terhadap Pemerataan Informasi Publik **149**

C. Capaian Indeks Dimensi Outcome **152**

D. Kesimpulan Dimensi Outcome **152**

E. Kesimpulan Dimensi Input - Proses Output - Outcome **154**

Bab 3 Refleksi atas Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2024 **158**

3.1 Perbandingan Indeks PIKP tahun 2019, 2021, 2022, 2023 dan 2024 **158**

3.2 Implikasi Hasil Pengukuran **160**

3.3 Kesimpulan dan Rekomendasi **161**

DAFTAR PUSTAKA **162**

LAMPIRAN I

Sumber Data Primer

LAMPIRAN II

Perhitungan Indeks PIKP Tahun 2024

LAMPIRAN III

Daftar Indikator Indeks PIKP Tahun 2024

LAMPIRAN IV

Skor Indeks PIKP Tahun 2024

LAMPIRAN V

Perbandingan Indeks PIKP 2019, 2021, 2022, 2023, 2024

LAMPIRAN VI

Data Pelengkap, Gambaran Demografis Responden Masyarakat

LAMPIRAN VII

Sumber Daya Manusia Bidang PIKP

KATA PENGANTAR

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik

Dr. Hasyim Gautama



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga kegiatan pengukuran kinerja Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) melalui Indeks PIKP Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Pengukuran Indeks ini merupakan bagian dari tugas pokok dan menjadi salah satu Program Kerja tahun 2024 dari Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Digital. Tahun 2024 ini menandai pelaksanaan pengukuran Indeks PIKP untuk yang kelima kalinya.

Sebagaimana pada kegiatan sebelumnya, pengukuran Indeks PIKP Tahun 2024 dilaksanakan dengan tujuan estimasi nasional, menggunakan pendekatan sistem (Input-Proses-Output Outcome), dengan data kuantitatif sebagai basis penghitungan Indeks. Data untuk dimensi Input dan Proses berasal dari hasil survei terhadap unit-unit kerja pelaksana fungsi informasi dan komunikasi publik di tingkat pemerintah pusat (total samping 70 K/L, dan dari jumlah tersebut 67 Kementerian dan Lembaga Non kementerian bersedia berpartisipasi), dan Dinas Komunikasi dan Digital di tingkat daerah (total sampling 34 Provinsi) dengan instrumen self-administered quastionnaires.

Data untuk dimensi Output dan Outcome berasal dari hasil survei masyarakat di 34 Ibukota Provinsi, dimana lokasi kecamatan, kelurahan, RW dan RT dipilih secara proporsional dengan teknik multi-stage area probability sampling. Target populasi yaitu penduduk berusia 15-64 tahun (termasuk penyandang disabilitas) dengan sampel sebanyak 1.600 orang. Responden dipilih secara acak proporsional dengan memperhatikan faktor usia dan tingkat pendidikan.

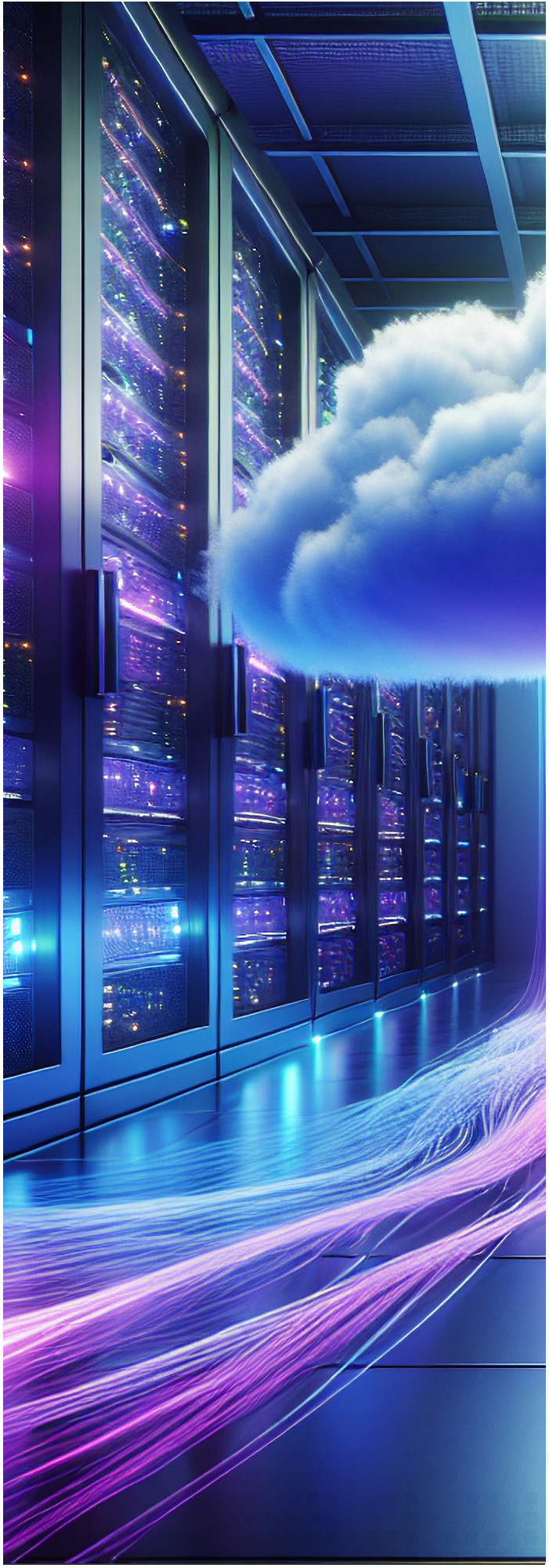
Pengumpulan data dari responden dilakukan melalui wawancara dengan kuesioner sebagai pedoman wawancara oleh tim enumerator yang terdiri dari para peneliti bidang komunikasi dan mitra Badan Pusat Statistik. Hasil piloting terhadap instrumen survei masyarakat menunjukkan angka reliabilitas rata-rata di atas 0,60.

Dengan selesainya kegiatan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada para ahli, pembuat kebijakan, dan praktisi informasi dan komunikasi publik yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta memberikan sumbang saran serta gagasan-gagasan selama pelaksanaan kegiatan. Ucapan terimakasih dan penghargaan juga perlu kami sampaikan kepada Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital serta Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik yang telah memberikan dukungannya, serta kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan atensinya, dan kepada koordinator penyusun Indeks PIKP Prof. Dr. Gati Gayatri, M.A. bersama seluruh anggota tim yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya.

Kami menyadari bahwa pengukuran Indeks PIKP ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik, sumbangsaran, serta gagasan-gagasan baru dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dan pengembangan Indeks PIKP di masa mendatang. Semoga Indeks ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi berbagai pihak dan menjadi referensi penting dalam meningkatkan tata kelola informasi dan komunikasi publik.

Jakarta, 5 Desember 2024

Dr. Hasyim Gautama



SAMBUTAN

Plt. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media

Molly Prabawaty



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan pengukuran Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Indeks PIKP) Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Dengan penuh sukacita, kami menyambut publikasi laporan ini karena kami meyakini bahwa Indeks PIKP dapat menjadi instrumen penting bagi badan-badan publik pemerintah dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yang merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

Pelaksanaan pengukuran Indeks PIKP merupakan bentuk komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital terhadap Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Inpres ini mengamanatkan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengoordinasikan komunikasi publik nasional, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan komunikasi publik oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Instruksi tersebut juga mencakup diseminasi informasi publik melalui skema narasi tunggal kebijakan dan program pemerintah.

Sejak pertama kali dikembangkan pada tahun 2019, Indeks PIKP telah menjadi alat evaluasi yang strategis bagi perbaikan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik nasional. Kita memahami bahwa informasi dan komunikasi memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam sistem negara demokratis. Namun, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat dan penuh dengan disrupsi menghadirkan tantangan baru, seperti perubahan lanskap komunikasi yang menyebabkan batas antara ranah publik dan privat semakin kabur, serta meningkatnya disinformasi yang tersebar melalui media digital.

Situasi ini menuntut pemerintah untuk terus melakukan pembaruan dan penyesuaian agar sistem pengelolaan informasi dan komunikasi publik menjadi lebih adaptif dan efektif. Langkah-langkah pembaruan ini harus terus dipantau dan dievaluasi dengan menggunakan alat ukur yang objektif. Indeks PIKP hadir sebagai instrumen yang dapat mengukur perkembangan kinerja

pengelolaan informasi dan komunikasi publik nasional, hasil dari koordinasi dan kerja sama antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Kami berharap hasil pengukuran Indeks PIKP Tahun 2024, yang merupakan kegiatan kelima setelah tahun 2019, 2021, 2022, dan 2023, mampu memberikan gambaran capaian kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik nasional. Indeks ini diharapkan dapat menyoroti kontribusi dari masing-masing K/L dan Dinas Kominfo Provinsi pada empat dimensi utama: Input, Proses, Output, dan Outcome.

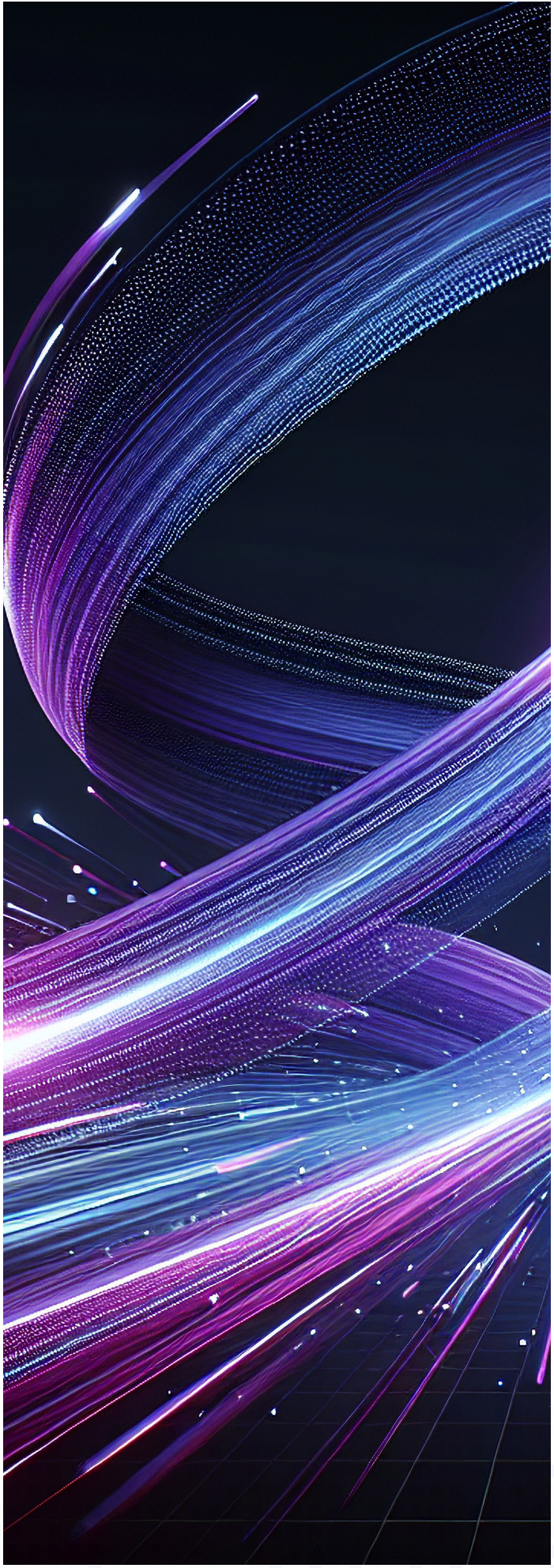
Selain itu, hasil pengukuran ini diharapkan dapat membantu setiap instansi mengidentifikasi perkembangan serta area yang memerlukan perbaikan, sehingga aktivitas komunikasi publik di masa mendatang dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Kami juga berharap data yang dihasilkan dari pengukuran ini dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan kebijakan, khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang informasi dan komunikasi. Dengan demikian, upaya pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkualitas dapat terus ditingkatkan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga hasil dari pengukuran Indeks PIKP Tahun 2024 dapat memberikan manfaat yang besar bagi penguatan tata kelola komunikasi publik di Indonesia.

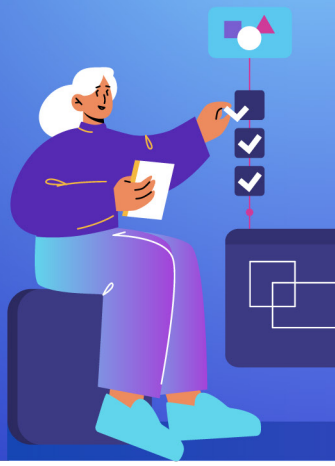
Jakarta, 5 Desember 2024

Molly Prabawaty



EXECUTIVE SUMMARY

Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2024



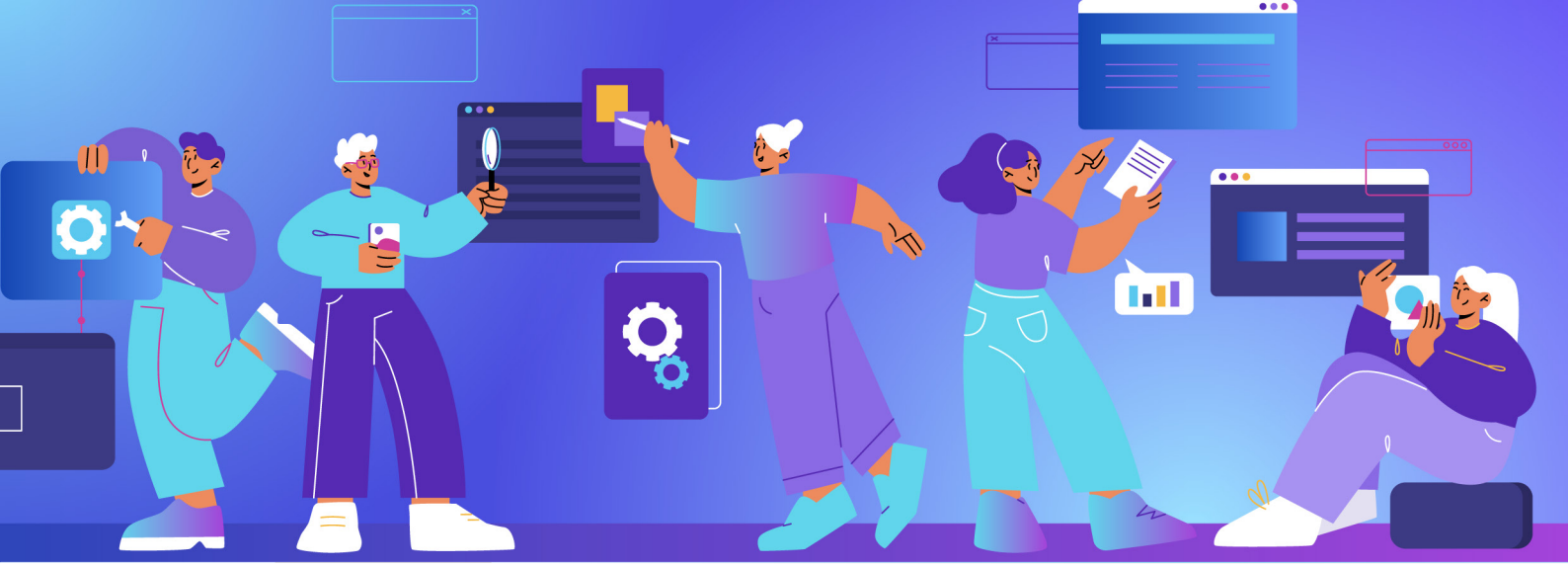


Pendahuluan

Tata Kelola informasi dan komunikasi publik (IKP) memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan tata kelola IKP menjadi salah satu sasaran bidang komunikasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sasaran ini kemudian diterjemahkan menjadi salah satu Rencana. Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2020 – 2024 dalam rangka optimalisasi transparasi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Transparasi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik yang efektif tidak hanya dilaksanakan melalui penyebaran masif informasi tentang program-program prioritas pemerintah melalui media elektronik dan media digital, tetapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah serta pembangunan nasional, yang diharapkan mampu mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah serta berkontribusi pada penguatan demokrasi di Indonesia.

Evaluasi terhadap kinerja Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) memerlukan alat ukur yang terstandar, sistematis dan objektif. Sejak tahun 2019, Kementerian Komdigi telah melaksanakan survei nasional dengan topik: “Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)” yang bertujuan mengukur kinerja PIKP dari sisi pemerintah pusat dan daerah sebagai pengelola, dan dari sisi masyarakat sebagai penerima layanan IKP. Skor indeks PIKP berfungsi menunjukkan tingkat kinerja PIKP pemerintah terutama dalam hal ketersediaan,penyediaan, dan



penggunaan sumber daya pendukung pelaksanaan PIKP (INPUT), manajemen informasi dan komunikasi (PROSES), penerimaan dan penilaian masyarakat terhadap informasi dan pelayanan informasi yang diterima (OUTPUT), serta pengaruh dan dampak PIKP terhadap masyarakat (OUTCOME). Pengukuran Indeks dimaksudkan untuk menghasilkan estimasi tingkat kinerja PIKP secara nasional. Sebagai alat ukur yang objektif, Indeks PIKP diharapkan dapat membantu dan memberikan data sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan dan perbaikan kebijakan dan program-program pelayanan informasi dan komunikasi publik serta dalam peningkatan koordinasi PIKP, baik diantara maupun antar instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor.

Sejak awal penyusunannya, Indeks PIKP dirancang sebagai indikator gabungan (composite indicator) yang mencakup empat dimensi, yaitu: INPUT, PROSES, OUTPUT dan OUTCOME. Setiap dimensi terdiri dari indikator-indikator variabel PIKP yang disusun dengan pendekatan normatif, yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan yang berlaku, dan disesuaikan dengan kebutuhan monitoring dan evaluasi komunikasi publik yang menjadi kewenangan Kementerian Komdigi

Sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah yaitu menyebarluaskan informasi tentang kebijakan dan program pembangunan, khususnya informasi tentang Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden dan disahkan melalui Peraturan Presiden setiap tahun.

Pengukuran Indeks PIKP dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni berupa survei, dengan metode sebagai berikut: Pertama, untuk pengukuran dimensi INPUT dan PROSES, populasi terdiri dari seluruh Kementerian dan Lembaga Non-kementerian (K/L) di tingkat pusat, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Provinsi di tingkat daerah. Target populasi instansi terdiri dari satuan kerja di K/L dan Dinas Kominfo Provinsi yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi PIKP. Sampel instansi dipilih dengan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner secara mandiri oleh masing-masing instansi (self-administered quationnaires).

Ke-dua, untuk pengukuran dimensi OUTPUT dan OUTCOME, populasi terdiri dari seluruh masyarakat Indonesia dan target populasi terdiri dari penduduk di ibukota provinsi yang berusia 15-64 tahun. Ukuran sampel ditetapkan dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 2,45 (1.600 orang), yang didistribusikan ke tingkat kecamatan, kelurahan, RW, dan RT dengan jumlah proporsional berdasarkan lokasi yang dipilih secara acak bertingkat (multi-stage area random sampling). Di setiap lokasi pemilihan responden dilakukan secara acak sistematis (systematic random sampling). Sebelum digunakan dalam survei masyarakat, instrumen berupa kuesioner terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya melalui piloting di salah satu kota yang terpilih sebagai lokasi survei.

Pengumpulan data dalam survei masyarakat dilakukan oleh enumerator yang terdiri dari mitra Badan Pusat Statistik (BPS) dan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Quality control terhadap pengisian kuesioner baik oleh instansi K/L dan Dinas Kominfo maupun oleh enumerator pada survei masyarakat dilakukan melalui verifikasi oleh Tim Pusat dengan koordinator tim peneliti ahli utama BRIN.

Perbandingan Indeks PIKP tahun 2024 dan tahun sebelumnya

Skor dimensi Input pada Indeks PIKP tahun 2024 di tingkat Pusat (K/L) menunjukkan kriteria “sangat baik” di kisaran nilai 80,89 (tabel 1. di bawah ini). Skor ini meningkat 3,85 poin dibanding skor dimensi Input pada Indeks PIKP tahun 2023 sebesar 77,04. Variabel dengan skor terendah dari dimensi input yaitu variabel bahan informasi dengan nilai yang termasuk kategori “sedang” (66,27). Pengukuran indikator bahan informasi ini berdasarkan frekuensi penyediaan bahan informasi Program Prioritas Nasional. Rendahnya skor variabel bahan informasi dikontribusi oleh tidak semua K/L menyediakan bahan informasi seluruh Program Prioritas Nasional, karena masing-masing K/L memiliki tugas pokok dan fungsi yang tidak berhubungan langsung dengan Program Prioritas tersebut. Dari 67 K/L, hanya 15 K/L yang menyediakan bahan informasi sebanyak 39 Program Prioritas Nasional, diantaranya adalah Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan.

Tabel 1. Skor Dimensi Input dan Proses tingkat Pusat (K/L)

Dimensi Input	Skor	Dimensi Proses	Skor
Anggaran	90,67	Pengumpulan Data dalam Rangka Perencanaan Program	63,43
Bahan Informasi	66,27	Perencanaan	73,02
Sarana dan Prasarana	86,15	Pelaksanaan	56,56
Media dan Saluran Komunikasi	80,46	Monitoring dan Evaluasi	70,40
Nasional	80,89	Nasional	65,85

Skor nasional pada dimensi Proses untuk tingkat pusat lebih rendah dibandingkan dengan skor dimensi Input yakni 65,85. Skor ini menurun 2,66 poin dibanding skor dimensi Proses pada Indeks PIKP tahun 2023 sebesar 68,51. Skor variabel terendah yaitu variabel pelaksanaan dengan skor 56,56 (kategori “buruk”). Salah satu komponen dari variabel pelaksanaan adalah frekuensi kegiatan diseminasi program pemerintah kepada masyarakat. Sebanyak 60 K/L melakukan kegiatan diseminasi. Meski demikian, tingkat partisipasi K/L dalam menyebarkan informasi masing-masing Program Prioritas Nasional sangat beragam. Dari 39 Program Prioritas Nasional, hanya 10 Program Prioritas Nasional dengan tingkat partisipasi lebih dari 50 persen. Ada satu Program Prioritas yang memiliki persentasi partisipasi mencapai 93,3% atau dalam arti lain 56 K/L menyebarkan informasi Program Prioritas Nasional (PN 01) Konsolidasi Demokrasi dengan kegiatan Sosialisasi World Water Forum/Sosialisasi Pemilu/Sosialisasi Pilkada/ Sosialisasi Penurunan Stunting yang merupakan agenda nasional tahun 2024 yang dikampanyekan oleh lintas K/L dan sektor.

Tabel 2. Skor Dimensi Input dan Proses Dinas Kominfo

Dimensi Input	Skor	Dimensi Proses	Skor
Anggaran	85,29	Pengumpulan Data dalam Rangka Perencanaan Program	58,82
Bahan Informasi	65,36	Perencanaan	72,54
Sarana dan Prasarana	82,35	Pelaksanaan	51,43
Media dan Saluran Komunikasi	80,48	Monitoring dan Evaluasi	60,29
Nasional	78,37	Nasional	60,77

Tabel 2. di atas menunjukkan skor dimensi Input dan Proses nasional di tingkat daerah (Dinas Kominfo). Skor dimensi Input di tingkat Dinas Kominfo sebesar 78,37. Skor ini meningkat 0,82 poin dibanding skor dimensi Input pada Indeks PIKP tahun 2023. Tren skor pada dimensi Input di tingkat Dinas Kominfo menunjukkan tren yang serupa dengan K/L yakni skor terendah pada dimensi ini adalah variabel Bahan Informasi, sebesar 65,36. Dari 34 Dinas Kominfo, terdapat 28 diantaranya yang membuat sendiri konten/ bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional.

Skor dimensi Proses di tingkat Dinas Kominfo secara nasional yaitu 60,77 (kategori “Sedang”) atau lebih rendah dibandingkan dengan skor dimensi Input. Skor dimensi Proses tahun 2024 ini lebih rendah 1,39 poin dibanding skor dimensi Proses pada Indeks PIKP tahun 2023 sebesar 62,16. Variabel dengan skor terendah di dimensi ini yaitu variabel Pelaksanaan, dengan nilai 51,43 (kategori “Buruk”). Salah satu komponen dari variabel pelaksanaan adalah frekuensi kegiatan diseminasi program pemerintah kepada masyarakat. Sebanyak 31 Dinas Kominfo menyatakan pernah melakukan diseminasi informasi Program Prioritas Nasional. Berbeda dengan pusat, sebanyak 24 dari 39 Program Prioritas Nasional dengan tingkat partisipasi lebih dari 50 persen.

Tabel 3. Skor Dimensi Output dan Outcome Masyarakat

Dimensi Output	Skor	Dimensi Outcome	Skor
Penerimaan Informasi	57,38	Pemerataan Informasi	71,49
Peniliaian publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik	74,86	Pemenuhan Hak untuk Tahu (Rights to Know)	78,70
Peniliaian publik terhadap Akses dan Kualitas Informasi	86,93	Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Pemerintah	63,34
Nasional	73,06	Nasional	71,18

Tabel 3 di atas ini menunjukkan skor dimensi Output dan Outcome secara nasional. Skor dimensi Output secara nasional adalah 73,06 (tergolong "Baik"). Skor ini meningkat 0,06 poin dibanding skor dimensi Output pada Indeks PIKP tahun 2023. Adapun variabel dengan skor terendah pada dimensi ini adalah variabel Penerimaan Informasi dengan skor 57,38 (kategori "Buruk"). Variabel ini dihitung berdasarkan pernah atau tidaknya responden mendengar Program Prioritas Nasional serta proporsi banyaknya Program Prioritas Nasional yang diketahui. Provinsi Papua dan Gorontalo menduduki dua urutan terendah dengan presentasi sebesar 22,76 dan 28,21. Sementara Provinsi Sulawesi Tengah menduduki peringkat teratas dengan presentase 89,41 persen responden pernah mendapatkan informasi tentang Program Prioritas Nasional tahun 2024.

Sementara skor nasional dimensi Outcome Indeks PIKP 2024 adalah 71,18 (kategori "baik"). Skor ini meningkat 7,81 dibanding skor dimensi Outcome pada Indeks PIKP tahun 2023 sebesar 63,37. Variabel dengan skor terendah pada dimensi ini adalah variabel Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Publik dengan skor 63,34 (kategori "Sedang"). Namun angka ini meningkat cukup signifikan 9,77 poin, jika dibandingkan dengan variabel yang sama pada Indeks PIKP tahun 2023 yang hanya 53,57. Demikian halnya dengan variabel Pemenuhan Hak Untuk Tahu yang mengalami peningkatan sangat signifikan, menjadi 78,70, bila dibandingkan tahun 2023, skor variabel ini hanya 62,78). Hal ini disebabkan adanya perubahan komponen-komponen variabel yang jauh lebih detail dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Refleksi atas Indeks PIKP tahun 2019-2024

Di akhir tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah penguatan tata kelola IKP sudah tercapai. Studi Indeks PIKP memang tidak didesain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun skor Indeks PIKP dapat memberikan setidaknya tren tata kelola IKP secara objektif.

Tabel 4. Hasil Indeks PIKP tahun 2019, 2021, 2022, 2023, dan 2024

Indeks PIKP	2019	2021	2022	2023	2024
Dimensi Input					
Anggaran	54,41	60,63	71,71	82,44	87,98
Bahan informasi	62,37	51,39	58,99	65,95	65,82
Media dan saluran komunikasi	66,75	74,83	81,77	78,40	80,47
Sarana dan prasarana	71,16	75,43	80,56	82,42	84,25
Skor Dimensi Input	63,67	65,57	73,11	77,30	79,63
Proses					
Pengumpulan data dan informasi	53,23	50,18	60,46	65	61,13
Perencanaan	73,08	81,78	71,26	67,68	72,78
Pelaksanaan	42,94	71,75	59,92	61,81	53,99
Monitoring dan evaluasi	34,87	65,68	69,29	66,89	65,35
Skor Dimensi Proses	51,03	67,35	65,23	65,34	63,31
Output					
Agenda publik*	66,90	70,5	50,82	55,9	57,38
Kepuasan terhadap layanan IKP	72,66	51.9	-	-	-
Akses dan Kualitas Informasi**	-	-	74,27	75,8	86,93
Teknis Pelayanan Informasi Publik**	-	-	74,78	87,3	74,86
Skor Dimensi Output	69,78	61,20	66,62	73	73,06
Outcome					
Hak untuk tahu	65,70	55,50	52,45	62,78	78,70
Partisipasi dalam proses kebijakan publik	65,90	49,30	54,39	53,57	63,34
Keadilan informasi***	-	66,40	-	-	-
Pemerataan Informasi**	-		73,38	73,77	71,49
Skor Dimensi Outcome	65,80	57,07	60,07	63,37	71,18
Skor Gabungan Nasional	62,57	62,80	66,26	69,75	71,79

* istilah "Agenda publik" mengalami penyesuaian menjadi "Penerimaan Informasi" pada studi PIKP tahun 2023
** subvariabel tambahan di Indeks PIKP tahun 2022
*** subvariabel tambahan di Indeks PIKP tahun 2021

Bila diperhatikan pada tabel 4, skor dimensi Input menunjukkan tren yang terus meningkat tiap tahunnya. Sementara, skor Dimensi Proses menunjukkan tren yang bertolak belakang atau terus menurun meski tidak drastis. Hal ini menunjukkan bahwa K/L maupun Dinas Kominfo belum bisa mengelola sumber daya yang dimilikinya secara maksimal untuk produksi dan diseminasi Program Prioritas Nasional kepada masyarakat.

Dalam dimensi Input, skor variabel bahan informasi selalu paling rendah bila dibandingkan dengan variabel anggaran, media dan saluran komunikasi, serta sarana dan prasarana. Terlepas dari batas kewenangan, tugas pokok dan fungsi antara K/L maupun Dinas Kominfo, unit pengelola IKP baik K/L maupun Dinas Kominfo memiliki kewajiban untuk menyebarkan informasi Program Prioritas Nasional secara berkala. Koordinasi antara pusat dan daerah dalam tukar menukar bahan informasi harus menjadi budaya kerja unit pengelola IKP. Tingkat partisipasi K/L maupun Dinas Kominfo dalam mengumpulkan bahan informasi, memproduksi konten, hingga menyebarkan informasi seluruh Program Prioritas Nasional cukup rendah.

Sementara dimensi Proses, skor variabel Pelaksanaan lebih rendah dibandingkan dengan dengan tiga variabel lainnya: variabel Pengumpulan data dan informasi, Perencanaan, dan Monev. Bahkan, skor variabel ini di tahun 2024 turun cukup drastis dibandingkan tahun lalu. Penyebaran atau diseminasi informasi Program Prioritas Nasional dalam tata kelola IKP memiliki peran strategis karena dua hal: meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat untuk keberhasilan program-program pemerintah.

Pada temuan skor dimensi Output, persepsi masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi terus membaik dan bahkan meningkat signifikan di tahun 2024. Tetapi, persepsi masyarakat terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik tidak begitu baik khususnya di tahun 2024. Sementara pada Dimensi Outcome, skor variabel Partisipasi Dalam Proses Kebijakan Publik menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2024 bila dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Penyebab kenaikan ini kemungkinan adalah perubahan pada komponen-komponen dari variabel ini yang mengalami perombakan total. Bila pada tahun-tahun sebelumnya, komponen variabel ini lebih mengutamakan tindakan keterlibatan individu responden terhadap proses kebijakan pemerintah melalui media (co. mengemukakan opini/pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau berkumpul dan berserikat dalam kaitan mengkritisi kebijakan pemerintah). Maka di tahun 2024, komponen tersebut diubah menjadi persepsi responden terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah.

Demikian halnya skor variable pemenuhan hak tahu yang juga meningkat sangat signifikan di tahun 2024 menjadi sebesar 78,7 yang semula hanya 62,78 di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap informasi publik yang boleh dan tidak boleh diminta kepada badan publik pemerintah.

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Secara nasional, kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik pada tahun 2024 termasuk kategori “Baik”. Kinerja tersebut dicapai dengan dukungan dari dimensi INPUT, OUTPUT, dan OUTCOME. Kinerja dari dimensi PROSES berada pada tingkat “Sedang”;

2. Secara nasional, hasil pengukuran 2019-2024 menunjukkan adanya peningkatan kinerja PIKP dari tahun ke tahun. Kecuali kinerja dimensi PROSES yang terus mengalami penurunan sejak 2022, kinerja semua dimensi PIKP pada tahun 2019-2024 selalu berada pada kategori “Baik” dengan skor yang cenderung terus meningkat;



3. Aktivitas manajemen komunikasi publik (riset, perencanaan, pelaksanaan, dan Monev) selama ini kurang mendapatkan perhatian dari K/L dan Dinas Kominfo Provinsi. Kinerja PIKP untuk dimensi PROSES masih perlu ditingkatkan.

Untuk meningkatkan kinerja dimensi PROSES, disarankan agar instansi pelaksana fungsi PIKP bersifat lebih strategic, data-driven, and proactive, melalui:

1. Pemanfaatan Riset:

- Mengembangkan strategi komunikasi yang jelas (tujuan, target khalayak, pesan-pesan kunci, taktik dan saluran);
- Meningkatkan pemanfaatan data dan data analytics untuk memonitor dampak, melakukan penyesuaian strategi, dan memahami sentiment khalayak;

2. Peningkatan Kualitas Perencanaan Program Kegiatan:

- Menyusun rencana (termasuk bahan) program/kegiatan komunikasi reguler jangka pendek (weekly, monthly), menengah (quarterly), dan panjang (yearly) secara sistematis dan berbasis data;
- Menyusun rencana komunikasi situasional (termasuk komunikasi krisis) untuk mempertahankan kredibilitas organisasi dalam situasi sulit dan penuh tantangan;

3. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan:

- Meningkatkan komunikasi dua arah untuk mendapatkan feedback dari khalayak, mengidentifikasi isu-isu yang muncul, serta memperkuat hubungan dan mempertahankan komunikasi yang terbuka;
- Menginterintegrasikan penggunaan berbagai saluran dan media (integrated communication) untuk mempertahankan unified voice and message (narasi tunggal), menghindari informasi dan pesan-pesan yang saling bertentangan, dan meningkatkan engagement khalayak;
- Memberdayakan komunikasi internal dengan memanfaatkan saluran-saluran internal, menjadikan karyawan sebagai duta organisasi, kepemimpinan komunikasi yang lebih profesional;
- Meningkatkan pemanfaatan pemasaran konten dan storytelling melalui cerita-cerita dan konten audio dan/atau visual yang menarik tentang organisasi agar pesan-pesan organisasi lebih sesuai dengan kepentingan, nilai-nilai, dan kebutuhan khalayak dan gampang diingat (memorable);
- Melaksanakan media relations yang lebih proaktif untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang baik dengan wartawan dan media agar komunikasi publik lebih efektif;
- Melakukan investasi SDM melalui pelatihan-pelatihan staf dan pimpinan, seperti pelatihan juru bicara, keterampilan komunikasi, dan sensitivitas budaya untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Ingat: Effective communication starts with well-trained staff;

4. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi:

- Mengumpulkan feedback dari stakeholders, dan penyesuaian strategi komunikasi berbasis hasil;
- Melaksanakan riset dampak dan audit komunikasi.



Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) adalah skor yang menunjukkan seberapa jauh kinerja Kementerian/Lembaga dan Dinas Kominfo dalam melaksanakan PIKP



BAB 1

PENDAHULUAN





Latar Belakang

Tata Kelola informasi dan komunikasi publik (IKP) memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan tata kelola IKP di pusat dan daerah menjadi salah satu sasaran bidang komunikasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sasaran ini kemudian diterjemahkan menjadi salah satu Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tahun 2020-2024 dalam rangka optimalisasi transparasi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Transparasi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik yang efektif tidak hanya dilaksanakan melalui penyebaran masif informasi tentang program-program prioritas pemerintah melalui media elektronik dan media digital, tetapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah serta pembangunan nasional, yang diharapkan mampu mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah serta berkontribusi pada penguatan demokrasi di Indonesia.

Evaluasi terhadap kinerja Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) memerlukan alat ukur yang terstandar, sistematis dan obyektif. Sejak tahun 2019, Kementerian Komdigi telah melaksanakan survei nasional dengan topik: “Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)” yang bertujuan mengukur kinerja PIKP dari sisi pemerintah pusat dan daerah sebagai pengelola, dan dari sisi masyarakat sebagai penerima layanan IKP.

Skor indeks PIKP berfungsi menunjukkan tingkat kinerja PIKP pemerintah terutama dalam hal ketersediaan, penyediaan, dan penggunaan sumber daya pendukung pelaksanaan PIKP (Input), manajemen informasi dan komunikasi (PROSES), penerimaan dan penilaian masyarakat terhadap informasi dan pelayanan informasi yang diterima (Output), serta pengaruh dan dampak PIKP terhadap masyarakat (Outcome).

Pengukuran Indeks PIKP dimaksudkan untuk menghasilkan estimasi tingkat kinerja PIKP secara nasional. Sebagai alat ukur yang obyektif, Indeks PIKP diharapkan dapat membantu dan memberikan data sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan dan perbaikan kebijakan dan program-program pelayanan informasi dan komunikasi publik serta dalam peningkatan koordinasi PIKP, baik diantara maupun antar instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor.

Sejak awal penyusunannya, Indeks PIKP dirancang sebagai indikator gabungan (composite indicator) yang mencakup empat dimensi, yaitu: Input, Proses, Output dan Outcome. Setiap dimensi terdiri dari indikator-indikator variabel PIKP yang disusun dengan pendekatan normatif, yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan yang berlaku, dan disesuaikan dengan kebutuhan monitoring dan evaluasi komunikasi publik yang menjadi kewenangan Kementerian Komdigi.

Sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah yaitu menyebarluaskan informasi tentang kebijakan dan program pembangunan, khususnya informasi tentang Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden dan disahkan melalui Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Tabel 1.1). Informasi tentang Program Prioritas dalam RKP biasanya mencakup penjelasan tentang berbagai kegiatan pemerintah yang dikelola oleh masing-masing kementerian atau lembaga teknis pemerintah yang menjadi leading sector dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia berhak untuk mengetahuinya.



Tabel 1.1 Program Prioritas Nasional tahun 2019 – 2024

Tahun	Peraturan Presiden	Program Prioritas Nasional
2019	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019	24 Program Prioritas
2020	Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020	30 Program Prioritas
2021	Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021	39 Program Prioritas
2022	Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022	39 Program Prioritas
2023	Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023	39 Program Prioritas
2024	Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	39 Program Prioritas

Sebagai regulator bidang IKP, Kominfo memiliki peran sebagai Government Public Relation (GPR) sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Melalui Inpres ini, Kominfo bertugas sebagai koordinator dalam mengelola komunikasi publik bersama-sama dengan semua Menteri Kabinet, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Tidak hanya itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan IKP ditetapkan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah (kabupaten/kota). Ada batas kewenangan dalam hal memproduksi dan mendiseminasi IKP. Pemerintah pusat (Kementerian/ lembaga non Kementerian – K/L) bertanggungjawab atas pengelolaan IKP pemerintah pusat serta informasi strategis nasional dan internasional, sedangkan pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) bertanggungjawab atas pengelolaan IKP pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) tersebut. Kementerian Komdigi melalui Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Ditjen KPM) ditetapkan sebagai instansi pembina teknis Dinas Kominfo.

Tabel 1.2 Skor Indeks PIKP tahun 2019, 2021, 2022, 2023, 2024

Tahun	Dimensi Indeks PIKP				Skor Gabungan Nasional
	Input	Proses	Output	Outcome	
2019	63,67	51,03	69,78	65,80	62,57
2020	65,57	67,35	61,20	57,07	62,80
2021	73,11	65,23	66,62	60,07	66,26
2022	77,30	65,34	73,00	63,37	69,75
2023	79,63	63,31	73,06	71,18	71,79

Tabel 1.1. menunjukkan tren Indeks PIKP dalam periode empat tahun. Skor dimensi Input memperlihatkan tren peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat diartikan adanya perbaikan yang dilakukan oleh badan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya untuk mengelola IKP. Sementara, skor pada dimensi Proses, Output dan Outcome terlihat tren dinamis serta terus meningkat hingga tahun 2024.

Kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola informasi publik dalam hal ini Program Prioritas Nasional perlu dimonitor dan dievaluasi tiap tahunnya.

Oleh sebab itu, Ditjen IKP kembali melaksanakan Studi Pengukuran Indeks PIKP tahun 2024 dengan rumusan masalah:

- Bagaimana kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik Unit K/L dan DisKominfo Provinsi pada tahun 2024?
- Apakah terjadi peningkatan atau penurunan Indeks PIKP tahun 2024 jika dibandingkan dengan Indeks tahun 2022 dan 2023?

Tujuan dan Kegunaan

Studi pengukuran Indeks PIKP tahun 2024 dilaksanakan dengan tujuan memonitor dan mengevaluasi implementasi Inpres 9 tahun 2015, khususnya dari aspek kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Dinas Kominfo Provinsi (Dinas Kominfo). Skor Indeks PIKP tidak menunjukkan instansi mana yang baik dan yang buruk dalam pengelolaan IKP, melainkan untuk kegunaan sebagai berikut:

- sebagai alat ukur yang objektif, kredibel, komprehensif dan terstandar terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Indonesia yang bisa menjadi rujukan baik dari para akademisi maupun praktisi Kehumasan pemerintah.
- sebagai acuan publik untuk memonitor kinerja pengelolaan IKP di pemerintah pusat maupun daerah
- sebagai bagian dari early warning system kepada instansi terutama dalam hal pengalokasian kegiatan atau program-program IKP agar lebih efektif dan efisien.
- sebagai acuan penyusunan program-program intervensi Kementerian Komdigi, dalam hal ini Ditjen IKP, kepada K/L maupun DisKominfo Provinsi.

Konsep dan Definisi Operasional

Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) merupakan isu strategis negara yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. IKP mengutamakan kepentingan publik termasuk seberapa jauh pengelolaan negara ini untuk kesejahteraan warga. Tingginya penggunaan media sosial serta drastisnya perubahan ekosistem informasi dan komunikasi saat ini membuat informasi publik harus berkompetisi dengan derasnya disinformasi yang sengaja diproduksi dan disebarkan dengan tujuan untuk menyesatkan publik. Jika informasi tidak disampaikan dengan baik oleh pemerintah kepada publik, maka publik akan mudah disesatkan oleh disinformasi ini dan pada akhirnya akan menganggu sistem bernegara dan bermasyarakat.

Istilah “informasi publik” pertama kali diperkenalkan oleh Ivy Ledbetter Lee, pendiri praktisi Public Relations (PR) modern, di tahun 1920an[1]. Kata informasi publik ini melekat pada praktisi PR yang tugasnya untuk membangun dan mempertahankan reputasi organisasi dan mendapatkan dukungan dari target audiens tertentu. Dalam Studi ini, istilah “Informasi publik” didefinisikan dengan merujuk pada pengertian secara normatif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[1] Dikutip dalam paper “the Role and Importance of “Public Information” in Political Public Relations” (Ertürk, 2015). https://www.dieweltdertuerken.org/admin/files/issues/654-2815-1-PB.pdf

Informasi publik yang diukur dalam studi ini yaitu informasi tentang Program Prioritas Nasional Tahun 2024 yang berjumlah 39 program prioritas sesuai rincian pada Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023. Pengukuran informasi publik dalam studi Indeks PIKP dilihat dari dua sisi baik itu badan publik maupun masyarakat. Dari sisi badan publik, pengelolaan informasi program prioritas tahun 2024 dari mulai perencanaan, penyusunan penyebaran informasi (dimensi Input dan Proses) hingga monitoring dan evaluasi. Sementara dari sisi masyarakat, terdapat enam hal yang diukur yaitu: 1) berapa banyak Program Prioritas Nasional tahun 2024 yang diterima oleh publik; 2) persepsi publik terhadap teknis pelayanan informasi publik yang diberikan oleh instansi publik; 3) penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik; 4) persepsi publik terhadap pemenuhan hak tahu; 5) partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah; 6) persepsi publik terhadap pemerataan informasi publik.

Yang dimaksud dengan "komunikasi publik" dalam Studi ini adalah aktivitas-aktivitas penyampaian dan tukar-menukar informasi tentang Program-program Prioritas Nasional, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun oleh publik, baik yang dilakukan secara langsung (tatap-muka) maupun melalui media dan saluran. Aktivitas-aktivitas komunikasi publik yang diukur dalam studi ini mencakup diantaranya:

Kegiatan penyebaran informasi 39 Program Prioritas Nasional tahun 2024;

- Penyebaran Narasi Tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian;
- Koordinasi pelaksanaan penyebaran Program Prioritas Nasional dengan Kementerian Komdigi;
- Penyebarluasan informasi terkait kebijakan dan program pemerintah berlandaskan pada nilai-nilai pelayanan IKP diantaranya lintas sectoral; lintas daerah; objektif; akurat dengan didukung data yang valid dan andal; relevan dengan konteks sosial, politik, budaya serta kebutuhan target Masyarakat; konsisten; jelas, lengkap dan mudah dipahami; interaktif serta melibatkan partisipasi publik;
- Kegiatan penyampaian informasi kebijakan dan program pemerintah melalui media dan saluran baik konvensional maupun digital;



- Frekuensi kegiatan Kerjasama antar unit internal K/L maupun Dinas Kominfo;
- Frekuensi kegiatan Kerjasama eksternal K/L maupun Dinas Kominfo;
- Kegiatan Komunikasi Publik berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Kegiatan penyebarluasan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan sasaran kelompok khusus seperti kelompok disabilitas, lanjut usia, perempuan maupun;
- Kegiatan penyebarluasan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah tertentu seperti kelompok Masyarakat dari wilayah 3T, desa, kota, serta Indonesia bagian Barat maupun Timur.

Memasuki tahun kelima, studi Indeks PIKP di tahun 2024 juga mengukur penerimaan informasi tentang Program Prioritas Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yang di dalamnya memuat dari 39 Program Prioritas Nasional.

Untuk memudahkan responden mengingat Program Prioritas Nasional apa saja yang mereka ketahui dalam enam bulan terakhir (Januari sampai Juni 2024), maka pertanyaan dalam kuesioner survey PIKP langsung menanyakan contoh-contoh dari 39 Program Prioritas Nasional dimaksud, yaitu:

No	Nama Program Prioritas Nasional	Contoh Program Prioritas Nasional
1	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)/ PLTS (Surya)/ PLTM (Minihidro)/ PLTPB (Panas bumi)/PLTU (Uap)/Program Hemat Listrik/Pemanfaatan Panel Surya di Rumah Tangga/ Penggunaan Kendaraan Dinas Listrik
2	Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Pembangunan Bendung/Pembangunan Saluran Irigasi/ Hutan Lindung/ Hutan Konservasi/ Reboisasi/Penghijauan/Pemulihan Lahan Mangrove/Gambut
3	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam/Bergizi/ Seimbang dan Aman/Konsumsi Sayur dan Buah/ konsumsi Daging/Konsumsi kacang-kacangan/ Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
4	Peningkatan, Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan	Bantuan benih ikan/Alat tangkap/Kapal/ Sampan/Budidaya rumput laut/Sentra produksi perikanan budidaya/Penyuluhan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan/ Pelatihan masyarakat kelautan perikanan
5	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi	Bantuan modal usaha bagi UMKM/Wirausaha/ Literasi Keuangan/Training e-Commerce/ Perluasan kemitraan UMKM/Waralaba/ Franchise/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
6	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Pengurusan izin usaha lebih mudah dan cepat /Sistem Online Single Submission (OSS)/ Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi/ Penjaminan kepastian hukum/Kepastian berusaha/Keamanan Berusaha bagi Penanam Modal/Pengolahan nikel menjadi baterai/ Hilirisasi Bioindustri & Batubara
7	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Penggunaan HP /Laptop/Mobil buatan dalam negeri/Fasilitasi pengembangan produk ekspor/ Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Fasilitasi ekspor seperti subsidi ekspor bagi pengusaha dalam negeri/Platform pelayanan satu pintu InaExport/Customer Service Center Membership (CSC)
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Operasi Pasar Murah/Operasi Sembako Murah/ Gerakan Pangan Murah/Cinta Produk Lokal/ Pembangunan Tol Darat/Tol Laut
9	Pembangunan Wilayah Sumatera	Perbaikan aksesibilitas dan fasilitas wisata Danau Toba/Akses dari Bandara Silangit ke Danau Toba/Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera

10	Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	Perbaikan aksesibilitas dan fasilitas wisata Borobudur/Bromo/Tengger/Semeru dan Bali/ Penataan kawasan/jalan/penyediaan air baku dan air bersih/Pengelolaan sampah dan sanitasi
11	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	Perbaikan aksesibilitas dan fasilitas wisata Labuan Bajo/Lombok Mandalika/Penataan kawasan/jalan/penyediaan air baku dan air bersih/ pengelolaan sampah dan sanitasi
12	Pembangunan Wilayah Kalimantan	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)/Kluster Ekonomi/ Identitas Nasional/Pembangunan Destinasi Pariwisata Sambas-Singkawang
13	Pembangunan Wilayah Sulawesi	Pembangunan tempat wisata Toraja/Perbaikan akses dan fasilitas wisata Wakatobi/Penataan kawasan/jalan/ Penyediaan air baku dan air bersih/Pengelolaan sampah dan sanitasi
14	Pembangunan Wilayah Maluku	Program Gerbangdutas (Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan)/Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/ Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Maluku/ Pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku/Tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik
15	Pembangunan Wilayah Papua	Perbaikan akses dan fasilitas wisata Raja Ampat/Penataan kawasan/jalan/ Penyediaan air baku dan air bersih/Pengelolaan sampah dan sanitasi/Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan/Pendidikan dan kualitas SDM di wilayah Papua
16	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	Proses pendaftaran adminstrasi kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran dll) yang sudah berbasis online melalui web atau aplikasi/ Penguatnya integrasi data administrasi kependudukan (KTP)/Satu Data Indonesia/ Pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
17	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Sembako/Program Indonesia Pintar (PIP)/ Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah/Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Program Bantuan Sosial (BLT, Pemulihan Ekonomi Nasional)
18	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Program BPJS/Kartu Indonesia Sehat (KIS)/ Sosialisasi Penurunan Stunting/ Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal/ Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)/ Vaksinasi Covid-19/ HIV/Hepatitis dan TBC
19	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Internet untuk pembelajaran di sekolah/ Kampus Merdeka/Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila/ Kelas online/Kuis/Presentasi yang atraktif/Integrasi Softskill dalam proses pembelajaran (sopan santun) dan ekstrakurikuler

20	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Perlindungan dari pelecehan seksual perempuan dan anak di bawah umur/Perlindungan anak dari tindak kekerasan/eksploitasi dan perlakuan salah lainnya/Pelayanan pengaduan/Pengelolaan kasus/akses penampungan sementara, pelayanan mediasi/pelayanan pendampingan korban.
21	Pengentasan Kemiskinan	Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)/Model Usaha Ultra Mikro/Bantuan CSR dari Perusahaan Swasta/Negeri/Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk integrasi Bansos
22	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Digital Talent Scholarship bagi lulusan baru/ Politeknik Negeri (Pendidikan Vokasi)/ Peningkatan kualifikasi tenaga dosen dengan pendidikan lanjutan ke S2 dan S3
23	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	Program Sekolah Bebas Perundungan/Bullying/ Menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik dengan tenaga pendidik, orang tua serta masyarakat,
24	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	Penyelenggaraan Festival Budaya/Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Museum/ Pengembangan produk seni, budaya dan film
25	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Program Kampung Moderasi (KMB)/Pelatihan Penggerak Moderasi Beragama/ Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama/ Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
26	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	Program Merdeka Belajar/Program Gemar Membaca/Pembangunan Perpustakaan Daerah/ Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional/ Penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional
27	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi/ Subsidi rumah dengan bunga 0%/ Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan korban bencana/Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (PLN, PAM, Telkom)
28	Infrastruktur Ekonomi	Pembangunan Jalan Tol/Pembangunan Jalan Strategis di Kota / Daerah/ Pembangunan KA Medium Speed Jakarta-Surabaya/Tol Trans Sumatera/ Tol Trans Jawa
29	Infrastruktur Perkotaan	Pembangunan Jembatan/ MRT/LRT/BRT (Bus Rapid Transit)/ Pembangunan Jalan Perkotaan/ Flyover Underpass

30	Energi dan Ketenagalistrikan	Pembangunan saluran udara tegangan tinggi (Sutet)/Program listrik masuk desa/ Penambahan Penyalur BBM satu harga/ Pembangunan jaringan Gas perkotaan/ Sistem transmisi listrik terintegrasi/ Meteran listrik pintar
31	Transformasi Digital	Literasi digital/Pemblokiran konten negatif/ Judi Online/Pelatihan digital entrepreneurship/ QRIS, Akses 4G di daerah 3T/ Palapa Ring/Satelit Broadband
32	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Sistem dan instrumentasi pemantauan kualitas air, sungai, danau dan udara secara real-time/ Alat pemantauan kualitas air laut secara manual/ Komunitas peduli lingkungan hidup/ Produk ramah lingkungan/Daur ulang
33	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Pembangunan Pusat Studi Tsunami dan Mitigasi Bencana/Gerakan Literasi Bencana sebagai edukasi bencana/Sosialisasi pengurangan risiko bencana/ Kelompok Masyarakat Tangguh Bencana
34	Pembangunan Rendah Karbon	Sosialisasi/Ajakan menggunakan angkutan umum (bus, kereta, MRT)/Penggunaan Panel Surya/Tenaga Panas Bumi/Pemanfaatan Biofuel/ Efisiensi dan konservasi energi/Teknologi Rendah Energi (LED, Inverter)/Kendaraan Listrik
35	Konsolidasi Demokrasi	Sosialisasi World Water Forum/Sosialisasi Pemilu/Sosialisasi Pilkada/Sosialisasi Penurunan Stunting,
36	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Peningkatan Kapasitas Pekerja Migran/TKI / Penguatan Sistem Perlindungan TKI/Pekerja Migran/Sosialisasi Wonderful Indonesia/Tanda Batas Negara/ Peta Batas Negara
37	Penegakan Hukum Nasional	Pengadaan barang dan jasa menggunakan e-katalog/Digitalisasi Pembayaran Pajak/ Digitalisasi Pelayanan Publik/Penguatan Partai Politik Dalam Pencegahan Korupsi
38	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Layanan pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR/Portal pelayanan publik/Sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)
39	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penanganan Terorisme/Jumlah Pos Polisi yang dibangun di Perbatasan/ Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan/Sarpras Pertahanan di Pulau Kecil Terluar

Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) adalah skor yang menunjukkan seberapa jauh kinerja Kementerian/Lembaga dan Dinas Kominfo dalam melaksanakan PIKP.

Pengukuran Indeks PIKP yang dilakukan secara komprehensif; mencakup empat (4) dimensi yakni: Input, Proses, Output, dan Outcome, dengan definisi operasional sebagai berikut:

- Dimensi Input adalah sumberdaya yang akan diproses dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yang mencakup: sumber daya manusia, anggaran, penyediaan bahan informasi, sarana dan prasana, media dan saluran komunikasi.

- Dimensi Proses adalah serangkaian tindakan, langkah-langkah atau kegiatan untuk mencapai tujuan PIKP, yang mencakup: pengumpulan data dan informasi, perencanaan, pelaksanan, monitoring dan evaluasi.

- Dimensi Output adalah hasil, produk akhir, konsekuen atau hasil akhir dari proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dimensi Output diukur dari penerimaan Informasi, penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik, penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik.

- Dimensi Outcome adalah hasil, konsekuensi, produk akhir atau efek dari output pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dimensi Outcome diukur dari partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan, hak untuk tahu, serta pemerataan informasi.

Penyusunan indicator variabel dalam Indeks PIKP tersebut disesuaikan dengan kebutuhan praktis dan pragmatis khususnya bagi Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Ditjen IKP Kominfo. Sejak tahun 2022, penyesuaian terhadap variabel indikator terjadi khususnya pada dimensi Output variabel Kepuasan Publik diubah menjadi variabel Penilaian Publik terhadap teknis pelayanan informasi dan terhadap akses dan kualitas informasi publik. Perubahan lainnya adalah pada dimensi Outcome berupa penambahan variabel untuk mengukur Pemerataan Informasi yang menggantikan variable Keadilan Informasi. Sementara di tahun 2023 variabel Agenda Publik berubah menjadi Penerimaan Informasi. Sedangkan di tahun 2024, indikator-indikator pada keempat dimensi pengukuran PIKP tidak mengalami perubahan. Tabel 1.3. berikut ini menunjukkan perkembangan indikator dan variabel Indeks PIKP 2019, 2021, 2022, 2023 dan 2024.

Tabel 1.3 Perbandingan Dimensi dan Variabel dalam Indeks PIKP 2019, 2021, 2022, 2023 dan 2024

No	Dimensi	Tahun			
		2019	2021	2022	2023 & 2024
1	INPUT	Variabel Anggaran Variabel Bahan Informasi Variabel Sarana dan Prasarana Variabel Media dan Saluran Komunikasi	Variabel Anggaran Variabel Bahan Informasi Variabel Sarana dan Prasarana Variabel Media dan Saluran Komunikasi	Variabel Anggaran Variabel Bahan Informasi Variabel Sarana dan Prasarana Variabel Media dan Saluran Komunikasi	Variabel Anggaran Variabel Bahan Informasi Variabel Sarana dan Prasarana Variabel Media dan Saluran Komunikasi
2	PROSES	Variabel Pengumpulan Data dan Informasi Variabel Perencanaan Variabel Pelaksanaan Variabel Monitoring dan Evaluasi	Variabel Pengumpulan Data dan Informasi Variabel Perencanaan Variabel Pelaksanaan Variabel Monitoring dan Evaluasi	Variabel Pengumpulan Data dan Informasi Variabel Perencanaan Variabel Pelaksanaan Variabel Monitoring dan Evaluasi	Variabel Pengumpulan Data dan Informasi Variabel Perencanaan Variabel Pelaksanaan Variabel Monitoring dan Evaluasi

3	OUTPUT	Variabel Agenda Publik Variabel Kepuasan Publik terhadap Pelayanan Informasi Publik	Variabel Agenda Publik Variabel Kepuasan Publik terhadap Pelayanan Informasi Publik	Variabel Agenda Publik Variabel Penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik Variabel Penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik	Variabel Penerimaan Informasi Variabel Penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik Variabel Penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik
4	OUTCOME	Variabel Pemenuhan Hak untuk Mengetahui Variabel Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan Pemerintah	Variabel Pemenuhan Hak untuk Mengetahui Variabel Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan Pemerintah Variabel Keadilan Informasi	Variabel Pemenuhan Hak untuk Menge-tahui Variabel Partisipasi Publik Variabel Pemerataan Informasi	Variabel Pemenuhan Hak untuk Mengetahui Variabel Partisipasi Publik Variabel Pemerataan Informasi

Metodologi

Studi indeks PIKP dikembangkan untuk menyediakan suatu alat ukur yang obyektif untuk memonitor dan mengevaluasi pengelolaan IKP baik dari sisi pengelola informasi (K/L non-Kementerian dan Pemerintah Daerah) dan dari sisi penerima informasi (masyarakat). Metode studi indeks PIKP adalah deskriptif kuantatif dengan alat pengumpul data utama melalui survei. Data dimensi Input dan Proses dikumpulkan secara self-administered questionnaires di mana unit pelaksana PIKP di instansi mengisi kuesioner. Sebelum diolah dan dianalisis, data yang dilaporkan K/L dan Dinas Kominfo terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim melalui komunikasi secara daring. Sementara, data dimensi Output dan Outcome diisi oleh responden individu masyarakat dengan dibimbing oleh enumerator.

Pemilihan responden yang dilakukan baik instansi pemerintah maupun masyarakat dilakukan dengan pendekatan yang berbeda. Responden instansi pemerintah baik pusat dan daerah dipilih secara purposif yakni pihak yang memiliki fungsi dan otoritas dalam unit pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Di tingkat Pusat, PIKP merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap Kementerian dan Lembaga Non-kementerian (K/L). Dalam pengaturan Peraturan Presiden (Prepres) tentang Organisasi dan Tata-kerja masing-masing K/L, tugas pokok dan fungsi PIKP diberikan dan umumnya dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarkaat (Humas) atau Biro Komunikasi Publik atau Pusat Penerangan atau unit kerja dengan nomenklatur sejenisnya di lingkungan K/L masing-masing. Sebagai contoh, di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital, tugas pokok dan fungsi PIKP diberikan dan dilaksanakan oleh Biro Humas. Partisipasi instansi pemerintah pusat di tahun 2024 meningkat dibanding tahun 2024 dari 67 K/L menjadi 67 K/L dan 34 Dinas Kominfo.

Sementara, untuk pemilihan responden masyarakat dilakukan dengan cara multistage random sampling (untuk pemilihan lokasi) dan metode random proportionate-to-size (untuk menentukan jumlah responden di setiap lokasi). Populasi yang menjadi target adalah penduduk di 34 ibu kota provinsi, khususnya yang berusia 15 – 64 usia. Ukuran sampel dengan level kepercayaan 95% dan margin of error 2,45 menghasilkan jumlah responden sebanyak 1.600 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap-muka) oleh petugas enumerator yang terdiri dari peneliti BRIN dan mitra BPS dengan didampingi oleh pegawai Dinas Kominfo setempat. Sama halnya dengan data Input

dan Proses, sebelum diolah dan dianalisis data Output dan Outcome terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim melalui komunikasi secara daring.

Penyusunan Indeks PIKP sejak awal dirancang sebagai penyusunan indikator gabungan (composite indicator/ CI) yang mengukur aspek-aspek PIKP, yaitu INPUT, PROSES, OUTPUT dan OUTCOME. CI merupakan metode yang paling sering digunakan untuk menyusun indeks dengan kombinasi lebih dari satu indikator bahkan cenderung beragam. Indikator-indikator dalam CI memiliki variabel-variabel yang teridentifikasi dengan jelas untuk tujuan yang spesifik dalam indeks. Adapun beberapa tahapan CI yang perlu diperhatikan diantaranya (Chakrabartty, 2017):

1. Penentuan indikator-indikator serta variabel-variabel dalam indeks tidak ada aturan baku, akan tetapi sepadan dengan tujuan, kerangka konsep, konsistensi serta ketersediaan data (dalam tahap ini, semakin tinggi korelasi antar indikator dalam indeks, maka semakin rendah dimensi statistika yang ditampilkan dari data set);

2. Normalisasi indikator dan variabel dalam indeks diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh setiap variabel terhadap nilai indikator itu sendiri (metode pembobotan atau scaling paling sering digunakan);

3. Metode penggabungan yang paling sering dilakukan dengan cara penjumlahan nilai seluruh variabel dalam indikator. Setidaknya ada tiga pendekatan untuk melakukan penggabungan yakni secara normatif, karakteristik data (data-driven), serta hybrid antar keduanya. [2]

Sementara untuk analisis data Indeks PIKP tahun 2023 tidak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Perhitungan indeks didasarkan pada nilai proporsi dari setiap dimensi. Untuk indikator yang dinilai dengan skala nominal (Ya= 1; dan Tidak=0), maka perhitungan indeks diformulasikan sebagai berikut: Indeks= Jumlah yang menjawab "Ya" dibagi jumlah sampel. Sementara, untuk item dengan skala ordinal (skala jawaban 1 – 4), maka perhitungan indeks dilakukan dengan cara sebagai berikut: Indeks = Jumlah Skor dibagi (4 x Jumlah Sampel). Capaian skor untuk masing-masing dimensi ditentukan berdasarkan rata-rata akumulasi skor masing-masing variabel dan indikator variabel. Skor tersebut berkisar dari angka 1 – 100. Untuk tujuan evaluasi dan pembinaan, skor atau nilai total seluruh dimensi dalam Indeks PIKP 2024 dibagi menjadi lima kategori, yaitu: "Sangat Baik" (skor >80), "Baik" (skor >70 - 80), "Sedang" (skor > 60 - 70), "Buruk" (skor>50 - 60), dan "Sangat Buruk" (skor <=50).

Piloting untuk menguji instrumen survei dilaksanakan dengan melibatkan 30 responden di Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 – 17 Juli 2024. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan terhadap dimensi Output dan Outcome yang terdiri dari data dengan skala pengukuran ordinal (skala jawaban 1 – 4).

Dimensi Output - Agenda Publik

Hasil analisis uji validitas dan realibilitas dimensi – output agenda publik menggunakan corrected-total item correlation dan Alpha Cronbach's menemukan semua item memiliki koefisien validitas yang positif dan sebagian besar memiliki koefiisen yang lebih besar dari batas minimum yang dianjurkan untuk pengujian validitas yaitu 0.300 serta koefisien reliabilitas yang sangat tinggi lebih besar dari 0.60-0.70 (Azwar 2013)[3]. Terdapat dua item yang memiliki koefiisen validitas kurang dari 0.30 yaitu (i) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (co. Peningkatan Produksi Perikanan, Peningkatan SDM Kelautan Perikanan) dan (ii) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah/ UMKM dan Koperasi (co. Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk, Perluasan Kemitraan Usaha). Kedua item ini walaupun berdasarkan kriteria batas minimum 0.30, namun sehubungan keberadaan item ini masih memiliki nilai koefisien validitas yang positif dengan komposite reliability yang lebih besar dari 0.600 maka item ini dapat digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait dengan agenda publik (Hair et al. 2014)[4].

[2] Chakrabartty, S. N. (2017). COMPOSITE INDEX: METHODS AND PROPERTIES. Journal of Applied Quantitative Methods, 12(2), 31+. https://link.gale.com/apps/doc/A644651975/AONE?u=anon~e8aad450&sid=googleScholar&xid=200cda73

[3] Azwar S. (2012) Reliabilitas dan validitas. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

[4] Hair, J., Hult, G., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2014). A Primer On Partial Least Square Structural Equation Modeling (Pls-Sem). London: Sage

Dimensi Output – Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik

Hasil analisis validitas dan reliabilitas untuk dimensi Dimensi Output – Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik juga menemukan semua item memiliki koefisien validitas yang positif dan semua lebih besar dari batas minimum 0.30 sehingga semua item pada dimensi ini dapat dinyatakan valid. Namun demikian, tingkat reliabilitasnya masih pada kategori cukup reliabel karena belum berada di atas 0.60.

Dimensi Output – Penilaian Publik terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik

Hasil analisis validitas dan reliabilitas untuk dimensi Dimensi Output – Penilaian Publik terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik ditemukan semua item memiliki koefisien validitas dan reliabilitas yang tinggi. Koefisien validitas lebih besar dari 0.30 dan koefisien reliabilitas lebih besar dari 0.60 sehingga item-item yang digunakan untuk mengukur dimensi Output – Penilaian Publik terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik dapat dikatakan valid dan reliabel.

Dimensi Outcome - Penilaian Publik terhadap Pemenuhan Hak untuk Tahu (rights to know)

Hasil analisis validitas dan reliabilitas untuk dimensi Outcome - Penilaian Publik terhadap Pemenuhan Hak untuk Tahu (rights to know) ditemukan semua item memiliki koefisien validitas dan reliabilitas yang tinggi. Koefisien validitas lebih besar dari 0.30 dan koefisien reliabilitas lebih besar dari 0.70 sehingga item-item yang digunakan untuk mengukur dimensi Outcome - Penilaian Publik terhadap Pemenuhan Hak untuk Tahu (rights to know) dapat dikatakan valid dan reliablel.

Dimensi Outcome – Penilaian Publik terhadap Pemerataan Informasi

Hasil analisis validitas dan reliabilitas untuk Dimensi Outcome - Penilaian Publik terhadap Pemerataan Informasi ditemukan semua item memiliki koefisien validitas dan reliabilitas yang tinggi. Koefisien validitas lebih besar dari 0.30 dan koefisien reliabilitas lebih besar dari 0.60 sehingga item-item yang digunakan untuk mengukur dimensi Outcome - Penilaian Publik terhadap Pemerataan Informasi dapat dikatakan valid dan reliabel.

Keterbatasan - keterbatasan

Studi indeks PIKP bertujuan hanya mengukur pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui 4 dimensi: Input, Proses, Output dan Outcome secara deskriptif, tanpa menunjukkan hubungan antar dimensi, antar variabel indikator. Analisis untuk mengetahui hubungan antar indikator variabel dengan rumus regresi belum dilakukan sehingga tidak diketahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel dari dimensi Input dan Proses terhadap variabel-variabel dari dimensi Output dan Outcome. Dengan kata lain, studi ini memiliki keterbatasan khususnya untuk menunjukkan seberapa jauh dampak dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik terhadap persepsi masyarakat.

Kompleksitas studi ini yang melibatkan antara elemen pemerintah (unit pelaksana fungsi IKP di instansi pemerintah pusat dan daerah) sehingga menyebabkan adanya tantangan-tantangan dalam pengumpulan data di lapangan. Pengisian data kuesioner Indeks PIKP oleh instansi pemerintah melibatkan beberapa sub unit dengan petugas yang sering berganti sehingga menimbulkan kesulitan dalam verifikasi data dan membutuhkan waktu yang lebih lama.



Informasi Publik yang diukur dalam Studi ini adalah informasi tentang Program Prioritas Nasional Tahun 2024 yang berjumlah 39 program prioritas sesuai rincian pada Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023



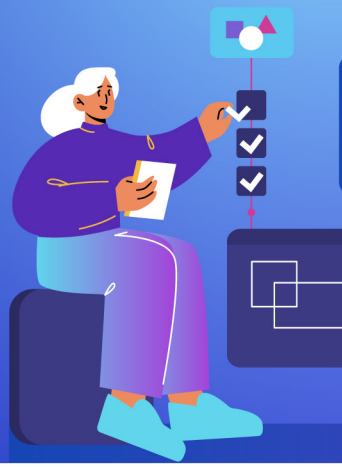
BAB 2

INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2024



BAB 2

Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2024





Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) merupakan suatu indikator gabungan (composite indicator) yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik, meliputi Input, Proses, Output dan Outcome. Indeks PIKP dikembangkan untuk menyediakan alat ukur yang obyektif dalam memonitor, mengevaluasi dan membandingkan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh K/L dan Dinas Kominfo. Indeks PIKP dapat digunakan sebagai bagian dari sistem peringatan dini (early warning system) yang membantu mengidentikasi permasalahan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang memerlukan perhatian serta langkah-langkah tindak lanjut. Indek ini juga dapat mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan nasional dan daerah.

Indeks PIKP diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Bagi komunitas akademis, Indeks PIKP menyediakan data penting yang diperlukan untuk studi komunikasi dan kehumasan pemerintah. Bagi perencana pembangunan, Indeks ini dapat menunjukkan aspek, variabel atau indikator apa saja yang belum berkembang, sudah berkembang, dan sangat berkembang di setiap instansi pemerintah, sehingga dapat diketahui langkah apa yang perlu dilakukan. Bagi instansi pemerintah, Indeks PIKP dapat membantu dalam mengevaluasi kinerja masing-masing dan melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Bagi masyarakat, alat ukur ini dapat membantu mereka dalam menilai kinerja instansi PIKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



Indeks PIKP Tahun 2024 disusun berdasarkan data yang dikumpulkan dari 67 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 34 Dinas Komunikasi dan Digital Provinsi

(Dinas Kominfo) melalui pengisian daftar pertanyaan (kuesioner) dan verifikasi data dengan pejabat terkait dari yang dianggap memahami dan menguasai persoalan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Pemilihan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut dilakukan secara total sampling. Data untuk pengukuran setiap dimensi, setiap variabel, dan setiap indikator variabel untuk penyusunan Indeks ini yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan dimintakan kepada para narasumber mencakup rentang waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum studi dilaksanakan, yakni sejak Januari hingga Juni 2024.

Berikut ini disajikan hasil pengukuran kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah untuk dimensi Input-Proses-Output-Outcome.



2.1 Dimensi Input

A. Pengantar

Dimensi Input dalam Indeks PIKP Tahun 2024 diukur berdasarkan skor untuk 4 (empat) variabel, yaitu: (1) Anggaran; (2) Bahan Informasi; (3) Sarana dan Prasarana; dan (4) Media dan Saluran Komunikasi. Variabel pertama, anggaran, memiliki 2 (dua) indikator, yaitu: (1) Ketersediaan anggaran tahun berjalan; (2) Ketersediaan anggaran untuk seluruh program/kegiatan terkait PIKP tahun berjalan..

Variabel kedua, bahan informasi, terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu (a) Ketersediaan bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2024) yang tertuang dalam Perpres Nomor 84 Tahun 2023; (b) Ketersediaan bahan informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L dan Dinas Kominfo tahun 2020 – 2024; (c) Ketersediaan bahan informasi selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra KL dan Dinas Kominfo tahun 2020-2024. (d) Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media; (e) Kesediaan K/L dan Dinas Kominfo menyampaikan data dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Digital secara berkala; (f) Ketersediaan bahan informasi (termasuk narasi Tunggal) yang diterima K/L dan Dinas Kominfo dari Kementerian Komdigi.

Variabel ketiga, sarana dan prasarana hanya terdiri dari dua indikator. Indikator pertama, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Komunikasi Publik, baik berbasis manual maupun elektronik, digital, supporting dan infrastruktur telekomunikasi. Indikator kedua, ketersediaan kebijakan teknis untuk mendukung pelaksanaan PIKP.

Variabel ke-empat, yakni media dan saluran komunikasi, terdiri dari dua indikator: ketersediaan media dan saluran komunikasi baik konvensional maupun digital yang dikelola sendiri oleh instansi untuk menyampaikan informasi publik dan ketersediaan media partner yang bekerjasama oleh K/L dan Dinas Kominfo untuk menyampaikan informasi publik. Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik tahun 2024 mencatat capaian skor rata-rata untuk dimensi input secara nasional (skor gabungan K/L dan Dinas Kominfo) sebesar 79,63 atau termasuk kategori “Baik”. Skor ini lebih



tinggi 2,33 poin jika dibandingkan dengan hasil studi dimensi Input tahun 2023 sebesar 77,30 (kategori “Baik”). Secara rinci masing-masing skor pada dimensi Input gabungan di Indeks PIKP tahun 2024 adalah sebagai berikut: skor anggaran sebesar 87,98 (Sangat Baik); skor bahan informasi sebesar 65,82 (Sedang); skor sarana dan prasarana sebesar 84,25 (Sangat Baik); dan skor variabel media dan saluran komunikasi sebesar 80,47 (Sangat Baik).

Temuan studi ini untuk dimensi Input di tingkat K/L tahun 2024 secara keseluruhan, skor rata-rata untuk dimensi Input sebesar 80,89 atau termasuk ke dalam kategori “Sangat Baik”. Skor ini lebih tinggi 3,85 poin bila dibandingkan dengan hasil studi dimensi input tahun 2023, yaitu 77,04 (”Baik”). Artinya dalam kurun waktu satu tahun ini ada perubahan yang cukup signifikan.

Hasil penghitungan Indeks juga menunjukkan instansi pemerintah pusat yang berhasil mencapai kategori “Sangat Baik” dengan skor tertinggi untuk dimensi Input ada 39 K/L. Adapun K/L yang meraih peringkat pertama yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan skor sebesar 99,91. Kementerian ini juga berhasil mendapatkan skor terbaik untuk semua variabel, mulai dari anggaran, sarana dan prasarana, media dan saluran komunikasi serta bahan informasi. Data hasil studi ini juga menunjukkan K/L dengan capaian skor untuk dimensi Input terendah yaitu Badan Intelijen Negara dengan skor 51.11 (Buruk), peringkat kedua dari bawah diperoleh Badan Pusat Statistik dengan skor 54.57 (Buruk). Ada kemungkinan minimnya skor tersebut disebabkan oleh minimnya data dan informasi yang diberikan narasumber instansi tersebut yang hanya menyampaikan data variabel bahan informasi, namun tidak memberikan data terkait variabel-variabel anggaran, sarana dan prasarana.

Sedangkan variabel dengan capaian terendah pada dimensi Input di tingkat K/L adalah bahan informasi dengan skor 66,27, atau kategori “Sedang”. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa rendahnya variabel ini disebabkan K/L hanya menyiapkan bahan informasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang bersangkutan. Sedangkan bahan informasi terkait Program Prioritas Nasional tahun 2024 lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak disiapkan oleh K/L. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya dukungan K/L terhadap penyebaran informasi seluruh Program Prioritas Nasional. Sementara, nilai skor variabel anggaran, sarana dan prasarana serta media dan saluran komunikasi tergolong “Sangat Baik” yaitu masing-masing 90,67, 86,15 dan 80,46.

Hasil perhitungan Indeks PIKP untuk dimensi Input di tingkat Dinas Kominfo cenderung sedikit lebih rendah dibandingkan dengan skor indeks di tingkat K/L, yakni 78,37 atau dalam kategori “Baik”. Bila dibandingkan dengan dimensi yang sama pada Indeks PIKP tahun 2023 yang sebesar 77,55 atau mengalami peningkatan, meski tidak signifikan sebesar 0,82 poin. Secara rinci masing-masing skor variabel pada Indeks PIKP tahun 2024 adalah sebagai berikut: skor variabel anggaran sebesar 85,29 (Baik), skor variabel bahan informasi 65,36 (Sedang); skor variabel sarana dan prasarana sebesar 82,35 (Sangat Baik); dan skor variabel media dan saluran komunikasi sebesar 80,48 (Sangat Baik).

Di tingkat Dinas Kominfo, skor tertinggi dengan kategori “Sangat Baik” untuk dimensi Input diraih oleh 16 (enam belas) Dinas Kominfo Provinsi, diantaranya Dinas Kominfo Provinsi Banten dengan skor sebesar 94,97. Skor tertinggi ini utamanya bersumber dari perolehan skor variabel anggaran, media dan saluran, sarana prasarana dan bahan informasi. Peringkat terbaik berikutnya diraih oleh Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta (92,58), dan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Utara (91,55). Sementara itu, skor terendah dimensi Input diperoleh oleh Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat dengan skor 50,35 (Buruk). Terendah kedua setelah Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat adalah Dinas Kominfo Provinsi Maluku Utara dengan skor 54,42 (Buruk). Posisi Dinas Kominfo Provinsi Maluku Utara dengan skor 54,42 (Buruk) ini tidak ada perubahan bila dibandingkan dengan Indeks PIKP tahun 2023, 2022 dan 2021.

Secara lebih rinci, capaian Indeks untuk dimensi Input di tingkat K/L dan di tingkat Dinas Kominfo Provinsi dijelaskan dalam uraian berikut ini:

B. Capaian Indeks Dimensi Input di Kementerian Lembaga

1. Anggaran

Total Anggaran menurut K/L Tahun 2024

Dalam perencanaan program komunikasi publik pada organisasi pemerintah, anggaran berkaitan erat dengan kegiatan atau proyek yang diuraikan dalam rencana program dan secara langsung mempengaruhi bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Pengelolaan anggaran yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya sudah dialokasikan dengan benar dan program mencapai tujuannya.

Anggaran dimasukkan sebagai elemen dalam pengukuran input Indeks PIKP berdasarkan salah satu fungsinya yaitu memvisualisasikan aktivitas-aktivitas yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks pengukuran Indeks PIKP ini, dengan memperhitungkan anggaran dalam unit kerja pelayanan informasi dan kehumasan, kita dapat melihat sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan layanan unit kerja tersebut.

Sebagai gambaran awal, Diagram 2.1 menunjukkan anggaran keseluruhan yang dimiliki K/L pada Tahun Anggaran 2024. Dari 67 K/L yang berpartisipasi dalam survei ini, jumlah total anggaran K/L terbesar dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedangkan jumlah terkecil dimiliki oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



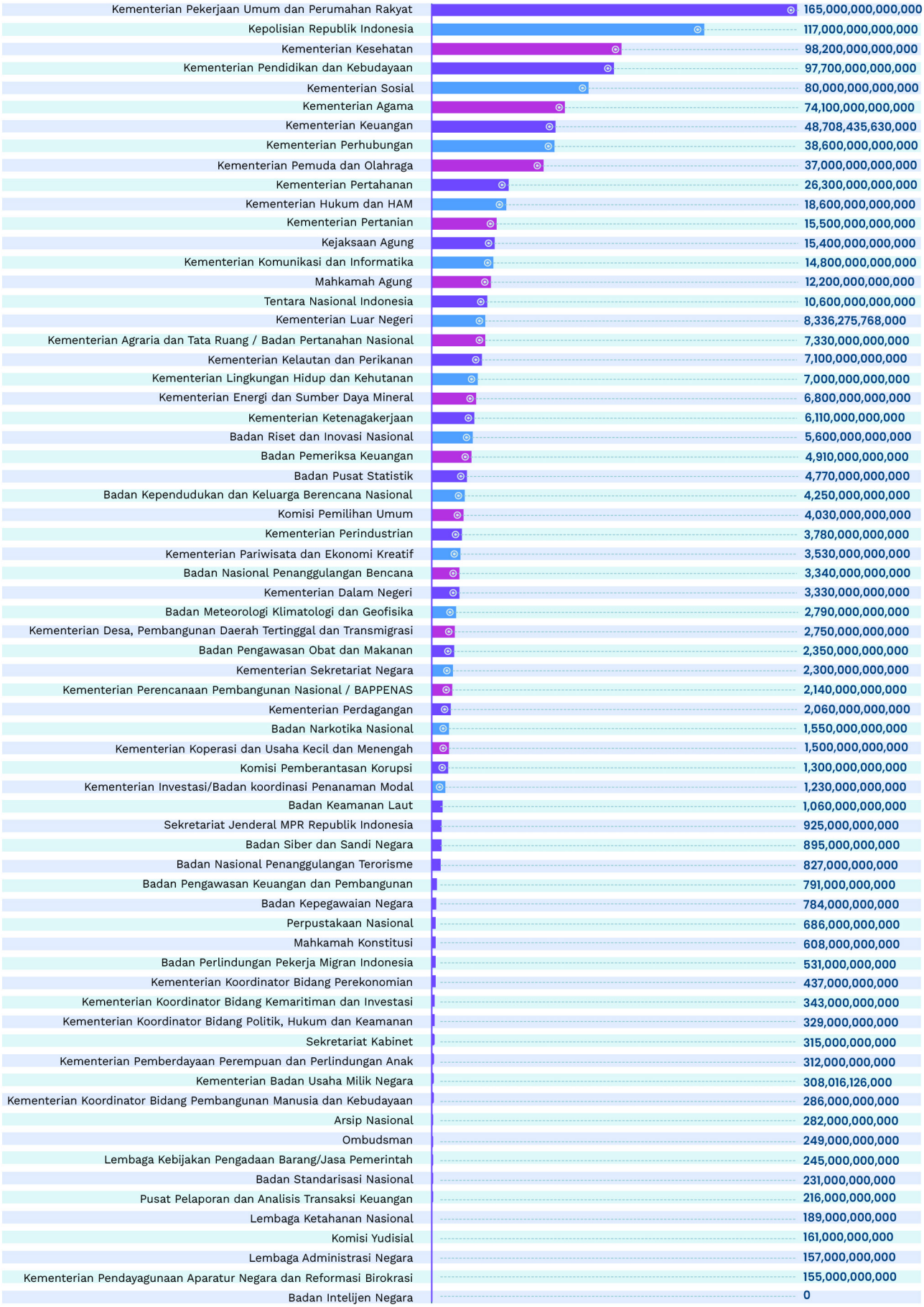


Diagram 2.1 Total Anggaran menurut K/L Tahun 2024

Total Anggaran PIKP pada Unit Kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan menurut K/L Tahun 2024

Diagram 2.2 di bawah ini menunjukkan anggaran keseluruhan yang dimiliki unit kerja yang membidangi pelayanan informasi dan kehumasan pada Tahun Anggaran 2024. Unit kerja yang dimaksud adalah unit yang dipimpin oleh Pejabat Tinggi Pratama di kementerian/lembaga, dan Dinas Kominfo Provinsi. Besaran anggaran tidak menjadi indikator penilaian Indeks PIKP, tetapi memberi gagasan proporsi atau pengalokasian pos khusus untuk pelayanan informasi dan kehumasan.

Sebagaimana terlihat pada Diagram 2.2, 66 K/L mengalokasikan dana khusus untuk pelayanan informasi dan kehumasan, dan ada 1 K/L yang tidak mencantumkan jumlah anggarannya. Meskipun demikian, terdapat variasi yang sangat lebar pada jumlah total anggaran di antara Kementerian Sekretariat Negara dan Kepolisian Republik Indonesia dibandingkan dengan K/L lainnya. Jumlah total anggaran terbesar unit kerja yang membidangi pelayanan informasi dan kehumasan dimiliki Kementerian Sekretariat Negara dan jumlah terkecil dimiliki oleh Badan Standardisasi Nasional.



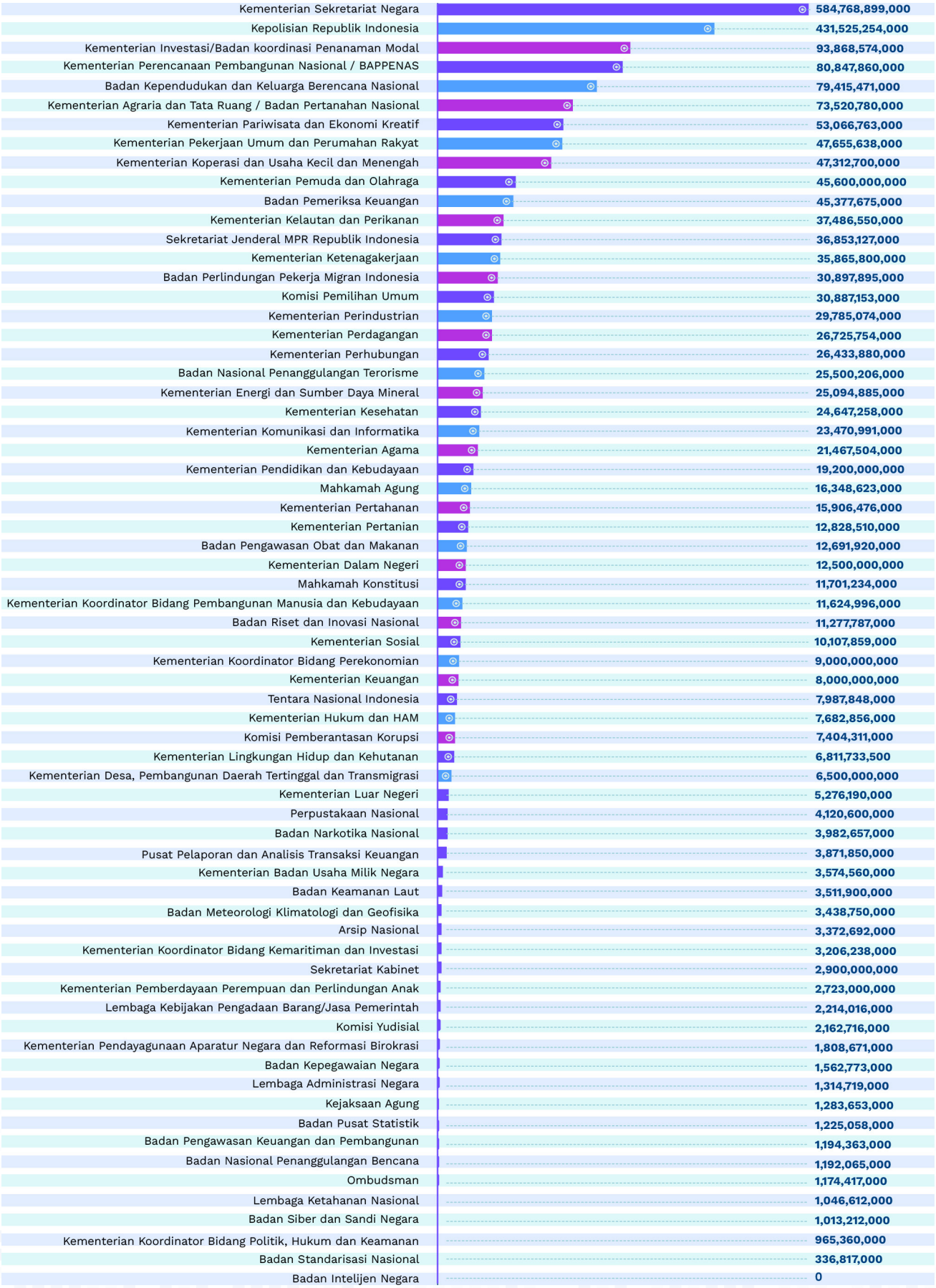


Diagram 2.2 Total Anggaran PIKP menurut K/L Tahun 2024

2. Bahan Informasi

Dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat, ketersediaan informasi yang berkualitas dan berdasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan keberagaman sangat dibutuhkan. Oleh karenanya, intensitas produksi dan kualitas informasi yang disediakan oleh instansi pemerintah tidak saja dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah, tetapi pada gilirannya juga dapat mempengaruhi kualitas kehidupan demokrasi di negara ini.

Materi bahan informasi antara lain dapat berupa data terkait Program Prioritas Nasional yang terdapat dalam Perpres Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Perpres ini menetapkan 39 Program Prioritas Nasional yang dituangkan dalam rencana kerja masing-masing K/L tahun 2024.

Penyediaan Bahan Informasi tentang Program Prioritas Nasional

Variabel kedua yang diukur dalam penghitungan Indeks PIKP dari dimensi Input adalah penyediaan bahan informasi. Hasil studi ini menunjukkan, dari 67 K/L yang disurvei, sebanyak 60 K/L (89,55%) telah membuat sendiri bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional secara mandiri, sedangkan 7 K/L (10,45%) tidak memproduksi bahan informasi terkait Program Prioritas Nasional (RKP 2024) secara mandiri dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi dan kehumasan. Dalam hal ini, bahan informasi tersebut bisa saja diproduksi K/L lain sebagai pengampu substansi.

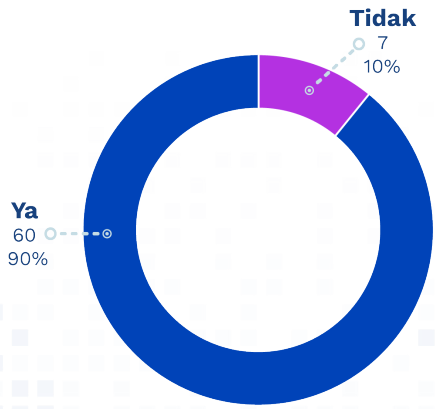
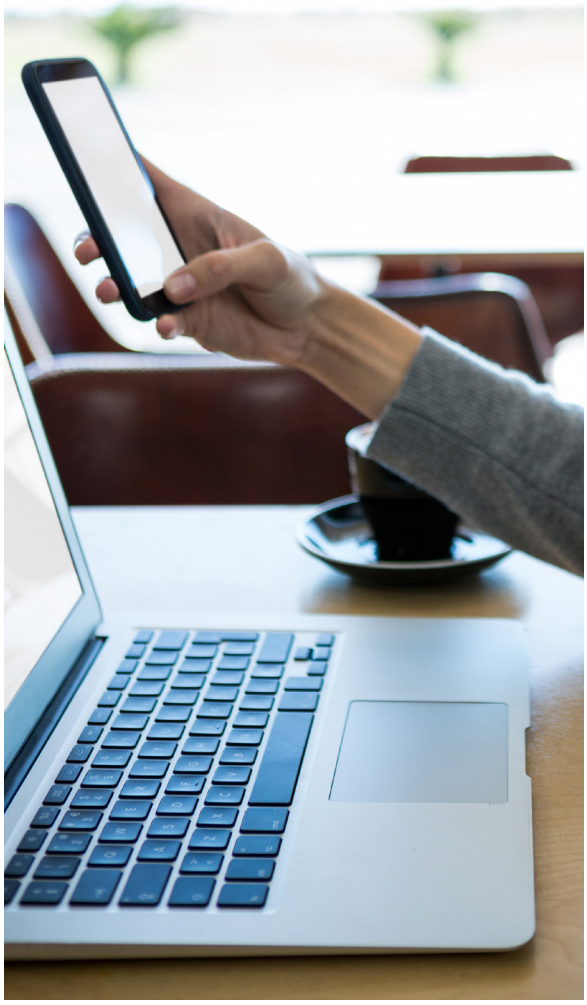


Diagram 2.3 Jumlah K/L Tahun 2024 yang membuat sendiri konten/bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2024) yang tertuang dalam Perpres No. 84 Tahun 2023)



Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi tentang Program Prioritas Nasional

Frekuensi penyediaan bahan informasi menjadi faktor kunci dalam komunikasi publik yang efektif, memastikan bahwa audiens selalu mendapatkan informasi yang relevan dan tepat waktu. Selain itu, penyediaan bahan informasi yang rutin memungkinkan pesan yang ingin disampaikan lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyakat.

Dari Diagram 2.4 di bawah ini, dapat kita simpulkan bahwa bila dilihat berdasarkan 39 Program Prioritas Nasional, konten yang paling banyak diproduksi adalah konten terkait program Sosialisasi World Water Forum/Sosialisasi Pemilu/Pilkada, sedangkan konten yang paling jarang diproduksi adalah program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi/Subsidi rumah dengan bunga 0%/ Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan korban bencana/Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.

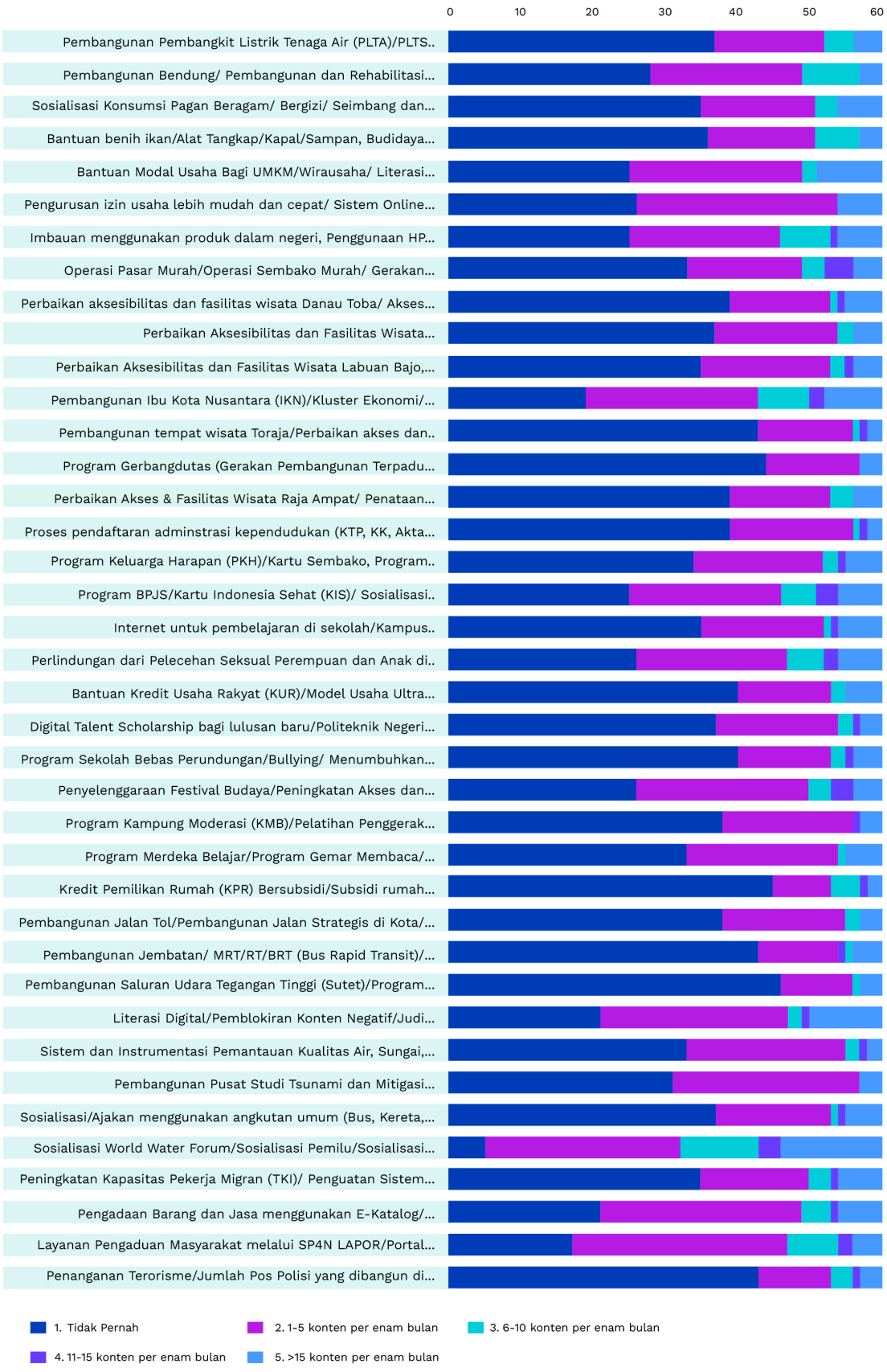


Diagram 2.4 Frekuensi produksi Bahan Informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2024) di masing-masing K/L Tahun 2024

Program Prioritas Nasional tidak serta-merta menjadi agenda prioritas juga bagi seluruh K/L. Dari 60 K/L yang memproduksi konten Program Prioritas Nasional, hanya ada 15 K/L yang memproduksi seluruh konten Program Prioritas Nasional yang berjumlah 39 konten. Diagram 2.5 di bawah ini menunjukkan hampir seluruh K/L turut berkontribusi dalam memproduksi konten Program Prioritas Nasional (RKP 2024) yaitu sebanyak 89,6% dengan sebaran yang merata mulai dari 1 hingga 39 konten dalam satu tahun seperti yang ditunjukkan dalam Diagram 2.5.

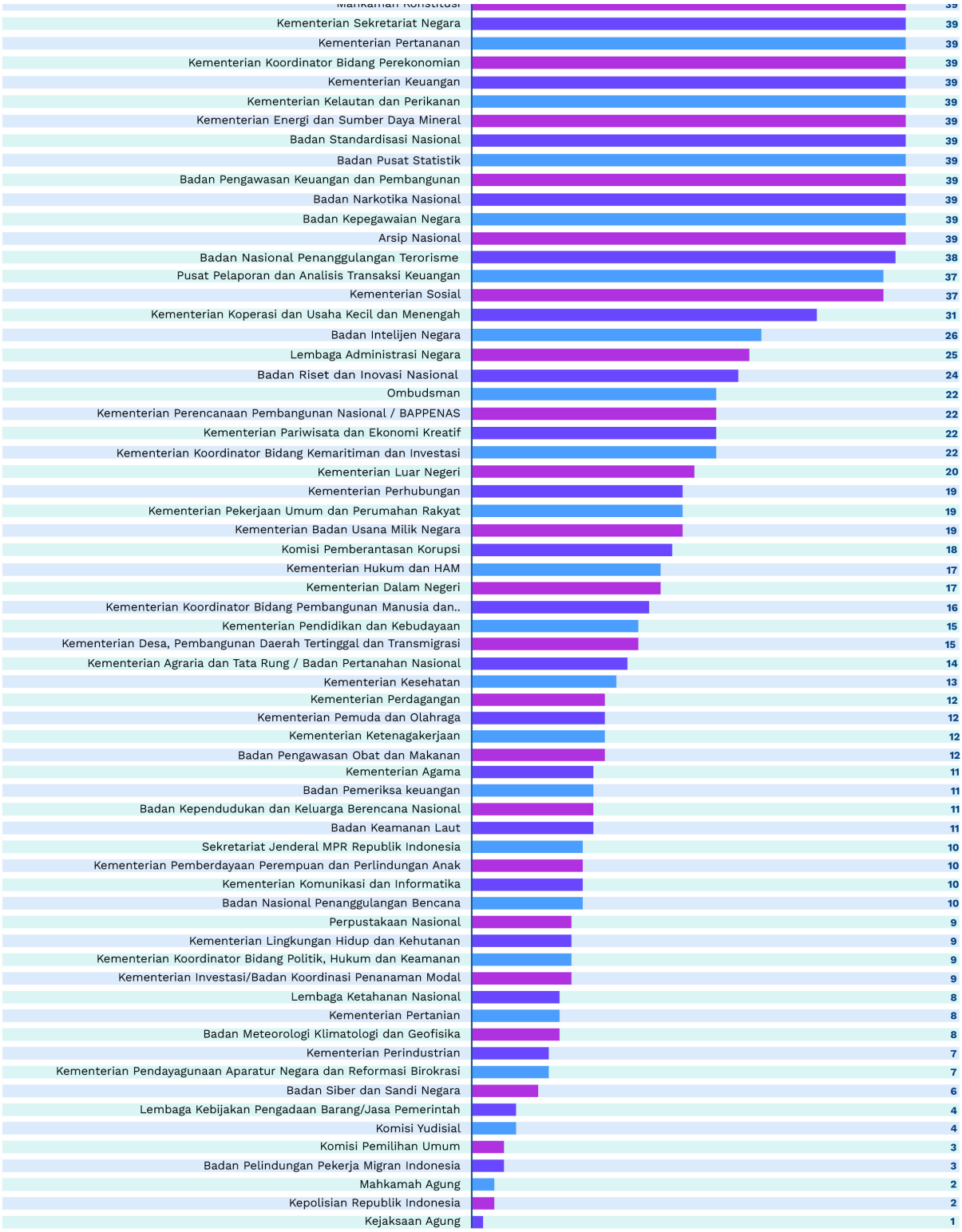


Diagram 2.5 Frekuensi produksi Bahan Informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2024) secara keseluruhan menurut K/L Tahun 2024

Penyediaan Bahan Informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L Tahun 2020- 2024

Selain Program Prioritas Nasional, K/L juga memiliki program yang menjadi isu prioritas masing-masing yang perlu disediakan bahan informasinya, terutama terkait dengan program kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L Tahun 2020 – 2024.

Hasil studi ini menunjukkan dari 67 K/L yang disurvei, sebanyak 60 KL (89,6%) menyediakan bahan informasi Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L tahun 2020 – 2024, sementara 14 K/L lainnya tidak menyediakan bahan informasi dimaksud, seperti terlihat dalam Diagram 2.6. di bawah ini:

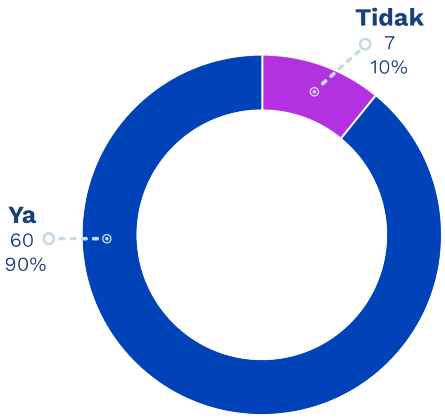


Diagram 2.6 Jumlah K/L yang menyediakan Bahan Informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L Tahun 2020-2024

Dari 60 K/L yang menyediakan bahan informasi tentang program dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L tahun 2020 – 2024 lebih dari separuh (58,3%) atau 35 K/L menyiapkan bahan informasi tersebut lebih dari 15 konten per enam bulan, sebanyak 5 K/L menyiapkan bahan informasi tersebut dengan frekuensi 11-15 konten per enam bulan. Sementara 6 K/L menyiapkan bahan informasi tersebut dengan frekuensi 6-10 konten per enam bulan. Paling jarang, 14 K/L memproduksi bahan informasi tersebut sebanyak 1–5 konten per bulan, seperti ditampilkan dalam Diagram 2.7 di bawah ini:

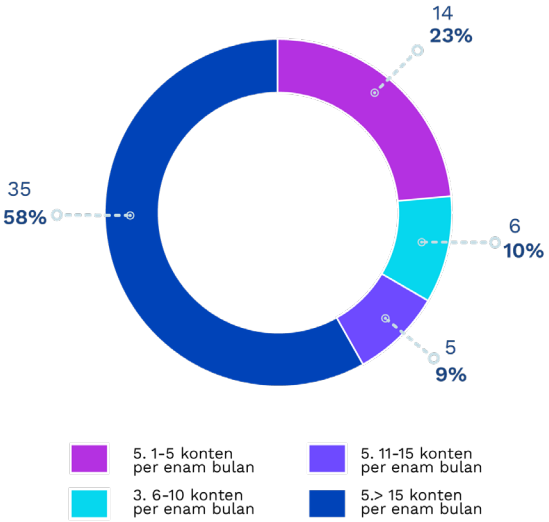


Diagram 2.7 Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L Tahun 2020-2024)

Selain program yang menjadi core business atau program utamanya, instansi pemerintah juga dapat memberikan layanan informasi terkait program lain yang pada saat memiliki urgensi tertentu atau merupakan program berskala nasional atau internasional yang perlu didukung diseminasi informasinya, misalnya Pemilu, Pilkada Serentak, Sosialisasi World Water Forum, program lainnya. Diagram 2.8 di bawah ini memperlihatkan bahwa sebanyak 53 K/L (79,1%) menyediakan bahan informasi selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L tahun 2020 – 2024.

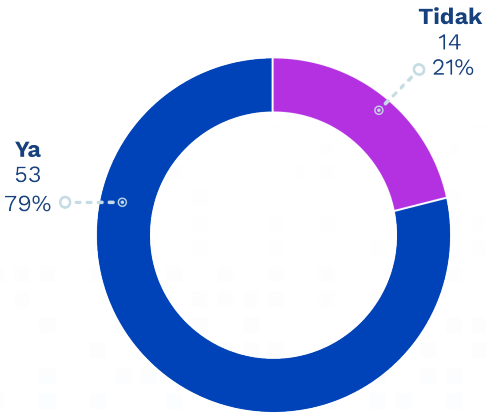


Diagram 2.8 Jumlah K/L yang menyediakan Bahan Informasi selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L Tahun 2020-2024

Diagram 2.9 di bawah ini merinci data jumlah konten yang diproduksi yaitu 58.5% K/L menyediakan lebih dari enam konten setiap enam bulan, sedangkan 10 K/L berkontribusi dengan 1-2 konten setiap enam bulan

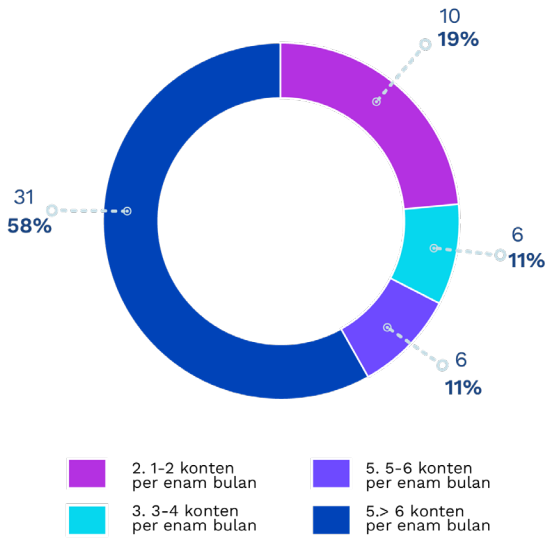


Diagram 2.9 Frekuensi penyediaan Bahan Informasi Selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L Tahun 2020-2024

Penyediaan Bahan Informasi hasil monitoring media oleh K/L

Frekuensi penyediaan Bahan Informasi hasil Monitoring Media menurut K/L Tahun 2024

Hal lain yang perlu dicermati dalam pembuatan bahan informasi adalah sumber dan acuan yang digunakan. Bahan informasi, sebagai bagian dari strategi komunikasi, secara idealnya disusun untuk layanan informasi berdasarkan analisis situasi dan kebutuhan khalayak sasaran. Monitoring media, sebagai salah satu metode dalam menganalisis situasi, dilakukan untuk membantu instansi dalam menetapkan strategi dan bahan informasi yang tepat. Monitoring media juga merupakan langkah antisipasi dalam manajemen komunikasi krisis. Dengan adanya pemantauan terhadap isu secara rutin atau berkala, K/L dapat mengantisipasi terjadinya krisis maupun memantau isu pascakrisis.

Diagram 2.10 berikut menunjukkan hampir seluruh K/L (95,9%) atau 64 K/L menyediakan bahan informasi berdasarkan hasil pemantauan isu secara rutin, baik itu setiap kali pelaksanaan kegiatan atau seminggu sekali. Artinya K/L tersebut telah memanfaatkan hasil pemantauan isu di media sebagai acuan penyusunan bahan informasi secara optimal. Hal ini merupakan indikator yang baik di mana strategi komunikasi yang dilakukan berbasis kajian yang aktual. Kendati demikian, masih ada 3 K/L atau kurang dari 5% yang tidak melaksanakannya sama sekali. Diagram 2.11 menunjukkan data frekuensi penyajian bahan informasi yang dihasilkan pemantauan isu publik melalui monitoring media. Mayoritas K/L (95,5%) menghasilkan lebih dari tiga bahan informasi selama enam bulan

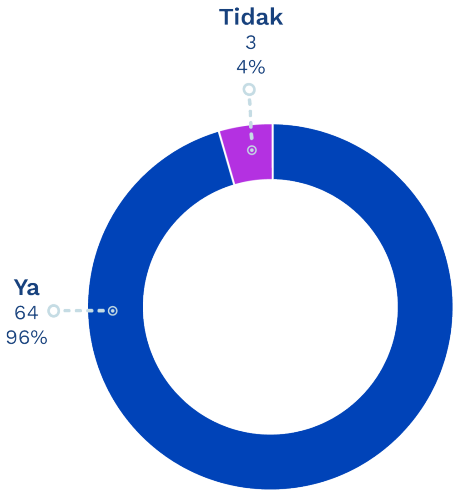


Diagram 2.10 Jumlah K/L yang menyediakan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media

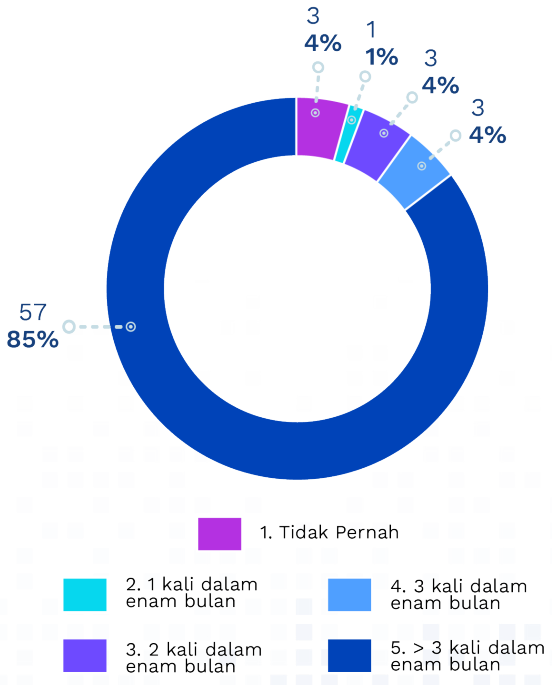


Diagram 2.11 Jumlah K/L yang menyediakan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media

Penyampaian Data dan Informasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Digital

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, setiap instansi pemerintah, baik pusat dan daerah, diminta untuk menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) secara berkala untuk mendukung pelaksanaan komunikasi publik. Dari 67 K/L, lebih dari separuhnya (56,7%) atau 38 K/L tidak menyampaikan data dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menkodigi secara berkala seperti yang ditunjukkan Diagram 2.12.

Hal ini merupakan penurunan dibandingkan data pada Indeks PIKP tahun 2023. Selain tidak sesuai dengan Inpres terkait, tersendatnya data dan infomasi kepada Kementerian Komdigi berpengaruh terhadap penyusunan narasi tunggal dan orkestrasi komunikasi publik nasional karena data dan informasi dari K/L menjadi referensi dan acuan dalam penyusunan narasi tunggal dan narasi turunan PIKP nasional.

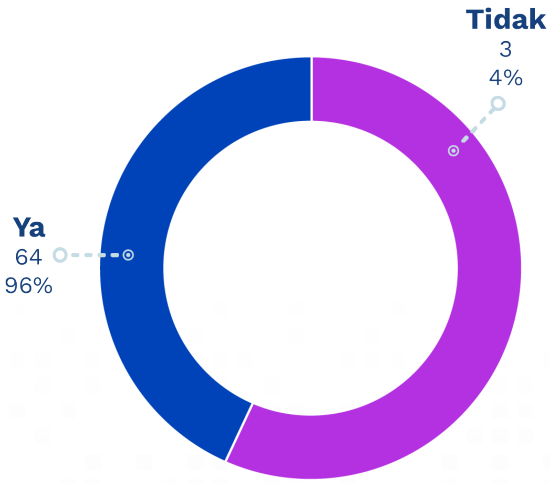


Diagram 2.12 Penyampaian Data dan Informasi terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Digital secara berkala menurut K/L Tahun 2024)

Penerimaan Bahan Informasi (termasuk Narasi Tunggal) dari Kementerian Komdigi

Selain menyampaikan data dan informasi kepada Menkomdigi, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015, kementerian dan lembaga juga wajib menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan datapendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Digital berupaya mendiseminasikan narasi tunggal ke seluruh kementerian dan lembaga. Temuan studi ini menunjukkan mayoritas K/L atau 89,6% telah menerima bahan informasi, termasuk narasi tunggal dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Diagram 2.13). Namun sebanyak 7 K/L atau 17,2% tidak menerima narasi tunggal. Walaupun jumlah ini merupakan peningkatan dari data tahun lalu, Kementerian Komdigi tetap perlu untuk mengidentifikasikan faktor kendalanya. Penyediaan narasi tunggal merupakan bagian penting dalam PIKP agar Program Prioritas Nasional dapat digaungkan secara serentak dan masif.

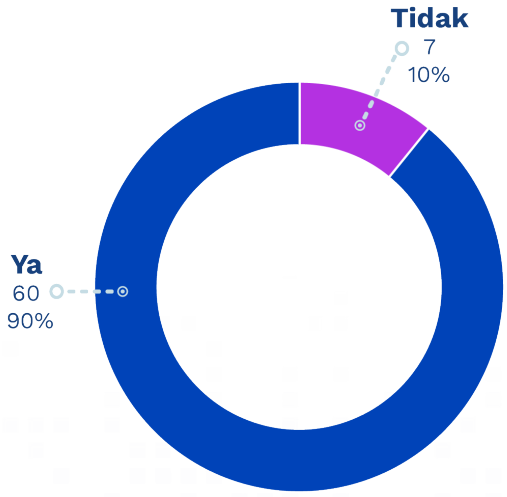


Diagram 2.13 Jumlah K/L yang menerima Bahan Informasi, termasuk narasi tunggal dari Kementerian Komunikasi dan Digital

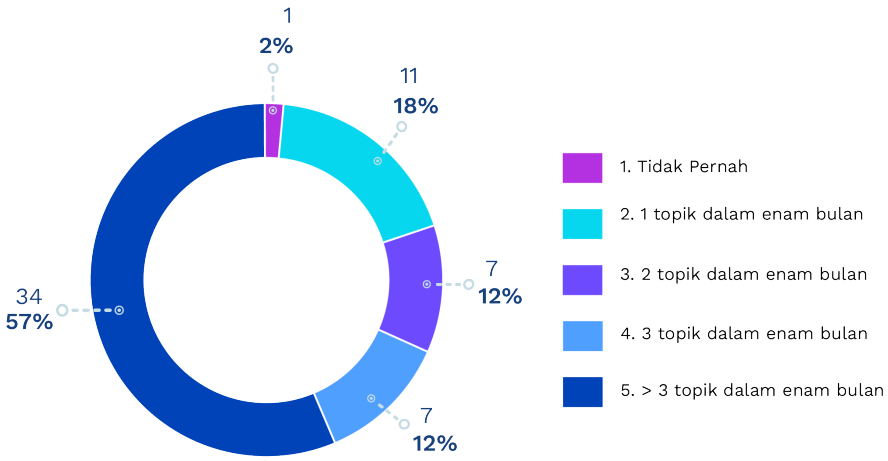


Diagram 2.14 Frekuensi K/L yang menerima Bahan Informasi, termasuk narasi tunggal dari Kementerian Komunikasi dan Digital

Pendistribusian narasi tunggal oleh Kementerian Komdigi dilaksanakan secara berkala menggunakan beberapa kanal, termasuk Bakohumas dan widget GPR yang tersambung dengan website resmi K/L. Diagram 2.14 menunjukkan frekuensi penerimaan bahan informasi dari Kementerian Komdigi yang berbeda-beda. Apabila Kementerian Komdigi menggunakan pendekatan dan media yang sama untuk semua K/L, faktor yang menjadi pembeda perlu dikaji juga.

3. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pengelolaan IKP sangat penting karena keduanya berperan dalam memastkan pengelolaan IKP berjalan efektif, cepat dan aman. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai memungkinkan penyebaran informasi secara luas dan cepat kepada publik. Hal ini juga akan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi berbagai kalangan masyarakat. Sarana dan prasana dalam Indeks PIKP Tahun 2024 dibedakan menjadi dua yaitu yang berbasis manual dan digital.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Komunikasi Publik di K/L Tahun 2024.

Sarana dan prasarana berbasis manual mencakup ruang/desk layanan informasi PPID, nomor kontak yang dapat digunakan masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi, kotak saran atau formulir aduan, dan layanan khusus untuk pemohon informasi bagi penyandang disabilitas. Diagram 2.15 menggambarkan bahwa hampir seluruh K/L (berjumlah 64 K/L) memiliki keempat sarana dan prasarana tadi. Dua K/L belum memfasilitasi layanan khusus untuk pemohon informasi penyandang disabilitas.

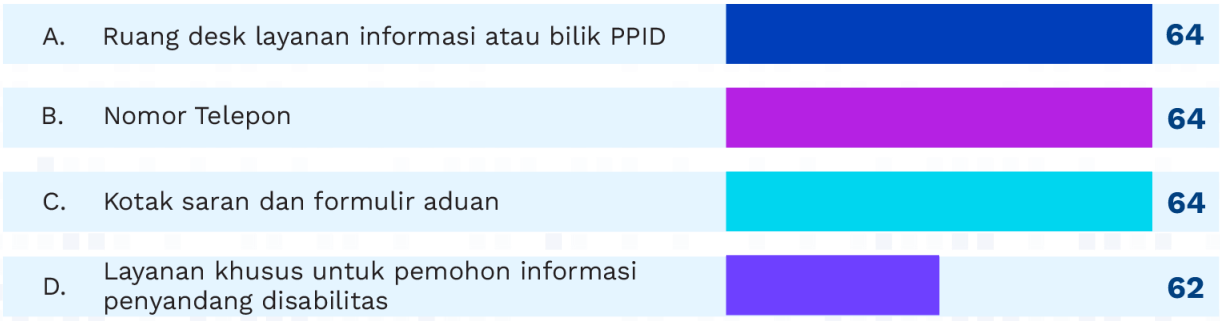


Diagram 2.15 Ketersediaan Sarana dan Prasarana berbasis Manual di K/L Tahun 2024

Ketersediaan Sarana dan Prasana Berbasis Digital

Disamping sarana dan prasarana yang bersifat manual, digitalisasi telah banyak mempengaruhi cara kementerian dan lembaga dalam mengelola komunikasi publik agar pelayanan yang diberikan lebih mudah diakses oleh masyarakat dimana pun mereka berada. Sarana dan prasarana berbasis digital mencakup layanan aduan berbasis elektronik, website, platform pertemuan daring, dan langganan media berita daring.

Seperti yang ditampilkan dalam Diagram 2.16, seluruh K/L (67 KL) sudah menyediakan layanan aduan berbasis elektronik, 66 K/L menyediakan layanan PPID melalui website, dan mayoritas sudah memiliki menggunakan platform digital sebagai prasarana layanan informasi (63 K/L) serta sebanyak 52 K/L sudah berlangganan media berita daring.

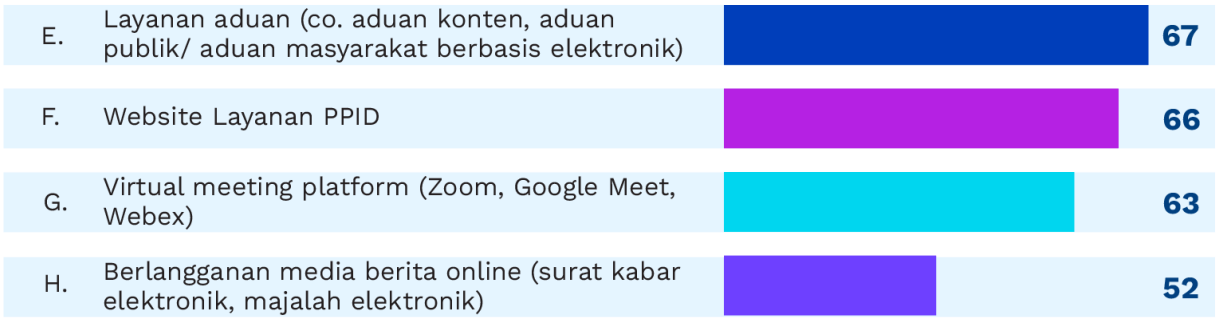


Diagram 2.16 Ketersediaan Sarana dan Prasarana berbasis Digital di K/L Tahun 2024

Ketersediaan Sarana dan Prasarana bersifat Supporting Kegiatan Komunikasi Publik di K/L Tahun 2024

Selain sarana dan prasarama utama, terdapat juga sarana dan prasarana pendukung kegiatan komunikasi publik K/L. Dari data yang diperoleh, seperti ditunjukkan dalam Diagram 2.17 di bawah ini, terlihat layanan akses internet gratis menjadi fasilitas pendukung terbanyak, yaitu 60 K/L, walaupun masih belum semua K/L memilikinya. Dua fasilitas pendukung yang paling sedikit dimiliki adalah mobil keliling (26,9%) dan radiogram (12,6%). Hal ini sangat dimungkinkan mengingat karakter publik dan profil demografi publik berbeda-beda sehingga berimplikasi pada metode dan media yang digunakan.

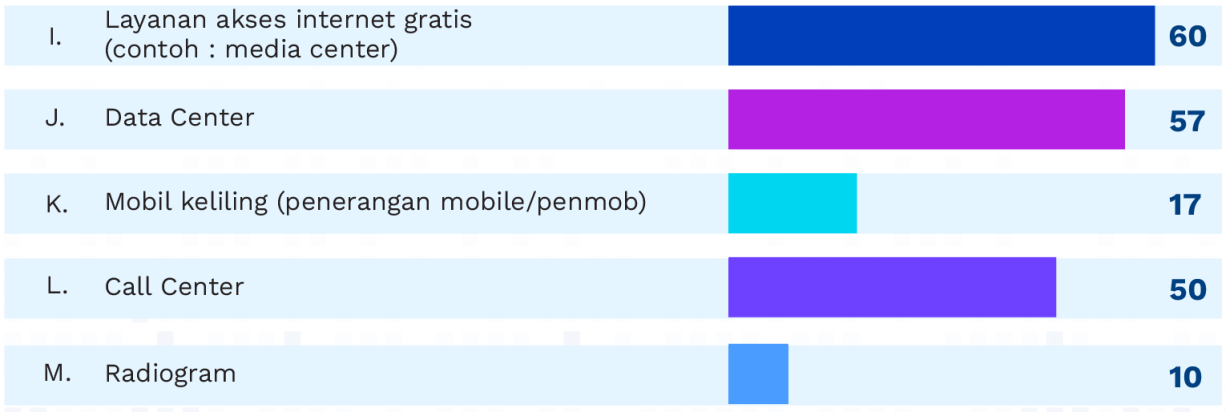


Diagram 2.17 Ketersediaan Sarana dan Prasarana bersifat Supporting Kegiatan Komunikasi Publik di K/L Tahun 2024

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Telekomunikasi yang di K/L Tahun 2024

Dukungan infrastruktur telekomunikasi dalam Indeks PIKP 2024 menjadi faktor yang diperhitungkan dalam pemberian layanan informasi. Salah satu langkah nyata untuk transformasi digital layanan informasi dimulai dari penyediaan beragam infrastruktur yang menjamin konektivitas yang stabil. Seluruh K/L memiliki perangkat komputer sebagai sarana telekomunikasi serta beragam peralatan untuk interkonektivitas. Hanya saja, pemanfaatan aplikasi berbasis big data untuk pemantauan media belum banyak digunakan, hanya sekitar 43 K/L seperti yang ditampilkan dalam Diagram 2.18. di bawah ini:

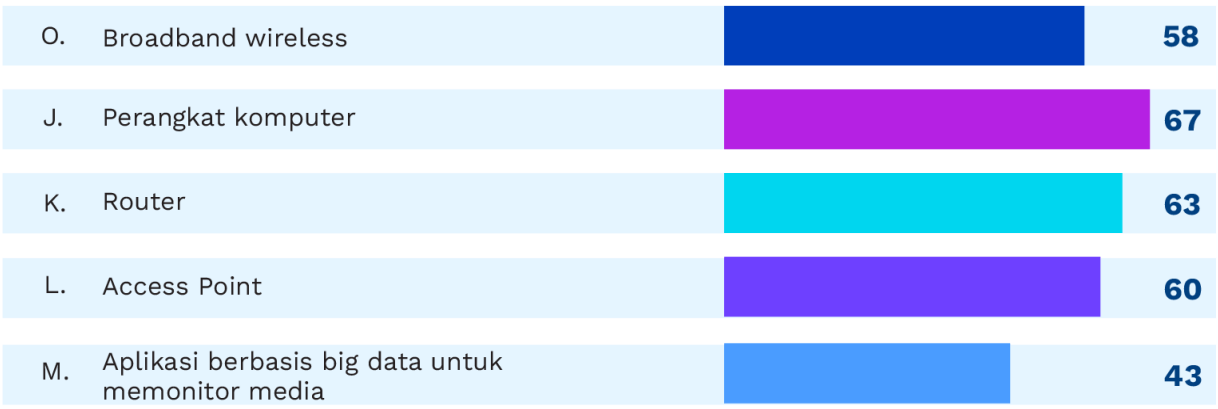


Diagram 2.18 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Telekomunikasi yang di K/L Tahun 2024

Kepemilikan kebijakan teknis untuk mendukung pelaksanaan PIKP di K/L Tahun 2024

Disamping sarana dan prasarana, kebijakan teknis dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik menjadi faktor yang diperhitungkan. Kebijakan teknis yang jelas dan terstruktur membantu memastikan informasi disampaikan dengan cara dan waktu yang tepat, meminimalisir kebingungan di masyarakat dan memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik.

Kebijakan teknis berupa standar, pedoman, prosedur operasional standar, petunjuk tenis, petunjuk pelaksanaan, dan bentuk kebijakan lainnya. Hasil studi ini, seperti ditunjukkan Diagram 2.19, menemukan sebanyak 62 K/L atau 92,5% telah memiliki pedoman internal atau mekanisme tertentu terhadap pengelolaan informasi dan komunikasi publik, sedangkan kurang dari 10% belum memiliki pedoman dimaksud.

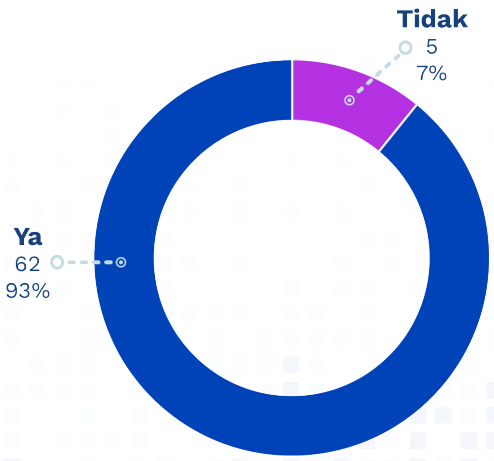


Diagram 2.19 Kepemilikan kebijakan teknis untuk mendukung pelaksanaan PIKP di K/L Tahun 2024

4. Media dan Saluran Komunikasi

Media dan Saluran Komunikasi memainkan peran krusial dalam pengelolaan IKP, karena media dan saluran komunikasi memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas, sehingga pesan dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat di seluruh wilayah. Variabel Media dan Saluran Komunikasi dalam studi ini mencakup media dan saluran komunikasi dalam format konvensional dan digital.

Media dan Saluran Komunikasi yang dimiliki K/L dalam format Konvensional untuk menyampaikan informasi Program Prioritas Nasional

Media dan saluran komunikasi dalam format konvensional memiliki peran penting dalam memastikan bahwa informasi dapat disampaikan secara efektif kepada masyarakat, misal melalui forum tatap muka memungkinkan adanya interaksi langsung antara pemerintah sebagai penyampai informasi dan masyarakat sebagai penerima informasi. Pertemuan langsung ini dapat memperkuat rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah karena interaksi langsung cenderung lebih transparan dan dapat menciptakan hubungan yang lebih humanis. Diagram 2.20 memperlihatkan bahwa masih banyak K/L menjangkau khalayaknya melalui pertemuan tatap muka (64 K/L), begitu juga dengan media (63 K/L).

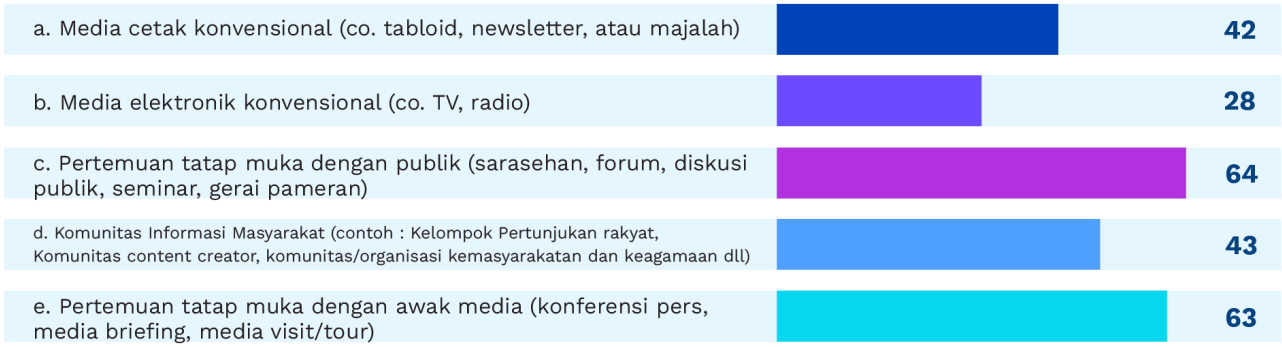


Diagram 2.20 Media dan Saluran Komunikasi yang dimiliki K/L dalam format Konvensional untuk menyampaikan informasi Program Prioritas Nasional

Media dan Saluran Komunikasi yang dimiliki K/L dalam format Digital untuk menyampaikan informasi

Pada era digital saat ini, cara berkomunikasi dan media yang digunakan oleh instansi pemerintah semakin beragam. Disrupsi teknologi telah menjadi katalisator bagi tersedianya beragam media komunikasi dan metode yang digunakan. Pemanfaatan media berbasis digital seperti media sosial, website, dan aplikasi khusus saat ini merupakan saluran media komunikasi yang sangat efektif untuk menjangkau masyarakat secara masif. Hasil studi ini menunjukkan seluruh K/L telah memiliki website dan email sebagai sebagai media komunikasi publik seperti yang ditunjukkan dalam Diagram 2.21 di bawah ini, serta kanal media sosial yang hampir dimiliki semua K/L. Penggunaan aplikasi perpesanan sebagai kanal komunikasi publik juga telah digunakan oleh mayoritas K/L. Hal ini merupakan pendekatan yang baik mengingat aplikasi perpesanan merupakan media komunikasi yang lazim digunakan masyarakat untuk berinteraksi.

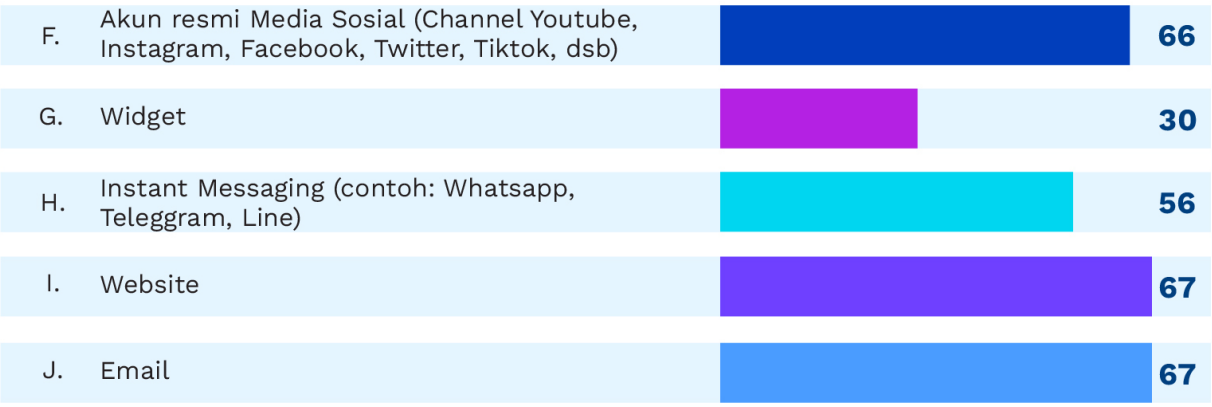


Diagram 2.21 Media dan Saluran Komunikasi yang dimiliki K/L dalam format Digital untuk menyampaikan informasi

Jumlah mitra media dalam membantu diseminasi yang dimiliki K/L Tahun 2024

Pemerintah perlu berkolaborasi dengan media dalam komunikasi publik karena media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas dan cepat. Kolaborasi ini memungkinkan pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesan kebijakan, program, dan informasi penting dengan lebih efektif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Di era kolaborasi, mitra media dapat menyokong PIKP. Selain meluaskan jangkauan diseminasi informasi, pengelolaan relasi yang baik dengan media dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya PIKP. Banyaknya mitra memang tidak menjamin efektivitas, namun dapat menjadi salah satu upaya yang dilakukan K/L untuk menggaungkan informasi lebih luas. Mitra media dalam konteks ini mencakup media cetak, elektronik, maupun daring. Hasil studi ini menunjukkan bahwa sebanyak 41 K/L atau 61,2% telah menjalin kemitraan dengan lebih dari 15 media. Hanya enam K/L yang tidak menjalin kerja sama khusus dengan media seperti yang diperlihatkan dalam Diagram 2.22 di bawah ini.

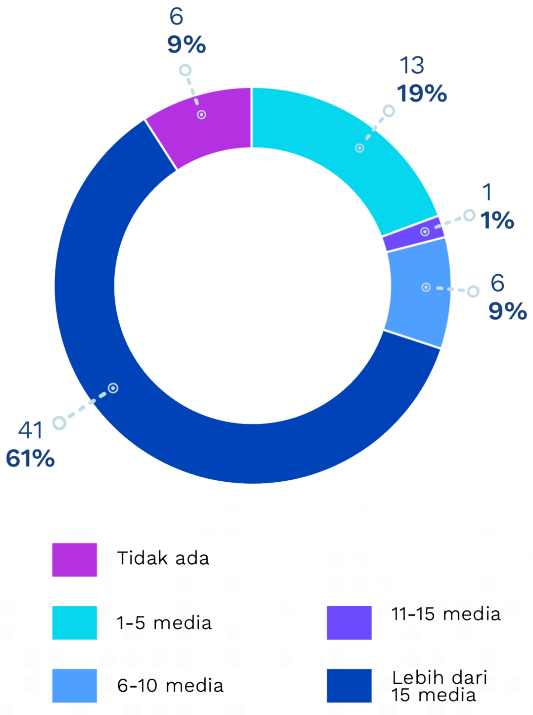


Diagram 2.22 Jumlah mitra media dalam membantu diseminasi yang dimiliki K/L Tahun 2024)

C. Capaian Indeks Dimensi Input Dinas Kominfo

1. Anggaran

Dalam sebuah organisasi, anggaran merupakan salah satu instrumen penting karena berfungsi sebagai alat pengelolaan keuangan yang mendasar untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Anggaran yang dimiliki dan dikelola oleh organisasi, dalam hal ini anggaran dari Dinas Kominfo merupakan salah satu variabel yang diukur dalam pengukuran Indeks PIKP Tahun 2024. Walaupun pengukuran ini tidak membandingkan atau mengukur jumlah anggaran dari masing-masing Dinas Kominfo. Namun, pengukuran ini lebih pada mengukur tersedianya anggaran untuk pelaksanaan tugas Dinas Kominfo mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Digital. Total Anggaran menurut Dinas Kominfo Tahun 2024.

Total Anggaran PIKP menurut Dinas Kominfo Tahun 2024

Diagram 2.23 di bawah ini menunjukkan total anggaran yang dimiliki oleh Dinas Kominfo 34 provinsi pada tahun 2024. Untuk total anggaran, sama seperti pengukuran tahun sebelumnya total anggaan terbesar dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta sedangkan yang terkecil dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup siginifikan antara wilayah yang memiliki anggaran terbesar dan terkecil, misalnya adalah Provinsi DKI Jakarta, jika dibandingkan anggarannya memang besar dikarenakan wilayah kerja DKI Jakarta yang meliputi dinas dan 6 suku dinas serta DKI kabupaten/kota di DKI Jakarta menyatu dengan provinsi

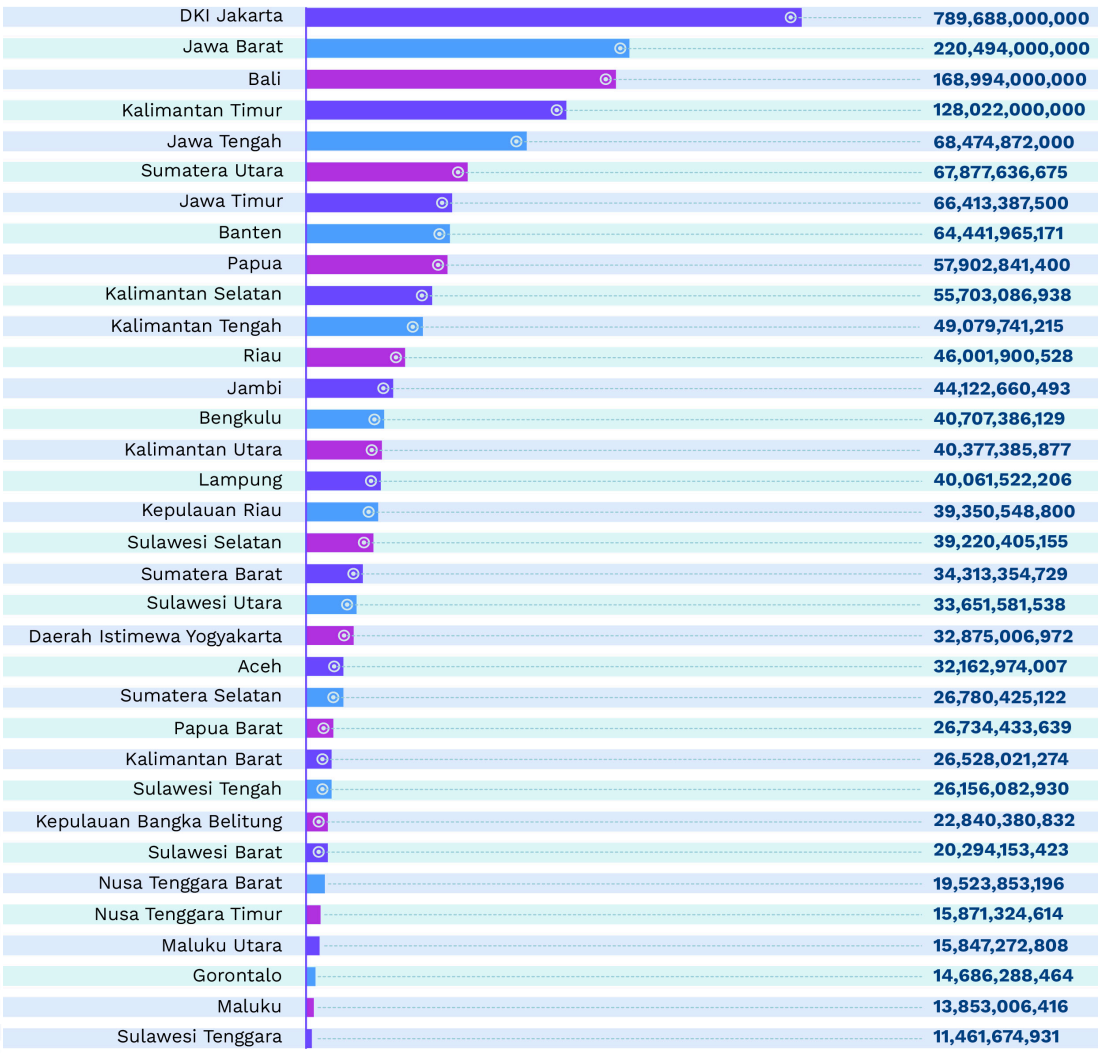


Diagram 2.23 Total Anggaran menurut Dinas Kominfo Tahun 2024

Total Anggaran PIKP menurut Dinas Kominfo Tahun 2024

Dari jumlah anggaran Dinas Kominfo di atas, tentunya ada alokasi yang dianggarkan untuk tiap unit kerja yang ada di Dinas Kominfo provinsi, salah satunya adalah unit kerja yang melaksanakan pelayanan informasi dan kehumasan atau dalam studi ini disebut Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP). Diagram 2.24 di bawah ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran terbesar untuk PIKP ada pada Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta dan alokasi terkecil ada pada Dinas Kominfo Provinsi Papua. Ada perubahan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di tahun sebelumnya ada Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat dengan anggaran terbesar dan Dinas Kominfo Provinsi Papua dengan anggaran terkecil untuk bidang PIKP. Jika diperhatikan, beberapa provinsi mengalami penurunan anggaran di bidang PIKP pada tahun 2024 ini, misalnya Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran PIKP mencapai sekira Rp. 80 Miliar, namun tahun 2024 turun menjadi Rp. 31 Miliar.

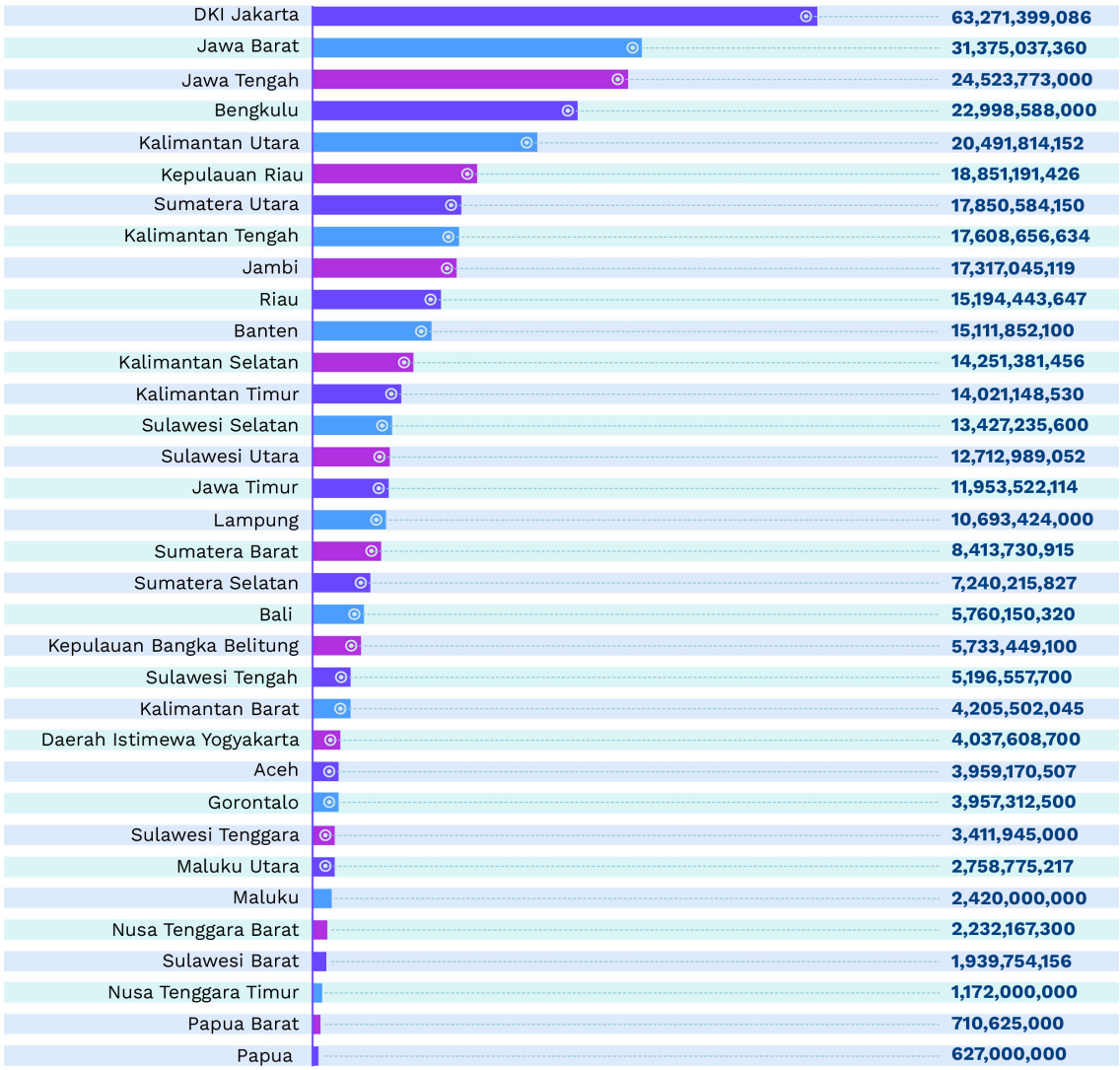


Diagram 2.24 Total Anggaran PIKP menurut Dinas Kominfo Tahun 2024

2. Bahan Informasi

Variabel kedua yang diukur dalam indeks PIKP ini yaitu penyediaan bahan informasi. Penyediaan bahan informasi yang tepat dan berkala sangat penting untuk memastikan komunikasi publik yang dilaksanakan berjalan efektif dan transparan, sehingga mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Pelaksaanan kegiatan komunikasi publik oleh Dinas Kominfo tentu tidak terlepas dari penyediaan bahan informasi yang perlu disiapkan sebelumnya. Yang dimaksud bahan informasi adalah semua data dan/atau keterangan tentang Program Prioritas Nasional yang akan disusun sendiri oleh Dinas Kominfo sebagai data, paket informasi dari instansi lain dan/atau sebagai paket informasi dan konten baru versi sesuai kewenangan Dinas Kominfo untuk disebarluaskan di berbagai media.

Penyediaan Bahan Informasi tentang Program Prioritas Nasional yang Tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah 2024

Indikator penyediaan bahan informasi dalam studi ini antara lain pembuatan bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2024) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Perpres ini menetapkan 39 Program Prioritas Nasional yang menjadi Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024.

Diagram 2.24 di bawah ini menunjukkan mayoritas Dinas Kominfo membuat sendiri konten/bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2024) yang tertuang dalam Perpres No. 84 Tahun 2023. Ada 28 Dinas Kominfo yang membuat sendiri, namun masih ada 6 Dinas Kominfo yang tidak membuat sendiri bahan informasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, ada peningkatan jumlah Dinas Kominfo yang membuat sendiri bahan informasi, dari 23 menjadi 28 Dinas Kominfo. Hal ini tentu berdampak positif karena semakin banyak informasi terkait Program Prioritas yang dapat disebarluaskan ke publik. Namun, untuk Dinas Kominfo yang tidak pernah memproduksi bahan informasi perlu mendapat perhatian karena tugas dan fungsi dari Dinas Kominfo adalah menyediakan bahan informasi untuk disosialisasikan kepada masyarakat

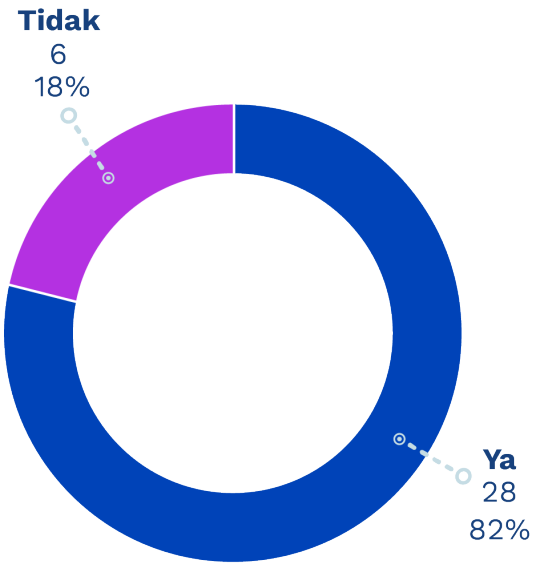


Diagram 2.25 Jumlah Dinas Kominfo Tahun 2024 yang membuat sendiri bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional yang tertuang dalam Perpres No. 84 Tahun 2023)



Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi

Frekuensi penyediaan bahan informasi memungkinkan penyesuaian pesan yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan audiens yang berbeda. Selain itu, informasi yang diperbaharui secara berkala memungkinkan audiens mendapatkan data yang akurat dan terkini, menghindari misinformasi yang dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat.

Karena itu frekuensi penyediaan bahan informasi yang tepat dan terus menerus sangat krusial untuk memastikan komunikasi publik berjalan efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

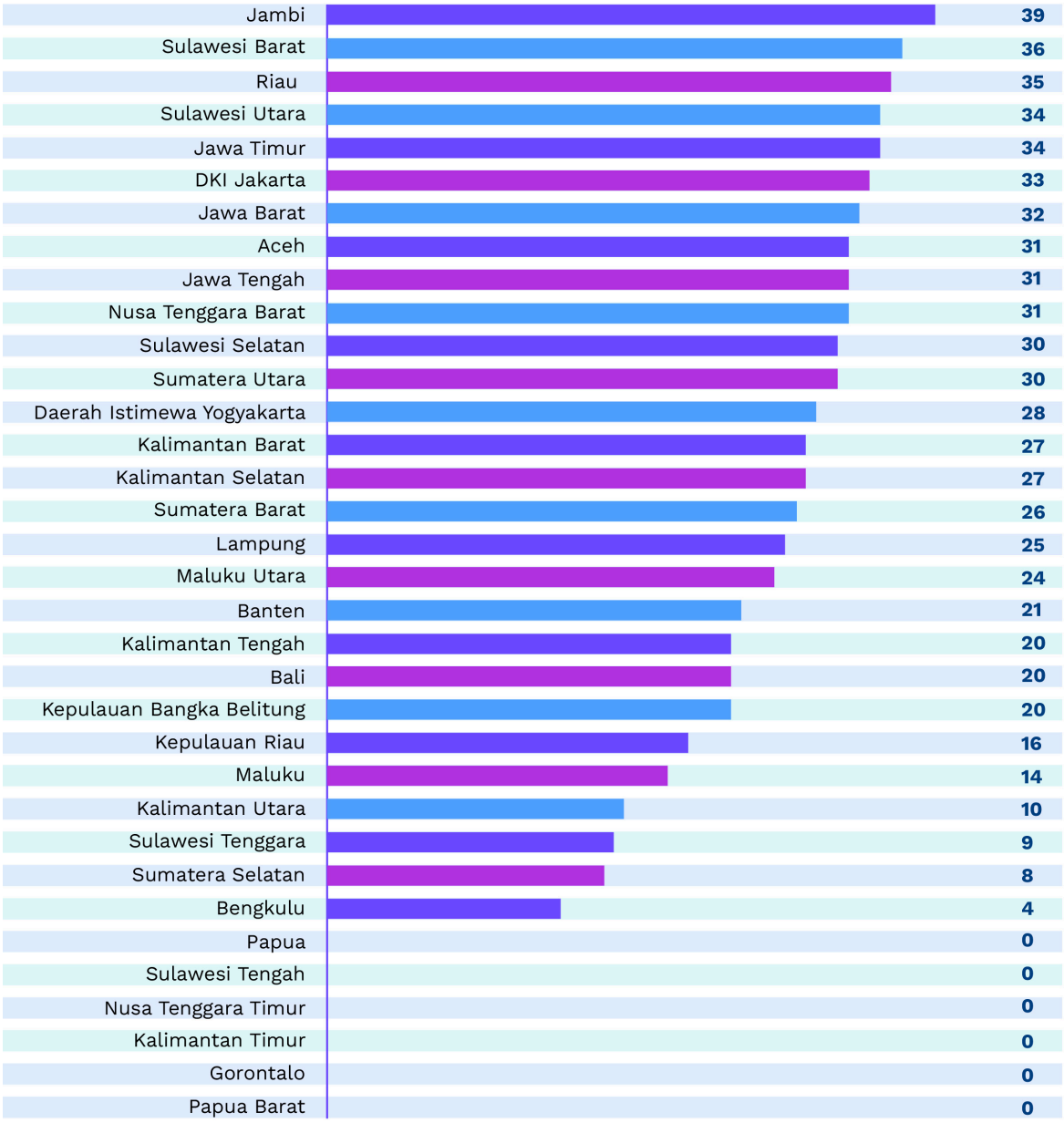


Diagram 2.26 Frekuensi produksi Bahan Informasi tentang Program Prioritas Nasional (RKP 2024) menurut Dinas Kominfo. Tahun 2024

Dari diagram 2.25 di atas dapat diketahui bahwa dari 34 Dinas Kominfo yang disurvei, sebanyak 28 Dinas Kominfo (82,35%) telah memproduksi bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional sedikitnya 4 program dan terbanyak 39 program. Namun masih ada 6 Dinas Kominfo (17,65%) yang belum memproduksi bahan informasi tentang Progam Prioritas 2024 dimaksud. Hal ini menunjukkan belum semua Dinas Kominfo memproduksi bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional. Padahal tugas dan fungsi dari Dinas Kominfo adalah menyediakan bahan informasi untuk didiseminasikan kepada masyarakat, hal ini perlu mendapat perhatian dari Dinas Kominfo.



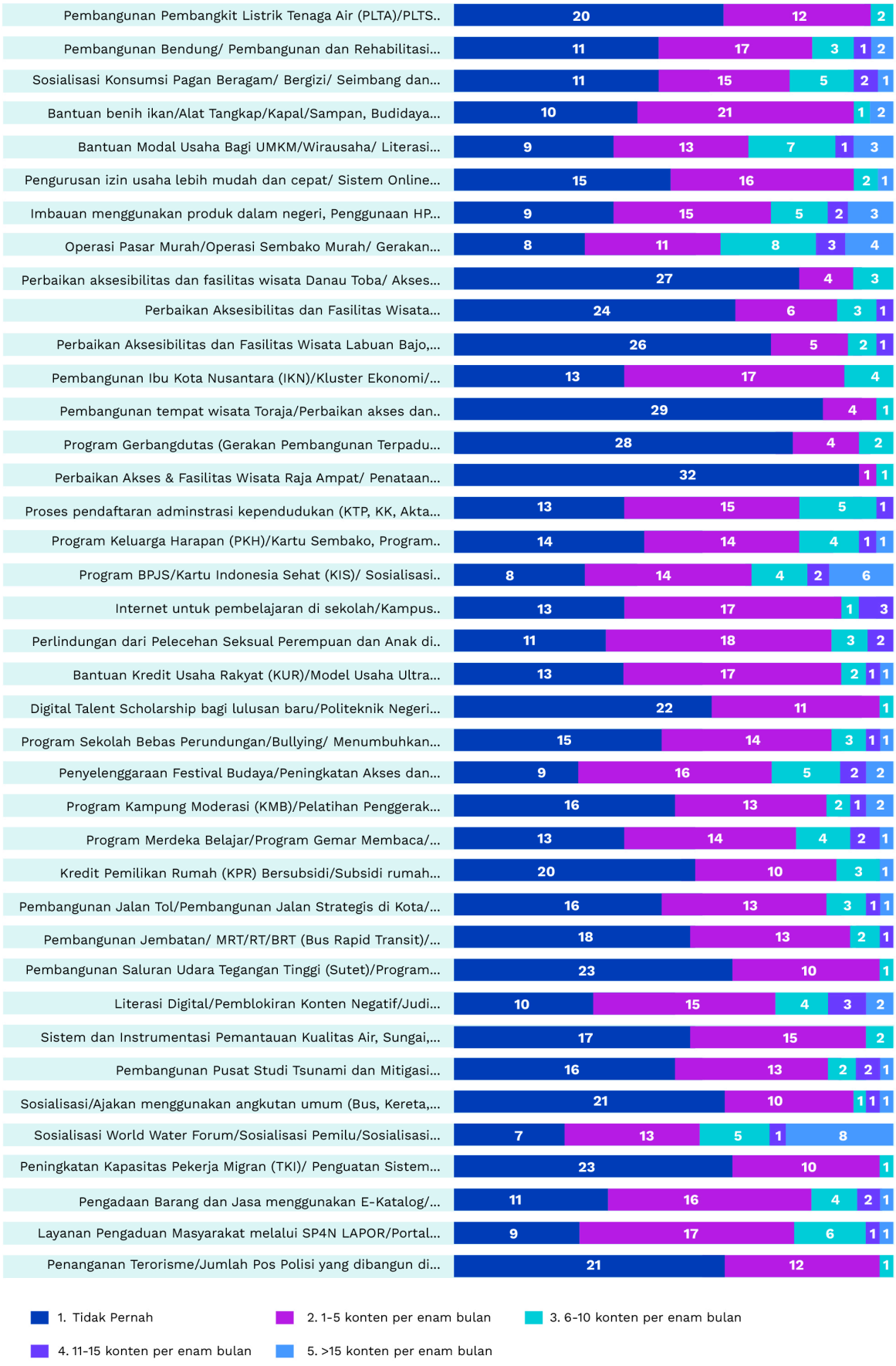


Diagram 2.27 frekuensi pembuatan bahan informasi Program Prioritas Nasional secara keseluruhan menurut Dinas Kominfo provinsi

Diagram 2.26 di atas merupakan frekuensi pembuatan bahan informasi Program Prioritas Nasional secara keseluruhan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo. Diagram tersebut menunjukan bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional yang paling banyak dibuat oleh Dinas Kominfo, antara lain Sosialisasi World Water Forum/Sosialisasi Pemilu/Sosisalisasi Pilkada. Sedangkan bahan informasi yang paling sedikit dibuat yaitu Program Perbaikan akses dan fasilitas wisata Raja Ampat/Penataan kawasan/jalan/ Penyediaan air baku dan air bersih/Pengelolaan sampah dan sanitasi/ Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan/ Pendidikan dan kualitas SDM di wilayah Papua.

Penyediaan Bahan Informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020- 2024

Indikator berikutnya yaitu Penyediaan Bahan Informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020- 2024. Diagram 2.27 di bawah ini terlihat, sebanyak 30 Dinas Kominfo menyediakan bahan informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024, namun masih ada 4 Dinas Kominfo yang tidak menyediakan bahan informasi dimaksud. Kondisi ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa belum ada kesadaran dari 4 Dinas Kominfo tersebut untuk melaksanakan tugasnya menyediakan bahan informasi untuk disebarluaskan. Hal ini perlu menjadi perhatian Dinas Kominfo.

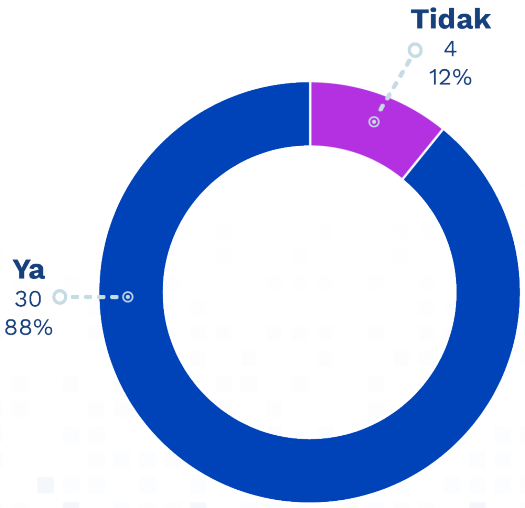


Diagram 2.28 Jumlah Dinas Kominfo yang menyediakan Bahan Informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024)

Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi tentang Program Kebijakan oleh Dinas Kominfo yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024

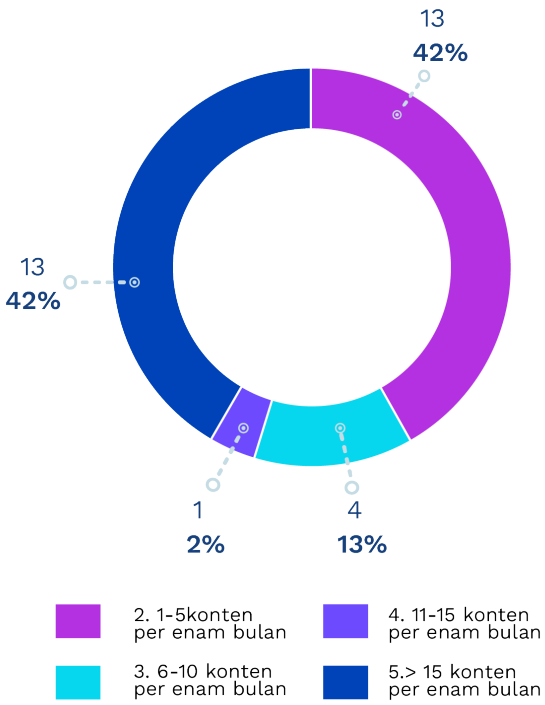


Diagram 2.29 Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi tentang Program Kebijakan oleh Dinas Kominfo yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024)

Dari diagram 2.28 di atas terlihat sebanyak 13 Dinas Kominfo (41,9%) telah menyediakan bahan informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020 – 2024 lebih dari 15 konten dalam 6 bulan. Sementara hanya ada 1 Dinas Kominfo (3,2%) yang menyediakan bahan informasi tersebut dengan frekuensi 11 – 15 konten dalam 6 bulan. Sebanyak 4 Dinas Kominfo (12,9%) lainnya menyediakan 6 – 10 konten dalam 6 bulan dan sebanyak 13 Dinas Kominfo (41,9%) menyediakan 1 – 5 konten dalam 6 bulan.

Penyediaan Bahan Informasi Selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024

Indikator lainnya dalam dimensi Input yaitu Penyediaan Bahan Informasi Selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024. Disamping menyediakan bahan informasi terkait program kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah tahun 2020 – 2024, Dinas Kominfo juga terkadang mendapat penugasan untuk menyediakan bahan informasi selain terkait Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah tahun 2020-2024, misalnya bahan informasi terkait Peringatan Hari Besar Keagamaan.

Diagram 2.29 di bawah memeperlihatkan sebanyak 28 Dinas Kominfo (82,35%) menyediakan Bahan Informasi selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024, sedangkan 6 Dinas Kominfo (17,65%) tidak menyediakan bahan informasi. Dibanding tahun sebelumnya, ada peningkatan sebanyak 7 Dinas Kominfo yang menyediakan Bahan Informasi selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024. Hal ini mengindikasikan tumbuhnya kesadaran dari Dinas Kominfo untuk melaksanakan tugasnya dalam menyebarluaskan informasi.

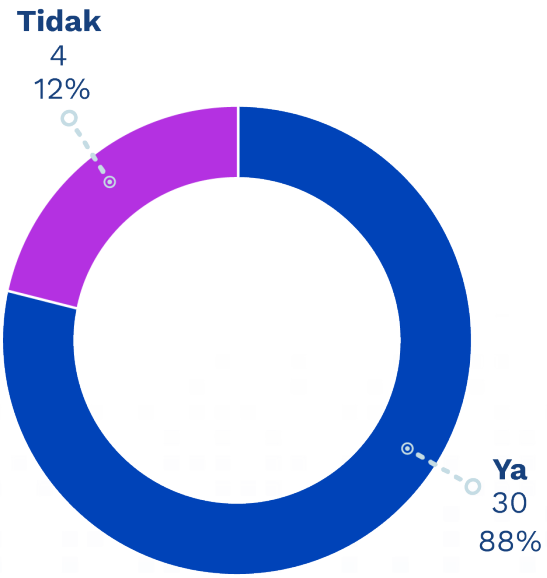


Diagram 2.30 Jumlah Dinas Kominfo yang menyediakan Bahan Informasi selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024

Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Selain Program Kebijakan yang tertuang Dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024

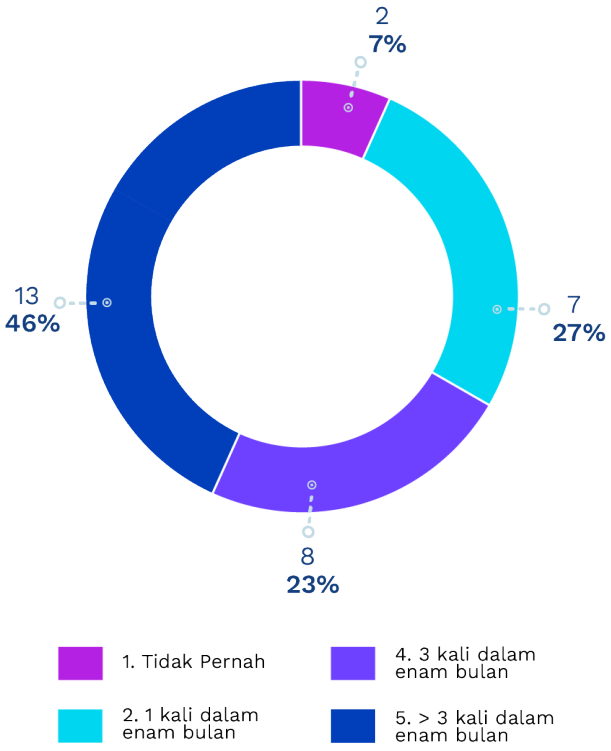


Diagram 2.31 Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Selaim Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020 - 2024

Diagram 2.31 di atas menunjukkan, dari 28 Dinas Kominfo yang menyediakan bahan informasi selain program kebijakan yang tertuang dalam Renstra Daerah Tahun 2020-2024, terdapat sebanyak 13 Dinas Kominfo (46,43%) sudah menyediakan Bahan Informasi tersebut lebih dari 6 konten dalam 6 bulan. Sementara 7 Dinas Kominfo (25%) memproduksi 3 – 4 konten dan 8 (33,33%) dinas kominfo memproduksi 1 – 2 konten.

Penyediaan Bahan Informasi hasil monitoring media oleh Dinas Kominfo

Penyediaan bahan informasi melalui monitoring media memungkinkan pengelolaan komunikasi publik yang lebih terstruktur dan terencana, dengan mengetahui tren atau topik yang sedang populer di kalangan masyarakat. Hal ini membantu instansi pemerintah dalam menyusun pesan yang relevan dan tepat waktu. Selain itu, monitoring media juga memungkinkan instansi untuk mendapatkan feedback langsung dari masyarakat berupa kritik, saran, maupun aspirasi. Informasi ini sangat penting untuk perbaikan kebijakan atau program yang sedang dijalankan.

Hasil studi ini menunjukkan sebanyak 29 Dinas Kominfo (85,3%) telah menyediakan bahan informasi hasil monitoring media dan 5 Dinas Kominfo (14,7%) tidak menyediakan bahan informasi dimaksud, seperti terlihat dalam Diagram 2.30 di bawah ini. Dibanding tahun sebelumnya, jumlah Dinas Kominfo yang menyediakan bahan informasi hasil monitoring media meningkat signifikan, dari 12 menjadi 29 Dinas Kominfo. Hal ini menunjukan bahwa mayoritas Dinas Kominfo sudah menganggap penting penyediaan bahan informasi yang berasal dari hasil monitoring media.

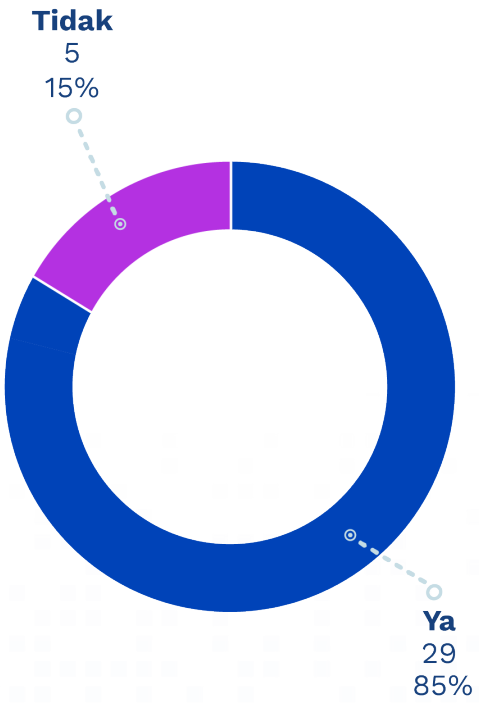


Diagram 2.32 Jumlah Dinas Kominfo yang menyediakan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media oleh Dinas Kominfo

Frekuensi penyediaan Bahan Informasi hasil Monitoring Media menurut Dinas Kominfo Tahun 2024

Frekuensi penyediaan bahan informasi hasil monitoring media yang dilakukan secara teratur memungkinkan instansi pemerintah sebagai pengelola komunikasi untuk merespon perubahan opini publik secara real-time, menghindari kesalahan komunikasi atau ketidaktahuan tentang perkembangan terbaru. Hal ini juga memungkinkan instansi untuk tidak hanya bereaksi terhadap isu yang ada, tetapi juga mengambil tindakan proaktif berdasarkan tren yang terindifikasi lebih awal.

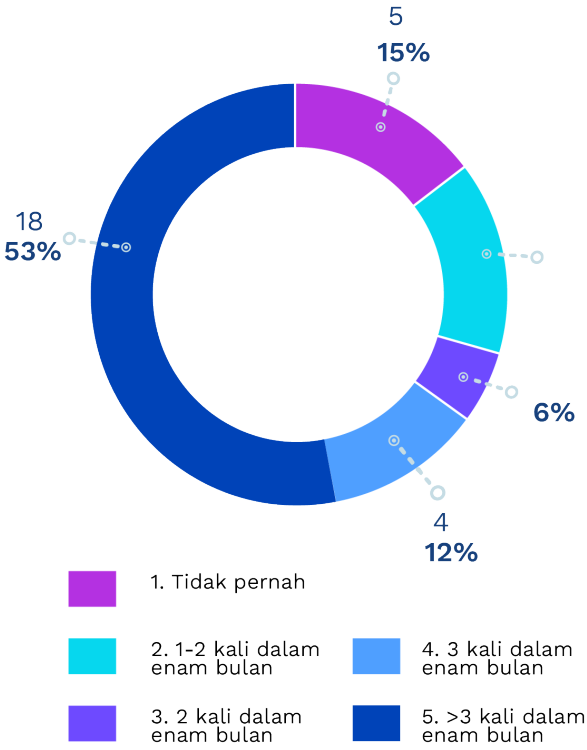


Diagram 2.33 Frekuensi penyediaan Bahan Informasi hasil Monitoring Media menurut Dinas Kominfo Tahun 2024

Diagram 2.32 di atas menunjukkan Dinas Kominfo sudah aktif dalam menyediakan bahan informasi dari hasil monitoring media. Hal ini dibuktikan dengan frekuensi konten yang diproduksi oleh 18 Dinas Kominfo (52,9%) lebih dari 3 kali dalam 6 bulan. Sementara 4 Dinas Kominfo (11,8%) memproduksi 3 kali dalam enam bulan dan 2 Dinas Kominfo (5,9%) memproduksi 2 kali dalam 6 bulan. Namun masih ada 5 Dinas (14,7%) Kominfo tidak pernah memproduksi konten dalam 6 bulan.

Penyampaian Data dan Informasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo kepada Menteri Komunikasi dan Digital

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan badan publik untuk menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Digital secara berkala.

Hasil studi tahun ini menunjukkan 19 Dinas Kominfo (55,9%) telah menyampaikan Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Digital secara berkala, namun sebanyak 15 Dinas Kominfo (44,1%) tidak menyampaikan data dan informasi tersebut, seperti tergambar dalam diagram 2.32 di bawah ini

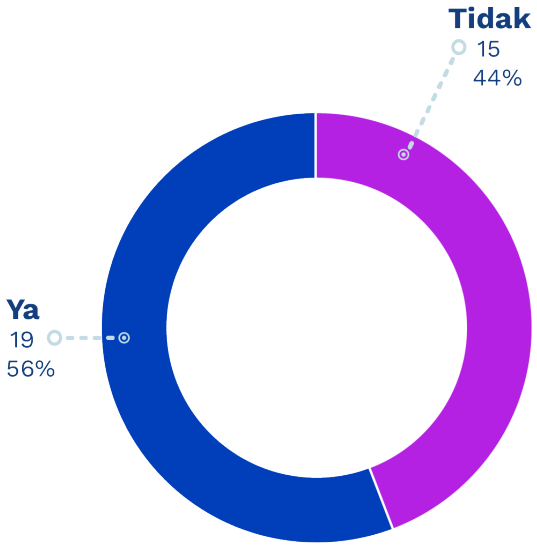


Diagram 2.34 Penyampaian Data dan Informasi terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Digital secara berkala menurut Dinas Kominfo Tahun 2024

Penerimaan Bahan Informasi (termasuk Narasi Tunggal) dari Kementerian Komunikasi dan Digital

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatkan Kementerian Komdigi untuk menyusun dan menyebarluaskan kepada publik, narasi tunggal dan data pendukung lainnya terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik, agar konten dan informasi yang diterima masyarakat dan pemerintah itu satu suara dan tidak ada perbedaan untuk kalangan manapun.

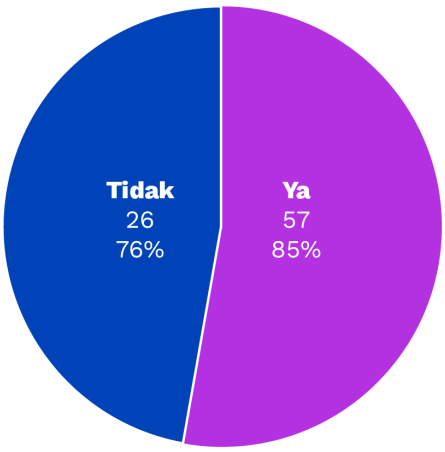


Diagram 2.35 Jumlah Dinas Kominfo yang menerima Bahan Informasi, termasuk narasi tunggal dari Kementerian Komunikasi dan Digital

Hasil studi menunjukan mayoritas Dinas Kominfo atau 31 Dinas Kominfo (91,2%) sudah menerima bahan informasi dari Kemkomdig, namun masih ada 3 (8,8%) Dinas Kominfo mengaku tidak menerima bahan informasi dimaksud. Hal ini perlu mendapat perhatian dari Kementerian Komdigi agar 3 Dinas Kominfo selanjutnya dapat menerima bahan informasi dari Kementerian Komdigi dan mendiseminasikan konten tersebut sesuai dengan tusi Dinas Kominfo.

Frekuensi Dinas Kominfo yang menerima Bahan Informasi, termasuk Narasi Tunggal dari Kementerian Komunikasi dan Digital

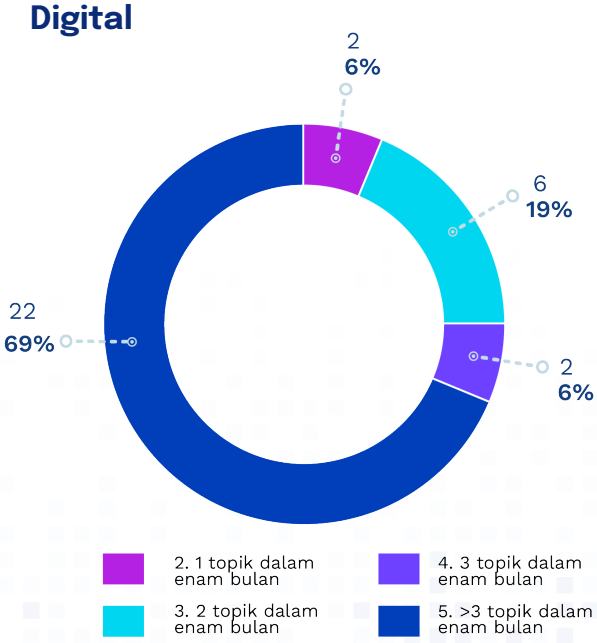


Diagram 2.36 Frekuensi Dinas Kominfo yang menerima Bahan Informasi, termasuk Narasi Tunggal dari Kementerian Komunikasi dan Digital

Diagram 2.35 di atas menunjukkan sebanyak 22 Dinas Kominfo (68,8%) menerima lebih dari 3 topik bahan informasi dalam 6 bulan. Sementara 2 Dinas Kominfo (6,3%) lainnya menerima 3 topik dalam 6 bulan dan 6 Dinas Kominfo (18,8%) menerima 2 topik dalam 6 bulan. Sedangkan 2 Dinas Kominfo (6,3%) menerima 1 topik dalam 6 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kominfo cukup intens menerima bahan informasi termasuk narasi tunggal dari Kementerian Komdigi untuk didiseminasikan ke masyarakat.



3. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai memastikan bahwa informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat baik secara fisik maupun digital. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai juga memungkinkan pelayanan publik yang lebih responsif dan interaktif bagi masyarakat. Studi ini mengukur ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas komunikasi publik oleh Dinas Kominfo dari berbagai jenis, seperti infrastruktur komunikasi dan informasi baik berbasis manual, maupun digital, infrastruktur supporting dan infrastruktur telekomunikasi. Untuk penjelasan lebih detail, berikut diagram infrastruktur yang dimiliki 34 Dinas Kominfo.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana berbasis Manual di Dinas Kominfo Tahun 2024

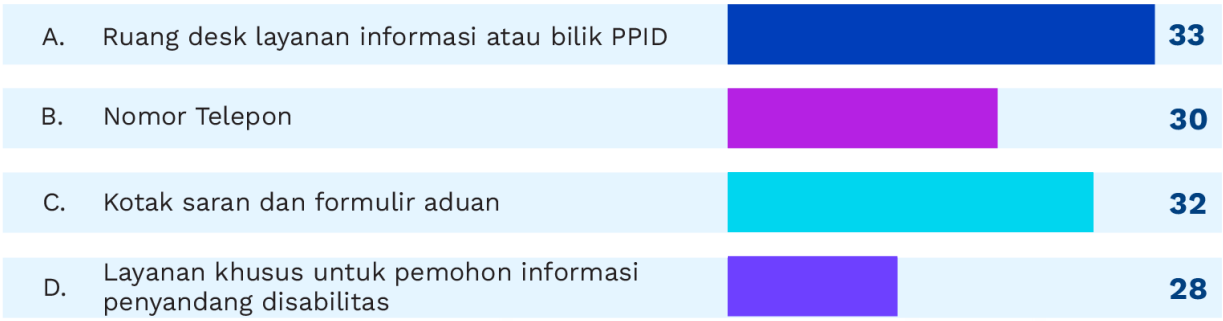


Diagram 2.37 Ketersediaan Sarana dan Prasarana berbasis Manual di Dinas Kominfo Tahun 2024

Diagram 2.36 di atas menunjukkan, mayoritas atau 33 Dinas Kominfo (97,05%) telah memiliki ruang desk layanan informasi atau bilik PPID, dan hanya 1 Dinas Kominfo (2,94%) yang tidak memiliki bilik PPID. Hal ini patut dipertanyakan karena pada tahun sebelumnya 34 Dinas Kominfo memiliki bilik PPID. Sebanyak 30 Dinas Kominfo (88,23%) memiliki nomor telepon, 32 (94,12%) Dinas Kominfo memiliki kotak saran atau formulir aduan, 28 Dinas Kominfo (82,36%) memiliki layanan khusus untuk pemohon informasi penyandang disabilitas dan sebanyak 6 Dinas Kominfo (17,65%) belum memiliki layanan khusus untuk penyandang disabilitas.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana berbasis Digital di Dinas Kominfo Tahun 2024

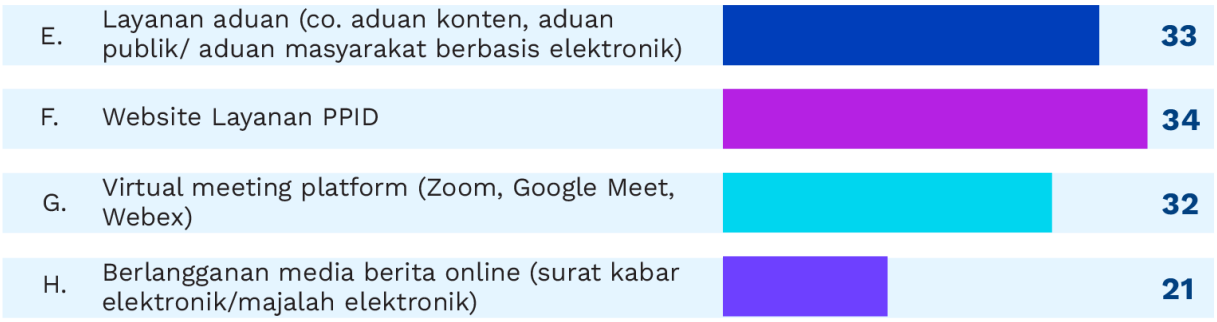


Diagram 2.38 Ketersediaan Sarana dan Prasarana berbasis Digital di Dinas Kominfo Tahun 2024

Selain sarana dan prasarana layanan yang bersifat manual, Dinas Kominfo provinsi juga memiliki sarana dan prasaran berbasis digital dengan tujuan untuk mempermudah cara kerja Dinas Kominfo dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Diagram 2.37 di atas menunjukkan bahwa 33 Dinas Kominfo (97,05%) memiliki layanan aduan berbasis elektronik, 34 Dinas Kominfo (100%) memiliki website layanan PPID, 32 Dinas Kominfo (94,12%) memiliki virtual meeting rooms platform seperti (zoom, google meet, webex) dan 21 Dinas Kominfo (61,76%) sudah berlangganan media berita online (surat kabar elektronik/majalah elektronik).

Ketersediaan Sarana dan Prasarana bersifat Supporting Kegiatan Komunikasi Publik di Dinas Kominfo Tahun 2024

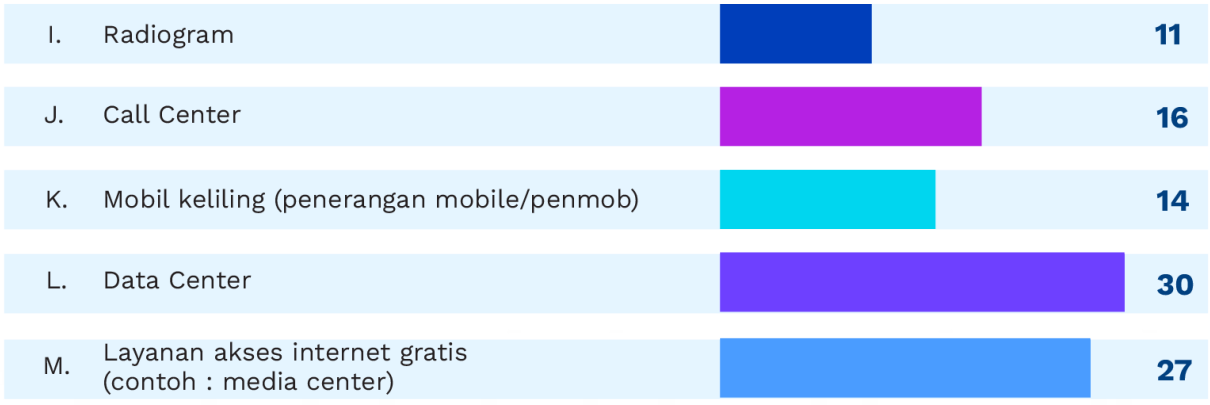


Diagram 2.39 Ketersediaan Sarana dan Prasarana bersifat Supporting Kegiatan Komunikasi Publik di Dinas Kominfo Tahun 2024

Selain sarana dan prasarana manual dan digital yang dimiliki oleh Dinas Kominfo, juga dilengkapi sarana prasarana yang bersifat supporting untuk kegiatan komunikasi publik kepada masyarakat. Diagram 2.38 di atas menunjukkan, sarana prasarana supporting yang paling banyak dimiliki oleh Dinas Kominfo yaitu data center karena sebanyak 30 Dinas Kominfo (88,23%) memiliki sarana tersebut. Selain itu, ada 11 Dinas Kominfo (32,35%) yang memiliki radiogram, 16 Dinas Kominfo (47,06%) yang memiliki call center, 14 Dinas Kominfo (41,18%) memiliki mobil keliling dan 27 Dinas Kominfo (79,42%) memiliki layanan akses internet gratis.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Telekomunikasi di Dinas Kominfo Tahun 2024



Diagram 2.40 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Telekomunikasi di Dinas Kominfo Tahun 2024

Diagram 2.39 di atas menunjukkan, 34 Dinas Kominfo (100%) sudah memiliki perangkat komputer dan router, 33 Dinas Kominfo (97,06%) sudah memiliki access point, 29 Dinas Kominfo (85,29%) memiliki broadband wireless dan 20 Dinas Kominfo (58,82%) memiliki aplikasi berbasis big data untuk memonitor media. Sementara itu 5 Dinas Kominfo (14,7%) tidak memiliki broadband wireless, 1 Dinas Kominfo (2,94%) tidak memiliki access point dan 14 Dinas Kominfo (41,18%) tidak memiliki aplikasi berbasis big data memonitor media. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua Dinas Kominfo sudah dilengkapi dengan infrastruktur telekomunikasi yang memadai, terlebih lagi teknologi telekomunikasi berkembang semakin pesat sehingga perlu mendapat perhatian bagi Dinas Kominfo yang belum memiliki infrastruktur telekomunikasi yang memadai.

Kepemilikan kebijakan teknis untuk mendukung pengelolaan IKP di Dinas Kominfo Tahun 2024

Ketersediaan kebijakan teknis untuk mendukung pengelolaan IKP memiliki manfaat penting dalam menjalankan komunikasi yang efektif antara instansi pemerintah dengan masyarakat. Kebijakan teknis mendukung transparansi dengan menetapkan prosedur yang jelas dalam pengelolaan IKP, yang membantu masyarakat untuk memahami bagaimana informasi dikelola dan disampaikan ke publik. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Hasil studi ini menunjukan, 24 Dinas Kominfo (70,6%) telah memiliki kebijakan teknis untuk mendukung pelaksanaan PIKP di Dinas Kominfo Tahun 2024. Namun masih ada 10 Dinas Kominfo (29,4%) yang tidak memiliki kebijakan teknis dimaksud.

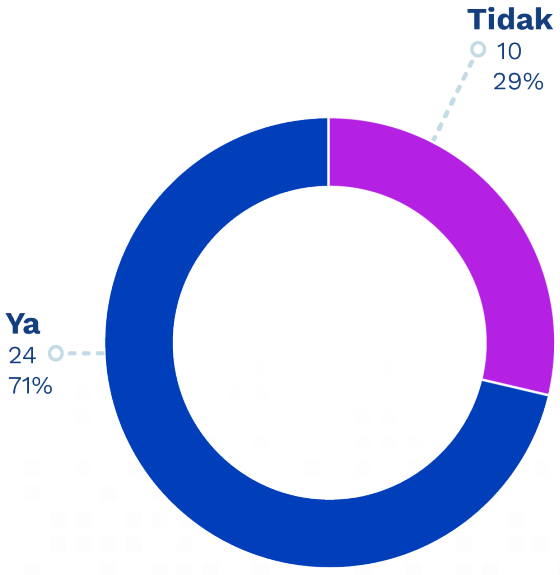


Diagram 2.41 Kepemilikan kebijakan teknis untuk mendukung pelaksanaan PIKP di Dinas Kominfo Tahun 2024

4. Media dan Saluran Komunikasi

Ketersediaan media dan saluran komunikasi yang memadai memungkinkan informasi yang disampaikan instansi pemerintah dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat. Hal ini membantu meningkatkan transparansi, memungkinkan publik untuk memahami kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pihak yang berwenang dan memperkuat akuntabilitas. Media dan saluran komunikasi baik konvensional maupun digital memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Media dan saluran komunikasi konvensional seperti televisi, radio, surat kabar dan majalah menjangkau audiens yang sangat luas, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki akses ke internat atau teknologi digital. Saat ini dengan adanya media dan saluran komunikasi digital yang berkembang pesat, informasi dapat disebarluaskan dalam waktu singkat dan langsung ke audiens yang relevan. Hal ini memungkinkan respon yang cepat terhadap isu-isu yang muncul.

Media dan Saluran Komunikasi yang dimiliki Dinas Kominfo dalam format Konvensional untuk menyampaikan informasi Program Prioritas Nasional

Media dan saluran komunikasi konvensional oleh banyak orang masih dianggap lebih kredibel dibandingkan dengan media digital yang seringkali penuh dengan informasi yang tidak terverifikasi. Karena itu media dan saluran komunikasi konvensional masih menjadi salah satu alat yang digunakan oleh Dinas Kominfo dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Diagram 2.41 di bawah ini menunjukan, sebanyak 32 Dinas Kominfo (94,12%) melaksanakan pertemuan tatap muka dengan awak media, 31 Dinas Kominfo (91,18%) melakukan pertemuan tatap muka dengan publik, 27 Dinas Kominfo (79,41%) memanfaatkan KIM (Komunitas Informasi Masyarakat sebagai media dan saluran komunikasi. Sementara itu, 22 Dinas Kominfo (64,71%) memanfaatkan media elektronik konvensional dan 15 Dinas Kominfo (44,12%) masih memanfaatkan media cetak konvensional untukm menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa mayoritas Dinas Kominfo masih memanfaatkan media dan saluran komunikasi dalam format konvensional.



Diagram 2.42 Media dan Saluran Komunikasi yang dimiliki Dinas Kominfo dalam format Konvensional untuk menyampaikan informasi Program Prioritas Nasional

Media dan Saluran Komunikasi yang dimiliki Dinas Kominfo dalam format Digital untuk menyampaikan informasi Program Prioritas Nasional

Di era digital, ketersediaan media dan saluran komunikasi dalam format digital sangat penting untuk mengoptimalkan komunikasi, meningkatkan efisiensi dan memastikan akses yang lebih luas terhadap informasi. Karena media dan saluran komunikasi dalam format digital memungkinkan penyebaran informasi yang melintasi batas negara dan waktu. Selain itu, seringkali lebih hemat biaya dibandingkan dengan media dan saluran dalam format konvensional.

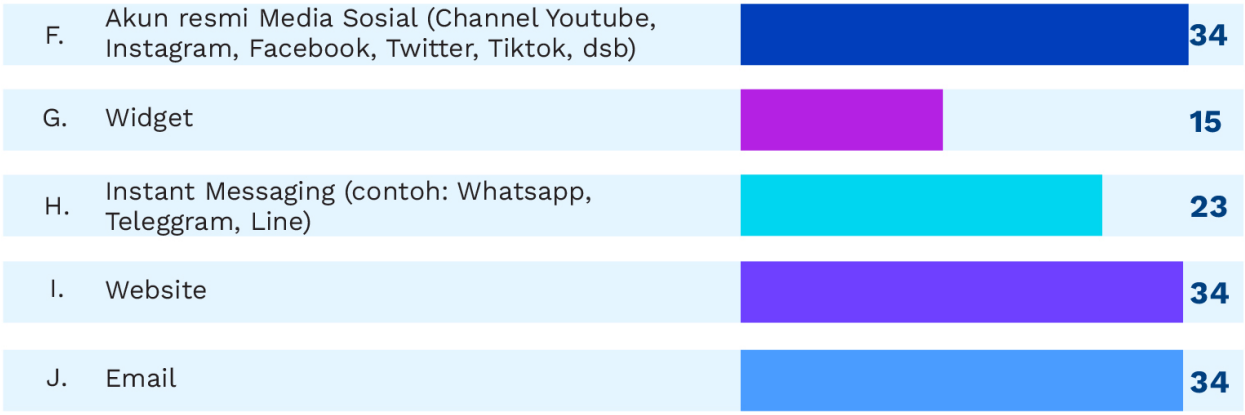


Diagram 2.43 Media dan Saluran Komunikasi yang dimiliki Dinas Kominfo dalam format digital untuk menyampaikan informasi Program Prioritas Nasional

Diagram 2.42 di atas menunjukkan, mayoritas atau 34 Dinas Kominfo (100%) sudah memiliki akun resmi media sosial (youtube, instagram, facebook, twitter, TikTok, dsb), website dan e-mail. Sedangkan 23 Dinas Kominfo (67,65%) sudah memiliki Instant Messaging dan 15 Dinas Kominfo (23,44%) sudah memiliki widget sebagai media dan saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi.

Jumlah mitra media dalam membantu diseminasi Dinas

Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat dan luas. Selain itu, media juga dapat memberikan umpan balik dari masyarakat yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan atau layanan publik. Dengan kerjasama ini, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan lebih lancar dan membangun kepercayaan publik.

Berdasarkan diagram 2.43 di samping diketahui, ada 26 Dinas Kominfo(76,5%) yang memiliki lebih dari 15 mitra media yang membantu dalam proses diseminasi informasi, sebanyak 2 Dinas Kominfo (5,9%) memiliki 11 – 15 media. Sementara 2 Dinas Kominfo lainnya (5,9%) memiliki 6 – 10 media dan 2 Dinas Kominfo (5,9%) memiliki 1 – 5 media. Sedangkan 2 Dinas Kominfo lainnya (5,9%) tidak memiliki mitra media dalam diseminasi informasi.

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas Dinas Kominfo sudah memiliki mitra media yang membantu dalam proses diseminasi informasi.

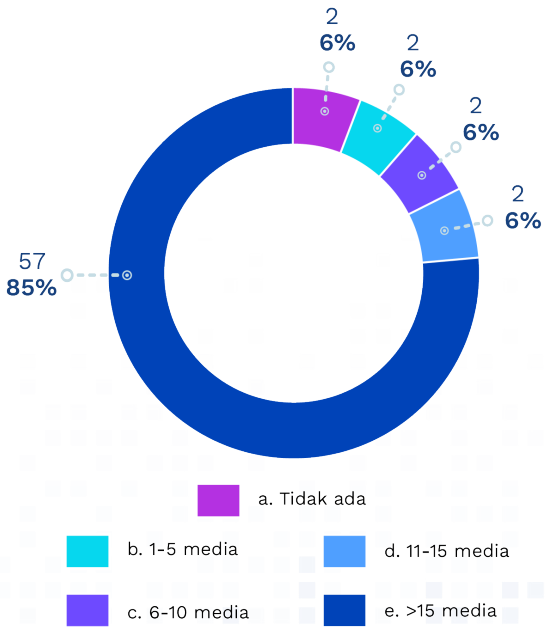


Diagram 2.44 Jumlah mitra media dalam membantu diseminasi Dinas

D. Kesimpulan Dimensi Input

Dimensi input merupakan salah satu dimensi pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diukur dalam Indeks PIKP tahun 2024. Dimensi Input diukur berdasarkan empat variabel, yaitu : (1) anggaran; (2) bahan informasi; (3) sarana dan prasarana; dan (4) media dan saluran komunikasi. Pengukuran dimensi Input berdasarkan data yang bersumber dari 67 K/L dan 34 Dinas Kominfo dengan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik tahun 2024 mencatat capaian skor rata-rata untuk dimensi input secara nasional (skor gabungan K/L dan Dinas Kominfo) sebesar 79,63 atau termasuk kategori "Baik". Skor ini lebih tinggi 2,33 poin jika dibandingkan dengan hasil studi dimensi Input tahun 2023 sebesar 77,30 (kategori "Baik"). Secara rinci masing-masing skor pada dimensi Input gabungan di Indeks PIKP tahun 2024 sebagai berikut: skor anggaran sebesar 87,98 (Sangat Baik); skor bahan informasi sebesar 65,82 (Sedang); skor vsarana dan prasarana sebesar 84,25 (Sangat Baik); dan skor variabel media dan saluran komunikasi sebesar 80,47 (Sangat Baik).

Pada tingkat pemerintah pusat, dari jumlah 67 K/L yang diukur, skor dimensi Input berdasarkan empat variabel yang diukur tersebut sebesar 80,89 atau berkategori "Sangat Baik", dengan rincian sebanyak 39 K/L yang memiliki tingkat kesiapan "Sangat Baik". Sebanyak 18 K/L dengan tingkat kesiapan "Baik". Sementara 8 K/L lainnya dengan tingkat kesiapan "Sedang" dan "Buruk" sebanyak 2. K/L Untuk pertama kali pada tahun 2024 ini tidak ada K/L yang mendapat skor di bawah 51 atau memperoleh predikat "Sangat Buruk".

Adapun 39 Instansi pemerintah pusat yang berhasil meraih kategori "Sangat Baik" pada dimensi Input, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (99,91), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (99,27) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (98,67). Kementerian Komunikasi dan Digital (93,67), Kementerian Pertanian (93,58), Kementerian Sekretariat Negara (93,43), Komisi Pemberantasan Korupsi (93,41), Lembaga Administrasi Negara (93,34), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (93,11), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (92,59), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (91,66), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (90,87), Kementerian Perdagangan (90,41), Kepolisian Republik Indonesia (90,22), Kementerian Ketenagakerjaan (89,93), Kementerian Kesehatan (89,00), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (88,71), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (87,95), Kementerian Keuangan (87,49), Badan Riset dan Inovasi Nasional (87,34), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (86,84), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (86,66), Kementerian Luar Negeri (86,11), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (86,10), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (86,03), Badan Kepegawaian Negara (85,95), Perpustakaan Nasional (85,75), Komisi Pemilihan Umum (83,84), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (83,44), Kementerian Perhubungan (83,22), Kementerian Sosial (83,21), Ombudsman (83,15), Mahkamah Konstitusi (82,37), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (81,81), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (81,78), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (81,68), Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (81,57), Komisi Yudisial (81,29), dan Kementerian Dalam Negeri (80,56).

Sementara 18 K/L yang mendapat skor dengan kategori "Baik" antara lain, Kementerian Perindustrian (79,09), Kementerian Agama, (78,87), Kementerian Hukum dan HAM (77,84), Badan Pemeriksa Keuangan (77,69), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (76,49), Arsip Nasional (76,10), Kementerian Pertahanan (75,98), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (75,84), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (75,24), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (74,51), Sekretariat Kabinet (74,50), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (74,35), Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia (74,14), Kementerian Pemuda dan Olahraga (73,06), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (71,62), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (71,35), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (71,26), dan Lembaga Ketahanan Nasional (70,30)

Selanjutnya K/L mendapat kategori "Sedang" antara lain Badan Siber dan Sandi Negara (69,29), Badan Standardisasi Nasional (69,17), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (69,06), Mahkamah Agung (68,57), Badan Narkotika Nasional (67,98), Kejaksaan Agung (62,38), Badan Keamanan Laut (61,98) dan Tentara Nasional Indonesia (61,20). Sedangkan K/L yang mendapat kategori "Buruk" yaitu Badan Pusat Statistik (54,57) dan Badan Intelijen Negara (51,11).

Tingkat kesiapan K/L dari aspek-aspek ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana serta media dan saluran komunikasi rata-rata dapat dikategorikan "Sangat Baik", dengan nilai rata-rata 80,89 yang berarti meningkat 3,85 dibanding tahun lalu sebesar 77,04. Namun, dari sisi ketersediaan bahan dan informasi, ternyata tingkat kesiapan K/L sebagian besar K/L belum baik atau masih dalam kategori "Sedang" dengan skor 66,27, sehingga upaya peningkatan kesiapan K/L dari dimensi Input masih diperlukan

khususnya dalam penyediaan bahan informasi. Dilihat dari salah satu variabel dimensi Input yaitu anggaran dengan skor di tingkat K/L sebesar 90,67, setiap K/L memiliki jumlah porsi anggaran yang berbeda untuk menangani pelayanan informasi dan kehumasan. hal ini dikarenakan ukuran dari K/L masing-masing yang berbeda-beda. Hasil studi ini menunjukkan sebanyak 92,54% KL mengalokasikan anggaran terbanyak untuk kegiatan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media.

Sedangkan alokasi anggaran yang paling sedikit oleh K/L adalah anggaran untuk manajemen komunikasi krisis, hanya 46,27% K/L. kondisi ini hampir sama dengan hasil studi tahun 2023 sebesar 40,6%. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran K/L terhadap pentingnya pengelolaan komunikasi krisis. K/L mungkin belum sepenuhnya memahami dampak potensial krisis terhadap reputasi dan kepercayaan publik. Di era media sosial, pengelolaan komunikasi krisis merupakan hal penting karena penanganan krisis membutuhkan respon yang cepat dan tepat. Krisis yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak reputasi lembaga dengan cepat dan komunikasi yang buruk saat krisis dapat menimbulkan kehilangan kepercayaan publik. Oleh karena itu pengelolaan komunikasi krisis yang didukung anggaran memadai merupakan investasi strategis yang melindungi reputasi, memastikan operasional dan menjaga kepercayaan masyakat serta pemangku kepentingan.

Pada variabel bahan informasi, dari 67 KL yang disurvei, terdapat sebanyak 60 K/L yang membuat sendiri bahan informasi terkait Program Prioritas Nasional (RKP 2024), sisanya sebanyak 7 atau 10,4% K/L tidak membuat sendiri bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional dalam rangka Pelaksanaan pelayanan informasi dan kehumasan. Dalam hal ini, bahan informasi tersebut bisa saja diproduksi K/L lain sebagai pengampu substansi. Angka ini menurun dibanding tahun 2023 sebanyak 13 K/L atau turun 54%.

Sementara itu, terdapat 7 K/L (10,4%) yang juga tidak menyediakan bahan inforrmasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L Tahun 2020 – 2024. Sedangkan terkait penyediaan bahan informasi selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L tahun 2020 – 2024, terdapat 14 atau (20.9%) K/L tidak menyediakan bahan informasi dimaksud. Penyediaan bahan informasi hasil monitoring media oleh K/L juga menjadi bagian dari variabel bahan informasi yang disurvei dalam studi ini. Temuan studi ini menunjukkan terdapat sebanyak 64 atau 95,5% K/L yang menyediakan bahan informasi hasil monitoring media, sisanya 3 K/L tidak menyediakan.

Sedangkan mengenai penyampaian data dan Informasi terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Digital secara berkala, sebanyak 29 (43,3%) K/L menyatakan menyampaikan data dan Informasi terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi kepada Menteri Kominfo. Sisanya sebanyak 38 K/L menyatakan tidak menyampaikan.

Dalam hal penerimaan bahan informasi termasuk narasi tunggal dari Kementerian Komdigi, masih ada 7 K/L yang belum menerima bahan informasi tersebut, hal ini menandakan bahwa belum semua K/L menerima narasi tunggal, padahal bahan informasi ini merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan komunikasi publik, sebagai dasar strategi komunikasi untuk didesiminasikan.

Variabel selanjutnya yaitu sarana dan prasarana dengan skor 86,15 untuk mendukung kegiatan komunikasi publik adalah dengan menyediakan ruang desk layanan informasi atau bilik PPID oleh 64 K/L, nomor telefon oleh 64 K/L, kotak saran atau formulir aduan sudah disediakan oleh 64 K/L. Namun pada penyediaan layanan khusus untuk pemohon informasi penyandang disabilitas, masih ada 5 K/L yang belum menyediakan, padahal sudah seharusnya seluruh instansi pemerintah menyediakan layanan yang bersifat inklusif, salah satunya yaitu ramah disabilitas. Ketersediaan layanan akses internet gratis oleh 60 K/L, sedangkan penyediaan data center telah dilaksanakan oleh 57 K/L. Penyediaan mobil keliling 17 K/L. Penyediaan call center 50 K/L dan radiogram 10 K/L. Penyediaan broadband wireless 58 K/L, perangkat komputer 67 K/L, Router 63 K/L, access point 60 K/L dan penyediaan aplikasi berbasis big data untuk memonitor media. Sementara kepemilikan kebijakan teknis untuk mendukung pelaksanaan PIKP di K/L tahun 2024 telah ada di 62 K/L atau 92.50%.

Variabel terakhir yaitu media dan saluran komunikasi dengan skor 80.46, media dan saluran komunikasi yang digunakan oleh K/L didominasi oleh website dan email sebanyak 67 KL, akun resmi media sosial seperti Channel Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok masing-masing instansi, 66 K/L. Penyediaan widget 30 K/L, instan messaging seperti Whatsapp, Telegram dan Line 56 K/L Namun dari media dan saluran komunikasi yang perlu ditingkatkan oleh K/L adalah fitur untuk penyandang disabilitas, mengingat penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang sama untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dijamin oleh konstitusi.

Pada tingkat Dinas Kominfo, dari jumlah 34 Dinas Kominfo, skor dimensi Input sebesar 78,37 berdasarkan variabel yang diukur tersebut, ada sebanyak 16 Dinas Kominfo yang memiliki tingkat kesiapan ”Sangat Baik”. Jumlah ini menurun dibanding tahun 2023, sebanyak 17 Dinas Kominfo. Adapun 16 Dinas Kominfo yang memiliki tingkat kesiapan ”Sangat Baik”. yaitu Banten (94,97), DKI Jakarta (92,58), Sulawesi Utara (91,55), Sumatera Utara (90,82), Bali (90.62), Riau (89,57), Jawa

Timur (87,50), Jawa Barat (87,32), Kepulauan Bangka Belitung (86,89), Jawa Tengah (86,26), Kalimantan Timur (85,93), Sulawesi Selatan (85,60), Lampung (83,51), Kalimantan Selatan (83,33), Sumatera Barat (83,16), dan Aceh (81,33).

Sementara Dinas Kominfo yang mendapat kategori ”Baik” ada sebanyak 12 instansi. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2023 lalu yang hanya 9 Dinas Kominfo. Berikut ini 12 Dinas Kominfo Provinsi dengan kategori ”Baik”, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Barat (79,38), Dinas Kominfo Provinsi Papua (78,47), Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Barat (77,97), Dinas Kominfo Provinsi Jambi (76,38), Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan (75,80), Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat (75,63), Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah (75,55), Dinas Kominfo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (75,04), Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Utara (74,41), Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara (73,59), Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah (70,57), dan Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo (70,21).

Selanjutnya, Dinas Kominfo yang mendapat kategori ”Sedang” ada sebanyak 3 instansi. Jumlah ini menurun dibanding tahun 2023 lalu yang mencapai 6 Dinas Kominfo. Adapun Dinas Kominfo yang mendapat kategori ”Sedang”, yaitu Bengkulu (68,70), Kepulauan Riau (64,17) dan Maluku (63,77). Sedangkan Dinas Kominfo yang mendapat kategori ”Buruk”, ada sebanyak 3 Dinas Kominfo. Dibanding tahun 2023 jumlah ini meningkat, dimana hanya ada 1 Dinas Kominfo yang memperoleh kategori ”Buruk” yaitu Dinas Kominfo Papua.

Adapun ke-3 Dinas Kominfo yang mendapat kategori ”Buruk” yaitu Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur (59,31), Dinas Kominfo Provinsi Maluku Utara (54,42) dan Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat (50,35).

Pada pegukuran tahun 2024 ini tidak ada Dinas Kominfo yang mendapat peringkat ”Sangat Buruk”.

Tingkat kesiapan Dinas Kominfo dari aspek aspek ketersediaan anggaran, bahan informasi, sarana dan prasarana, serta media dan saluran komunikasi, rata-rata dapat dikategorikan “Baik”, dengan nilai masing-masing relatif lebih rendah dibanding nilai yang dicapai K/L, yakni 78,37. Nilai Indeks rata-rata Dinas Kominfo untuk indikator ketersediaan anggaran sebesar 85,29 yang berarti meningkat 5,51 poin dibanding skor dimensi Input pada Indeks PIKP tahun 2023 sebesar 79,78.

Namun untuk aspek kemampuan menyediakan bahan informasi, skor yang didapat hanya 65,36 atau termasuk kategori “Sedang”. Skor ini merupakan skor terendah pada dimensi input. Kendati demikian, skor ini meningkat jika dibandingkan dengan skor penyediaan bahan informasi pada Indeks PIKP tahun 2023 yang hanya 63,03. Sementara, untuk indikator ketersediaan sarana dan prasarana tingkat kesiapan Dinas Kominfo rata-rata “Sangat Baik” atau sebesar 82,35, meski skor ini menurun jika dibandingkan dengan skor ketersediaan sarana dan prasarana pada Indeks PIKP tahun 2023 yang sebesar 83,50 dan untuk indikator ketersediaan media dan saluran komunikasi juga termasuk tingkat “Sangat Baik” atau sebesar 80,48. Skor ini menurun jika dibandingkan dengan skor media dan saluran komunikasi pada Indeks PIKP tahun 2023 sebesar 83,90.

Dengan kata lain, hasil pengukuran pada dimensi input ini menunjukkan bahwa masih diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesiapan K/L dan Dinas Kominfo dalam melaksanakan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan agar mampu mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan baik di pusat maupun di daerah.

Tabel 2.1 Capaian Indeks Dimensi Input menurut Kementerian/Lembaga

No.	Kementerian/Lembaga	Anggaran	Bahan Informasi	Sarana dan Prasarana	Media dan Saluran Komunikasi	Dimensi Input	Kategori
1.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	100,00	99,63	100,00	100,00	99,91	Sangat Baik
2.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	100,00	97,07	100,00	100,00	99,27	Sangat Baik
3.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	100,00	94,69	100,00	100,00	98,67	Sangat Baik
4.	Kementerian Komunikasi dan Digital	87,50	87,18	100,00	100,00	93,67	Sangat Baik
5.	Kementerian Pertanian	100,00	83,42	100,00	90,91	93,58	Sangat Baik
6.	Kementerian Sekretariat Negara	100,00	88,37	94,44	90,91	93,43	Sangat Baik
7.	Komisi Pemberantasan Korupsi	100,00	73,63	100,00	100,00	93,41	Sangat Baik
8.	Lembaga Administrasi Negara	100,00	88,00	94,44	90,91	93,34	Sangat Baik
9.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	100,00	72,44	100,00	100,00	93,11	Sangat Baik
10.	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	100,00	88,55	100,00	81,82	92,59	Sangat Baik
11.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100,00	90,38	94,44	81,82	91,66	Sangat Baik
12.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	100,00	83,70	88,89	90,91	90,87	Sangat Baik
13.	Kementerian Perdagangan	100,00	85,39	94,44	81,82	90,41	Sangat Baik
14.	Kepolisian Republik Indonesia	100,00	60,90	100,00	100,00	90,22	Sangat Baik
15.	Kementerian Ketenagakerjaan	100,00	68,82	100,00	90,91	89,93	Sangat Baik
16.	Kementerian Kesehatan	100,00	81,78	83,33	90,91	89,00	Sangat Baik
17.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	100,00	78,57	94,44	81,82	88,71	Sangat Baik
18.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	100,00	81,09	88,89	81,82	87,95	Sangat Baik
19.	Kementerian Keuangan	100,00	68,13	100,00	81,82	87,49	Sangat Baik
20.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	100,00	64,01	94,44	90,91	87,34	Sangat Baik
21.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	87,50	83,61	94,44	81,82	86,84	Sangat Baik
22.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	100,00	88,55	94,44	63,64	86,66	Sangat Baik
23.	Kementerian Luar Negeri	87,50	80,68	94,44	81,82	86,11	Sangat Baik
24.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	100,00	64,61	88,89	90,91	86,10	Sangat Baik
25.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	75,00	80,22	88,89	100,00	86,03	Sangat Baik
26	Badan Kepegawaian Negara	100,00	85,71	94,44	63,64	85,95	Sangat Baik
27	Perpustakaan Nasional	100,00	79,85	72,22	90,91	85,75	Sangat Baik
28	Komisi Pemilihan Umum	100,00	73,76	88,89	72,73	83,84	Sangat Baik
29	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	100,00	65,06	77,78	90,91	83,44	Sangat Baik
30	Kementerian Perhubungan	62,50	81,50	88,89	100,00	83,22	Sangat Baik
31	Kementerian Sosial	100,00	73,26	77,78	81,82	83,21	Sangat Baik
32	Ombudsman	100,00	56,32	94,44	81,82	83,15	Sangat Baik
33	Mahkamah Konstitusi	100,00	67,86	88,89	72,73	82,37	Sangat Baik
34	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	87,50	69,05	88,89	81,82	81,81	Sangat Baik
35	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100,00	67,54	77,78	81,82	81,78	Sangat Baik
36	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	100,00	56,00	88,89	81,82	81,68	Sangat Baik
37	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	75,00	65,93	94,44	90,91	81,57	Sangat Baik
38	Komisi Yudisial	75,00	61,26	88,89	100,00	81,29	Sangat Baik

39	Kementerian Dalam Negeri	100,00	64,15	94,44	63,64	80,56	Sangat Baik
40	Kementerian Perindustrian	100,00	54,76	88,89	72,73	79,09	Baik
41	Kementerian Agama	100,00	30,13	94,44	90,91	78,87	Baik
42	Kementerian Hukum dan HAM	100,00	69,96	77,78	63,64	77,84	Baik
43	Badan Pemeriksa Keuangan	100,00	42,08	77,78	90,91	77,69	Baik
44	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	87,50	44,23	83,33	90,91	76,49	Baik
45	Arsip Nasional	75,00	60,71	77,78	90,91	76,10	Baik
46	Kementerian Pertahanan	100,00	62,50	77,78	63,64	75,98	Baik
47	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	87,50	63,32	88,89	63,64	75,84	Baik
48	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	87,50	83,15	66,67	63,64	75,24	Baik
49	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	75,00	52,34	88,89	81,82	74,51	Baik
50	Sekretariat Kabinet	87,50	89,29	66,67	54,55	74,50	Baik
51	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	87,50	72,02	83,33	54,55	74,35	Baik
52	Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia	87,50	47,44	88,89	72,73	74,14	Baik
53	Kementerian Pemuda dan Olahraga	100,00	38,19	72,22	81,82	73,06	Baik
54	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS	75,00	64,51	83,33	63,64	71,62	Baik
55	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100,00	36,90	66,67	81,82	71,35	Baik
56	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	87,50	87,45	55,56	54,55	71,26	Baik
57	Lembaga Ketahanan Nasional	75,00	66,80	66,67	72,73	70,30	Baik
58	Badan Siber dan Sandi Negara	75,00	37,00	83,33	81,82	69,29	Sedang
59	Badan Standardisasi Nasional	75,00	67,86	61,11	72,73	69,17	Sedang
60	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	75,00	59,84	77,78	63,64	69,06	Sedang
61	Mahkamah Agung	87,50	25,18	88,89	72,73	68,57	Sedang
62	Badan Narkotika Nasional	75,00	46,43	77,78	72,73	67,98	Sedang
63	Kejaksaan Agung	62,50	7,23	88,89	90,91	62,38	Sedang
64	Badan Keamanan Laut	62,50	46,02	66,67	72,73	61,98	Sedang
65	Tentara Nasional Indonesia	87,50	21,43	72,22	63,64	61,20	Sedang
66	Badan Pusat Statistik	62,50	21,43	88,89	45,45	54,57	Buruk
67	Badan Intelijen Negara	62,50	40,93	55,56	45,45	51,11	Buruk
Nasional 2024		90,67	66,27	86,15	80,46	80,89	Sangat Baik

Tabel 2.2 Capaian Indeks Dimensi Input menurut Kementerian/Lembaga

No.	Provinsi	Anggaran	Bahan Informasi	Sarana dan Prasarana	Media dan Saluran Komunikasi	Dimensi Input	Kategori
1.	Banten	100,00	85,44	94,44	100,00	94,97	Sangat Baik
2.	DKI Jakarta	100,00	96,06	83,33	90,91	92,58	Sangat Baik
3.	Sulawesi Utara	100,00	66,21	100,00	100,00	91,55	Sangat Baik
4.	Sumatera Utara	87,50	81,32	94,44	100,00	90,82	Sangat Baik
5.	Bali	100,00	80,68	100,00	81,82	90,62	Sangat Baik
6.	Riau	100,00	72,94	94,44	90,91	89,57	Sangat Baik
7.	Jawa Timur	87,50	82,69	88,89	90,91	87,50	Sangat Baik
8.	Jawa Barat	100,00	78,57	88,89	81,82	87,32	Sangat Baik
9.	Kepulauan Bangka Belitung	75,00	87,23	94,44	90,91	86,89	Sangat Baik
10.	Jawa Tengah	100,00	70,79	83,33	90,91	86,26	Sangat Baik
11.	Kalimantan Timur	100,00	78,57	83,33	81,82	85,93	Sangat Baik
12.	Sulawesi Selatan	87,50	89,74	83,33	81,82	85,60	Sangat Baik
13.	Lampung	87,50	72,30	83,33	90,91	83,51	Sangat Baik
14.	Kalimantan Selatan	87,50	66,03	88,89	90,91	83,33	Sangat Baik
15.	Sumatera Barat	100,00	82,14	77,78	72,73	83,16	Sangat Baik
16.	Aceh	87,50	61,54	94,44	81,82	81,33	Sangat Baik
17.	Kalimantan Barat	87,50	70,42	77,78	81,82	79,38	Baik
18.	Papua	62,50	62,50	88,89	100,00	78,47	Baik
19.	Sulawesi Barat	62,50	73,12	94,44	81,82	77,97	Baik
20.	Jambi	75,00	65,38	83,33	81,82	76,38	Baik
21.	Sumatera Selatan	87,50	56,09	77,78	81,82	75,80	Baik
22.	Nusa Tenggara Barat	75,00	89,65	83,33	54,55	75,63	Baik
23.	Sulawesi Tengah	87,50	57,14	66,67	90,91	75,55	Baik
24.	Daerah Istimewa Yogyakarta	75,00	63,55	88,89	72,73	75,04	Baik
25.	Kalimantan Utara	87,50	65,20	72,22	72,73	74,41	Baik
26	Sulawesi Tenggara	75,00	59,75	77,78	81,82	73,59	Baik
27	Kalimantan Tengah	87,50	55,40	66,67	72,73	70,57	Baik
28	Gorontalo	62,50	64,29	72,22	81,82	70,21	Baik
29	Bengkulu	87,50	7,51	88,89	90,91	68,70	Sedang
30	Kepulauan Riau	87,50	47,99	66,67	54,55	64,17	Sedang
31	Maluku	75,00	44,23	72,22	63,64	63,77	Sedang
32	Nusa Tenggara Timur	75,00	37,50	61,11	63,64	59,31	Buruk
33	Maluku Utara	75,00	36,13	61,11	45,45	54,42	Buruk
34	Papua Barat	75,00	14,29	66,67	45,45	50,35	Buruk
Nasional 2024		85,29	65,36	82,35	80,48	78,37	Baik

2.2. Dimensi Proses

A. Pengantar

Pengukuran Dimensi Proses K/L dalam Indeks PIKP tahun 2024 ini dilakukan terhadap empat variabel, yaitu: (1) pengumpulan data dalam rangka perencanaan program; (2) perencanaan; (3) pelaksanaan; (4) monitoring dan evaluasi; serta (5) variabel tambahan.

Variabel pengumpulan data dalam rangka perencanaan program terdiri dari tiga indikator, yaitu (a). frekuensi pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal, (b).frekuensi pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik (termasuk monitoring isu publik, aduan masyarakat), dan (c). frekuensi pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset dari organisasi atau instansi lain.

Variabel kedua, yakni perencanaan, terdiri dari lima indikator, yaitu (a). frekuensi rapat koordinasi internal (dengan unit kerja di lingkungan K/L) selama Juli - Desember 2023 dalam rangka perencanaan program kegiatan tahun 2024, (b). frekuensi rapat koordinasi eksternal (dengan instansi di luar Kementerian/Lembaga), (c). kepemilikan dokumen perencanaan program/kegiatan tahunan untuk tahun 2024 (contoh: proposal, TOR, RAB, Program Kerja Tahunan/RKP) baik dalam bentuk *hard copy* maupun soft copy, (d). perencanaan kegiatan komunikasi publik di unit kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan dengan memperhatikan kebutuhan informasi kelompok masyarakat pada segmen khusus (penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak-anak, dan kelompok masyarakat lainnya), (e). perencanaan kegiatan komunikasi publik di Unit Kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan dengan memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen publik di wilayah: 3T, pedesaan, perkotaan, dan lainnya.

Variabel ketiga, yakni pelaksanaan program/kegiatan, terdiri dari 9 indikator: (a) kegiatan penyebarluasan informasi Program Prioritas Nasional 2024, (b) penyebarluasan narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah dari Kementerian Komdigi, (c) jumlah koordinasi dengan Kementerian Komdigi dalam rangka Penyebarluasan Informasi, (d) frekuensi kegiatan penyampaian informasi kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat melalui saluran atau media baik konvensional maupun digital, (e) frekuensi kegiatan kerjasama antara Unit Kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan dengan unit kerja internal K/L, (f) kegiatan kerjasama dengan instansi eksternal K/L dalam rangka Penyebarluasan Informasi, (g) frekuensi pelaksanaan kegiatan komunikasi publik terkait UU Nomor 14 Tahun 2008, (h) kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat (kelompok masyarakat: penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak-anak, dll), (i) kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen publik di wilayah 3T, pedesaan, perkotaan, dan wilayah lainnya.

Variabel keempat, monitoring dan evaluasi (Januari - Juni 2024), terdiri dari tiga indikator, yaitu (a) kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/ kegiatan Unit Kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan, (b) kegiatan monitoring dan evaluasi media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan Unit Kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan, dan (c) frekuensi pembuatan dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan valuasi pelaksanaan program/kegiatan" Unit Kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan.

Variabel tambahan pada survei indeks PIKP tahun 2024 ini melihat dari: (1) frekuensi Kementerian/ Lembaga menghasilkan program inovasi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik selama Januari - Juni 2024, (2) frekuensi individu/lembaga Unit Kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan Kementerian/Lembaga ini mendapatkan penghargaan di bidang Kehumasan dalam lima tahun terakhir (2019-2024).

Hasil studi Indeks PIKP Tahun 2024 menunjukkan bahwa skor dimensi Proses pada K/L berada di angka 64,85 atau kategori "Sedang" (skor 61–70). K/L yang tercatat memiliki skor tertinggi pada dimensi Proses yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan perolehan skor sebesar 94,36. Sementara, K/L yang tercatat memiliki skor terendah pad"a dimensi Proses, yaitu Tentara Nasional Indonesia, dengan perolehan skor hanya 18,20 ("Sangat Buruk").

Untuk instansi Dinas Kominfo, perolehan skor untuk dimensi Proses sebesar 60,77 (kategori "Sedang"). Dinas Kominfo DKI Jakarta tercatat memiliki skor tertinggi dengan perolehan angka 91,82 atau berkategori "Sangat Baik". Sementara, Dinas Kominfo Papua Barat tercatat memiliki skor terendah dengan perolehan angka 15,57 atau berkategori "Sangat Buruk". Penjelasan rinci terkait hasil penghitungan Indeks untuk dimensi Proses di tingkat K/L dan DisKominfo Provinsi disajikan dalam uraian berikut.

B. Capaian Indeks untuk Dimensi Proses di Tingkat Kementerian/ Lembaga

1. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi dalam pengelolaan IKP memiliki urgensi yang penting karena data yang akurat dan terkini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat oleh pemerintah. Tanpa data yang jelas, kebijakan atau strategi komunikasi publik yang dilaksanakan bisa kurang efektif atau bahkan salah sasaran. Selain itu, pengumpulan data yang transparan dan terbuka dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan IKP karena Masyarakat dapat memantau dan menilai kebijakan atau program yang dijalankan.

Nilai indeks Pengumpulan Data dan Informasi di tingkat Kementerian dan Lembaga (K/L) secara nasional sebesar 64,43 (“Sedang”). Hal ini menunjukkan bahwa, belum semua K/L yang disurvei telah melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi dalam proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Padahal data dan informasi yang dikumpulkan ini akan menjadi dasar dalam perencanaan program/ kegiatan komunikasi publik.

Pengumpulan Data dan Informasi dengan melibatkan Instansi Eksternal

Pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal memiliki beberapa urgensi yang signifikan, antara lain mendapatkan perspektif yang lebih luas, akses ke data yang lebih lengkap dan terkini, peningkatan akurasi dan kredibilitas data serta memperluas jangkauan pengumpulan data.

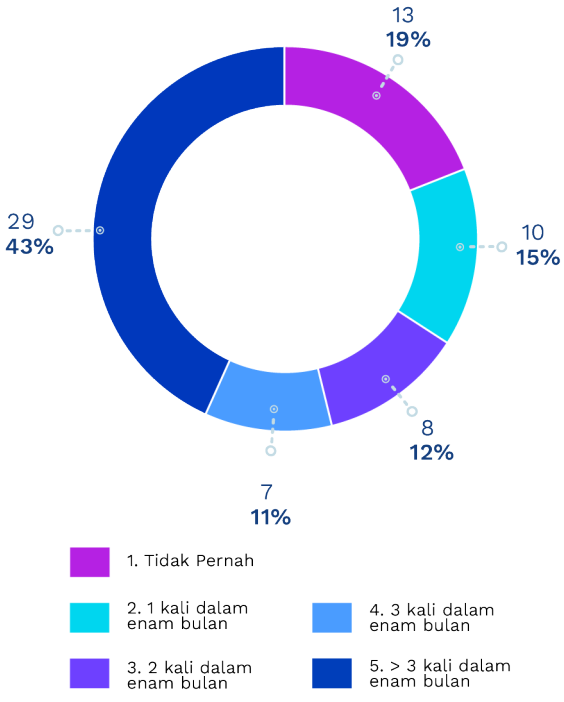
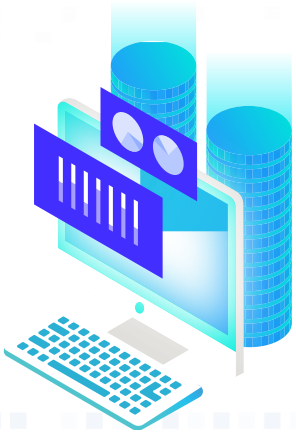
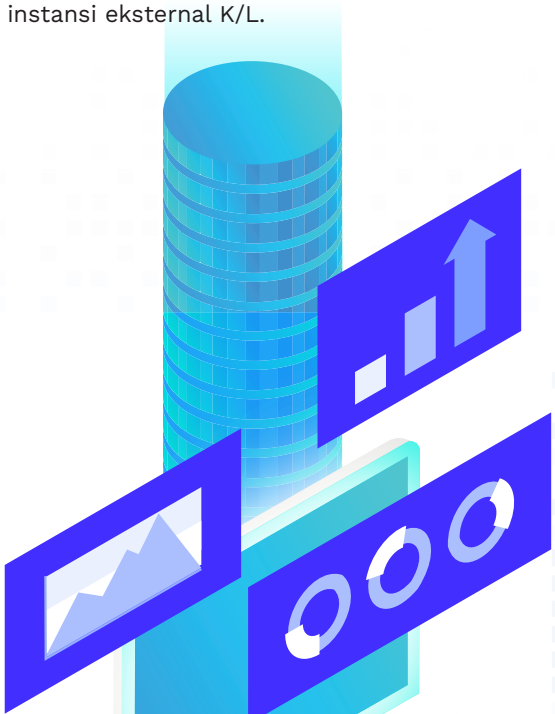


Diagram 2.45 Pengumpulan Data dan Informasi dengan melibatkan Instansi Eksternal menurut K/L

Temuan pada survei ini menunjukkan, dari 67 K/L yang diukur, sebesar 43,3% atau 29 K/L melakukan pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal lebih dari 3 kali dalam 6 bulan. Sebesar 14,9% atau 10 K/L melakukan pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal 1 kali dalam 6 bulan. Sementara 11,9% atau 8 K/L melakukan kegiatan tersebut minimal dua kali dalam enam bulan. Sedangkan 10,4% atau 7 K/L melakukan pengumpulan data ini minimal 3 kali dalam enam bulan. Namun masih ada 13 K/L atau 19,4% yang tidak pernah sama sekali pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal K/L. Dari hasil studi ini dapat diketahui bahwa belum semua K/L melaksanakan pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal K/L.





Pengumpulan Data dan Informasi melalui Penyerapan Aspirasi Publik

Pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik penting dilaksanakan dalam pengelolaan IKP karena data dan informasi yang diperoleh dari aspirasi publik membantu instansi pemerintah untuk merancang program dan kebijakan yang lebih relevan dan efektif, sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, proses pengumpulan data melalui aspirasi publik membantu memastikan bahwa kebijakan dan Keputusan yang diambil transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat.

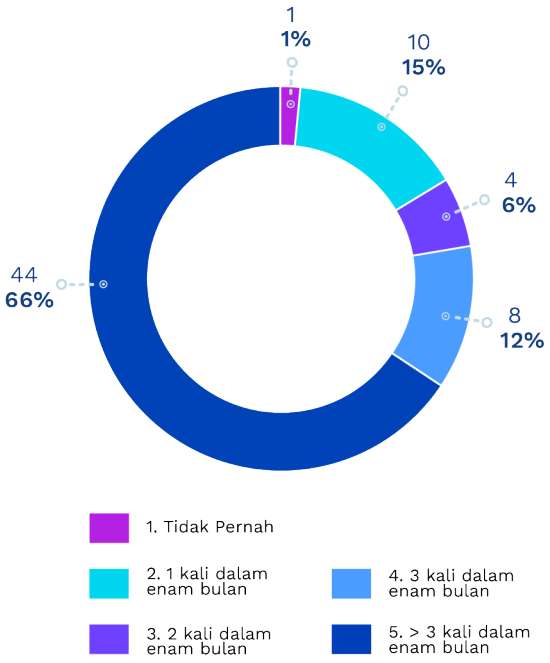


Diagram 2.46 Pengumpulan Data dan Informasi melalui Penyerapan Aspirasi Publik menurut K/L

Hasil survei indeks ini menunjukkan ada 44 K/L atau 65,7% yang melakukan pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik lebih dari 3 kali dalam 6 bulan. Sedangkan masih ada 1 K/L atau 1,5% yang tidak pernah mengumpulkan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik dalam pengelolaan IKP. Temuan ini menandakan mayoritas K/L melakukan pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik minimal tiga kali dalam enam bulan dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang sudah mengakomodir aspirasi masyarakat.

Pengumpulan Data dan Informasi menggunakan Hasil Riset dari Organisasi atau Instansi lain

Pengumpulan data dan informasi menggunakan hasil riset dari organisasi atau instansi lain memiliki manfaat yang signifikan karena data dan informasi yang dikumpulkan dari riset eksternal dapat memperkaya keputusan yang diambil, terutama jika riset tersebut didukung oleh metodologi yang kuat dan kredibel. Hal ini dapat menghasilkan kebijakan atau Solusi yang lebih tepat dab berbasis bukti.

Selain itu pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset dari berbagai sumber dapat mengurangi bias yang mungkin terjadi jika hanya mengandalkan riset internal. Sumber data yang beragam dapat membantu memastikan bahwa kebijakan atau keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang objektif dan komprehensif.

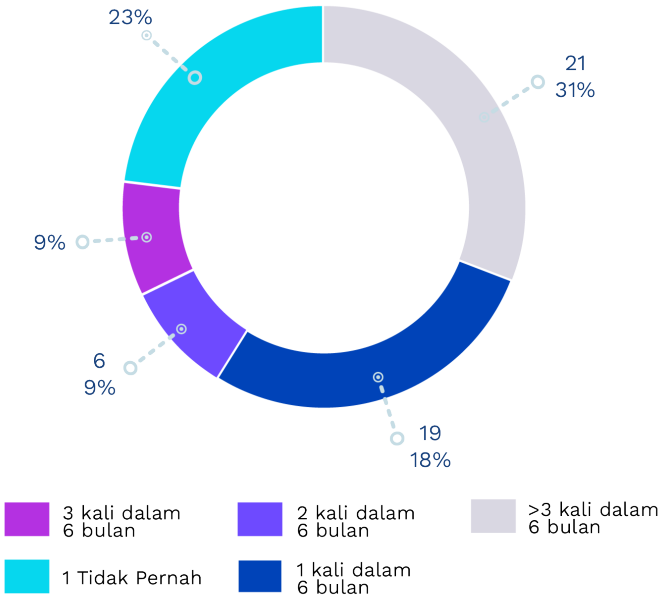


Diagram 2.47 Pengumpulan Data dan Informasi menggunakan Hasil Riset dari Organisasi atau Instansi lain menurut K/L

Temuan studi ini menunjukkan, dari 67 K/L yang diukur, sebanyak 19 K/L atau 28,4% tidak pernah melakukan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset dari organisasi atau instansi lain minimal sekali dalam enam bulan. Namun ada juga beberapa K/L yang mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset dari organisasi/instansi lain lebih dari 3 kali dalam waktu

6 bulan, sebanyak 21 K/L atau 31,3%. Temuan ini menandakan, meskipun proses ini dilaksanakan dalam menentukan tujuan komunikasi, namun frekuensinya masih rendah. Padahal proses ini penting dilakukan agar data dan informasi yang akan digunakan valid dan berkualitas baik.

2. Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaan IKP sangat penting untuk mewujudkan komunikasi yang efektif, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang matang membantu memastikan pesan yang disampaikan jelas, tepat sasaran, dan mudah dipahami oleh audiens yang berbeda. Tanpa perencanaan, komunikasi bisa jadi kurang fokus, dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan.

Karena itu perencanaan komunikasi publik yang baik sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu, yang hanya bisa dicapai melalui komunikasi yang terencana dengan baik.

Pada tahap perencanaan program/kegiatan, pengukuran variabel difokuskan pada lima indikator, yaitu jumlah pelaksanaan rapat koordinasi internal, jumlah rapat koordinasi dengan pihak eksternal, kepemilikan dokumen perencanaan program/kegiatan tahunan, dan perencanaan yang meiagrammperhatikan kebutuhan informasi pada khususnya segmen kelompok masyarakat (penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak-anak, dan kelompok masyarakat lainnya). Selain itu indikator lainnya adalah perencanaan Program/Kegiatan yang memperhatikan kebutuhan informasi kewilayahan menurut K/L di wilayah: pedesaan, perkotaan, dan lainnya.

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Internal untuk Tujuan Perencanaan Program/ Kegiatan

Rapat koordinasi internal ini merupakan suatu kegiatan *transfer of knowledge* antar unit kerja instansi untuk menggali informasi yang lebih komprehensif dan valid dalam perencanaan program/ kegiatan. Diharapkan, dari kegiatan ini, tergambar isu-isu yang mengemuka terkait pelaksanaan teknis urusan pemerintahan di masing-masing instansi

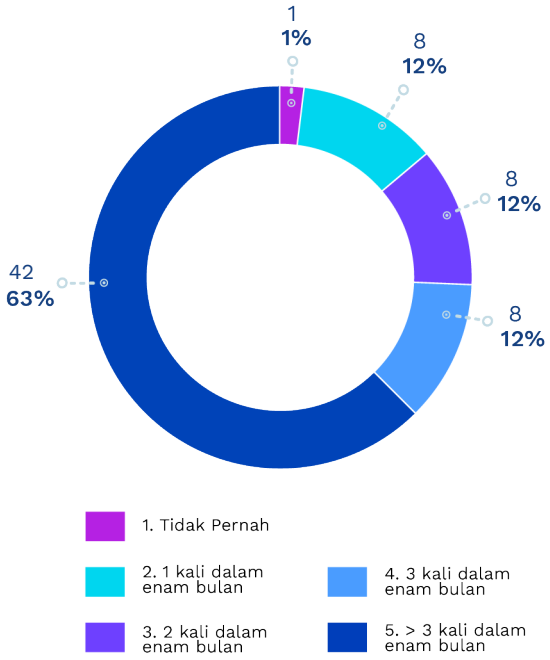


Diagram 2.48 Pengumpulan Data dan Informasi menggunakan Hasil Riset dari Organisasi atau Instansi lain menurut K/L

Berdasarkan hasil studi ini diketahui dari 67 K/L yang disurvei, sebanyak 42 K/L atau 62,7% sudah melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka perencanaan komunikasi lebih dari 3 kali dalam 6 bulan. Sementara 8 K/L atau sebanyak 11,9% melaksanakannya 3 kali dalam 6 bulan. Namun masih terdapat 1 K/L yang tidak pernah mengadakan rapat koordinasi internal dalam rangka perencanaan program/kegiatan.

Frekuensi Rapat Koordinasi Eksternal untuk Tujuan Perencanaan Program/ Kegiatan

Selain melaksanakan rapat koordinasi internal, kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan K/L juga melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak eksternal di luar K/L untuk mewujudkan koordinasi, kerjasama dan/atau kolaborasi yang baik dalam pelaksanaan program/ kegiatan para pihak.

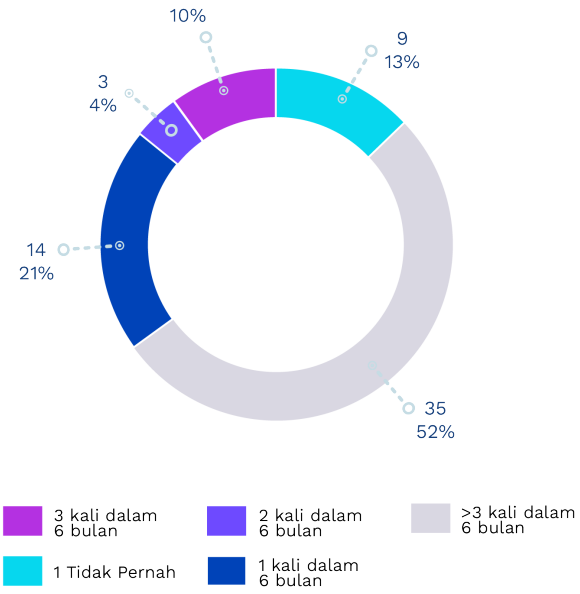


Diagram 2.49 Proporsi K/L menurut Frekuensi Rapat Koordinasi Eksternal untuk Tujuan Perencanaan Program/Kegiatan

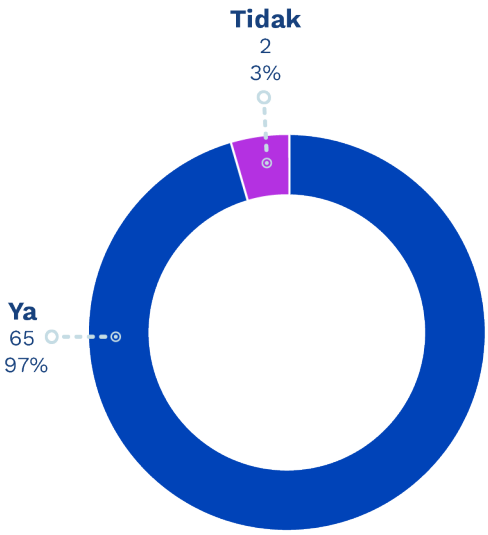


Diagram 2.50 Ketersediaan dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Tahun 2024 menurut K/L

Berdasarkan diagram 2.48 diatas diketahui, sebanyak 35 K/L atau 52,2% telah melakukan rapat koordinasi eksternal untuk merencanakan kegiatan komunikasi publik lebih dari 3 kali dalam 6 bulan dan 14 K/L atau 20,9% melaksanakan satu kali dalam enam bulan. Sementara masih ada 9 K/L atau 13,4% yang tidak pernah melakukan rapat tersebut untuk perencanaan program/ kegiatan

Ketersediaan dokumen "Perencanaan Program/Kegiatan Tahun 2024

Indikator ketiga dari variabel perencanaan adalah Ketersediaan dokumen "Perencanaan Program/ Kegiatan Tahun 2024" (dokumen proposal, TOR, RAB maupun Program Kerja Tahunan) dalam bidang pelayanan informasi dan kehumasan K/L.

Ketersediaan dokumen Perencanaan Program/ Kegiatan sangat penting dalam pengelolaan IKP karena dokumen perencanaan program/kegiatan memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai, sasaran audiens, serta pesan-pesan kunci yang perlu disampaikan. Dengan memiliki dokumen ini, kegiatan komunikasi publik dapat dilakukan secara terarah dan sesuai dengan prioritas pemerintah atau organisasi.

Data hasil survei ini menunjukkan 65 K/L atau 97% telah memiliki dokumen tersebut dan hanya ada 2 K/L atau 3% yang tidak memiliki memiliki dokumen tersebut.

Perencanaan yang memperhatikan kebutuhan informasi pada khususnya segmen kelompok Masyarakat

Perencanaan yang memperhatikan kebutuhan informasi khusus pada segmen kelompok masyarakat sangat penting dalam pengelolaan IKP karena setiap segmen masyarakat memiliki kebutuhan informasi, preferensi media, dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Dengan memahami kebutuhan spesifik mereka, informasi yang disampaikan dapat lebih relevan, mudah dipahami, dan berdampak pada perubahan sikap atau perilaku yang diinginkan.

Karena itu Indikator lainnya dalam perencanaan program/kegiatan adalah perencanaan kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada khususnya segmen kelompok masyarakat: penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan lainnya. Dalam konteks ini, diharapkan dokumen perencanaan program/ kegiatan komunikasi publik yang disusun oleh K/L dapat menjadi alternatif solusi penyebaran informasi

bagi kelompok masyarakat tersebut. Hal ini penting dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan di K/L dalam rangka pemenuhan hak warga negara atas informasi publik yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia tahun 1945.

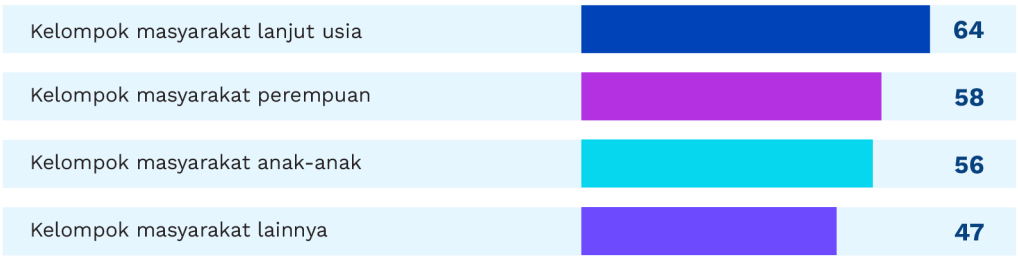


Diagram 2.51 Proporsi K/L menurut Perencanaan Program/ Kegiatan yang memperhatikan kebutuhan informasi kelompok masyarakat (Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Perempuan, Anak-Anak dan Lainnya)

Dari hasil studi ini dapat diketahui sebanyak 64 K/L (95,52%) telah memperhatikan kebutuhan informasi pada kelompok masyarakat lanjut usia, 58 K/L (86,57%) telah memperhatikan kelompok masyarakat anak-anak, sebanyak 56 K/L (83,48%) telah memperhatikan kebutuhan kelompok masyarakat perempuan, dan sebanyak 47 (70,15%) K/L telah memperhatikan kelompok masyarakat lainnya dalam menyusun dokumen perencanaan program/ kegiatan komunikasi publik.

Perencanaan yang Memperhatikan Kebutuhan Informasi Segmen Publik di Wilayah

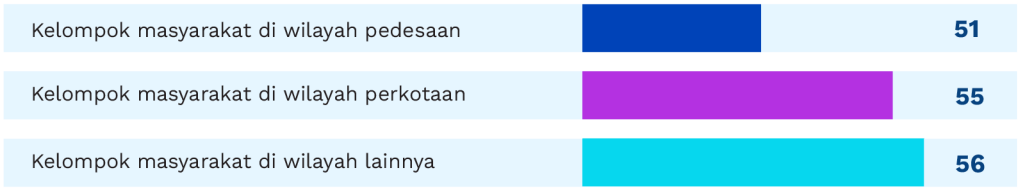


Diagram 2.52 Proporsi Perencanaan Program/Kegiatan yang memperhatikan kebutuhan informasi kewilayahan menurut K/L – cek persentase

Dalam melakukan perencanaan kegiatan komunikasi publik Unit Kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan K/L perlu memperhatikan kebutuhan informasi pada khususnya segmen publik di wilayah: pedesaan, perkotaan, dan lainnya. Dari hasil survei indeks PIKP K/L ini didapatkan data sebanyak 56 K/L (83,48%) telah memperhatikan kebutuhan informasi pada wilayah lainnya, 55% K/L (82,09%) telah memperhatikan kebutuhan informasi pada wilayah perkotaan, dan 51 K/L (76,12%) telah memperhatikan kebutuhan informasi pada wilayah pedesaan.



3. Pelaksanaan

Dimensi Proses dalam Indeks ini juga diukur dari variabel pelaksanaan kegiatan IKP, khususnya pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2024.Variabel ini terdiri dari sembilan indikator yaitu (1) kegiatan-kegiatan diseminasi informasi tentang program prioritas nasional, (2) penyebarluasan narasi tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah dari Kementerian Komdigi kepada publik, (3) koordinasi dengan Kementerian Komdigi dalam rangka penyebarluasan informasi periode Januari - Juni 2024, (4) diseminasi informasi kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat melalui saluran atau media, (5) kerjasama kegiatan IKP dengan pihak internal K/L, (6) kerjasama kegiatan IKP dengan pihak eksternal K/L, (7) kegiatan komunikasi publik terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik, (8) kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat, dan yang terakhir (9) kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi segmen publik di wilayah.

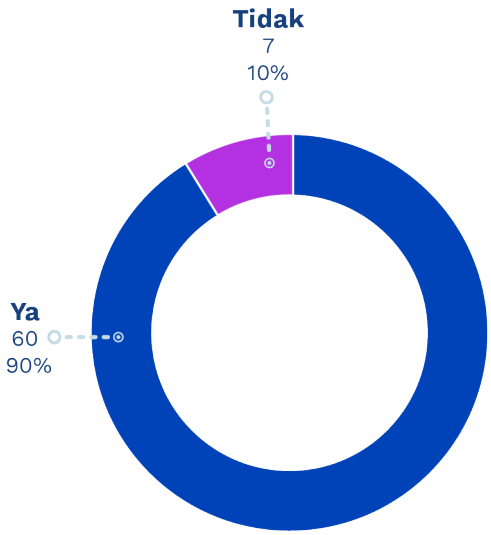


Diagram 2.53 PProporsi K/L terkait Diseminasi Informasi tentang Program Prioritas Nasional

Kegiatan Diseminasi Informasi tentang Program Prioritas Nasional

Aspek pelaksanaan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga dilihat pada pelaksanaan diseminasi narasi tunggal yang berdasarkan pada Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden melalui Perpres Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Dalam Perpres tersebut ada 39 Program Prioritas Nasional yang menjadi acuan.

Temuan studi ini menunjukkan sebanyak 60 K/L (90%) menyebarluaskan informasi terkait Program Prioritas Nasional ini, sesuai dengan amanat Inpres 9 Tahun 2015. Akan tetapi masih terdapat 7 K/L (10%) yang tidak turut menyebarluaskan narasi tunggal terkait program Prioritas Nasional.

Tabel 2.3 Frekuensi Penyebaran Informasi Program Prioritas Nasional

Tabel Informasi		
Respons	**Frekuensi**	**Persentase (%)**
a. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)/PLTS (Tenaga Surya)/PLTM (Minihidro)/ PLTPB (Panas Bumi)/Program Hemat Listrik/ Pemanfaatan Panel Surya di Rumah Tangga/ Pengunaan Kendaraan Dinas Listrik	17	28.33%
b. Pembangunan Bendung, Pembangunan Saluran Irigasi, Hutan Pembangunan Bendung/ Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Irigasi/Hutan Lindung/Hutan Konservasi/Reboisasi/ Penghijauan/ Pemulihan Lahan Mangrove/Gambut	26	43.33%
c. Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam/ Bergizi/ Seimbang dan Aman/Konsumsi Sayur dan Buah/Konsumsi Daging/Konsumsi kacang-kacangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	25	41.67%
d. Bantuan benih ikan/Alat Tangkap/Kapal/Sampan, Budidaya Rumput Laut/ Sentra Produksi Perikanan Budidaya/Penyuluhan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan/ Pelatihan Masyarakat Kelautan Perikanan	22	36.67%
e. Bantuan Modal Usaha Bagi UMKM/Wirausaha/ Literasi Keuangan/ Pelatihan Pemasaran Digital/ Training e-Commerce/ Perluasan Kemitraan UMKM/Waralaba/Franchise/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	34	56.67%
f. Pengurusan Izin Usaha Lebih Mudah dan Cepat/ Sistem Online Single Submission (OSS)/ Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi/ Penjaminan Kepastian Hukum/Kepastian berusaha/Keamanan Berusaha bagi Penanam Modal/Pengolahan Nikel menjadi baterai/Hilirisasi Bioindustri & Batubara	31	51.67%
g. Imbauan Menggunakan Produk Dalam Negeri, Penggunaan HP / Laptop/Mobil buatan dalam negeri/ Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Fasilitasi Ekspor seperti subsidi ekspor bagi pengusaha dalam negeri/Platform Pelayanan Satu Pintu Inaexport	32	53.33%
h. Operasi Pasar Murah/ Operasi Sembako Murah/Gerakan Pangan Murah/Cinta Produk Lokal/ Pembangunan Tol Darat/Tol Laut	24	40%
i. Perbaikan Aksesibilitas Dan Fasilitas Wisata Danau Toba/Akses dari Bandara Silangit ke Danau Toba/ Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera	19	31.67%
j. Perbaikan Aksesibilitas dan Fasilitas Wisata Borobudur/ Bromo/ Tengger/ Semeru dan Bali/ Penataan Kawasan/ Jalan/ Penyediaan Air Baku dan Air Bersih/ Pengelolaan Sampah dan Sanitasi	21	35%
k. Perbaikan Aksesibilitas dan Fasilitas Wisata Labuan Bajo, Lombok Mandalika/ Bali/ Penataan kawasan/ Jalan/Penyediaan Air Baku dan Air Bersih/Pengelolaan Sampah dan Sanitasi	19	31.67%
l. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)/Kluster Ekonomi/ Identitas Nasional/ Pembangunan Destinasi Pariwisata Sambas-Singkawang	43	71.67%
m. Pembangunan tempat wisata Toraja/Perbaikan Akses dan Fasilitas Wisata Wakatobi/ Wakatobi/Penataan kawasan/jalan/ Penyediaan Air Baku dan Air Bersih/Pengelolaan Sampah dan Sanitasi	16	26.67%
n. Program Gerbangdutas (Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan)/Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/ Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Maluku/Pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku/Tata kelola Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang Baik	14	23.33%
o. Perbaikan Akses & Fasilitas Wisata Raja Ampat/ Penataan kawasan/Jalan/Penyediaan Air Baku dan Air bersih/Pengelolaan sampah dan sanitasi/Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan/Pendidikan dan kualitas SDM di wilayah Papua	20	33.33%
p. Proses Pendaftaran Administrasi Kependudukan (KTP/KK/Akta Kelahiran dll) yang sudah berbasis online melalui web atau aplikasi/ Penguatnya Integrasi Data Administrasi Kependudukan (KTP)/Satu Data Indonesia/Pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	21	35%
q. Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Sembako/ Program Indonesia Pintar (PIP)/ Kartu Indonesia Pintar (KIP)/ Kuliah/Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Program Bantuan Sosial (BLT/Pemulihan Ekonomi Nasional)	25	41.67%
r. Program BPJS/Kartu Indonesia Sehat (KIS)/ Sosialisasi Penurunan Stunting/ Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal/ Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)/ Vaksinasi Covid19/ HIV/Hepatitis/TBC	32	53.33%
s. Internet untuk pembelajaran di sekolah/Kampus Merdeka/Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila/ Kelas online/Kuis/Presentasi yang atraktif/Integrasi Softskill dalam proses pembelajaran (sopan santun) dan ekstrakurikuler	21	35%
t. Perlindungan dari Pelecehan Seksual Perempuan dan Anak di bawah Umur/Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan/Eksploitasi dan Perlakuan Salah/lainnya/ Pelayanan Pengaduan/ Pengelolaan Kasus/ Akses Penampungan Sementara, Pelayanan Mediasi/ Pelayanan Pendampingan Korban	33	55%
u. Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)/Model Usaha Ultra Mikro/ Bantuan CSR dari Perusahaan Swasta/ Negeri/ Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk integrasi Bansos	20	33.33%
v. Digital Talent Scholarship bagi lulusan baru/Politeknik Negeri (Pendidikan Vokasi)/ Peningkatan kualifikasi Tenaga Dosen dengan Pendidikan Lanjutan ke S2 dan S3	25	41.67%

Tabel Informasi		
Respons	**Frekuensi**	**Persentase (%)**
w. Program Sekolah Bebas Perundungan/Bullying/ Menumbuhkan Kehidupan Pergaulan yang Harmonis dan Kebersamaan Antar Peserta Didik dengan Tenaga Pendidik, Orang Tua serta Masyarakat	22	36.67%
x. Penyelenggaraan Festival Budaya/Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Museum/ Pengembangan Produk Seni, Budaya dan Film	28	46.67%
y. Program Kampung Moderasi (KMB)/Pelatihan Penggerak Moderasi Beragama/ Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama/ Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	20	33.33%
z. Program Merdeka Belajar/Program Gemar Membaca/ Pembangunan Perpustakaan Daerah/ Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional/ Penggunaan Bahasa Indonesia di Forum Internasional	24	40%
aa. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi/Subsidi rumah dengan bunga 0%/ Pembangunan dan Penyediaan Rumah Layak Huni dan Korban Bencana/ Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (PLN/PAM/Telkom)	15	25%
ab. Pembangunan Jalan Tol/Pembangunan Jalan Strategis di Kota / Daerah/ Pembangunan KA Medium Speed Jakarta-Surabaya/Tol Trans Sumatera/ Tol Trans Jawa	19	31.67%
ac. Pembangunan Jembatan/ MRT/LRT/BRT (Bus Rapid Transit)/ Pembangunan Jalan Perkotaan/ Flyover Underpass	17	28.33%
ad. Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (Sutet)/Program Listrik Masuk Desa/ Penambahan Penyalur BBM satu harga/Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan/ Sistem Transmisi Listrik Terintegrasi/ Meteran Listrik Pintar	13	21.67%
ae. Literasi Digital/Pemblokiran Konten Negatif/Judi Online/Pelatihan Digital Entrepreneurship/ QRIS, Akses 4G Di Daerah 3T/ Palapa Ring/Satelit Broadband	37	61.67%
af. Sistem dan Instrumentasi Pemantauan Kualitas Air, Sungai, Danau dan Udara secara Real-Time/ Alat Pemantauan Kualitas Air Laut secara Manual/ Komunitas Peduli Lingkungan Hidup/Produk Ramah Lingkungan/Daur Ulang	25	41.67%
ag. Pembangunan Pusat Studi Tsunami dan Mitigasi Bencana/ Gerakan Literasi Bencana sebagai Edukasi Bencana/Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana/ Kelompok Masyarakat Tangguh Bencana	29	48.33%
ah. Sosialisasi/Ajakan menggunakan angkutan umum (Bus, Kereta, MRT)/Penggunaan Panel Surya/Tenaga Panas Bumi/Pemanfaatan Biofuel/Efisiensi dan Konservasi Energi/Teknologi Rendah Energi (LED, Inverter) /Kendaraan Listrik	22	36.67%
ai. Konten Sosialisasi World Water Forum/Sosialisasi Pemilu/Sosialisasi Pilkada/Sosialisasi Stunting/ Sosialisasi	56	93.33%
aj. Peningkatan Kapasitas Pekerja Migran (TKI)/ Penguatan Sistem Perlindungan Pekerja Migran (TKI)/ Sosialisasi Wonderful Indonesia/Tanda Batas Negara/ Peta Batas Negara	25	41.67%
ak. Pengadaan Barang dan Jasa Menggunakan E-Katalog/ Digitalisasi Pembayaran Pajak/ Digitalisasi Pelayanan Publik/ Penguatan Partai Politik dalam Pencegahan Korupsi	38	63.33%
al. Layanan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR/Portal pelayanan publik/ Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)/ Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)	47	78.33%
am. Penanganan Terorisme/Jumlah Pos Polisi yang dibangun di Perbatasan/ Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan/Sarana Prasarana Pertahanan di Pulau Kecil Terluar	16	26.67%

Berdasarkan tabel di atas, Program Prioritas Nasional yang paling banyak diinformasikan oleh K/L terkait Konten Sosialisasi World Water Forum/ Sosialisasi Pemilu/Sosialisasi Pilkada/Sosialisasi Penurunan Stunting. Hal ini menunjukkan bahwa program-program dengan fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat menjadi prioritas penting untuk mendukung pemahaman terhadap isu-isu strategis. Fokus ini mencerminkan peran K/L dalam memastikan pesan-pesan strategis pemerintah tersampaikan kepada publik.

Sedangkan informasi yang paling jarang diinformasikan adalah Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (Sutet)/Program Listrik Masuk Desa/ Penambahan Penyalur BBM satu harga/Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan/Sistem Transmisi Listrik Terintegrasi/Meteran Listrik Pintar.

Penyebarluasan Narasi Tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah dari Kementerian Komdigi kepada Publik

Indikator kedua dari variabel pelaksanaan dalam dimensi Proses adalah penyebarluasan Narasi Tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah dari Kementerian Komdigi kepada Publik. Kementerian/ lembaga diamanatkan untuk menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komdigi terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Selain itu, kementerian/lembaga juga diinstruksikan untuk menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

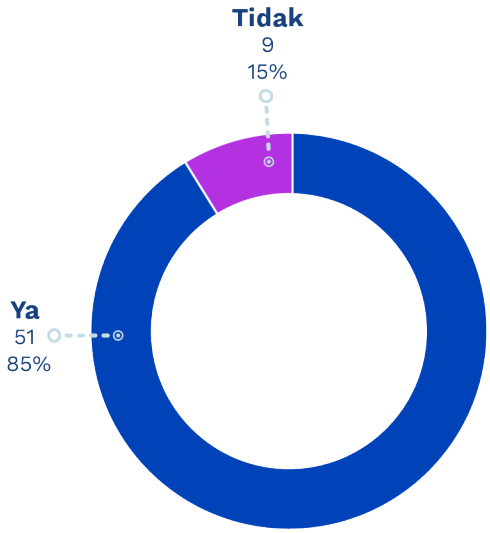


Diagram 2.54 Proporsi K/L dalam Penyebarluasan Narasi Tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah dari Kementerian Komdigi kepada Publik

Hasil studi ini menunjukkan, sebanyak 51 K/L atau 85% telah menyebarluaskan Narasi Tunggal dan data pendukung yang disusun oleh Kementerian Komdigi terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publiknya. Namun, masih terdapat 9 K/L (15%) yang tidak menyebarluaskan Narasi Tunggal dan data pendukung lainnya.

Koordinasi dengan Kementerian Komdigi dalam rangka Penyebarluasan Informasi periode Januari - Juni 2024

Indikator ketiga dari variabel Pelaksanaan dalam Dimensi Proses adalah koordinasi K/L dengan Kementerian Komdigi dalam rangka Penyebarluasan Informasi periode Januari - Juni 2024. Dalam Inpres 9 Tahun 2015 Kementerian Komdigi diamanatkan untuk mengkoordinasikan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

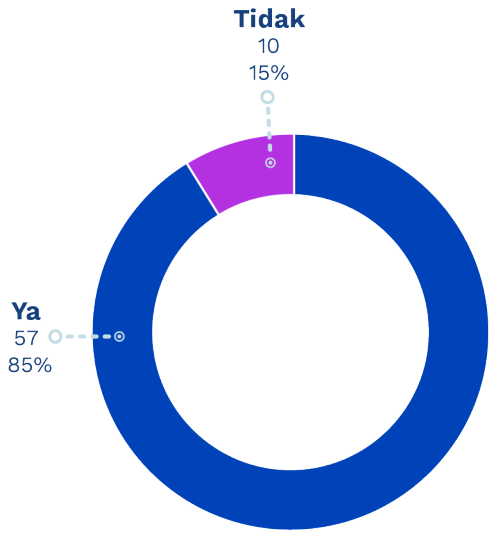


Diagram 2.55 Proporsi K/L saat Koordinasi dengan Kementerian Komdigi dalam rangka Penyebarluasan Informasi

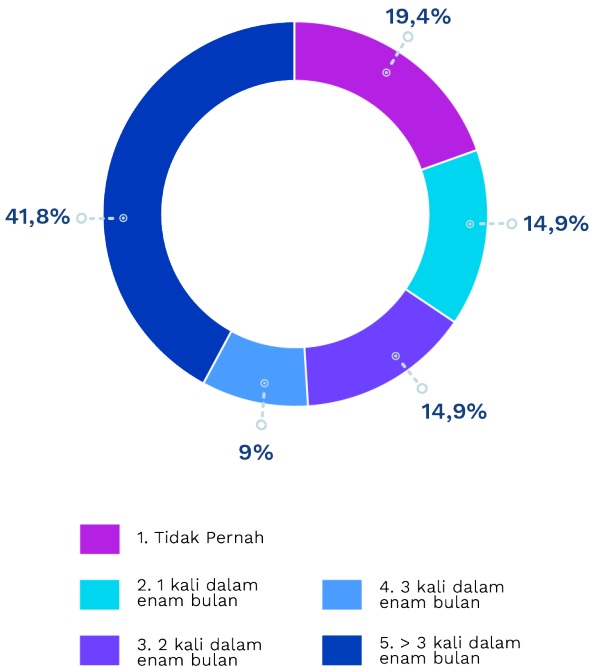
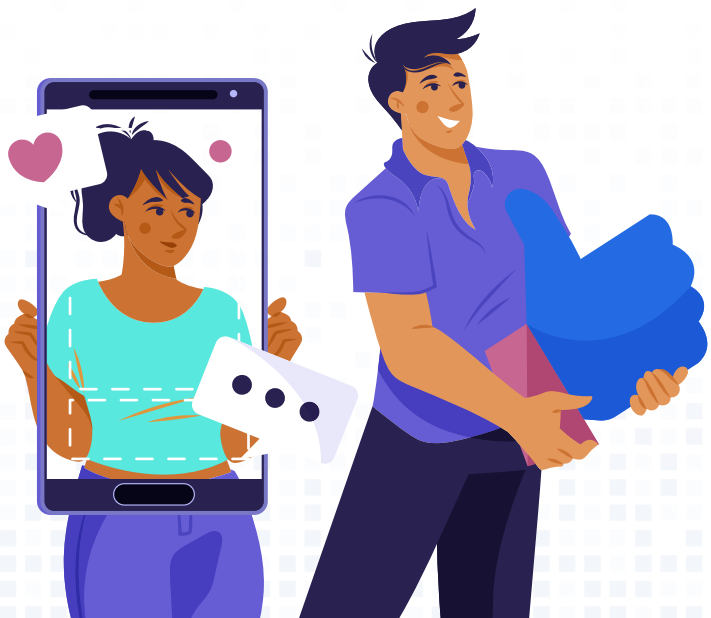


Diagram 2.56 Frekuensi K/L saat Koordinasi dengan Kementerian Komdigi dalam rangka Penyebarluasan Informasi

Hasil studi ini menunjukkan 57 K/L (85%) yang diukur melakukan penyebaran narasi tunggal dengan berkoordinasi terlebih dahulu ke Kementerian Komdigi, sebagai koordinator penyebarluasan narasi tunggal. Namun masih terdapat 10 K/L (15%) yang tidak berkoordinasi dengan Kementerian Komdigi.

Frekuensi K/L saat Koordinasi dengan Kementerian Komdigi dalam rangka Penyebarluasan Informasi

Adapun frekuensi koordinasi K/L dengan Kementerian Komdigi sepanjang enam bulan terakhir (Januari – Juni 2024) berdasarkan hasil studi ini diketahui sebanyak 42% atau 28 K/L melakukan koordinasi lebih dari tiga kali. Sementara 9% atau 6 K/L lainnya melakukan koordinasi tiga kali. Sedangkan 15% atau 10 K/L melakukan koordinasi sebanyak 2 kali dan sebanyak 15% atau 10 K/L melakukan koordinasi sebanyak 1 kali. Terdapat 13 atau 19% K/L yang tidak pernah melakukan koordinasi





Diseminasi Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah kepada Masyarakat melalui Saluran atau Media

Dalam penyebarluasan informasi publik, K/L melalui unit kerja pelaksana komunikasi publik menggunakan berbagai media dan saluran komunikasi baik konvensional maupun digital. Media Konvensional yang digunakan meliputi media cetak, media elektronik (televisi dan radio), pertunjukan rakyat, pertemuan tatap muka, Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), pertemuan tatap muka dengan awak media, forum Bakohumas, meja informasi PPID, hingga diseminasi melalui GPR TV yang merupakan televisi terestrial Kementerian Komdigi.

Tabel 2.4 Frekuensi Penggunaan Media Konvensional dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah

Media	Tidak pernah	Satu kali dalam enam bulan	Dua kali dalam enam bulan	Tiga kali dalam enam bulan	Lebih dari tiga kali dalam enam bulan
Media cetak konvensional (co. tabloid, newsletter, atau majalah)	14	8	11	5	29
Media elektronik konvensional (co. TV, radio)	22	5	5	4	31
Pertunjukan Rakyat	50	7	1	3	6
Pertemuan tatap muka dengan publik (sarasehan, forum, diskusi publik, seminar, gerai pameran, workshop/lokakarya)	6	13	8	7	33
Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok komunitas lainnya	27	8	4	10	18
Pertemuan tatap muka dengan awak media (konferensi pers, media briefing, media visit/tour)	5	8	7	4	43
Forum Bakohumas	29	8	4	7	19
Meja Informasi PPID	12	4	2	7	42
GPR TV	34	8	4	2	19

Hasil studi ini menunjukkan bahwa aktivitas diseminasi informasi oleh K/L didominasi dengan menggunakan Pertemuan Tatap Muka dengan Awak Media, Meja Informasi PPID, dan Pertemuan Tatap Muka dengan Publik. Sedangkan yang paling jarang digunakan oleh K/L untuk diseminasi informasi adalah Pertunjukan Rakyat. Hal ini kemungkinan karena komunikasi menggunakan media tradisional dianggap sudah tidak efektif.

Proses transisi dari pandemi membuat pelaksanaan komunikasi tatap muka dilirik kembali oleh K/L. Selain itu, sebagian K/L sudah mengetahui eksistensi GPR TV karena sudah melakukan diseminasi dengan bekerja sama dengan GPR TV.

Tabel 2.5 Frekuensi Penggunaan Media Konvensional dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah menurut K/L

Media	Tidak pernah	Satu kali dalam enam bulan	Dua kali dalam enam bulan	Tiga kali dalam enam bulan	Lebih dari tiga kali dalam enam bulan
Media cetak konvensional (co. tabloid, newsletter, atau majalah)	20.90	11.94	16.42	7.46	43.28
Media elektronik konvensional (co. TV, radio)	32.84	7.46	7.46	5.97	46.27
Pertunjukan Rakyat	74.63	10.45	1.49	4.48	8.96
Pertemuan tatap muka dengan publik (sarasehan, forum, diskusi publik, seminar, gerai pameran, workshop/lokakarya)	8.96	19.40	11.94	10.45	49.25
Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok komunitas lainnya	40.30	11.94	5.97	14.93	26.87
Pertemuan tatap muka dengan awak media (konferensi pers, media briefing, media visit/tour)	7.46	11.94	10.45	5.97	64.18
Forum Bakohumas	43.28	11.94	5.97	10.45	28.36
Meja Informasi PPID	17.91	5.97	2.99	10.45	62.69
GPR TV	50.75	11.94	5.97	2.99	28.36

Selain media konvensional, di era digital penggunaan media digital dalam diseminasi juga semakin signifikan. Saluran atau media yang dapat digunakan oleh K/L dalam menyebarluaskan informasi sangatlah bervariasi.

Tabel 2.6 Frekuensi Penggunaan Media Digital dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah

Media	Tidak pernah	Satu kali dalam enam bulan	Dua kali dalam enam bulan	Tiga kali dalam enam bulan	Lebih dari tiga kali dalam enam bulan
Akun resmi Media Sosial (co. Channel Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dsb)	6	3	1	1	56
Widget	47	4	0	0	16
Instant Messaging (contoh: Whatsapp, Telegram, LINE)	26	3	3	1	34
Website	8	2	0	0	57
Email	20	4	3	4	36
Fitur Khusus Untuk Penyandang Disabilitas	30	3	6	3	25
Media atau Saluran Lainnya:	26	4	2	3	32

Hasil studi ini menemukan bahwa K/L menggunakan berbagai macam media dan saluran informasi, seperti Tiktok yang cukup tenar pada beberapa tahun kebelakang. Selain itu,K/L yang menggunakan saluran, seperti media daring dan akun resmi media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas K/L sudah akrab dengan internet. Disamping itu, seperti pada pengukuran tahun 2023, terlihat bahwa di tahun 2024 K/L sudah mendukung transformasi digital dengan secara signifikan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu pekerjaannya. Hal ini terangkum dalam hasil survei penggunaan media digital sebagai berikut.

Media	Tidak pernah	Satu kali dalam enam bulan	Dua kali dalam enam bulan	Tiga kali dalam enam bulan	Lebih dari tiga kali dalam enam bulan
Akun resmi Media Sosial (co. Channel Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dsb)	8.96	4.48	1.49	1.49	83.58
Widget	70.15	5.97	0.00	0.00	23.88
Instant Messaging (contoh: Whatsapp, Telegram, LINE)	38.81	4.48	4.48	1.49	50.75
Website	11.94	2.99	0.00	0.00	85.07
Email	29.85	5.97	4.48	5.97	53.73
Fitur Khusus Untuk Penyandang Disabilitas	44.78	4.48	8.96	4.48	37.31
Media atau Saluran Lainnya:	38.81	5.97	2.99	4.48	47.76

Penggunaan akun resmi media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter tetap menjadi tren utama dalam menyebarluaskan informasi terkait program dan kebijakan pemerintah. Selain itu, sebagian besar K/L juga memanfaatkan Channel YouTube dan situs web resmi sebagai sarana komunikasi. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, terdapat peningkatan jumlah K/L yang menggunakan fitur khusus untuk penyandang disabilitas dalam penyampaian informasi. Meski sebelumnya hanya sedikit yang menggunakan fitur ini, kini semakin banyak K/L yang mulai menerapkannya, mencerminkan kesadaran yang terus berkembang akan pentingnya fitur tersebut untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Kerjasama Kegiatan IKP dengan Pihak Internal K/L

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi publik, K/L pada umumnya telah melibatkan unit kerja lain dalam internal instansi. Hal ini penting karena informasi teknis tetap diampu atau dimengerti lebih detil oleh unit kerja teknis, bukan di unit kerja kehumasan/ komunikasi publik.

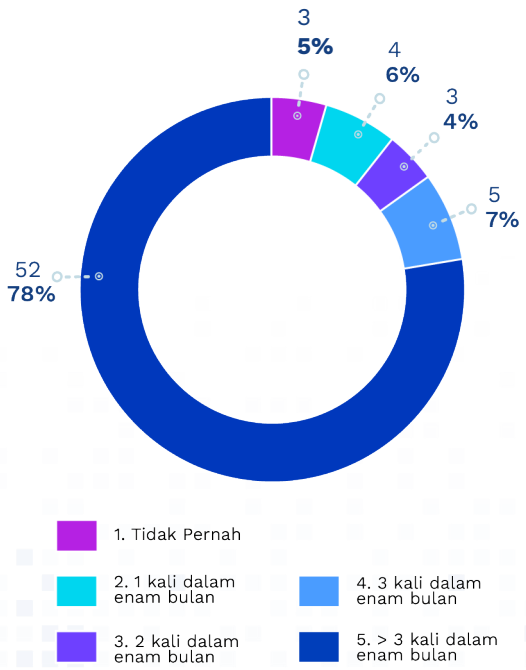


Diagram 2.57 Proporsi K/L menurut Frekuensi kegiatan kerjasama dengan unit kerja internal K/L)

Temuan studi ini menunjukkkan sebanyak 78% atau 52 K/L telah melaksanakan koordinasi internal lebih dari tiga kali dalam enam bulan setiap akan melaksanakan kegiatan. Hal ini sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Sebanyak 7% atau 5 K/L telah melaksanakan koordinasi internal sebanyak 3 kali dalam enam bulan, dan 4% atau 3 K/L lainnya melakukannya sebanyak dua kali dalam enam bulan. Sementara 6% atau 4 K/L melakukan koordinasi internal sebanyak satu kali dalam enam bulan dan masih terdapat 4% atau 3 K/L yang tidak melakukan koordinasi internal.

Kerjasama Kegiatan IKP dengan Pihak Eksternal K/L

Pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi publik pada unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan di K/L juga melibatkan instansi eksternal untuk keperluan koordinasi dan kerja sama. Hal ini diimplementasikan salah satunya dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak eksternal.

Tabel 2.7 Proporsi K/L menurut Frekuensi Kegiatan Kerjasama dengan Unit Kerja Eksternal K/L)

Lembaga Eksternal	Tidak pernah	Satu kali dalam enam bulan	Dua kali dalam enam bulan	Tiga kali dalam enam bulan	Lebih dari tiga kali dalam enam bulan
a. Lembaga Legislatif	19	9	8	7	24
b. Lembaga Yudikatif	34	10	6	4	13
c. Perusahaan/ Asosiasi Industri	23	7	9	3	25
d. Asosiasi Profesi / Kelompok Masyarakat	20	6	13	5	23
e. Kelompok Akademisi / Universitas	11	7	8	7	34
f. Perwakilan Pemerintah Lainnya	22	1	7	3	34
g. Pemangku Kepentingan Lainnya yang mendukung pelayanan informasi dan kehumasan	19	8	4	3	31
h. Lembaga pemerintah maupun non pemerintah skala internasional	25	10	6	6	19

Hasil studi ini menemukan bahwa secara umum K/L telah bekerjasama dengan unit eksternal sebanyak lebih dari 3 kali dalam enam bulan, terdapat 34 K/L bekerjasama dengan Kelompok Akademisi/ Universitas dan Perwakilan Pemerintah Lainnya. Terdapat 31 K/L bekerjasama dengan Pemangku Kepentingan Lainnya yang mendukung pelayanan informasi dan kehumasan, 25 K/L bekerjasama dengan Perusahaan/Asosiasi Industri, 24 K/L telah bekerjasama dengan Lembaga Legislatif, 23 K/L bekerjasama dengan Asosiasi Profesi / Kelompok Masyarakat, 19 K/L bekerjasama dengan Lembaga pemerintah maupun non pemerintah skala internasional, dan yang terakhir sebanyak 13 K/L bekerjasama dengan Lembaga Yudikatif.

Lembaga Eksternal	Tidak pernah	Satu kali dalam enam bulan	Dua kali dalam enam bulan	Tiga kali dalam enam bulan	Lebih dari tiga kali dalam enam bulan
a. Lembaga Legislatif	28.36	13.43	11.94	10.45	35.82
b. Lembaga Yudikatif	50.75	14.93	8.96	5.97	19.40
c. Perusahaan/ Asosiasi Industri	34.33	10.45	13.43	4.48	37.31
d. Asosiasi Profesi / Kelompok Masyarakat	29.85	8.96	19.40	7.46	34.33
e. Kelompok Akademisi / Universitas	16.42	10.45	11.94	10.45	50.75
f. Perwakilan Pemerintah Lainnya	32.84	1.49	10.45	4.48	50.75
g. Pemangku Kepentingan Lainnya yang mendukung pelayanan informasi dan kehumasan	28.36	11.94	5.97	4.48	46.27
h. Lembaga pemerintah maupun non pemerintah skala internasional	37.31	14.93	8.96	8.96	28.36

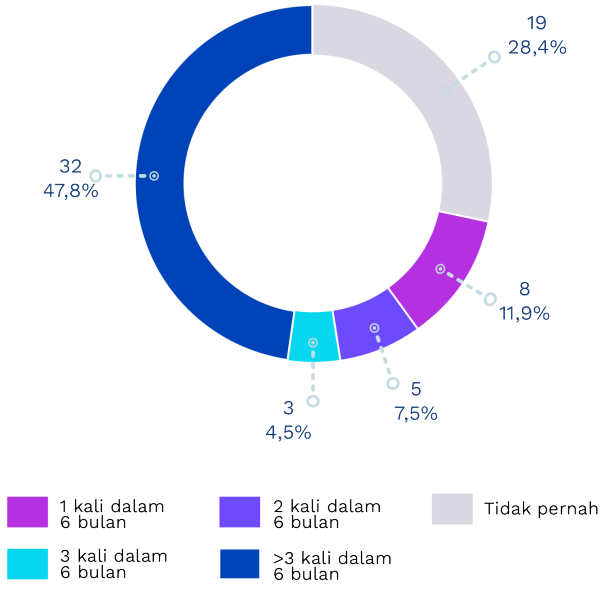


Diagram 2.58 Frekuensi Kerjasama antara Unit Kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan dengan instansi eksternal K/L)

Kegiatan Komunikasi Publik terkait Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh unit pelayanan informasi dan kehumasan K/L merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik tersebut, informasi diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Studi ini juga melakukan pengukuran terhadap tingkat kepatuhan K/L dalam penyebaran informasi publik.

Tabel 2.8 Frekuensi Kegiatan Komunikasi Publik berdasarkan UU KIP)

Media	Tidak pernah	Satu kali dalam enam bulan	Dua kali dalam enam bulan	Tiga kali dalam enam bulan	Lebih dari tiga kali dalam enam bulan
Penyampaian Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala	1	8	6	2	50
Penyampaian Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta	8	12	5	1	41
Penyampaian Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat	2	8	4	2	51
Penyampaian Pengumuman Tentang Layanan Informasi Publik (termasuk mekanisme memperoleh informasi publik)	1	12	4	3	47

Media	Tidak pernah	Satu kali dalam enam bulan	Dua kali dalam enam bulan	Tiga kali dalam enam bulan	Lebih dari tiga kali dalam enam bulan
Penyampaian Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala	1.49	11.94	8.96	2.99	74.63
Penyampaian Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta	11.94	17.91	7.46	1.49	61.19
Penyampaian Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat	2.99	11.94	5.97	2.99	76.12
Penyampaian Pengumuman Tentang Layanan Informasi Publik (termasuk mekanisme memperoleh informasi publik)	1.49	17.91	5.97	4.48	70.15

Data menunjukkan secara umum K/L telah melakukan Penyampaian Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat (76%); Penyampaian Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala (75%); Penyampaian Pengumuman Tentang Layanan Informasi Publik (termasuk mekanisme memperoleh informasi publik) (70%), Penyampaian Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta (61%). Penyampaian informasi tersebut dilakukan dengan frekuensi lebih dari tiga kali dalam enam bulan. Kepatuhan K/L dalam mengimplementasikan UU KIP ini memperlihatkan bahwa K/L telah memiliki kesadaran akan kewajiban sebagai badan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan.

Kegiatan Komunikasi Publik yang memenuhi Kebutuhan Lapisan Masyarakat

Dalam rangka pemerataan informasi, unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan di K/L, diharapkan secara rutin menyebarluaskan informasi yang telah disusun sebelumnya, dengan memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat, seperti kelompok masyarakat penyandang disabilitas, kelompok masyarakat lanjut usia, kelompok masyarakat perempuan, kelompok masyarakat anak-anak, dan kelompok masyarakat lainnya.

Tabel 2.9 Distribusi Kegiatan Komunikasi Publik yang Memenuhi Kebutuhan Lapisan Masyarakat

Kelompok	Jumlah K/L	Persentase (%)
Kegiatan komunikasi publik untuk kelompok masyarakat penyandang disabilitas	42	62.69
Kegiatan komunikasi publik untuk kelompok masyarakat lanjut usia	27	40.30
Kegiatan komunikasi publik untuk kelompok masyarakat Perempuan	40	59.70
Kegiatan komunikasi publik untuk kelompok masyarakat anak-anak	38	56.72
Kegiatan komunikasi publik untuk kelompok masyarakat lainnya	35	52.24

Temuan dalam studi ini memperlihatkan bahwa selama enam bulan terakhir (Januari– Juni 2024), dari 67 K/L yang disurvei, rata-rata baru 53,13% yang telah melakukan komunikasi publik dengan memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat tersebut dalam proses pelaksanaan kegiatan komunikasi publik. Artinya masih ada 46,87% K/L yang melakukan komunikasi publik namun belum memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat tersebut.

Adapun rinciannya sebagai berikut: sebanyak 62,69% K/L menyatakan telah memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat penyandang disabilitas, 59,70 K/L telah memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat perempuan, 56,72% K/L telah memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat anak-anak, 52,24% K/L telah memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat lainnya, dan 40,30% K/L telah memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat lanjut usia.

Kegiatan Komunikasi Publik yang memperhatikan Kebutuhan Informasi Segmen Publik di Wilayah

Dalam rangka pemerataan informasi, unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan di K/L, diharapkan secara rutin menyebarluaskan informasi yang telah disusun sebelumnya, dengan memenuhi kebutuhan informasi untuk masyarakat di wilayah 3T, pedesaan, perkotaan, dan wilayah lainnya.

Tabel 2.10 Distribusi Kegiatan Komunikasi Publik yang Memenuhi Kebutuhan Informasi Segmen Publik di Wilayah

Kelompok	Jumlah K/L	Persentase (%)
Kegiatan komunikasi publik untuk masyarakat di wilayah 3T	36	53.73
Kegiatan komunikasi publik untuk masyarakat di wilayah pedesaan	41	61.19
Kegiatan komunikasi publik untuk masyarakat di wilayah perkotaan	47	70.15
Kegiatan komunikasi publik untuk masyarakat wilayah lainnya	27	40.30

Temuan dalam studi ini memperlihatkan bahwa selama enam bulan terakhir (Januari– Juni 2024), dari 67K/L yang diteliti rata-rata baru 57,34% yang telah melakukan komunikasi publik dengan memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat tersebut dalam proses pelaksanaan kegiatan komunikasi publik. Artinya masih ada 42,66% K/L yang melakukan komunikasi publik namun belum memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat tersebut.

Adapun rinciannya sebagai berikut: sebanyak 70,15% K/L telah memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah perkotaan, 61,19% K/L memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah pedesaan, 53,73% K/L memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah 3T, serta 40,30% K/L memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah lainnya.

4. Monitoring dan Evaluasi

Variabel terakhir dalam dimensi Proses pada Indeks PIKP adalah monitoring dan evaluasi program/kegiatan. Tahap ini menjadi dasar untuk melaksanakan riset kegiatan dan diikuti oleh tahapan-tahap berikutnya yang berjalan secara terus-menerus dan berkelanjutan sebagai siklus dinamis yang terus bergerak. Kegiatan Monitoring dan evaluasi dalam kerangka pengukuran Indeks PIKP memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas program/kegiatan. Oleh karena itu kegiatan ini perlu dilakukan secara berkala dan terstruktur. Dalam merancang Indeks PIKP Tahun 2024, variabel monitoring dan evaluasi mencakup tiga indikator, yakni monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan, dan monitoring evaluasi media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan, serta pembuatan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Monitoring dan Evaluasi Terhadap Proses Pelaksanaan Program/ Kegiatan

Indikator pertama dari variabel monitoring dan evaluasi ini adalah monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan. Hasil pengukuran variabel ini diharapkan dapat merefleksikan mutu pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi.

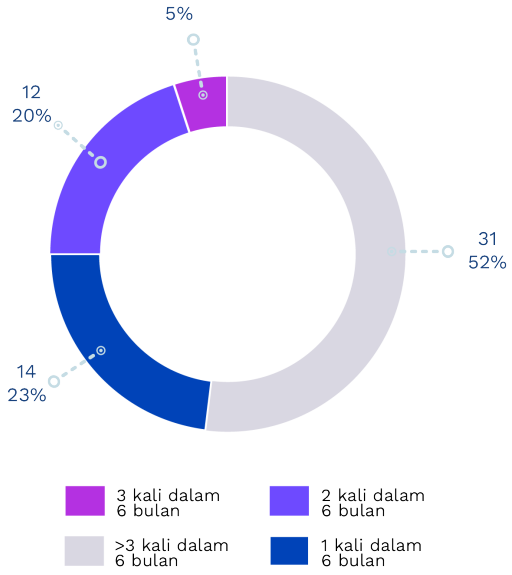
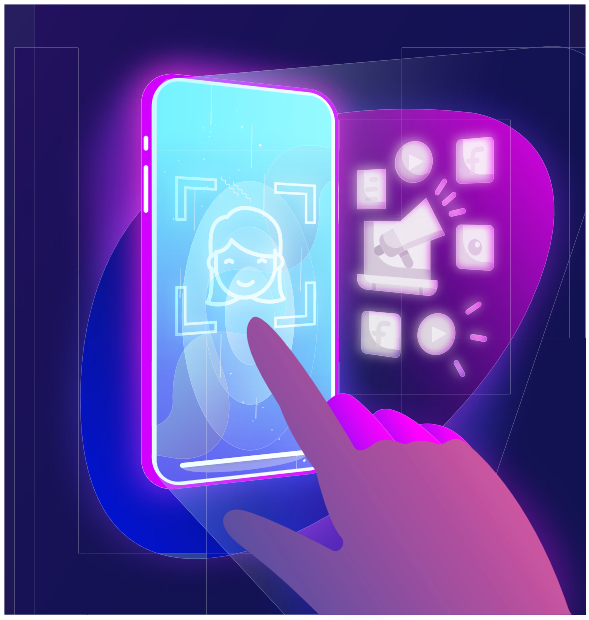


Diagram 2.59 Proporsi K/L menurut Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan

Hasil studi ini menunjukkan dari 67 K/L yang disurvei, sebanyak 52% telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program dan kegiatan lebih dari tiga kali dalam enam bulan. Sementara 23% K/L melakukan satu kali dalam enam bulan. Sedangkan 20% K/L melakukan dua kali dalam enam bulan. Terdapat 5% K/L yang melakukan tiga kali dalam enam bulan. Terjadi kesamaan seperti tahun sebelumnya, yaitu tidak ada lagi K/L yang tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program dan kegiatan.

Monitoring dan Evaluasi Media Terkait Liputan tentang Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan

Kegiatan monitoring dan evaluasi media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan perlu dilakukan untuk mengevaluasi seberapa banyak media yang meliput pelaksanaan kegiatan program/kegiatan unit kerja yang melaksanakan pelayanan informasi dan kehumasan di K/L Selain itu, kegiatan ini penting dilakukan guna melihat efektivitas media yang diajak kerja sama atau bermitra dalam pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi dan kehumasan.



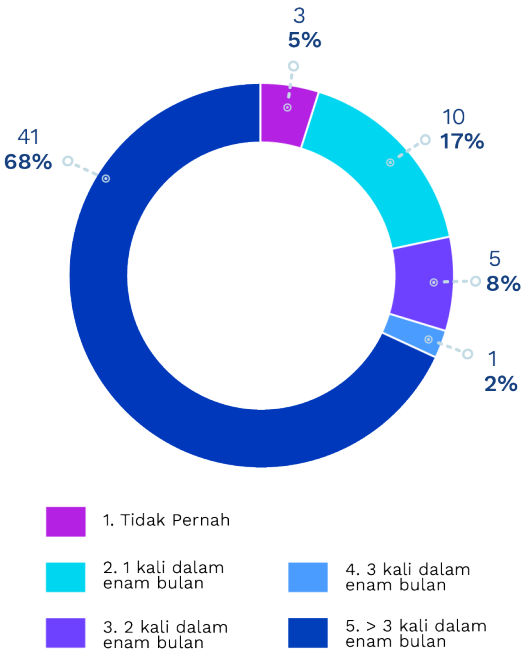


Diagram 2.60 Proporsi Dinas Kominfo menurut Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi Terkait Liputan tentang Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan

Berdasarkan temuan seperti yang digambarkan pada diagram di atas, sebanyak 68% atau 41 K/L telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan lebih dari tiga kali dalam enam bulan. Sementara 2% atau 1 K/L melakukan tiga kali dalam enam bulan. Sedangkan 8% atau 5 K/L melakukan dua kali dalam enam bulan dan 17% atau 10 K/L lainnya melakukan satu kali dalam enam bulan. Namun masih ada 5% atau 3 K/L yang tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi dimaksud.

Pembuatan Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Hasil studi ini menunjukkan, sebanyak 53,3% atau 32 K/L telah membuat dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan lebih dari tiga kali dalam enam bulan, Sebanyak 1,7% atau 1 K/L membuat dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan program/kegiatan tiga kali dalam enam bulan. Sedangkan 15% atau 9 K/L membuat laporan 2 kali dalam enam bulan. Terdapat 23,3% atau 14 K/L yang membuat laporan sebanyak 1 kali dalam enam bulan. Sayangnya masih terdapat 6,7% atau 4 K/L yang tidak pernah membuat dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan program

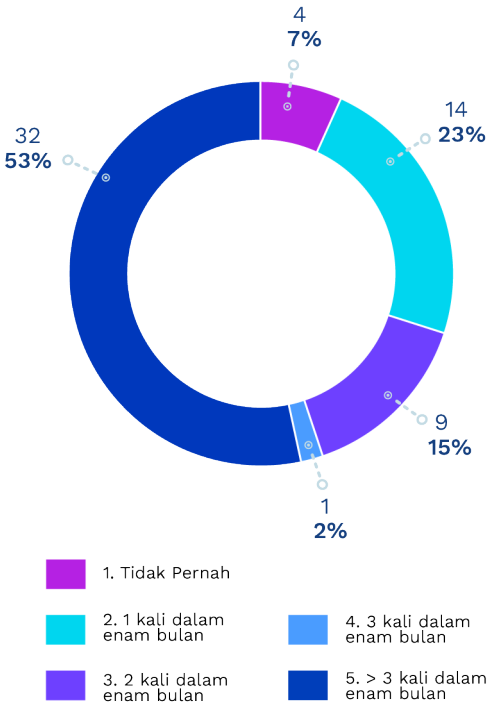


Diagram 2.61 Proporsi K/L menurut Frekuensi Pembuatan dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi" pelaksanaan program/kegiatan

C. Capaian Indeks Dimensi Proses di Tingkat Dinas Kominfo

Dimensi Proses di tingkat Dinas Kominfo memiliki empat variabel, seperti halnya dimensi Proses di tingkat K/L, yaitu: (1) Pengumpulan data dan informasi; (2) Perencanaan; (3) Pelaksanaan; serta (4) Monitoring dan evaluasi. Variabel pertama yaitu Pengumpulan data dan informasi memiliki tiga indikator yaitu (a) Pengumpulan Data dan Informasi dengan Instansi Eksternal (b) Pengumpulan Data dan Informasi melalui Penyerapan Aspirasi Publik (c) Pengumpulan Data dan Informasi Menggunakan Hasil Riset dan Organisasi atau Instansi lain.

Variabel kedua yakni Perencanaan Program/Kegiatan terdiri dari lima indikator yaitu: (a) Jumlah rapat koordinasi internal (b) Jumlah rapat koordinasi eksternal (c) Ketersediaan dokumen perencanaan program/kegiatan tahun 2024 (d) Perencanaan program/kegiatan yang memperhatikan kebutuhan informasi kelompok masyarakat (e) Perencanaan program/kegiatan yang memperhatikan kebutuhan informasi kewilayahan.

Variabel ketiga yakni pelaksanaan dengan 7 indikator yakni (a) Kegiatan diseminasi informasi tentang program prioritas nasional (b) Penyebaran narasi Tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah dari Kementerian Komdigi (c) Jumlah koordinasi dengan Kementerian Komdigi dalam rangka penyebarluasan informasi (d) Diseminasi Informasi pada Masyarakat secara langsung tatap muka melalui media (e) Kerjasama kegiatan IKP dengan pihak internal Dinas Kominfo (f) Kerjasama kegiatan IKP dengan pihak eksternal Dinas Kominfo (g) Kegiatan Komunikasi publik terkait Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik

Variabel keempat yakni Monitoring dan Evaluasi terdiri dari tiga indikator yakni (a) Monitoring dan Evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan (b) Monitoring dan evaluasi media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan (c) Pembuatan Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

1. Pengumpulan Data dan Informasi

Aktivitas pengumpulan data dan informasi dalam proses pengelolaan informasi dan Komunikasi publik penting dilaksanakan oleh Dinas Kominfo. Data dan informasi yang akurat memberikan dasar yang kuat untuk merancang strategi komunikasi publik yang efektif. Selain itu, data dan informasi juga dapat digunakan sebagai bahan perkiraan keadaan atau situasi di waktu yang akan datang

Tanpa data, pengelolaan komunikasi cenderung bersifat spekulatif dan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisi masyarakat. Dari data yang dikumpulkan tersebut dapat membuat sebuah perencanaan yang lebih matang dan terarah, sehingga hasil yang diinginkan dapat tercapai.

Pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program/kegiatan bidang IKP terdiri dari pengumpulan data dan informasi dengan instansi eksternal, penyerapan aspirasi publik dan penggunaan hasil riset organisasi atau instansi lain. Nilai indeks Pengumpulan Data dan Informasi di tingkat Dinas Kominfo secara nasional sebesar 60,77 (“Sedang”).

Hal ini menunjukkan bahwa belum semua Dinas Kominfo yang disurvei telah melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi dalam proses pengelolaan IKP. Padahal dengan data yang terkumpul tersebut, memungkinkan pemerintah untuk mempublikasikan informasi berbasis fakta, sehingga meningkatkan akuntabilitas

Pengumpulan Data dan Informasi dengan melibatkan Instansi Eksternal.

Pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal dapat membantu Dinas Kominfo untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dan berkualitas, karena data dan informasi diambil dari instansi pemilik proses kerja tersebut. Data dan Informasi yang diperoleh dari aktivitas pengumpulan data kemudian dimanfaatkan dalam perencanaan program/kegiatan (termasuk perencanaan strategi) pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Semakin baik kualitas data yang diperoleh, maka semakin efektif perencanaan program/kegiatan yang disusun.

Hasil studi menunjukan dari 34 Dinas Kominfo yang disurvei, terdapat 16 Dinas Kominfo (47,1%) yang melaksanakan pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal minimal 3 kali danam enam bulan, 11 Dinas Kominfo (32,4%) melaksanakan pengumpulan data dan informasi 1 kali dalam enam bulan, 3 Dinas Kominfo (8,8%) melaksanakan pengumpulan data dan informasi 3 kali dalam enam bulan dan 4 Dinas Kominfo (11,8%) tidak pernah melaksanakan pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan pihak eksternal.

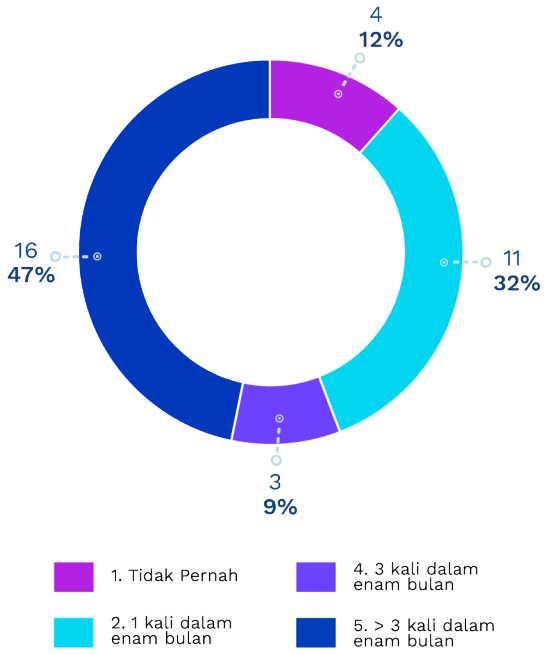


Diagram 2.62 Proporsi Dinas Kominfo menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi dengan Instansi Eksternal

Pengumpulan Data dan Informasi melalui Penyerapan Aspirasi Publik

Pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik penting dilaksanakan oleh Dinas Kominfo karena penyerapan aspirasi publik memungkinkan pemerintah memahami kebutuhan, harapan, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat secara langsung. Data ini sangat berguna untuk merancang kebijakan atau program yang relevan dan sesuai dengan konteks lokal

Aktivitas yang dapat dilakukan antara lain monitoring isu publik dan aduan Masyarakat. Sebagaimana ditunjukan oleh data hasil studi ini, dari 34 Dinas Kominfo yang disurvei, sebanyak 22 Dinas Kominfo (64.7%) melaksanakan pengumpulan data tersebut lebih dari 3 kali dalam enam bulan dan 3 Dinas

Kominfo lainnya (8,8%) melaksanakan 3 kali dalam 6 bulan. Sementara 1 Dinas Kominfo (2,9%) melaksanakan 2 kali dalam enam bulan dan 7 Dinas Kominfo (20,6%) melaksanakan 1 kali dalam enam bulan. Masih masih ada 1 Dinas Kominfo (2,9%) yang tidak pernah melaksanakan pengumpulan data dan informasi melalui penyerapann aspirasi publik.

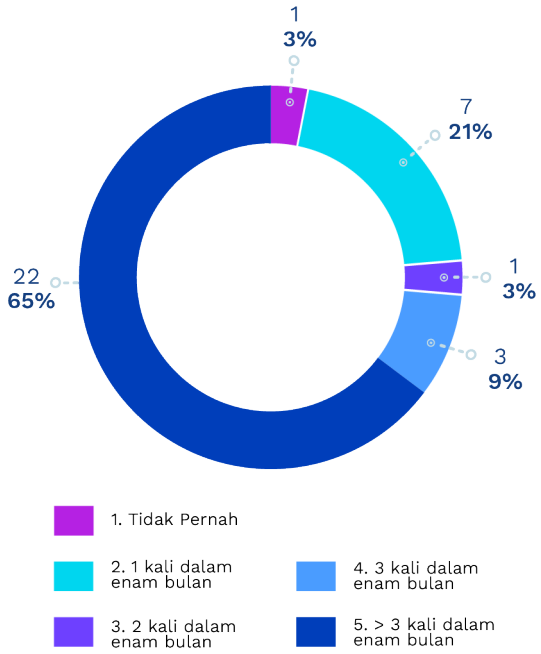


Diagram 2.63 Proporsi Dinas Kominfo menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi melalui Penyerapan Aspirasi Publik

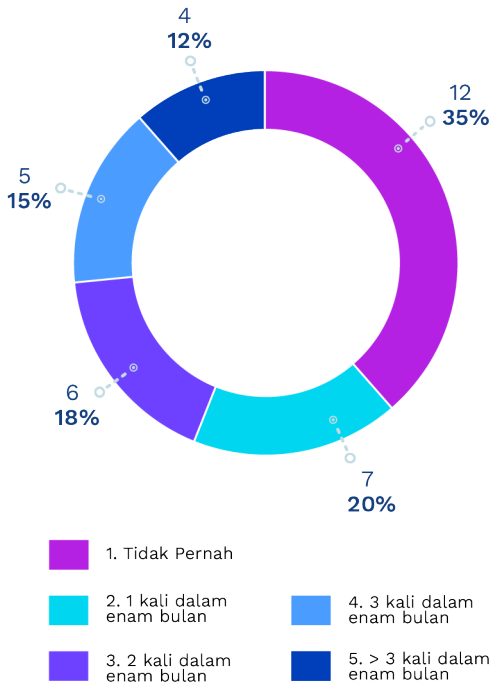


Diagram 2.64 Proporsi Dinas Kominfo menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi menggunakan Hasil Riset dari Organisasi atau Instansi lain

Pengumpulan Data dan Informasi menggunakan Hasil Riset dari Organisasi atau Instansi lain

Aktivitas lain yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan perencanaan adalah aktivitas pengumpulan data dan informasi menggunakan hasil riset organisasi atau instansi lain. Pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset dari berbagai sumber dapat mengurangi bias yang mungkin terjadi jika hanya mengandalkan riset internal. Sumber data yang beragam dapat membantu memastikan bahwa kebijakan atau keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang objektif dan komprehensif.

Hasil studi ini menunjukkan, hanya ada 4 Dinas Kominfo (11,8%) yang melaksanakan pengumpulan data dan informasi menggunakan hasil riset organisasi atau instansi lain dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam enam bulan dan 5 Dinas Kominfo (14,7%) melaksanakan 3 kali dalam enam bulan, Sementara 6 Dinas Kominfo (17,6%) melaksanakan 2 kali dalam enam bulan dan 7 Dinas Kominfo lainnya (20,6%) melaksanakan dengan frekuensi 1 kali dalam enam bulan, Namun masih ada 12 Dinas Kominfo (35,3%) yang tidak pernah melaksanakan pengumpulan data dimaksud.

Berdasarkan hasil studi ini, perlu peningkatan pemahaman Dinas Kominfo akan pentingnya pengumpulan data dan informasi melalui penggunaan hasil riset instansi laim sebelum melakukan perencanaan.

2. Perencanaan

Perencanaan memegang peranan penting dalam proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik, karena perencanaan yang baik memungkinkan penggunaan sumber daya secara lebih efektif dan efisien. Tanpa perencanaan yang baik, sumber daya bisa terbuang sia-sia atau tidak digunakan dengan optimal dalam pengelolaan IKP.

Tahap ini yang merupakan kelanjutan dari pengumpulan data dan informasi, berdasarkan data yang diperoleh, organisasi dapat merencanakan kegiatan komunikasi yang efektif melalui kegiatan kehumasan untuk mencapai tujuan organisasi.

Variabel Perencanaan Program/Kegiatan dalam dimensi Proses ini terdiri dari lima indikator yaitu (a) Jumlah rapat koordinasi internal (b) Jumlah rapat koordinasi eksternal (c) Ketersediaan dokumen perencanaan program/kegiatan tahun 2024 (d) Perencanaan program/kegiatan yang memperhatikan kebutuhan informasi kelompok masyarakat (e) Perencanaan program/kegiatan yang memperhatikan kebutuhan informasi kewilayahan.

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Internal

Rapat Koordinasi Internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan perlu dilakukan dalam rangka sinkronisasi rencana program/ kegiatan antara unit kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan dengan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas Kominfo.

Hasil studi ini menujukkan mayoritas Dinas Kominfo sudah melaksanakan Rapat Koordinasi Internal dengan rincian sebagai berikut: 17 Dinas Kominfo (50%) melaksanakan Rapat Koordinasi Internal Lebih dari 3 kali dalam enam bulan, 5 Dinas Kominfo (14,7%) melaksanakan 3 kali dalam enam bulan, 7 Dinas Kominfo (20,6%) melaksanakan 2 kali dalam enam bulan, 4 Dinas Kominfo (11,8%) melaksanakan 1 kali dalam enam bulan dan 1 Dinas Kominfo (2,9%) mengaku tidak pernah melaksanakan rapat koordinasi tersebut.

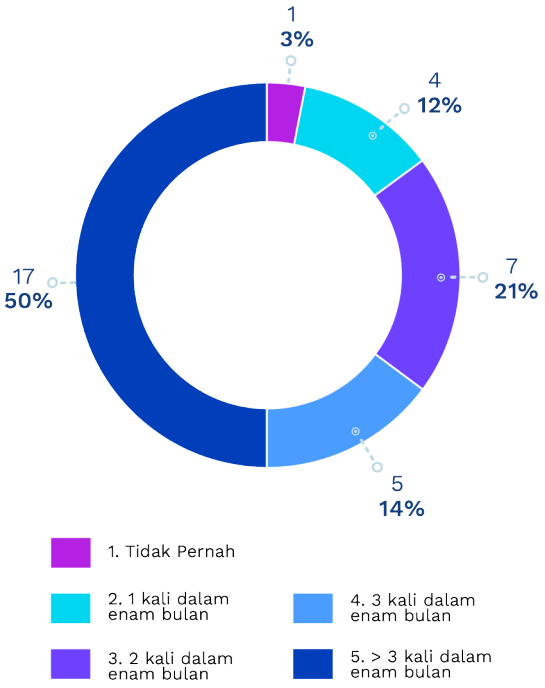


Diagram 2.65 Proporsi Dinas Kominfo menurut Frekuensi Rapat Koordinasi Internal untuk Tujuan Perencanaan Program/ Kegiatan

Jumlah Rapat Koordinasi Eksternal

Selain mengadakan pertemuan dengan unit kerja lain dalam lingkup internal organisasi, Dinas Kominfo juga melibatkan pihak eksternal untuk perencanaan program/kegiatannya.

Hasil studi menunjukkan bahwa mayoritas Dinas Kominfo Provinsi sudah melakukan Rapat koordinasi Eksternal dengan rincian sebagai berikut: 14 Dinas Kominfo (41,2%) melaksanakan lebih dari 3 kali dalam enam bulan, 5 Dinas Kominfo (14,7%) melaksanakan 3 kali dalam enam bulan, 8 Dinas Kominfo (23,5%) melaksanakan 2 kali dalam enam bulan, 5 Dinas Kominfo (14,7%) melaksanakan 1 kali dalam enam bulan dan 2 Dinas Kominfo (5,9%) tidak pernah melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak eksternal.

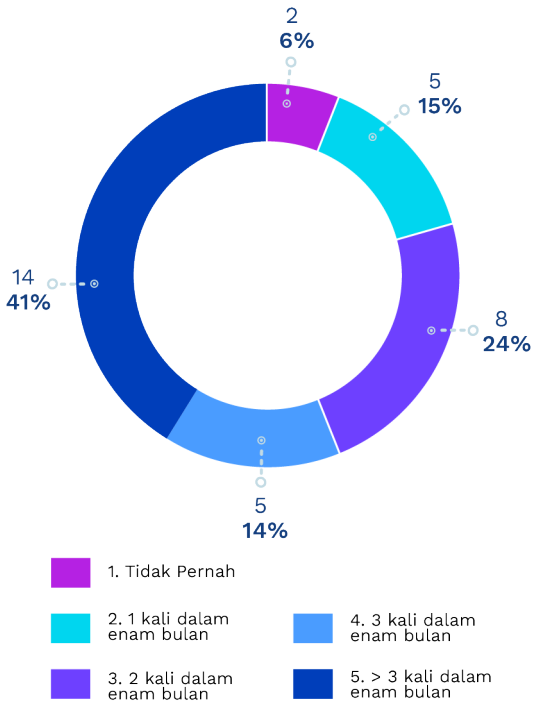


Diagram 2.66 Proporsi Dinas Kominfo menurut Frekuensi Rapat Koordinasi Eksternal untuk Tujuan Perencanaan Program/ Kegiatan

Ketersediaan dokumen "Perencanaan Program/Kegiatan Tahun 2024"

Studi Indeks PIKP 2024 juga mengukur variabel ketersediaan dokumen perencanaan program/ kegiatan tahunan untuk tahun 2024, seperti proposal, TOR, RAB dan Program Kerja Tahunan yang telah disusun oleh Dinas Kominfo. Dibandingkan dengan dua tahun pengukuran sebelumnya, jumlah Dinas Kominfo yang telah memiliki dokumen perencanaan tetap sama, yaitu 33 instansi. Namun masih terdapat 1 Instansi yang belum memiliki dokumen tersebut. Hal ini perlu ditelaah lebih lanjut karena terdapat kecenderungan hampir seluruh Dinas Kominfo telah memiliki data dukung dalam perencanaan.

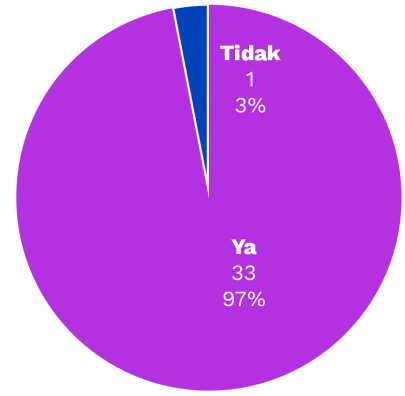


Diagram 2.67 Ketersediaan dokumen "Perencanaan Program/Kegiatan Tahun 2024

Perencanaan Kegiatan yang Memperhatikan Kebutuhan Informasi Pada Segmen Khusus

Perencanaan kegiatan yang memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen khusus penting dilaksanakan oleh Dinas Karena karena memastikan bahwa komunikasi publik dilakukan secara efektif, relevan, dan inklusif. Selain itu, upaya ini juga ditujukan dalam rangka pemerataan informasi, sehingga Dinas Kominfo perlu memperhatikan kebutuhan informasi pada segmen khusus seperti kelompok masyarakat penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak – anak dan lain sebagainya. Kesadaran untuk mengakomodir kebutuhan informasi pada segemen khusus ini dalam memproduksi konten juga sebagai perwujudan layanan informasi yang inklusif.



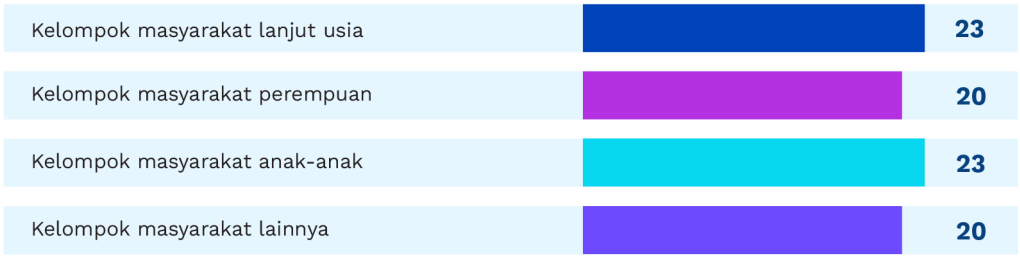


Diagram 2.68 Proporsi Dinas Kominfo menurut Perencanaan Program/Kegiatan yang memperhatikan kebutuhan informasi kelompok masyarakat (Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Perempuan, Anak-Anak dan Lainnya)

Diagram 2.68 di atas menunjukkan dari 34 Dinas Kominfo yang disurvei ditemukan hanya 23 Dinas Kominfo yang melakukan perencanaan terkait kebutuhan kelompok masyarakat lanjut usia, 20 Dinas Kominfo lainnya melakukan perencanaan terkait kebutuhan kelompok masyarakat perempuan, 23 Dinas Kominfo melakukan perencanaan terkait kebutuhan kelompok masyarakat anak – anak dan 20 Dinas Kominfo melaksanakan pada kelompok lainnya di luar kelompok yang dikategorikan dalam Indeks PIKP. Upaya ini perlu terus ditingkatkan karena kebutuhan akan informasi setiap individu maupun kelompok tentu tidak sama.

Perencanaan Kegiatan yang Memperhatikan Kebutuhan Informasi Segmen Publik di Wilayah

Perencanaan kegiatan yang memperhatikan kebutuhan informasi segmen publik di wilayah ini penting diperhatikan karena setiap wilayah memiliki karakteristik tertentu yang memengaruhi bagaimana informasi sebaiknya disampaikan dan diterima.

Dengan memperhatikan kebutuhan informasi spesifik di wilayah tertentu, antara lain kelompok masyarakat di wilayah 3t, kelompok masyarakat di wilayah perkotaan, kelompok masyarakat di wilayah pedesaan dan kelompok masyarakat lainnya, maka pesan yang disampaikan menjadi lebih relevan dan efektif.

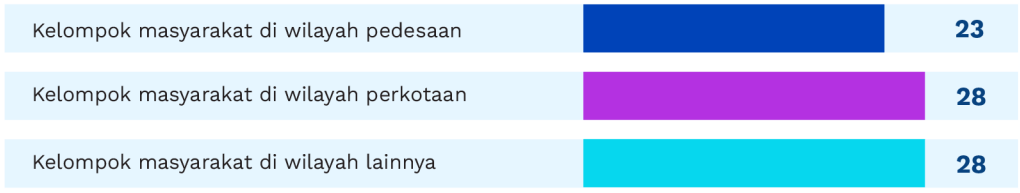


Diagram 2.69 Persentase Perencanaan Program/Kegiatan yang memperhatikan kebutuhan informasi kewilayahan menurut Dinas Kominfo

Hasil studi menunjukkan, hanya 23 Dinas Kominfo yang memperhatikan pada segmen masyarakat di wilayah pedesaan, 28 Dinas Kominfo Provinsi merencanakan pada segmen masyarakat di wilayah perkotaan dan 28 Dinas Kominfo pada segmen lainnya di luar kategori tersebut.

Perencanaan yang memperhatikan kebutuhan informasi segmen publik di wilayah tertentu tidak hanya meningkatkan efektivitas komunikasi, tetapi juga menciptakan pemerataan informasi, mendukung pembangunan yang adil, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.



3. Pelaksanaan

Aspek pelaksanaan dalam proses pengelolaan IKP oleh Dinas Kominfo dilihat melalui diseminasi Narasi Tunggal yang mengacu pada Program Prioritas Nasional sebagaimana diatur dalam Perpres 84 Tahun 2023. Perpres ini menetapkan 39 Program Prioritas Nasional sebagai acuan.

Capaian Indeks untuk dimensi Proses di tingkat Dinas Kominfo ini antara lain diukur dari variabel Pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi publik, khususnya pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2024, sama seperti dimensi Proses di tingkat K/L, Variabel ini juga terdiri dari sembilan indikator, yaitu: (1) Kegiatan diseminasi informasi tentang program prioritas nasional, (2) Kegiatan diseminasi informasi narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komdigi, (3) Jumlah Koordinasi Dinas Kominfo dengan Kementerian Komdigi, (4) Kegiatan Diseminasi informasi Kebijakan dan Program Pemerintah kepada Masyarakat melalui saluran atau media, (5) Jumlah kegiatan kerja sama dengan unit kerja internal instansi, (6) Jumlah kegiatan kerja sama dengan pihak eksternal, (7) Kegiatan komunikasi publik terkait keterbukaan Informasi Publik, (8) Kegiatan Komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan Masyarakat (kelompok masyarakat: penyandang disabilitas, lanjut usia, Perempuan, anak – anak dll), (9) Kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi segmen publik di wilayah.

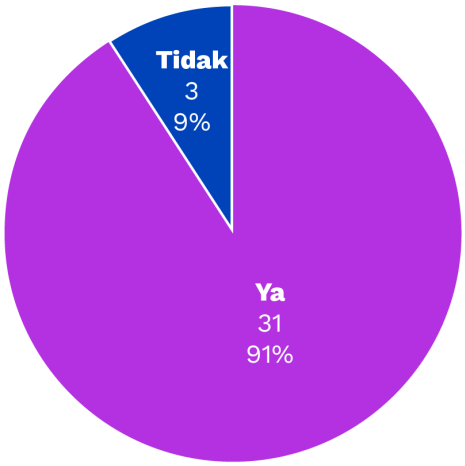


Diagram 2.70 Proporsi Dinas Kominfo terkait Diseminasi Informasi tentang Program Prioritas Nasional

Kegiatan Diseminasi Informasi tentang Program Prioritas Nasional

Indikator pertama pada variabel Pelaksanaan kegiatan pengelolaan IKP di tingkat Dinas Kominfo adalah kegiatan penyebarluasan informasi Program Prioritas Nasional selama kurun waktu Januari sampai Juni 2024.

Hasil studi ini menunjukkan, sebanyak 31 Dinas Kominfo (91,2%) telah melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi Program Prioritas Nasional. Jika dibandingkan dengan studi yang sama di tahun 2023, jumlah ini meningkat meski tidak signifikan (3,33%). Kendati demikian, masih ada 3 Dinas Kominfo (8,8%) yang tidak melaksanakan kegiatan dimaksud.

Tabel 2.11 Frekuensi Penyebaran Informasi Program Prioritas Nasional

Respons	Frekuensi	Persentase (%)
a. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)/PLTS (Tenaga Surya)/PLTM (Minihidro)/ PLTPB (Panas Bumi)/Program Hemat Listrik/ Pemanfaatan Panel Surya di Rumah Tangga/ Pengunaan Kendaraan Dinas Listrik	8	25.81%
b. Pembangunan Bendung, Pembangunan Saluran Irigasi, Hutan Pembangunan Bendung/ Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Irigasi/Hutan Lindung/Hutan Konservasi/Reboisasi/ Penghijauan/ Pemulihan Lahan Mangrove/Gambut	21	67.74%
c. Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam/ Bergizi/ Seimbang dan Aman/Konsumsi Sayur dan Buah/Konsumsi Daging/Konsumsi kacang-kacangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	24	77.42%
d. Bantuan benih ikan/Alat Tangkap/Kapal/Sampan, Budidaya Rumput Laut/ Sentra Produksi Perikanan Budidaya/Penyuluhan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan/ Pelatihan Masyarakat Kelautan Perikanan	21	67.74%
e. Bantuan Modal Usaha Bagi UMKM/Wirausaha/ Literasi Keuangan/ Pelatihan Pemasaran Digital/ Training e-Commerce/ Perluasan Kemitraan UMKM/Waralaba/Franchise/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	21	67.74%
f. Pengurusan Izin Usaha Lebih Mudah dan Cepat/ Sistem Online Single Submission (OSS)/ Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi/ Penjaminan Kepastian Hkum/Kepastian berusaha/Keamanan Berusaha bagi Penanam Modal/Pengolahan Nikel menjadi baterai/Hilirisasi Bioindustri & Batubara	15	48.39%
g. Imbauan Menggunakan Produk Dalam Negeri, Penggunaan HP / Laptop/Mobil buatan dalam negeri/ Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Fasilitasi Ekspor seperti subsidi ekspor bagi pengusaha dalam negeri/Platform Pelayanan Satu Pintu Inaexport	24	77.42%
h. Operasi Pasar Murah/ Operasi Sembako Murah/Gerakan Pangan Murah/Cinta Produk Lokal/ Pembangunan Tol Darat/Tol Laut	29	93.55%
i. Perbaikan Aksesibilitas Dan Fasilitas Wisata Danau Toba/Akses dari Bandara Silangit ke Danau Toba/ Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera	5	16.13%
j. Perbaikan Aksesibilitas dan Fasilitas Wisata Borobudur/ Bromo/ Tengger/ Semeru dan Bali/ Penataan Kawasan/ Jalan/ Penyediaan Air Baku dan Air Bersih/ Pengelolaan Sampah dan Sanitasi	8	25.81%
k. Perbaikan Aksesibilitas dan Fasilitas Wisata Labuan Bajo, Lombok Mandalika/ Bali/ Penataan kawasan/ Jalan/Penyediaan Air Baku dan Air Bersih/Pengelolaan Sampah dan Sanitasi	8	25.81%
l. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)/Kluster Ekonomi/ Identitas Nasional/ Pembangunan Destinasi Pariwisata Sambas-Singkawang	22	70.97%
m. Pembangunan tempat wisata Toraja/Perbaikan Akses dan Fasilitas Wisata Wakatobi/ Wakatobi/Penataan kawasan/jalan/ Penyediaan Air Baku dan Air Bersih/Pengelolaan Sampah dan Sanitasi	5	16.13%
n. Program Gerbangdutas (Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan)/Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/ Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Maluku/Pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku/Tata kelola Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang Baik	5	16.13%
o. Perbaikan Akses & Fasilitas Wisata Raja Ampat/ Penataan kawasan/Jalan/Penyediaan Air Baku dan Air bersih/Pengelolaan sampah dan sanitasi/Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan/Pendidikan dan kualitas SDM di wilayah Papua	3	9.68%
p. Proses Pendaftaran Adminstrasi Kependudukan (KTP/KK/Akta Kelahiran dll) yang sudah berbasis online melalui web atau aplikasi/ Penguatnya Integrasi Data Administrasi Kependudukan (KTP)/Satu Data Indonesia/Pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	25	80.65%
q. Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Sembako/ Program Indonesia Pintar (PIP)/ Kartu Indonesia Pintar (KIP)/ Kuliah/Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Program Bantuan Sosial (BLT/Pemulihan Ekonomi Nasional)	20	64.52%
r. Program BPJS/Kartu Indonesia Sehat (KIS)/ Sosialisasi Penurunan Stunting/ Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal/ Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)/ Vaksinasi Covid19/ HIV/Hepatitis/TBC	28	90.32%
s. Internet untuk pembelajaran di sekolah/Kampus Merdeka/Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila/ Kelas online/Kuis/Presentasi yang atraktif/Integrasi Softskill dalam proses pembelajaran (sopan santun) dan ekstrakurikuler	18	58.06%
t. Perlindungan dari Pelecehan Seksual Perempuan dan Anak di bawah Umur/Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan/Eksploitasi dan Perlakuan Salah/lainnya/ Pelayanan Pengaduan/ Pengelolaan Kasus/ Akses Penampungan Sementara, Pelayanan Mediasi/ Pelayanan Pendampingan Korban	22	70.97%
u. Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)/Model Usaha Ultra Mikro/ Bantuan CSR dari Perusahaan Swasta/ Negeri/ Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk integrasi Bansos	18	58.06%

Respons	Frekuensi	Persentase (%)
v. Digital Talent Scholarship bagi lulusan baru/Politeknik Negeri (Pendidikan Vokasi)/ Peningkatan kualifikasi Tenaga Dosen dengan Pendidikan Lanjutan ke S2 dan S3	12	38.71%
w. Program Sekolah Bebas Perundungan/Bullying/ Menumbuhkan Kehidupan Pergaulan yang Harmonis dan Kebersamaan Antar Peserta Didik dengan Tenaga Pendidik, Orang Tua serta Masyarakat	21	67.74%
x. Penyelenggaraan Festival Budaya/Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Museum/ Pengembangan Produk Seni, Budaya dan Film	25	80.65%
y. Program Kampung Moderasi (KMB)/Pelatihan Penggerak Moderasi Beragama/ Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama/ Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	20	64.52%
z. Program Merdeka Belajar/Program Gemar Membaca/ Pembangunan Perpustakaan Daerah/ Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional/ Penggunaan Bahasa Indonesia di Forum Internasional	18	58.06%
aa. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi/Subsidi rumah dengan bunga 0%/ Pembangunan dan Penyediaan Rumah Layak Huni dan Korban Bencana/ Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (PLN/PAM/Telkom)	13	41.94%
ab. Pembangunan Jalan Tol/Pembangunan Jalan Strategis di Kota / Daerah/ Pembangunan KA Medium Speed Jakarta-Surabaya/Tol Trans Sumatera/ Tol Trans Jawa	16	51.61%
ac. Pembangunan Jembatan/ MRT/LRT/BRT (Bus Rapid Transit)/ Pembangunan Jalan Perkotaan/ Flyover Underpass	13	41.94%
ad. Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (Sutet)/Program Listrik Masuk Desa/ Penambahan Penyalur BBM satu harga/Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan/ Sistem Transmisi Listrik Terintegrasi/ Meteran Listrik Pintar	9	29.03%
ae. Literasi Digital/Pemblokiran Konten Negatif/Judi Online/Pelatihan Digital Entrepreneurship/ QRIS, Akses 4G Di Daerah 3T/ Palapa Ring/Satelit Broadband	27	87.1%
af. Sistem dan Instrumentasi Pemantauan Kualitas Air, Sungai, Danau dan Udara secara Real-Time/ Alat Pemantauan Kualitas Air Laut secara Manual/ Komunitas Peduli Lingkungan Hidup/Produk Ramah Lingkungan/Daur Ulang	19	61.29%
ag. Pembangunan Pusat Studi Tsunami dan Mitigasi Bencana/ Gerakan Literasi Bencana sebagai Edukasi Bencana/Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana/ Kelompok Masyarakat Tangguh Bencana	16	51.61%
ah. Sosialisasi/Ajakan menggunakan angkutan umum (Bus, Kereta, MRT)/Penggunaan Panel Surya/Tenaga Panas Bumi/Pemanfaatan Biofuel/Efisiensi dan Konservasi Eenergi/Teknologi Rendah Energi (LED, Inverter) /Kendaraan Listrik	14	45.16%
ai. Konten Sosialisasi World Water Forum/Sosialisasi Pemilu/Sosialisasi Pilkada/Sosialisasi Penurunan Stunting	29	93.55%
aj. Peningkatan Kapasitas Pekerja Migran (TKI)/ Penguatan Sistem Perlindungan Pekerja Migran (TKI)/ Sosialisasi Wonderful Indonesia/Tanda Batas Negara/ Peta Batas Negara	8	25.81%
ak. Pengadaan Barang dan Jasa Menggunakan E-Katalog/ Digitalisasi Pembayaran Pajak/ Digitalisasi Pelayanan Publik/ Penguatan Partai Politik dalam Pencegahan Korupsi	24	77.42%
al. Layanan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR/Portal pelayanan publik/ Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)/ Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)	28	90.32%
am. Penanganan Terorisme/Jumlah Pos Polisi yang dibangun di Perbatasan/ Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan/Sarana Prasarana Pertahanan di Pulau Kecil Terluar	9	29.03%

Hasil studi ini menunjukkan bahwa program Operasi Pasar Murah/ Operasi Sembako Murah/Gerakan Pangan Murah/Cinta Produk Lokal/Pembangunan Tol Darat/Tol Laut dan Konten Sosialisasi World Water Forum/Sosialisasi Pemilu/Sosialisasi Pilkada/ Sosialisasi Penurunan Stunting paling sering didiseminasikan oleh 29 Dinas Kominfo (93,55%).

Kegiatan Diseminasi Informasi Narasi Tunggal dan Data Pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komdigi

Indikator kedua pada variabel Pelaksanaan kegiatan pengelolaan IKP di tingkat Dinas Kominfo adalah kegiatan diseminasi informasi Narasi Tunggal dan data pendukung lainnya kepada publik. Sesuai amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kominfo diamanatkan untuk menyebarluaskan Narasi Tunggal dan data pendukung yang disusun oleh Kementerian Komdigi.

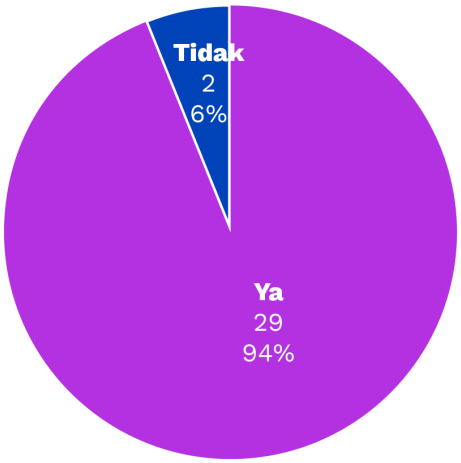


Diagram 2.71 Proporsi Dinas Kominfo dalam Penyebarluasan Narasi Tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah dari Kementerian Komdigi

Hasil studi menunjukkan, pada umumnya Dinas Kominfo telah menyebarkan Narasi Tunggal dengan presentasi 93,5% atau 29 Dinas Kominfo menyebarkan dan ada 2 yang tidak menyebarkan, serta 2 Dinas Kominfo tidak menjawab.

Jumlah Koordinasi Unit Kerja dengan Kementerian Komdigi

Indikator ketiga variabel Pelaksanaan kegiatan pengelolaan IKP di tingkat Dinas Kominfo adalah jumlah koordinasi unit kerja yang melaksanakan pelayanan informasi dan kehumasan dengan Kementerian Komdigi. Dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2015 Kementerian Komdigi diamanatkan untuk mengordinasikan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan Program Pemerintah. Karena itu Dinas Kominfo diamanatkan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Komdigi.

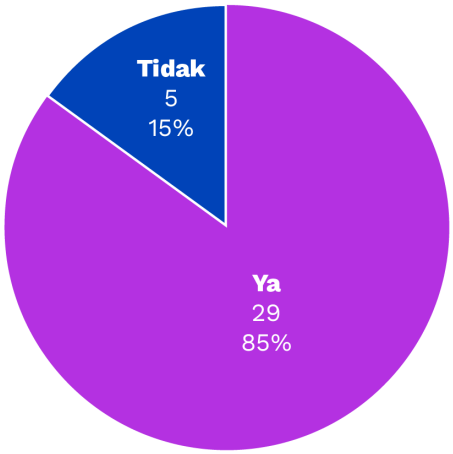


Diagram 2.72 Koordinasi dengan Kementerian Komdigi dalam rangka Penyebarluasan Informasi periode Januari - Juni 2024

Dari hasil studi ini diketahui ada 29 Dinas Kominfo (85,3%) yang telah berkoordinasi dengan Kementerian Komdigi dan 5 Dinas Kominfo (14,7%) tidak melakukan. Jika dibandingkan dengan studi yang sama di tahun 2023, terdapat penurunan jumlah Dinas Kominfo yang melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Komdigi, dimana pada tahun 2023 terdapat 31 Dinas Kominfo yang telah berkoordinasi dengan vv Komdigi.

Frekuensi Dinas Kominfo saat Koordinasi dengan Kementerian Komdigi dalam rangka Penyebarluasan Informasi

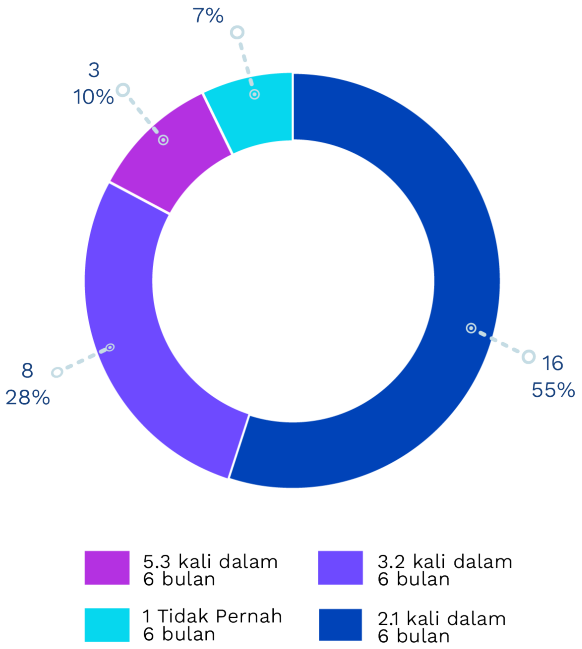


Diagram 2.73 Frekuensi Dinas Kominfo saat Koordinasi dengan Kementerian Komdigi dalam rangka Penyebarluasan Informasi

Berdasarkan studi ini juga diketahui ada 16 Dinas Kominfo (55,2%) yang berkoordinasi lebih dari 3 kali dalam enam bulan, 8 Dinas Kominfo (27,6%) berkoordinasi 1 kali dalam enam bulan, 3 Dinas Kominfo (10,3%) berkoordinasi 2 kali dalam enam bulan, 2 Dinas Kominfo (6,9%) berkoordinasi 3 kali dalam enam bulan.

Kegiatan Diseminasi informasi Kebijakan dan Program Pemerintah kepada Masyarakat melalui Saluran Komunikasi atau Media

Indikator keempat variabel Pelaksanaan kegiatan IKP di tingkat Dinas Kominfo adalah kegiatan diseminasi informasi kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat melalui saluran atau media. Dalam penyebarluasan informasi kebijakan dan program pemerintah, Dinas Kominfo dapat menggunakan berbagai jenis saluran komunikasi atau media, baik media konvensional maupun media digital. Mengingat keduanya memiliki manfaat penting dalam meningkatkan penyebaran informasi dengan cepat dan efektif kepada seluruh masyarakat.

Tabel 2.12 Frekuensi Penggunaan Media Konvensional dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah

Media	Tidak pernah	Satu kali dalam enam bulan	Dua kali dalam enam bulan	Tiga kali dalam enam bulan	Lebih dari tiga kali dalam enam bulan
Media cetak konvensional (co. tabloid, newsletter, atau majalah)	5	2	2	3	22
Media elektronik konvensional (co. TV, radio)	3	4	1	4	22
Pertunjukan Rakyat	21	6	2	1	4
Pertemuan tatap muka dengan publik (sarasehan, forum, diskusi publik, seminar, gerai pameran, workshop/lokakarya)	3	8	3	4	16
Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok komunitas lainnya	10	10	3	2	9
Pertemuan tatap muka dengan awak media (konferensi pers, media briefing, media visit/tour)	3	10	6	3	12
Forum Bakohumas	20	8	1	2	3
Meja Informasi PPID	4	5	4	1	20
GPR TV	20	6	1	0	7

Media	Tidak pernah	Satu kali dalam enam bulan	Dua kali dalam enam bulan	Tiga kali dalam enam bulan	Lebih dari tiga kali dalam enam bulan
Media cetak konvensional (co. tabloid, newsletter, atau majalah)	14.71	5.88	5.88	8.82	64.71
Media elektronik konvensional (co. TV, radio)	8.82	11.76	2.94	11.76	64.71
Pertunjukan Rakyat	61.76	17.65	5.88	2.94	11.76
Pertemuan tatap muka dengan publik (sarasehan, forum, diskusi publik, seminar, gerai pameran, workshop/lokakarya)	8.82	23.53	8.82	11.76	47.06
Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok komunitas lainnya	29.41	29.41	8.82	5.88	26.47
Pertemuan tatap muka dengan awak media (konferensi pers, media briefing, media visit/tour)	8.82	29.41	17.65	8.82	35.29
Forum Bakohumas	58.82	23.53	2.94	5.88	8.82
Meja Informasi PPID	11.76	14.71	11.76	2.94	58.82
GPR TV	58.82	17.65	2.94	0.00	20.59

Dari Tabel 2.12 di atas menunjukkan sebanyak 22 Dinas Kominfo menggunakan media cetak konvensional dalam menyampaikan informasi kebijakan dan program pemerintah seperti tabloid, newsletter, atau majalah dan 22 Dinas Kominfo menggunakan media elektronik konvensional seperti TV dan radio, dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam enam bulan. Sementara media konvensional yang paling sedikit digunakan oleh 3 Dinas Kominfo yaitu Forum Bakohumas dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam enam bulan.

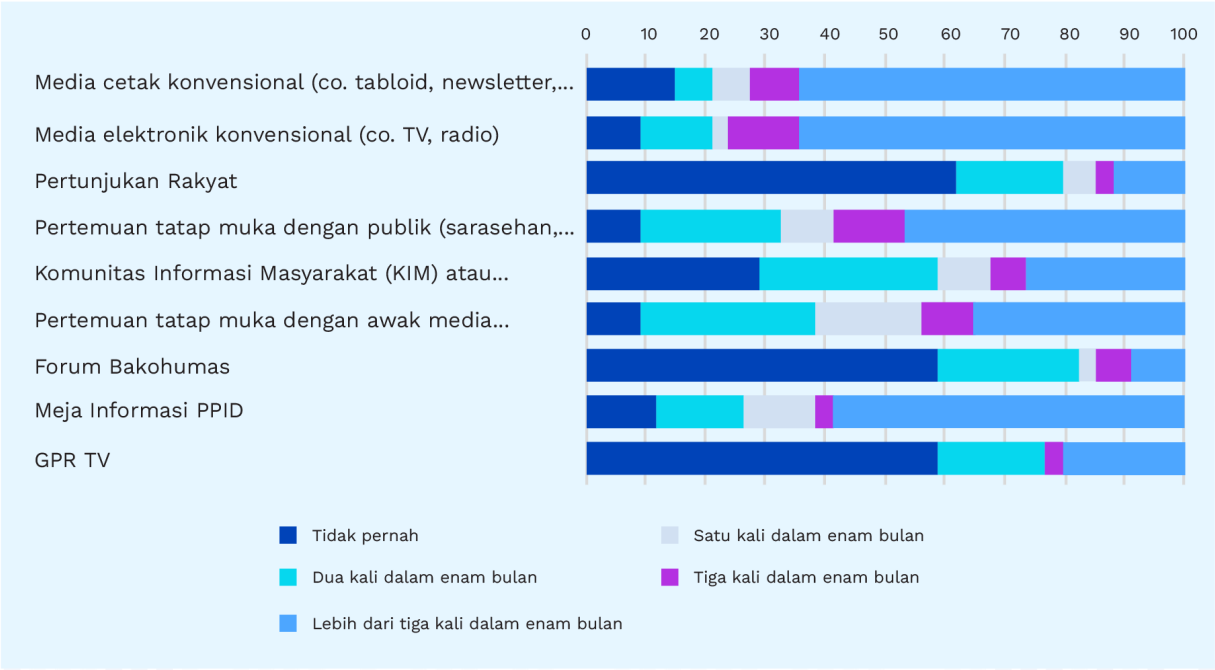


Diagram 2.74 Frekuensi Penggunaan Media Konvensional dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah

vv

Tabel 2.13 Frekuensi Penggunaan Media Digital dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah

Media	Tidak pernah	Satu kali dalam enam bulan	Dua kali dalam enam bulan	Tiga kali dalam enam bulan	Lebih dari tiga kali dalam enam bulan
Akun resmi Media Sosial (co. Channel Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dsb)	0	2	1	0	31
Widget	18	2	0	0	14
Instant Messaging (contoh: Whatsapp, Telegram, LINE)	9	1	0	0	24
Website	0	1	1	0	32
Email	11	4	5	0	14
Fitur Khusus Untuk Penyandang Disabilitas	12	6	2	2	12
Media atau Saluran Lainnya:	19	3	1	0	11

Media	Tidak pernah	Satu kali dalam enam bulan	Dua kali dalam enam bulan	Tiga kali dalam enam bulan	Lebih dari tiga kali dalam enam bulan
Akun resmi Media Sosial (co. Channel Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dsb)	0.00	5.88	2.94	0.00	91.18
Widget	52.94	5.88	0.00	0.00	41.18
Instant Messaging (contoh: Whatsapp, Telegram, LINE)	26.47	2.94	0.00	0.00	70.59
Website	0.00	2.94	2.94	0.00	94.12
Email	32.35	11.76	14.71	0.00	41.18
Fitur Khusus Untuk Penyandang Disabilitas	35.29	17.65	5.88	5.88	35.29
Media atau Saluran Lainnya:	55.88	8.82	2.94	0.00	32.35

Dari Tabel 2.14 di atas menunjukkan sebanyak 32 Dinas Kominfo menggunakan media digital seperti website dan 31 Dinas Kominfo menggunakan akun resmi media sosial seperti Channel Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dan sebagainya, dalam menyampaikan informasi kebijakan dan program pemerintah dengan frekuensi masing-masing lebih dari 3 kali dalam enam bulan. Sementara media digital yang paling sedikit digunakan oleh 11 Dinas Kominfo yaitu media atau saluran lainnya, dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam enam bulan.

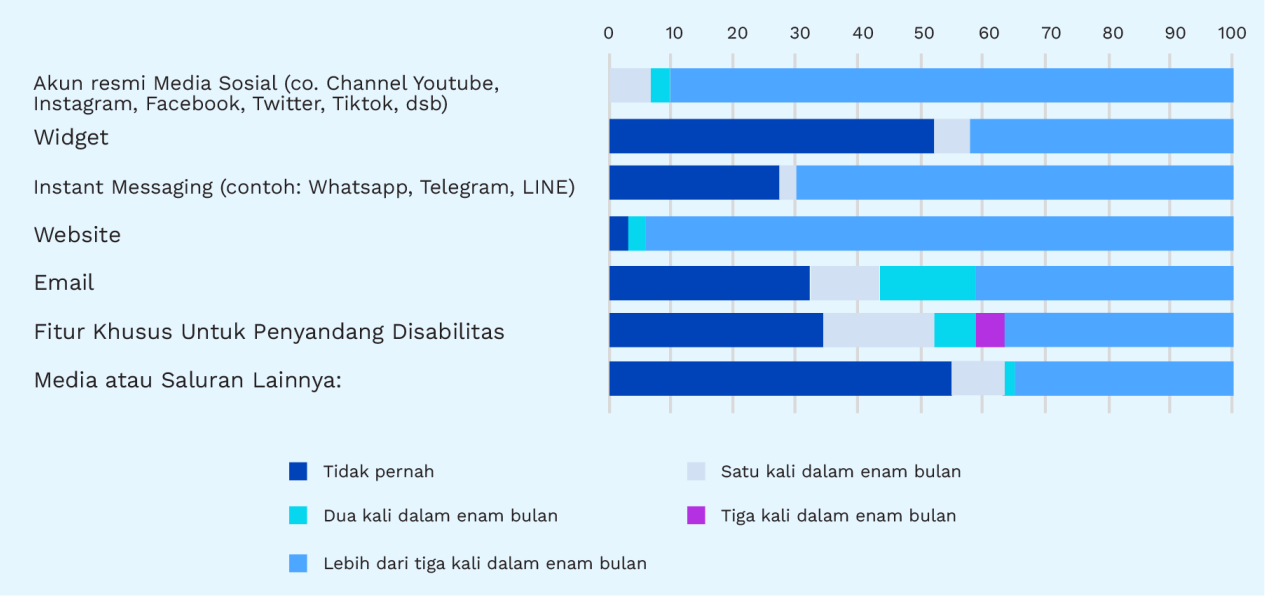


Diagram 2.75 Frekuensi Penggunaan Media Digital dalam Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah

Kegiatan Kerja Sama dengan Unit Kerja Internal

Indikator ke-lima pada variabel Pelaksanaan dalam pengelolaan IKP adalah frekuensi kegiatan kerja sama antara unit kerja pelaksana layanan informasi dan kehumasan dengan unit kerja lainnya di internal Dinas Kominfo.

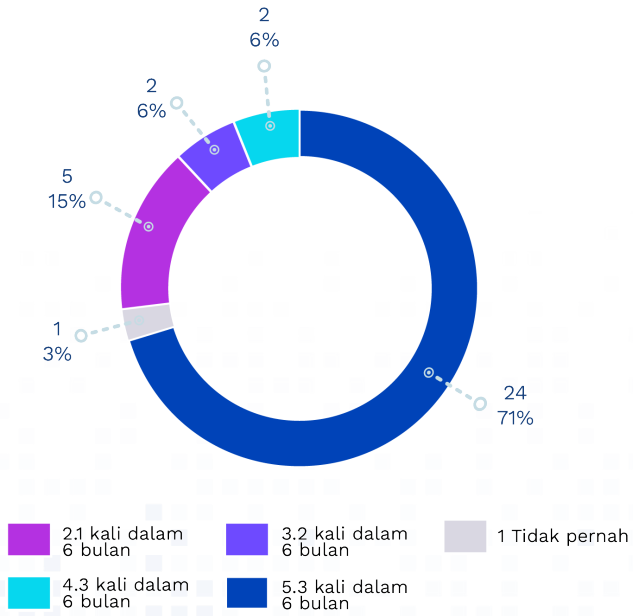


Diagram 2.76 Proporsi Dinas Kominfo menurut Frekuensi Kegiatan Kerjasama dengan Unit Kerja Internal

Hasil studi ini menunjukkan 24 Dinas Kominfo (70,6%) melaksanakan kegiatan kerjasama dengn unit kerja internal dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam enam bulan, 2 Dinas Kominfo (5,9%) melaksanakan dengan frekuensi 3 kali dalam enam bulan, 2 Dinas Kominfo (5,9%) melaksanakan dengan frekuensi 3 kali dalam enam bulan, 2 Dinas Kominfo (5,9%) melaksanakan dengan frekuensi 2 kali dalam enam bulan, 5 Dinas Kominfo (14,7%) melaksanakan dengan frekuensi 1 kali dalam enam bulan dan 1 Dinas Kominfo (2,9%) tidak pernah melaksanakan kegiatan dimaksud.

Kegiatan Kerjasama dengan Unit Kerja Pihak Eksternal

Indikator ke-enam pada variabel Pelaksanaan dalam pengelolaan IKP adalah frekuensi kegiatan kerja sama antara unit kerja pelaksana layanan informasi dan kehumasan dengan unit kerja lainnya di eksternal Dinas Kominfo, seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, perusahaan/asosiasi industry, asosiasi profesi/kelompok masyarakat dan kelompok akademisi/Universitas.

Tabel 2.14 Frekuensi Kerjasama antara Unit Kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan dengan instansi eksternal Dinas Kominfo

	Tidak pernah	Satu kali dalam enam bulan	Dua kali dalam enam bulan	Tiga kali dalam enam bulan	Lebih dari tiga kali dalam enam bulan
a. Lembaga Legislatif Daerah	3	10	1	3	17
b. Lembaga Yudikatif Perwakilan di Daerah	9	9	3	4	9
c. Perusahaan/ Asosiasi Industri	8	6	5	3	12
d. Asosiasi Profesi / Kelompok Masyarakat	5	6	2	5	16
e. Kelompok Akademisi / Universitas	3	9	3	4	15
f. Perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah	5	3	4	4	18
g. Pemangku Kepentingan Lainnya yang mendukung pelayanan informasi dan kehumasan	8	6	3	1	16
h. Lembaga pemerintah maupun non pemerintah skala internasional	20	4	2	0	8

	Tidak pernah	Satu kali dalam enam bulan	Dua kali dalam enam bulan	Tiga kali dalam enam bulan	Lebih dari tiga kali dalam enam bulan
a. Lembaga Legislatif Daerah	8.82	29.41	2.94	8.82	50.00
b. Lembaga Yudikatif Perwakilan di Daerah	26.47	26.47	8.82	11.76	26.47
c. Perusahaan/ Asosiasi Industri	23.53	17.65	14.71	8.82	35.29
d. Asosiasi Profesi / Kelompok Masyarakat	14.71	17.65	5.88	14.71	47.06
e. Kelompok Akademisi / Universitas	8.82	26.47	8.82	11.76	44.12
f. Perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah	14.71	8.82	11.76	11.76	52.94
g. Pemangku Kepentingan Lainnya yang mendukung pelayanan informasi dan kehumasan	23.53	17.65	8.82	2.94	47.06
h. Lembaga pemerintah maupun non pemerintah skala internasional	58.82	11.76	5.88	0.00	23.53

Hasil studi ini menunjukkan sebanyak 8 Dinas Kominfo telah melaksanakan kegiatan kerja sama dengan pihak eksternal instansi, yaitu Perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah dengan frekuensi lebih dari tiga kali dalam enam bulan

untuk presentasenya terdapat pada diagram berikut

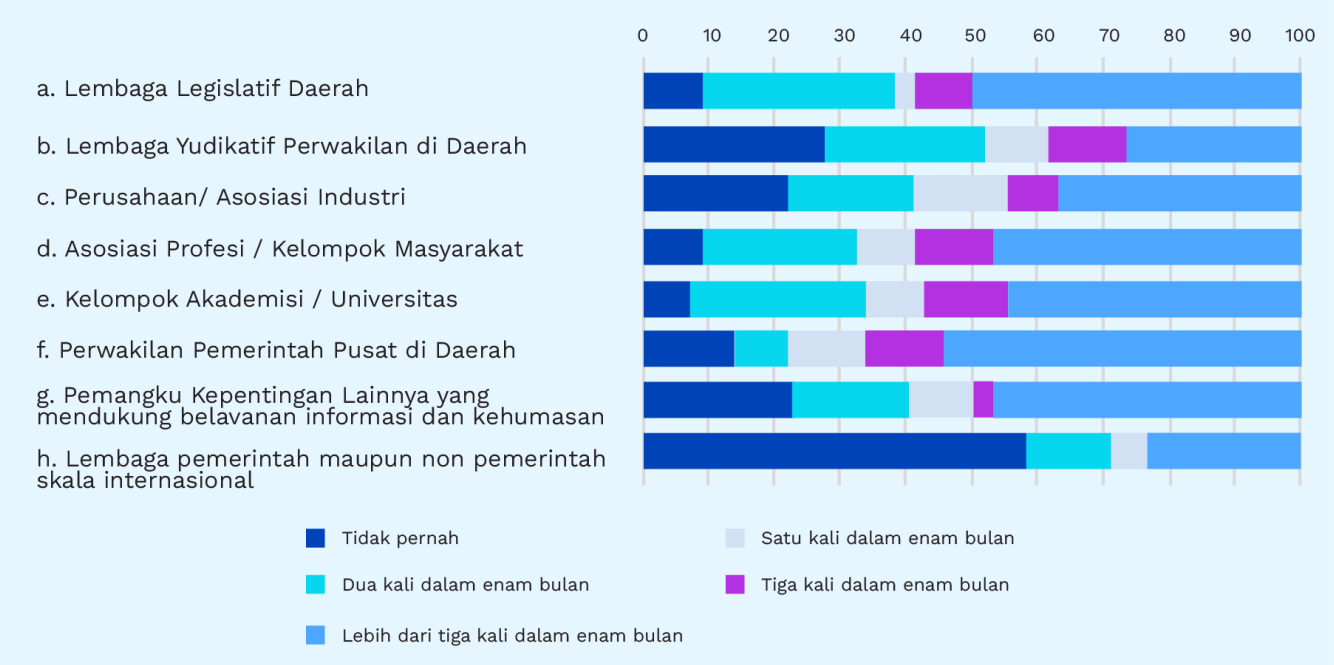


Diagram 2.77 Frekuensi Kerjasama antara Unit Kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan dengan instansi eksternal Dinas Kominfo)

Kegiatan Komunikasi Publik terkait Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik

Indikator ke-tujuh dalam variabel pelaksanaan kegiatan pengelolaan IKP di tingkat Dinas Kominfo adalah penyediaan dan penyampaian informasi publik sesuai empat jenis informasi yang disediakan Dinas Kominfo berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Studi ini mengukur apakah Dinas Kominfo melaksanakan amanat UU 14 Tahun 2008 dalam menyampaikan jenis informasi yang dimaksud dalam UU KIP, antara lain Penyampaian Informasi secara berkala, Penyampaian Informasi Serta merta, Penyampaian informasi tersedia setiap saat dan Penyampaian mekanise memperoleh informasi publik

Tabel 2.15 Frekuensi Kegiatan Komunikasi Publik berdasarkan UU KIP

	Tidak pernah	Satu kali dalam enam bulan	Dua kali dalam enam bulan	Tiga kali dalam enam bulan	Lebih dari tiga kali dalam enam bulan
Penyampaian Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala	1	6	4	4	
Penyampaian Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta	2	6	3	3	20
Penyampaian Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat	1	6	3	3	21
Penyampaian Pengumuman Tentang Layanan Informasi Publik (termasuk mekanisme memperoleh informasi publik)	1	5	5	4	19

Hasil studi menunjukkan sebanyak 21 Dinas Kominfo menyampaikan informasi yang wajib tersedia setiap saat, 20 Dinas Kominfo menyampaikan informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, 19 Dinas Kominfo menyampaikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan 19 Dinas Kominfo menyampaikan pengumuman tentang layanan informasi publik (termasuk mekanisme memperoleh informasi publik) dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam enam bulan, seperti terlihat dalam tabel 2..... di atas

Kegiatan Komunikasi Publik yang memenuhi Kebutuhan Lapisan Masyarakat

Indikator ke-delapan dalam variabel pelaksanaan kegiatan pengelolaan IKP di tingkat Dinas Kominfo adalah Kegiatan Komunikasi Publik yang memenuhi Kebutuhan Lapisan Masyarakat. Dalam rangka pemerataan informasi, pelaksanaan kegiatan komunikasi publik oleh Dinas Kominfo diharapkan dapat memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat, seperti kelompok masyarakat penyandang disabilitas, kelompok masyarakat lanjut usia, kelompok masyarakat perempuan, kelompok masyarakat anak-anak, kelompok masyarakat lainnya yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.16 Distribusi Kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan Masyarakat

Kelompok	Jumlah Provinsi	Persentase (%)
Kegiatan komunikasi publik untuk masyarakat di wilayah 3T	12	35.29
Kegiatan komunikasi publik untuk masyarakat di wilayah pedesaan	21	61.76
Kegiatan komunikasi publik untuk masyarakat di wilayah perkotaan	22	64.71
Kegiatan komunikasi publik untuk masyarakat wilayah lainnya	10	29.41

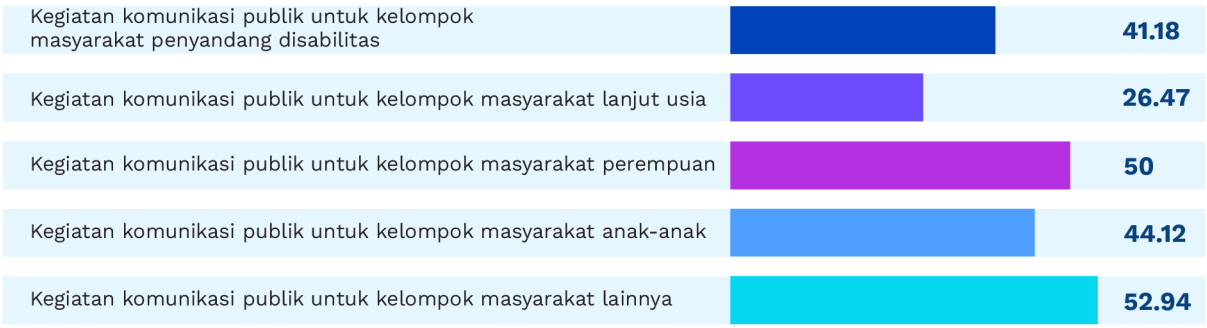


Diagram 2.78 Distribusi Kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan Masyarakat

Hasil studi ini menunjukan terdapat penurunan kegiatan komunikasi publik untuk kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Di tahun 2024 ini ada 14 Dinas Kominfo yang melaksanakannya, turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 17 Dinas Kominfo (50%). Pada kelompok lanjut usia terdapat 9 Dinas Kominfo yang telah melaksanakan, terdapat penurunan dari tahun 2023 yang berjumlah 11 Dinas Kominfo (32,4%). Pada kelompok masyarakat perempuan terdapat 17 Dinas Kominfo yang melaksanakan, terdapat penurunan dari tahun 2023 yang berjumlah 22 (64,7%). Pada kelompok masyarakat anak – anak ada 15 Dinas Kominfo yang melaksanakan (44,12%), terdapat penurunan juga di tahun sebelumnya, ada 18 Dinas Kominfo (52,9%) yang melaksanakan. Namun pada kelompok lainnya, terdapat kenaikan, dimana tahun 2024 ada 18 Dinas Kominfo, namun di tahun 2023 ada 15 Dinas Kominfo.



Kegiatan Komunikasi Publik yang memperhatikan Kebutuhan Informasi Segmen Publik di Wilayah

Selain memperhatikan kebutuhan kelompok masyarakat, pelaksanaan kegiatan komunikasi publik oleh Dinas Kominfo diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat di wilayah 3T, kelompok masyarakat di wilayah perkotaan, kelompok masyarakat di wilayah pedesaan. Hasil studi ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.17 Distribusi Kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan Informasi segmen publik di wilayah

Kelompok	Jumlah Provinsi	Persentase (%)
Kegiatan komunikasi publik untuk masyarakat di wilayah 3T	12	35.29
Kegiatan komunikasi publik untuk masyarakat di wilayah pedesaan	21	61.76
Kegiatan komunikasi publik untuk masyarakat di wilayah perkotaan	22	64.71
Kegiatan komunikasi publik untuk masyarakat wilayah lainnya	10	29.41



Diagram 2.79 Distribusi Kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan segmentasi kewilayahan

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Terhadap Proses Pelaksanaan Program/ Kegiatan

Kegiatan monitoring dan evaluasi memiliki peran penting dalam pengelolaan IKP. Monitoring dan evaluasi membantu menilai sejauhmana pesan atau informasi publik yang disampaikan kepada publik dapat diterima dan dipahami dengan baik. Hal ini penting untuk memastikan strategi komunikasi yang digunakan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, Monitoring dan evaluasi juga memberikan umpan balik yang berguna untuk memperbaiki atau menyesuaikan strategi komunikasi agar lebih efektif.

Berikut disajikan hasil studi ini terkait monitoring dan evaluasi pengelolaan IKP. Monitoring dan Evaluasi dalam pengukuran ini terdiri dari tiga indikator, (1) Monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kominfo, (2) Monitoring dan evaluasi media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kominfo; (3) Pembuatan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Dinas Kominfo.

Monitoring Dan Evaluasi terhadap Proses Pelaksanaan Program/ Kegiatan Dinas Kominfo

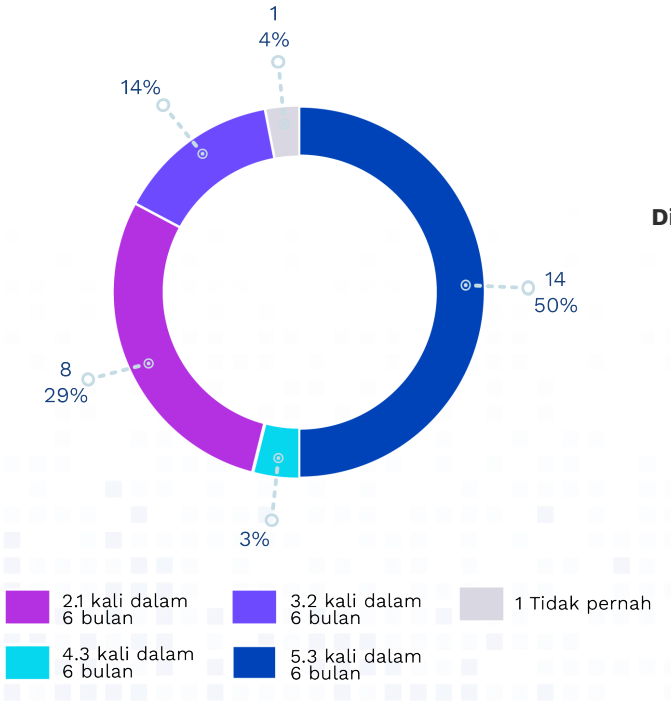


Diagram 2.80 Proporsi Dinas Kominfo menurut Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan

Hasil studi ini menunjukkan, frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut: Sebanyak 14 Dinas Kominfo (50%) melaksanakan monitoring dan evalusi lebih dari 3 kali dalam enam bulan, ada 1 Dinas Kominfo (3,6%) yang melaksanakan 3 kali dalam enam bulan, 4 Dinas Kominfo (14,3%) melaksanakan 2 kali dalam enam bulan, 8 Dinas Kominfo (28,6%) melaksanakan 1 kali dalam enam bulan. Namun masih ada 1 Dinas Kominfo (3,6%) yang tidak pernah melaksanakannya.

Monitoring dan evaluasi media terkait liputan tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kominfo;

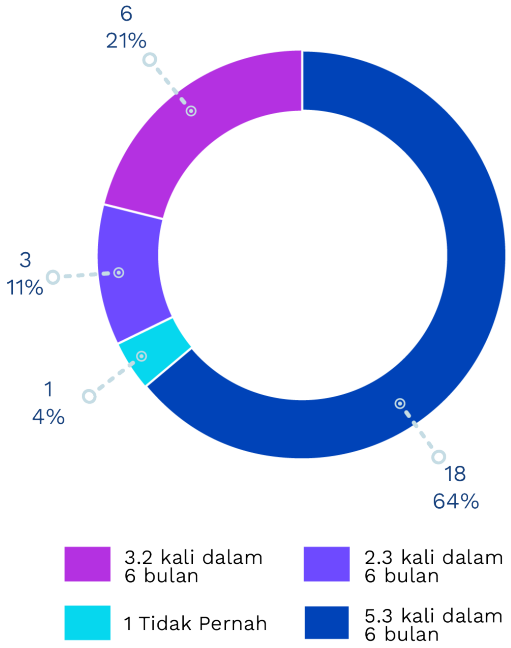


Diagram2.81 Proporsi Dinas Kominfo menurut Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi terkait Liputan tentang Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan

Hasil studi menunjukkan, dalam proses monitoring dan evaluasi terkait liputan tentang hasil pelaksanaan program/kegiatan, ada 18 Dinas Kominfo (64,3%) yang melaksanakan lebih dari 3 kali dalam enam bulan dan 6 Dinas Kominfo lainnya (21,4%) melaksanakan 2 kali dalam enam bulan. Sementara 3 Dinas Kominfo (10,7%) melaksanakan 1 kali dalam enam bulan dan 1 Dinas Kominfo (3,6%) tidak pernah melaksanakan monitoring dan evaluasi tersebut.

Pembuatan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Dinas Kominfo

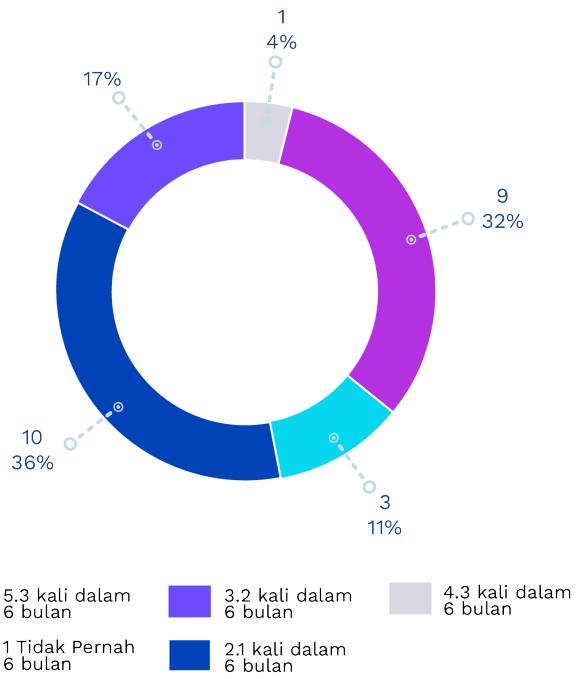




Diagram 2.82 Proporsi Dinas Kominfo menurut Frekuensi Pembuatan dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi" Pelaksanaan Program

Hasil studi ini menunjukkan, 9 Dinas Kominfo (32,1%) melaksanakan pembuatan dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program lebih dari 3 kali dalam enam bulan, 1 Dinas Kominfo (3,6%) melaksanakan 3 kali dalam enam bulan, 5 Dinas Kominfo (17,9%) melaksanakan 2 kali dalam enam bulan, 10 Dinas Kominfo (35,7%) melaksanakan 1 kali dalam enam bulan dan 3 Dinas Kominfo (10,7%) tidak pernah melaksanakan.

D. Kesimpulan Dimensi Proses

Secara umum, hasil pengukuran pada dimensi Proses menunjukkan bahwa proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik di tingkat K/L berada pada kategori "Sedang" (dengan skor 61–70), menghasilkan Indeks Proses sebesar 65,85. Sementara itu, proses PIKP di tingkat Dinas Kominfo juga berada pada kategori "Sedang" dengan Indeks Proses sebesar 60,77.

Di tingkat K/L, ada 22 K/L yang memperoleh kategori "Sangat Baik" pada dimensi Proses, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan yang meraih skor tertinggi pada dimensi Proses dengan nilai 94,36 (Sangat Baik). Sementara itu, 11 K/L mendapat kategori "Baik" pada dimensi Proses, antara lain Badan Pengawasan Obat dan Makanan (78,42), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (77,02), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (76,91)

Sedangkan K/L yang mendapat kategori "Sedang" ada sebanyak 9 K/L, antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (60,48), Kementerian Hukum dan HAM (63,94), Badan Narkotika Nasional (65,46) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (68,20).

Sebanyak 10 K/L mendapat kategori "Buruk" pada dimensi Proses, antara lain Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (50,15), Kementerian Agama (51,10) Bafan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (51,31)



Kategori ”Sangat Buruk” diraih oleh 15 K/L pada dimensi Proses, antara lain: Tentara Nasional Indonesia (18,20) dan Sekretariat Jenderal MPR RI (27,97) dan Badan Pusat Statistik (29,55).

Rata-rata skor untuk pengumpulan data dan informasi di tingkat K/L adalah 63,43 (Sedang), sementara skor Perencanaan rata-rata 73,02 (Baik). Sedangkan skor Pelaksanaan 56,56 (Buruk), serta skor Monitoring dan evaluasi 70,40 (Sedang)

Di tingkat Dinas Kominfo, terdapat 6 Dinas Kominfo yang mendapat kategori ”Sangat Baik” pada dimensi Proses. Skor tertinggi pada dimensi Proses antara lain diraih oleh Dinas Kominfo DKI Jakarta 91,82 (Sangat Baik), Dinas Kominfo Sumatera Utara 91,18 (Sangat Baik) dan Dinas

Kominfo Banten 88,43 (Sangat Baik), Sebaliknya, Maluku Utara (34,19), dan Sulawesi Barat (34,58) memiliki skor terendah dalam kategori “Sangat Buruk”.

Rata-rata skor untuk pengumpulan data dan informasi di tingkat Dinas Kominfo adalah 58,82 (Buruk), perencanaan 72,54 (Baik), pelaksanaan 51,43 (Buruk), dan monitoring serta evaluasi 60,29 (Sedang). Indeks dimensi Proses di tingkat Dinas Kominfo adalah 60,77 (Sedang).

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indeks Proses PIKP di tingkat K/L dan Dinas Kominfo masih jauh dari kategori “Sangat Baik”. Masih adanya instansi yang memperoleh skor kategori “Sangat Buruk” dan “Buruk” menunjukkan perlunya optimalisasi pada dimensi Proses kegiatan pengelolaan IKP berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Kementerian Komdigi perlu melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas proses kehumasan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Sinergi antar unit kerja dan mitra eksternal diharapkan dapat meningkatkan kinerja proses PIKP di masa mendatang. Berikut ini skor dimensi Proses Kementerian/Lembaga

Tabel 2.18 Capaian Indeks Dimensi Proses menurut Kementerian/Lembaga

No.	Kementrian/Lembaga	Dimensi Proses				Dimensi Proses	Kategori
		Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi		
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	100,00	100,00	77,43	100,00	94,36	Sangat Baik
2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	100,00	100,00	76,50	100,00	94,13	Sangat Baik
3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	100,00	100,00	71,41	100,00	92,85	Sangat Baik
4	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	100,00	95,00	75,35	100,00	92,59	Sangat Baik
5	Badan Kepegawaian Negara	100,00	100,00	68,67	100,00	92,17	Sangat Baik
6	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	100,00	85,00	74,15	100,00	89,79	Sangat Baik
7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	100,00	85,00	69,06	100,00	88,51	Sangat Baik
8	Kementerian Ketenagakerjaan	100,00	85,00	66,09	100,00	87,77	Sangat Baik
9	Kementerian Perindustrian	100,00	90,00	55,40	100,00	86,35	Sangat Baik
10	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	75,00	93,75	75,39	100,00	86,03	Sangat Baik
11	Komisi Pemberantasan Korupsi	91,67	90,00	60,69	100,00	85,59	Sangat Baik
12	Badan Riset dan Inovasi Nasional	75,00	90,00	74,04	100,00	84,76	Sangat Baik
13	Badan Siber dan Sandi Negara	83,33	87,50	65,63	100,00	84,11	Sangat Baik
14	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	75,00	90,00	69,48	100,00	83,62	Sangat Baik
15	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100,00	80,00	69,21	83,33	83,14	Sangat Baik
16	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	75,00	90,00	65,74	100,00	82,69	Sangat Baik
17	Kementerian Perhubungan	83,33	77,50	69,29	100,00	82,53	Sangat Baik
18	Kementerian Dalam Negeri	75,00	100,00	53,09	100,00	82,02	Sangat Baik
19	Kementerian Komunikasi dan Digital	100,00	71,25	55,21	100,00	81,61	Sangat Baik
20	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	100,00	78,75	63,43	83,33	81,38	Sangat Baik
21	Komisi Pemilihan Umum	91,67	100,00	65,28	66,67	80,90	Sangat Baik
22	Lembaga Administrasi Negara	66,67	82,50	73,73	100,00	80,72	Sangat Baik
23	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	100,00	90,00	73,69	50,00	78,42	Baik
24	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	100,00	90,00	68,09	50,00	77,02	Baik
25	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	58,33	85,00	64,31	100,00	76,91	Baik
26	Kementerian Pertahanan	66,67	100,00	40,28	100,00	76,74	Baik
27	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	75,00	90,00	44,33	91,67	75,25	Baik
28	Kementerian Keuangan	83,33	90,00	74,23	50,00	74,39	Baik
29	Kementerian Sekretariat Negara	58,33	95,00	76,16	66,67	74,04	Baik
30	Komisi Yudisial	83,33	66,25	61,92	83,33	73,71	Baik
31	Kementerian Sosial	100,00	85,00	76,85	25,00	71,71	Baik
32	Ombudsman	66,67	90,00	60,84	66,67	71,04	Baik
33	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	66,67	68,75	45,95	100,00	70,34	Baik
34	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	41,67	65,00	66,13	100,00	68,20	Sedang
35	Badan Intelijen Negara	58,33	70,00	61,11	83,33	68,19	Sedang
36	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	66,67	85,00	68,94	50,00	67,65	Sedang
37	Kementerian Perdagangan	58,33	65,00	62,00	83,33	67,17	Sedang
38	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	33,33	76,25	58,72	100,00	67,08	Sedang
39	Kepolisian Republik Indonesia	41,67	90,00	30,32	100,00	65,50	Sedang
40	Badan Narkotika Nasional	50,00	81,25	55,59	75,00	65,46	Sedang
41	Kementerian Hukum dan HAM	58,33	46,25	51,20	100,00	63,94	Sedang
42	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	75,00	63,75	44,83	58,33	60,48	Sedang
43	Kementerian Luar Negeri	100,00	52,50	35,73	50,00	59,56	Buruk
44	Mahkamah Agung	66,67	80,00	41,78	33,33	55,45	Buruk
45	Kementerian Pemuda dan Olahraga	58,33	38,75	42,13	75,00	53,55	Buruk

No.	Kementrian/Lembaga	Dimensi Proses				Dimensi Proses	Kategori
		Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi		
46	Badan Standardisasi Nasional	33,33	51,25	61,69	66,67	53,23	Buruk
47	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	58,33	56,25	46,49	50,00	52,77	Buruk
48	Perpustakaan Nasional	58,33	52,50	41,74	58,33	52,73	Buruk
49	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	58,33	73,75	59,65	16,67	52,10	Buruk
50	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	33,33	52,50	44,41	75,00	51,31	Buruk
51	Kementerian Agama	33,33	77,50	68,56	25,00	51,10	Buruk
52	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS	25,00	55,00	45,60	75,00	50,15	Buruk
53	Kementerian Kesehatan	16,67	100,00	58,10	25,00	49,94	Sangat Buruk
54	Sekretariat Kabinet	50,00	71,25	48,73	25,00	48,74	Sangat Buruk
55	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	16,67	77,50	46,18	50,00	47,59	Sangat Buruk
56	Lembaga Ketahanan Nasional	75,00	27,50	43,98	33,33	44,95	Sangat Buruk
57	Badan Keamanan Laut	33,33	55,00	32,52	50,00	42,71	Sangat Buruk
58	Kementerian Pertanian	8,33	41,25	41,98	75,00	41,64	Sangat Buruk
59	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	33,33	50,00	51,39	25,00	39,93	Sangat Buruk
60	Mahkamah Konstitusi	25,00	67,50	24,46	41,67	39,66	Sangat Buruk
61	Arsip Nasional	8,33	65,00	52,66	16,67	35,67	Sangat Buruk
62	Kejaksaan Agung	16,67	47,50	44,48	33,33	35,50	Sangat Buruk
63	Badan Pemeriksa Keuangan	33,33	27,50	48,73	25,00	33,64	Sangat Buruk
64	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	16,67	46,25	46,57	25,00	33,62	Sangat Buruk
65	Badan Pusat Statistik	0,00	35,00	33,22	50,00	29,55	Sangat Buruk
66	Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia	25,00	22,50	39,39	25,00	27,97	Sangat Buruk
67	Tentara Nasional Indonesia	33,33	5,00	9,45	25,00	18,20	Sangat Buruk
Nasional 2024		**63,43**	**73,02**	**56,56**	**70,40**	**65,85**	**Sedang**

Tabel 2.19 Capaian Indeks Dimensi Input menurut Dinas Kominfo Provinsi

No.	Provinsi	Dimensi Proses				Dimensi Proses	Kategori
		Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi		
1	DKI Jakarta	91,67	100,00	75,62	100,00	91,82	Sangat Baik
2	Sumatera Utara	91,67	100,00	73,07	100,00	91,18	Sangat Baik
3	Banten	91,67	93,75	68,29	100,00	88,43	Sangat Baik
4	Kalimantan Barat	83,33	95,00	63,73	100,00	85,52	Sangat Baik
5	Jawa Timur	100,00	65,00	73,23	100,00	84,56	Sangat Baik
6	Riau	66,67	100,00	64,04	100,00	82,68	Sangat Baik
7	Jawa Barat	83,33	71,25	55,56	100,00	77,53	Baik
8	Kalimantan Selatan	83,33	87,50	60,57	75,00	76,60	Baik
9	Sulawesi Selatan	100,00	63,75	45,68	83,33	73,19	Baik
10	Jawa Tengah	83,33	78,75	53,13	75,00	72,55	Baik
11	Kalimantan Timur	66,67	90,00	65,28	66,67	72,15	Baik
12	Bali	83,33	70,00	72,07	58,33	70,93	Baik
13	Maluku	75,00	100,00	46,99	58,33	70,08	Baik
14	Sumatera Selatan	83,33	57,50	52,93	83,33	69,27	Sedang
15	Jambi	58,33	82,50	68,09	66,67	68,90	Sedang
16	Kepulauan Bangka Belitung	91,67	72,50	29,71	75,00	67,22	Sedang
17	Nusa Tenggara Timur	66,67	100,00	49,38	50,00	66,51	Sedang
18	Daerah Istimewa Yogyakarta	50,00	100,00	53,40	50,00	63,35	Sedang
19	Kepulauan Riau	66,67	70,00	54,44	50,00	60,28	Sedang
20	Sumatera Barat	50,00	70,00	70,14	50,00	60,03	Sedang
21	Papua	100,00	85,00	28,63	25,00	59,66	Buruk
22	Sulawesi Utara	50,00	83,75	58,76	33,33	56,46	Buruk
23	Kalimantan Utara	33,33	70,00	49,07	66,67	54,77	Buruk
24	Lampung	41,67	72,50	41,44	50,00	51,40	Buruk
25	Bengkulu	33,33	27,50	36,15	100,00	49,25	Sangat Buruk
26	Aceh	33,33	95,00	58,41	0,00	46,69	Sangat Buruk
27	Nusa Tenggara Barat	25,00	43,75	52,78	50,00	42,88	Sangat Buruk
28	Sulawesi Tengah	16,67	65,00	34,84	25,00	35,38	Sangat Buruk
29	Sulawesi Barat	25,00	52,50	35,80	25,00	34,58	Sangat Buruk
30	Gorontalo	8,33	46,25	40,66	41,67	34,23	Sangat Buruk
31	Maluku Utara	25,00	50,00	36,77	25,00	34,19	Sangat Buruk
32	Kalimantan Tengah	25,00	40,00	32,68	25,00	30,67	Sangat Buruk
33	Sulawesi Tenggara	8,33	31,25	29,59	41,67	27,71	Sangat Buruk
34	Papua Barat	8,33	36,25	17,71	0,00	15,57	Sangat Buruk
Nasional 2024		**58,82**	**72,54**	**51,43**	**60,29**	**60,77**	**Sedang**


AD

2.3 Dimensi Output

A. Pengantar

Dimensi Output dalam penelitian ini menggambarkan hasil dari pelaksanaan program atau kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan upaya diseminasi informasi dan berbagai aktivitas komunikasi publik yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimensi ini menjadi indikator penting untuk memahami perubahan atau pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik oleh K/L dan Dinas Kominfo.

Dimensi ini terdiri atas tiga variabel utama, yaitu (1) Penerimaan informasi, (2) Penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik, dan (3) Penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik. Pertama, variabel penerimaan informasi yang mencakup indikator seperti penerimaan informasi mengenai Program Prioritas Nasional (PPN), media yang menjadi sumber informasi terkait PPN, penerimaan informasi mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan layanan PPID. Kedua, variabel penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik, yang diukur berdasarkan persepsi masyarakat terhadap teknis pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Ketiga, variabel penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik, yang mencakup indikator persepsi masyarakat terhadap akses informasi publik dan kualitas informasi yang disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran ini, rata-rata skor dimensi Output dari 34 ibu kota provinsi adalah 73,06, yang termasuk dalam kategori “Baik”. Skor tertinggi diraih oleh Ibukota Provinsi Bali dengan nilai 80,42 (Sangat Baik), sementara skor terendah ditemukan di Ibukota Provinsi Papua dengan nilai 66,55 (Sedang), yang menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 62,75 (Sedang). Hasil ini menyoroti adanya perbaikan, meskipun masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut di wilayah tersebut.

Pada variabel penerimaan informasi, skor rata-rata yang diperoleh adalah 57,38 (Buruk). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan informasi oleh masyarakat di banyak wilayah masih memerlukan perhatian serius. Skor tertinggi untuk variabel ini diraih oleh Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 69,68 (Sedang), sementara skor terendah, yaitu 39,84 (Sangat Buruk), ditemukan di Ibukota Provinsi Sulawesi Barat.

Hasil pengukuran variabel akses dan kualitas informasi publik juga menunjukkan tren positif. Skor rata-rata untuk variabel ini mencapai 86,93 (Sangat Baik). Skor tertinggi tercatat di Ibukota Provinsi Bali dengan nilai 91,25 (Sangat Baik), sedangkan skor terendah dengan nilai 82,08 (Sangat Baik) ditemukan di Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Tren ini menandakan bahwa meskipun ada tantangan di variabel lain, akses dan kualitas informasi publik di beberapa wilayah sudah mencapai tingkat yang memuaskan.

Untuk variabel penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik, skor rata-rata yang diperoleh menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan nilai 74,86 (Baik). Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat secara umum memiliki pandangan positif terhadap teknis pelayanan informasi yang diberikan pemerintah. Provinsi Bali mencatat skor tertinggi dengan nilai sebesar 84,68 (Sangat Baik), sementara Provinsi Aceh memperoleh skor terendah dengan nilai 56,19 (Buruk).

skor tertinggi dengan nilai sebesar 84,68 (Sangat Baik), sementara Provinsi Aceh memperoleh skor terendah dengan nilai 56,19 (Buruk).

B. Capaian Indeks untuk Dimensi Output

1. Penerimaan Informasi

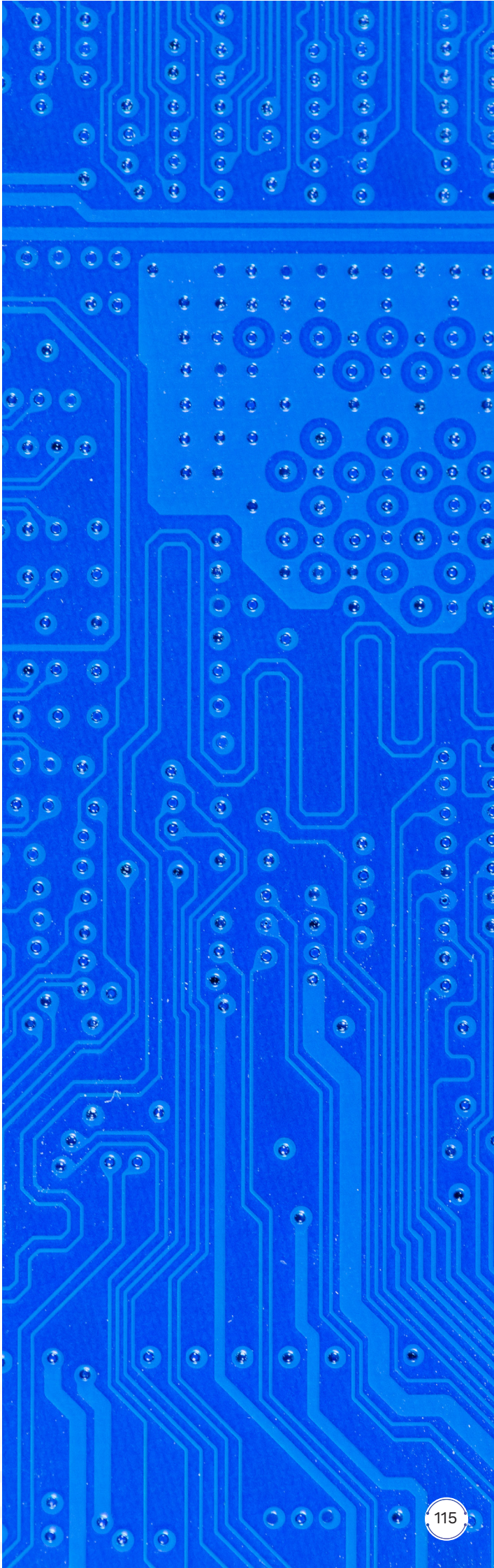
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, variabel agenda penerimaan informasi terdiri atas tiga indikator, yaitu penerimaan informasi mengenai program prioritas nasional, media yang menjadi sumber informasi terkait PPN tersebut, dan penerimaan informasi mengenai PPID dan layanan PPID. Berikut ini uraian penjelasan mengenai variabel dan indikator tersebut.

Penerimaan Informasi mengenai Program Prioritas Nasional.

Program prioritas nasional tahun 2024 tercantum dalam Perpres nomor 84 tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024. PPN merupakan turunan dari kerangka prioritas nasional (PN). Pada tahun 2024, terdapat 7 (tujuh) PN yang terdiri atas tema: (1) ketahanan ekonomi; (2) pengembangan wilayah; (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM); (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) penguatan infrastruktur; (6) pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) penguatan stabilitas polhukhankam (politik, hukum, pertahanan dan keamanan) dan transformasi pelayanan publik. Dari 7 (tujuh) PN tersebut, diuraikan menjadi 39 PP. Pengetahuan publik tentang PP itulah yang dieksplorasi dalam studi ini.

Kejelasan dan pemahaman yang mendalam terhadap suatu kebijakan atau program prioritas memiliki dampak besar terhadap kualitas opini publik. Ketika masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan jelas mengenai program prioritas nasional, mereka cenderung memiliki pemahaman yang lebih objektif terhadap kebijakan tersebut. Hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan penilaian yang lebih konstruktif dan menyuarakan pandangan secara tepat. Sebaliknya, kurangnya informasi atau kesalahpahaman tentang kebijakan dapat memunculkan ketidakpercayaan, opini yang bias, serta menghambat implementasi program di lapangan.

Memastikan kejelasan informasi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kebijakan prioritas nasional menjadi langkah krusial dalam pembangunan. Langkah ini tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga meningkatkan peluang keberhasilan implementasi program-program strategis di berbagai sektor pembangunan nasional.



Tabel 2.20 Indeks Prioritas mengenai Program Prioritas Nasional yang Diketahui oleh Responden

No	Program	Frekuensi (Ya)	Persentase (%)
A	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)/ PLTS (Surya)/ PLTM (Minihidro)/ PLTPB (Panas bumi)/PLTU (Uap)/Program Hemat Listrik/Pemanfaatan Panel Surya di Rumah Tangga/ Penggunaan Kendaraan Dinas Listrik (Ya = 1 dan Tidak = 0)	954	59.625
B	Pembangunan Bendung/Pembangunan Saluran Irigasi/ Hutan Lindung/ Hutan Konservasi/ Reboisasi/Penghijauan/Pemulihan Lahan Mangrove/Gambut (Ya = 1 dan Tidak = 0)	886	55.375
C	Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam/Bergizi/Seimbang dan Aman/Konsumsi Sayur dan Buah/konsumsi Daging/Konsumsi kacang-kacangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (Ya = 1 dan Tidak = 0)	1062	66.375
D	Bantuan benih ikan/Alat tangkap/Kapal/Sampan/Budidaya rumput laut/Sentra Produksi Perikanan Budidaya/Penyuluhan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan/Pelatihan Masyarakat Kelautan Perikanan (Ya = 1 dan Tidak = 0)	694	43.375
E	Bantuan modal usaha bagi UMKM/Wirausaha/Literasi Keuangan/Training eCommerce/Perluasan kemitraan UMKM/Waralaba/Franchise/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Ya = 1 dan Tidak = 0)	1352	84.5
F	Pengurusan izin usaha lebih mudah dan cepat /Sistem Online Single Submission (OSS)/Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi/Penjaminan kepastian hukum/Kepastian berusaha/ Keamanan Berusaha bagi Penanam Modal/Pengolahan nikel menjadi baterai/Hilirisasi Bioindustri & Batubara (Ya = 1 dan Tidak = 0)	878	54.875
G	Penggunaan HP /Laptop/Mobil buatan dalam negeri/Fasilitasi pengembangan produk ekspor/ Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Fasilitasi ekspor seperti subsidi ekspor bagi pengusaha dalam negeri/Platform pelayanan satu pintu InaExport/Customer Service Center Membership (CSC) (Ya = 1 dan Tidak = 0)	906	56.625
H	Operasi Pasar Murah/Operasi Sembako Murah/Gerakan Pangan Murah/Cinta Produk Lokal/ Pembangunan Tol Darat/Tol Laut (Ya = 1 dan Tidak = 0)	1412	88.25
I	Perbaikan aksesibilitas dan fasilitas wisata Danau Toba/Akses dari Bandara Silangit ke Danau Toba/Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (Ya = 1 dan Tidak = 0)	567	35.4375
J	Perbaikan aksesibilitas dan fasilitas wisata Borobudur/Bromo/Tengger/Semeru dan Bali/ Penataan kawasan/jalan/penyediaan air baku dan air bersih/Pengelolaan sampah dan sanitasi (Ya = 1 dan Tidak = 0)	539	33.6875
K	Perbaikan aksesibilitas dan fasilitas wisata Labuan Bajo/Lombok Mandalika/Penataan kawasan/jalan/penyediaan air baku dan air bersih/ pengelolaan sampah dan sanitasi(Ya = 1 dan Tidak = 0)	505	31.5625
L	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)/Kluster Ekonomi/ Identitas Nasional/Pembangunan Destinasi Pariwisata Sambas-Singkawang(Ya = 1 dan Tidak = 0)	1286	80.375
M	Pembangunan tempat wisata Toraja/Perbaikan akses dan fasilitas wisata Wakatobi/Penataan kawasan/jalan/ Penyediaan air baku dan air bersih/Pengelolaan sampah dan sanitasi (Ya = 1 dan Tidak = 0)	485	30.3125
N	Program Gerbangdutas (Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan)/Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/ Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Maluku/Pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku/Tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik (Ya = 1 dan Tidak = 0)	273	17.0625
O	Perbaikan akses dan fasilitas wisata Raja Ampat/Penataan kawasan/jalan/ Penyediaan air baku dan air bersih/Pengelolaan sampah dan sanitasi/Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan/Pendidikan dan kualitas SDM di wilayah Papua (Ya = 1 dan Tidak = 0)	461	28.8125
P	Proses pendaftaran adminstrasi kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran dll) yang sudah berbasis online melalui web atau aplikasi/ Penguatnya integrasi data administrasi kependudukan (KTP)/Satu Data Indonesia/Pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (Ya = 1 dan Tidak = 0)	1433	89.5625
Q	Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Sembako/Program Indonesia Pintar (PIP)/Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah/Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Program Bantuan Sosial (BLT, Pemulihan Ekonomi Nasional) (Ya = 1 dan Tidak = 0)	1515	94.6875
R	Program BPJS/Kartu Indonesia Sehat (KIS)/ Sosialisasi Penurunan Stunting/ Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal/ Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)/ Vaksinasi Covid-19/ HIV/Hepatitis dan TBC (Ya = 1 dan Tidak = 0)	1556	97.25
S	Internet untuk pembelajaran di sekolah/Kampus Merdeka/Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila/ Kelas online/Kuis/Presentasi yang atraktif/Integrasi Softskill dalam proses pembelajaran (sopan santun) dan ekstrakurikuler (Ya = 1 dan Tidak = 0)	1079	67.4375
T	Perlindungan dari pelecehan seksual perempuan dan anak di bawah umur/Perlindungan anak dari tindak kekerasan/eksploitasi dan perlakuan salah lainnya/Pelayanan pengaduan/ Pengelolaan kasus/akses penampungan sementara, pelayanan mediasi/pelayanan pendampingan korban (Ya = 1 dan Tidak = 0)	1176	73.5
U	Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)/Model Usaha Ultra Mikro/Bantuan CSR dari Perusahaan Swasta/Negeri/Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk integrasi Bansos(Ya = 1 dan Tidak = 0)	1340	83.75

No	Program	Frekuensi (Ya)	Persentase (%)
V	Digital Talent Scholarship bagi lulusan baru/Politeknik Negeri (Pendidikan Vokasi)/ Peningkatan kualifikasi tenaga dosen dengan pendidikan lanjutan ke S2 dan S3(Ya = 1 dan Tidak = 0)	447	27.9375
W	Program Sekolah Bebas Perundungan/Bullying/ Menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik dengan tenaga pendidik, orang tua serta masyarakat(Ya = 1 dan Tidak = 0)	1032	64.5
X	Penyelenggaraan Festival Budaya/Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Museum/ Pengembangan produk seni, budaya dan film (Ya = 1 dan Tidak = 0)	977	61.0625
Y	Program Kampung Moderasi (KMB)/Pelatihan Penggerak Moderasi Beragama/ Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama/Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) (Ya = 1 dan Tidak = 0)	669	41.8125
Z	Program Merdeka Belajar/Program Gemar Membaca/Pembangunan Perpustakaan Daerah/ Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional/ Penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional (Ya = 1 dan Tidak = 0)	968	60.5
AA	Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi/Subsidi rumah dengan bunga 0%/Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan korban bencana/Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (PLN, PAM, Telkom) (Ya = 1 dan Tidak = 0)	1226	76.625
AB	Pembangunan Jalan Tol/Pembangunan Jalan Strategis di Kota / Daerah/ Pembangunan KA Medium Speed Jakarta-Surabaya/Tol Trans Sumatera/ Tol Trans Jawa (Ya = 1 dan Tidak = 0)	1110	69.375
AC	Pembangunan Jembatan/ MRT/LRT/BRT (Bus Rapid Transit)/ Pembangunan Jalan Perkotaan/ Flyover Underpass (Ya = 1 dan Tidak = 0)	1089	68.0625
AD	Pembangunan saluran udara tegangan tinggi (Sutet)/Program listrik masuk desa/ Penambahan Penyalur BBM satu harga/Pembangunan jaringan Gas perkotaan/ Sistem transmisi listrik terintegrasi/ Meteran listrik pintar (Ya = 1 dan Tidak = 0)	914	57.125
AE	Literasi digital/Pemblokiran konten negatif/Judi Online/Pelatihan digital entrepreneurship/ QRIS, Akses 4G di daerah 3T/ Palapa Ring/Satelit Broadband (Ya = 1 dan Tidak = 0)	1211	75.6875
AF	Sistem dan instrumentasi pemantauan kualitas air, sungai, danau dan udara secara real-time/ Alat pemantauan kualitas air laut secara manual/ Komunitas peduli lingkungan hidup/ Produk ramah lingkungan/Daur ulang (Ya = 1 dan Tidak = 0)	772	48.25
AG	Pembangunan Pusat Studi Tsunami dan Mitigasi Bencana/Gerakan Literasi Bencana sebagai edukasi bencana/Sosialisasi pengurangan risiko bencana/ Kelompok Masyarakat Tangguh Bencana (Ya = 1 dan Tidak = 0)	824	51.5
AH	Sosialisasi/Ajakan menggunakan angkutan umum (bus, kereta,MRT)/Penggunaan Panel Surya/ Tenaga Panas Bumi/Pemanfaatan Biofuel/Efisiensi dan konservasi energi/Teknologi Rendah Energi (LED, Inverter)/Kendaraan Listrik (Ya = 1 dan Tidak = 0)	1014	63.375
AI	Sosialisasi World Water Forum/Sosialisasi Pemilu/Sosialisasi Pilkada/Sosialisasi Penurunan Stunting (Ya = 1 dan Tidak = 0)	1274	79.625
AJ	Peningkatan Kapasitas Pekerja Migran/TKI / Penguatan Sistem Perlindungan TKI/Pekerja Migran/Sosialisasi Wonderful Indonesia/Tanda Batas Negara/ Peta Batas Negara (Ya = 1 dan Tidak = 0)	737	46.0625
AK	Pengadaan barang dan jasa menggunakan e-katalog/Digitalisasi Pembayaran Pajak/ Digitalisasi Pelayanan Publik/Penguatan Partai Politik Dalam Pencegahan Korupsi (Ya = 1 dan Tidak = 0)	910	56.875
AL	Layanan pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR/Portal pelayanan publik/Sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) (Ya = 1 dan Tidak = 0)	719	44.9375
AM	Penanganan Terorisme/Jumlah Pos Polisi yang dibangun di Perbatasan/ Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan/Sarpras Pertahanan di Pulau Kecil Terluar(Ya = 1 dan Tidak = 0)	652	40.75

Hasil studi ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih sering menerima informasi yang berkaitan dengan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, seperti Program BPJS/Kartu Indonesia Sehat (KIS), Sosialisasi Penurunan Stunting, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD), Vaksinasi Covid-19, serta program terkait HIV, Hepatitis, dan TBC. Informasi ini diterima oleh 97,25% responden, menjadikannya sebagai tema yang paling dikenal. Sebaliknya, informasi tentang Pembangunan Wilayah Maluku, seperti Program Gerbangdutas (Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan), Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dan tata kelola pelayanan kesehatan di Maluku, hanya diterima oleh 17,06% responden. Ketimpangan sebesar 80,19 poin ini mengindikasikan bahwa adanya ketimpangan dalam distribusi informasi antara tema kesehatan dan pembangunan wilayah tertentu.

Jika dikelompokan berdasarkan kerangka prioritas nasional, responden lebih sering mengetahui atau mendapatkan informasi tentang meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, meliputi peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan (97,25%); penguatan pelaksanaan perlindungan sosial (94,69%); pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan (89,56%); pengentasan kemiskinan (83,75%); peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda (73,50%).

Disamping itu, terkait dengan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, responden lebih sering mengetahui informasi tentang penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi (88,25%). Selanjutnya, terkait mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan lebih sering mengetahui informasi tentang pembangunan wilayah Kalimantan (80,38%). Berikutnya dalam hal revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, responden lebih sering mengatahui informasi tentang revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter (64,50%).

Kemudian, dalam konteks memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, responden lebih sering mendapatkan informasi tentang infrastruktur pelayanan dasar (76,62%). Ketika berbicara tentang membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, responden lebih banyak mengetahui tentang pembangunan rendah karbon (63,38%). Selanjutnya dalam konteks memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, responden lebih sering mengetahui tentang konsolidasi demokrasi (79,62%).

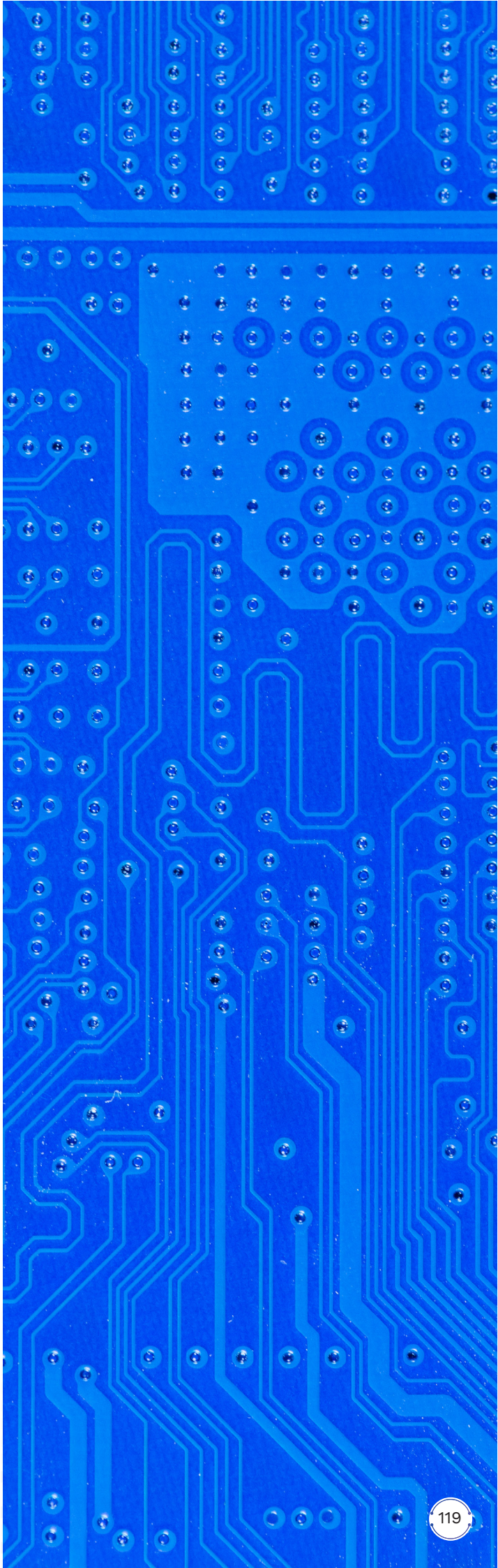
Sebaliknya, responden kurang mengetahui atau mendapatkan informasi tentang memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan pada bagian peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan (43,38%); peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi (54,87%); peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (55,38%); peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (56,62%); serta pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) (59,62%).

Selain itu, responden juga jarang mengetahui atau mendapatkan informasi tentang mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, seperti pembangunan wilayah Papua (28,81%); Sulawesi (30,31%); Nusa Tenggara (31,56%); Jawa-Bali (33,69%); Sumatera (35,44%). Bicara meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing masih ada responden yang belum mengetahui informasi terkait peningkatan produktivitas dan daya saing (27,94%). Kemudian untuk revolusi mental dan pembangunan kebudayaan responden minim dalam menerima informasi terkait memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial (41,81%).

Bicara memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar masih ada responden yang belum terpapar informasi terkait energi dan ketenagalistrikan (57,12%). Dalam konteks membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, responden memiliki informasi yang terbatas tentang peningkatan kualitas lingkungan hidup (48,25%).

Terakhir, terkait memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, responden kurang mendapatkan informasi tentang menjaga stabilitas keamanan nasional (40,75%); reformasi birokrasi dan tata kelola (44,94%); optimalisasi kebijakan luar negeri (46,06%); dan penegakan hukum nasional (56,88%).

Hasil ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam distribusi informasi publik. Tema-tema seperti kesehatan dan infrastruktur mendapatkan perhatian yang lebih besar, sementara tema seperti pengembangan wilayah, ketahanan ekonomi, dan reformasi birokrasi kurang disampaikan secara merata. Ketimpangan ini menggarisbawahi perlunya strategi komunikasi publik yang lebih terarah dan inklusif untuk memastikan bahwa seluruh tema prioritas nasional dapat diterima oleh masyarakat secara proporsional. Dengan pendekatan yang lebih merata, pemerintah dapat meningkatkan akses informasi publik sekaligus memperkuat dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan program-program strategis nasional.



Tabel 2.21 Proporsi Responden yang Mendapatkan Informasi tentang Program Prioritas Nasional Tahun 2024

No	Program	Presentase %
1.	Program BPJS/Kartu Indonesia Sehat (KIS)/ Sosialisasi Penurunan Stunting/ Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal/ Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)/ Vaksinasi Covid-19/ HIV/Hepatitis dan TBC	97,25
2.	Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Sembako/Program Indonesia Pintar (PIP)/ Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah/Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Program Bantuan Sosial (BLT, Pemulihan Ekonomi Nasional)	94,69
3.	Proses pendaftaran adminstrasi kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran dll) yang sudah berbasis online melalui web atau aplikasi/ Penguatnya integrasi data administrasi kependudukan (KTP)/Satu Data Indonesia/Pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	89,56
4.	Operasi Pasar Murah/Operasi Sembako Murah/Gerakan Pangan Murah/Cinta Produk Lokal/ Pembangunan Tol Darat/Tol Laut	88,25
5.	Bantuan modal usaha bagi UMKM/Wirausaha/Literasi Keuangan/Training e-Commerce/Perluasan kemitraan UMKM/Waralaba/Franchise/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	84,50
6.	Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)/Model Usaha Ultra Mikro/Bantuan CSR dari Perusahaan Swasta/Negeri/Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk integrasi Bansos	83,75
7.	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)/Kluster Ekonomi/ Identitas Nasional/Pembangunan Destinasi Pariwisata Sambas-Singkawang	80,38
8.	Sosialisasi World Water Forum/Sosialisasi Pemilu/Sosialisasi Pilkada/Sosialisasi Penurunan Stunting,	79,62
9.	Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi/Subsidi rumah dengan bunga 0%/ Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan korban bencana/Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (PLN, PAM, Telkom)	76,62
10.	Literasi digital/Pemblokiran konten negatif/Judi Online/Pelatihan digital entrepreneurship/ QRIS, Akses 4G di daerah 3T/ Palapa Ring/Satelit Broadband	75,69
11.	Perlindungan dari pelecehan seksual perempuan dan anak di bawah umur/Perlindungan anak dari tindak kekerasan/eksploitasi dan perlakuan salah lainnya/Pelayanan pengaduan/ Pengelolaan kasus/akses penampungan sementara, pelayanan mediasi/pelayanan pendampingan korban.	73,50
12.	Pembangunan Jalan Tol/Pembangunan Jalan Strategis di Kota / Daerah/ Pembangunan KA Medium Speed Jakarta-Surabaya/Tol Trans Sumatera/ Tol Trans Jawa	69,38
13.	Pembangunan Jembatan/ MRT/LRT/BRT (Bus Rapid Transit)/ Pembangunan Jalan Perkotaan/ Flyover Underpass	68,06
14.	Internet untuk pembelajaran di sekolah/Kampus Merdeka/Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila/ Kelas online/Kuis/Presentasi yang atraktif/Integrasi Softskill dalam proses pembelajaran (sopan santun) dan ekstrakurikuler	67,44
15.	Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam/Bergizi/Seimbang dan Aman/Konsumsi Sayur dan Buah/konsumsi Daging/Konsumsi kacang-kacangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	66,38
16.	Program Sekolah Bebas Perundungan/Bullying/ Menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik dengan tenaga pendidik, orang tua serta masyarakat,	64,50
17.	Sosialisasi/Ajakan menggunakan angkutan umum (bus, kereta, MRT)/Penggunaan Panel Surya/Tenaga Panas Bumi/Pemanfaatan Biofuel/Efisiensi dan konservasi energi/Teknologi Rendah Energi (LED, Inverter)/Kendaraan Listrik	63,38
18.	Penyelenggaraan Festival Budaya/Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Museum/ Pengembangan produk seni, budaya dan film	61,06
19.	Program Merdeka Belajar/Program Gemar Membaca/Pembangunan Perpustakaan Daerah/ Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional/ Penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional	60,50
20.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)/ PLTS (Surya)/ PLTM (Minihidro)/ PLTPB (Panas bumi)/PLTU (Uap)/Program Hemat Listrik/Pemanfaatan Panel Surya di Rumah Tangga/ Penggunaan Kendaraan Dinas Listrik	59,62
21.	Pembangunan saluran udara tegangan tinggi (Sutet)/Program listrik masuk desa/ Penambahan Penyalur BBM satu harga/Pembangunan jaringan Gas perkotaan/ Sistem transmisi listrik terintegrasi/ Meteran listrik pintar	57,12

No	Program	Validitas
22	Pengadaan barang dan jasa menggunakan e-katalog/Digitalisasi Pembayaran Pajak/ Digitalisasi Pelayanan Publik/Penguatan Partai Politik Dalam Pencegahan Korupsi	56,88
23	Penggunaan HP /Laptop/Mobil buatan dalam negeri/Fasilitasi pengembangan produk ekspor/Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Fasilitasi ekspor seperti subsidi ekspor bagi pengusaha dalam negeri/Platform pelayanan satu pintu InaExport/Customer Service Center Membership (CSC)	56,62
24	Pembangunan Bendung/Pembangunan Saluran Irigasi/ Hutan Lindung/ Hutan Konservasi/ Reboisasi/Penghijauan/ Pemulihan Lahan Mangrove/Gambut	55,38
25	Pengurusan izin usaha lebih mudah dan cepat /Sistem Online Single Submission (OSS)/ Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi/Penjaminan kepastian hukum/Kepastian berusaha/Keamanan Berusaha bagi Penanam Modal/Pengolahan nikel menjadi baterai/ Hilirisasi Bioindustri & Batubara	54,87
26	Pembangunan Pusat Studi Tsunami dan Mitigasi Bencana/Gerakan Literasi Bencana sebagai edukasi bencana/Sosialisasi pengurangan risiko bencana/ Kelompok Masyarakat Tangguh Bencana	51,50
27	Sistem dan instrumentasi pemantauan kualitas air, sungai, danau dan udara secara real-time/ Alat pemantauan kualitas air laut secara manual/ Komunitas peduli lingkungan hidup/Produk ramah lingkungan/Daur ulang	48,25
28	Peningkatan Kapasitas Pekerja Migran/TKI / Penguatan Sistem Perlindungan TKI/Pekerja Migran/Sosialisasi Wonderful Indonesia/Tanda Batas Negara/ Peta Batas Negara	46,06
29	Layanan pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR/Portal pelayanan publik/Sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)	44,94
30	Bantuan benih ikan/Alat tangkap/Kapal/Sampan/Budidaya rumput laut/Sentra produksi perikanan budidaya/Penyuluhan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan/ Pelatihan masyarakat kelautan perikanan	43,38
31	Program Kampung Moderasi (KMB)/Pelatihan Penggerak Moderasi Beragama/ Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama/Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	41,81
32	Penanganan Terorisme/Jumlah Pos Polisi yang dibangun di Perbatasan/ Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan/Sarpras Pertahanan di Pulau Kecil Terluar	40,75
33	Perbaikan aksesibilitas dan fasilitas wisata Danau Toba/Akses dari Bandara Silangit ke Danau Toba/Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera	35,44
34	Perbaikan aksesibilitas dan fasilitas wisata Borobudur/Bromo/Tengger/Semeru dan Bali/ Penataan kawasan/jalan/penyediaan air baku dan air bersih/Pengelolaan sampah dan sanitasi	33,69
35	Perbaikan aksesibilitas dan fasilitas wisata Labuan Bajo/Lombok Mandalika/Penataan kawasan/jalan/penyediaan air baku dan air bersih/ pengelolaan sampah dan sanitasi	31,56
36	Pembangunan tempat wisata Toraja/Perbaikan akses dan fasilitas wisata Wakatobi/ Penataan kawasan/jalan/ Penyediaan air baku dan air bersih/Pengelolaan sampah dan sanitasi	30,31
37	Perbaikan akses dan fasilitas wisata Raja Ampat/Penataan kawasan/jalan/ Penyediaan air baku dan air bersih/Pengelolaan sampah dan sanitasi/Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan/Pendidikan dan kualitas SDM di wilayah Papua	28,81
38	Digital Talent Scholarship bagi lulusan baru/Politeknik Negeri (Pendidikan Vokasi)/ Peningkatan kualifikasi tenaga dosen dengan pendidikan lanjutan ke S2 dan S3	27,94
39	Program Gerbangdutas (Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan)/Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/ Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Maluku/Pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku/Tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik	17,06



Media yang Menjadi Sumber Informasi

Studi ini mengidentifikasi berbagai jenis media yang digunakan oleh masyarakat untuk mencari atau memperoleh informasi terkait Program Prioritas Nasional. Ragam media tersebut mencakup media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar, hingga media berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terkini seperti media sosial, platform pesan instan, dan portal berita online. Pendekatan yang beragam ini mencerminkan pola konsumsi informasi masyarakat yang dinamis, dimana setiap jenis media memiliki peran strategis dalam menjangkau berbagai segmen masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Pemanfaatan media yang beragam ini menjadi kunci penting dalam memastikan informasi Program Prioritas Nasional dapat diakses secara luas dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

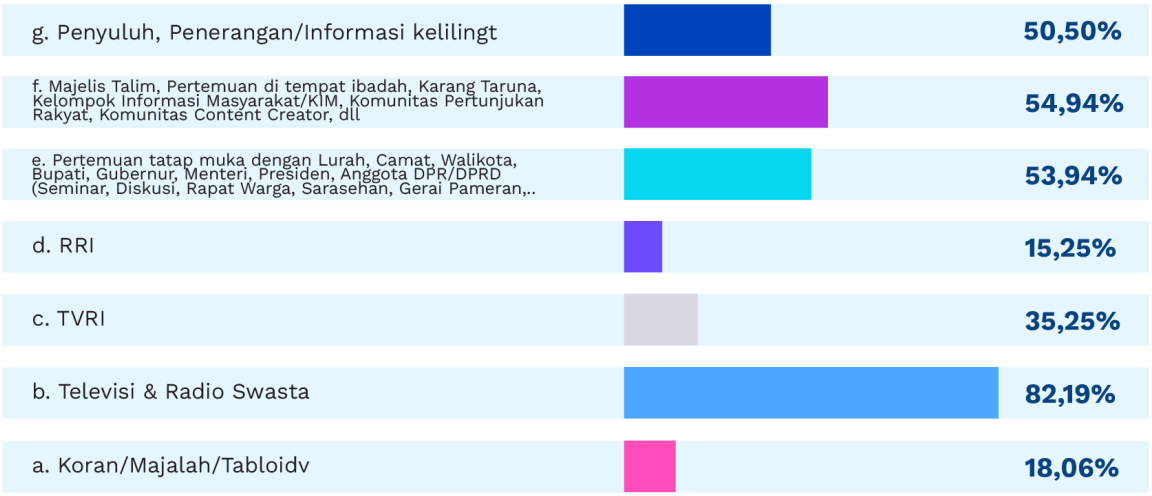


Diagram 2.83 Media berbasis Konvensional yang digunakan responden untuk mendapatkan informasi tentang program prioritas nasional Tahun 2024

Hasil studi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden mengutamakan media elektronik konvensional, seperti televisi dan radio, sebagai sumber utama untuk mencari atau memperoleh informasi mengenai Program Prioritas Nasional (82,19%). Hal ini menegaskan bahwa media konvensional tetap menjadi kanal komunikasi yang dominan dan dipercaya oleh masyarakat dalam menyerap informasi publik. Selain itu, pertemuan tatap muka juga memiliki peran penting dalam penyampaian informasi. Responden cenderung mendapatkan informasi melalui kegiatan komunitas, seperti majelis taklim, pertemuan di tempat ibadah, kelompok informasi masyarakat (KIM), serta komunitas pertunjukan rakyat (54,94%). Interaksi langsung dengan pejabat pemerintah setempat, seperti Lurah, Camat, Walikota, Bupati, Gubernur, Menteri, Presiden, atau anggota DPR/DPRD, juga dianggap signifikan (53,94%).

Namun, menarik untuk dicatat bahwa lembaga penyiaran publik pemerintah seperti TVRI (35,25%) dan RRI (15,25%) memiliki tingkat penggunaan yang lebih rendah dibandingkan dengan media konvensional lainnya. Bahkan, penyuluh informasi atau penerangan keliling memperoleh persentase lebih tinggi (50,50%), dibandingkan lembaga penyiaran publik tersebut. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran preferensi masyarakat dalam mengakses informasi. Sebagian besar responden lebih terhubung dengan media elektronik konvensional yang non-pemerintah dan metode penyampaian informasi langsung di tingkat komunitas. Hal ini mengindikasikan bahwa akses masyarakat terhadap lembaga penyiaran publik pemerintah masih terbatas atau kurang optimal, meskipun lembaga-lembaga tersebut memiliki mandat untuk menyampaikan informasi publik secara luas.

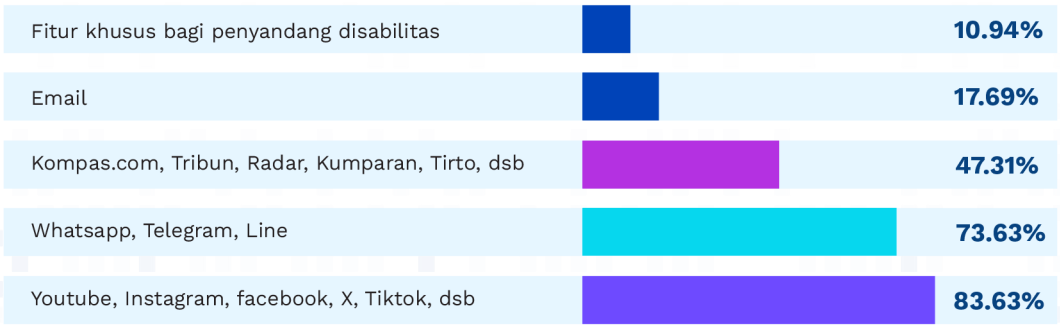


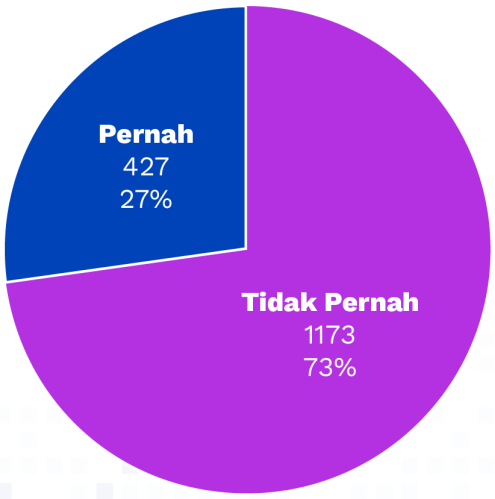
Diagram 2. 84 Media berbasis Digital yang digunakan responden untuk mendapatkan informasi tentang program prioritas nasional Tahun 2024

Selain itu, akun resmi instansi pemerintah di media sosial, seperti channel YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok, menjadi salah satu kanal informasi yang signifikan dengan tingkat penggunaan mencapai (83,63%). Platform instant messaging, seperti WhatsApp, Telegram, dan LINE, juga mencatat angka yang cukup tinggi, yaitu (73,63%), sebagai media pilihan masyarakat untuk menerima informasi tentang program prioritas nasional. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial dan aplikasi pesan instan telah menjadi elemen penting dalam strategi komunikasi digital pemerintah, seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.

Meskipun demikian, televisi dan radio, sebagai bagian dari media elektronik konvensional, tetap memegang peranan penting dalam penyebaran informasi. Eksistensinya tidak tergantikan oleh media digital, melainkan tetap relevan sebagai sumber utama informasi publik. Kombinasi antara media konvensional dan digital ini menunjukkan kebutuhan akan strategi komunikasi yang holistik dan terintegrasi untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Penyampaian informasi tentang Program Prioritas Nasional juga harus memperhatikan aspek inklusivitas, terutama bagi penyandang disabilitas. Studi ini mengungkapkan, hanya (10,94%) responden yang menggunakan media dengan fitur khusus, seperti teks alternatif, teks suara, atau alat bantu lainnya, untuk memperoleh informasi mengenai program pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas informasi bagi kelompok penyandang disabilitas masih memerlukan perhatian serius. Sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi hakhak konstitusional masyarakat, pemerintah perlu memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang setara terhadap informasi publik. Implementasi fitur khusus pada media komunikasi, seperti aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, harus ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip inklusivitas dan kesetaraan hak. Dengan demikian, informasi tentang program prioritas nasional dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali, mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inklusif.

Penerimaan Informasi mengenai PPID dan Layanan PPID



Aspek lain yang diukur pada variabel penerimaan informasi dalam dimensi output adalah bagaiman masyarakat mendapatkan informasi dari kanal resmi lain pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kanal resmi ini melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik negara, yang bertugas di antaranya untuk mengumumkan informasi publik dan memberikan pelayanan terhadap permintaan informasi publik dari masyarakat. PPID sebagai bagian dari sebuah layanan tentu perlu dikenal untuk dapat digunakan oleh masyarakat. Diagram di bawah menunjukkan tingkat pengenalan masyarakat terhadap nama PPID:

Diagram 2.85 Proporsi Responden yang pernah mendengar istilah PPID

Meskii perannya yang penting dalam penyampaian informasi, temuan studi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden (64.9%) tidak pernah mendengar nama PPID ini. Hanya 35.1% responden pernah mendengar nama PPID ini. Jumlah ini menunjukkan tantangan untuk mendorong penggunaan pelayanan informasi publik oleh masyarakat sebagai bagian dari meningkatkan partisipasi masyarakat. Informasi yang diterima responden yang pernah mendengar tentang PPID ini bersumber dari berbagai media. Studi ini kemudian berusaha melihat sumber dari dua bagian yaitu berbasis konvensional dan digital, dengan rincian sebagai berikut:

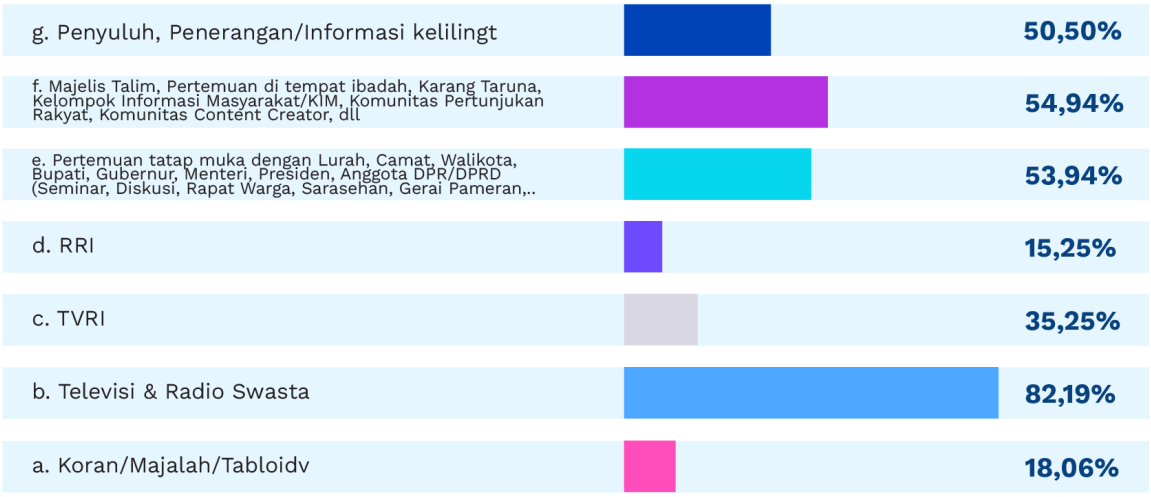


Diagram 2.86 Persentase media berbasis Konvensional yang digunakan responden untuk mencari atau mendapatkan informasi tentang PPID

Dari sumber media yang berbasis konvensional, mayoritas masyarakat mendengar nama PPID melalui televisi dan/atau radio (82,19%). Kondisi ini sejalan dengan penggunaan media oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi pemerintah lainnya yang kebanyakan juga menggunakan televisi dan/atau radio. Sumber lain dengan tingkat capaian yang tinggi melalui majelis talim, pertemuan di tempat ibadah karang taruna dan sebagainya (54%). Selain itu, pertemuan tatap muka dengan Camat, Lurah, Walikota, dan sebagainya mencapai 53,94%. Sumber informasi lain untuk mendapatkan informasi tentang PPID yang diperhitungkan adalah melalui media berbasis digital dengan hasil sebagai berikut

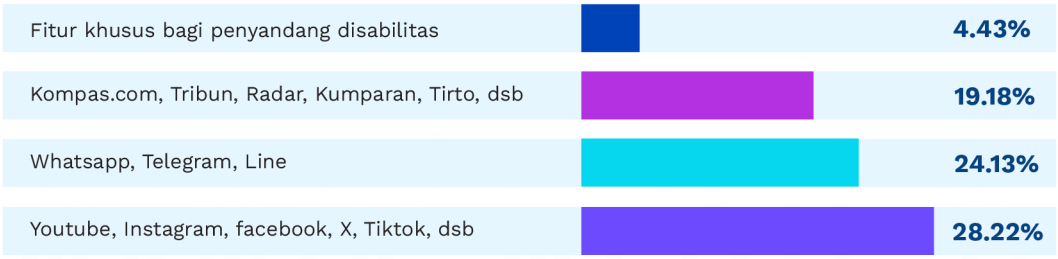


Diagram 2.87 Persentase media berbasis Konvensional yang digunakan responden untuk mencari atau mendapatkan informasi tentang PPID

Pada sumber media digital, terlihat bahwa sumber media untuk mendapatkan informasi tentang PPID secara mayoritas melalui media sosial seperti Channel Youtube, Instagram dan sebagainya (28,22%). Kondisi ini juga sejalan dengan temuan secara keseluruhan terhadap bagaimana masyarakat mendapatkan informasi Program Prioritas pemerintah, yang juga menempatkan media sosial sebagai sumber media informasi terbanyak. Media informasi dengan jumlah terbanyak kedua adalah melalui media pesan instan seperti WhatsApp, LINE, dan sebagainya (24,13%).

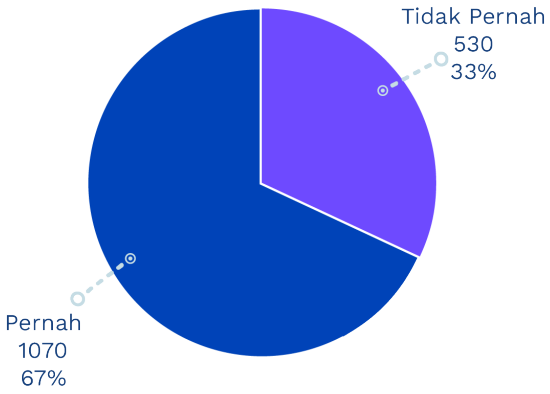


Diagram 2.88 Persentase media berbasis Digital yang digunakan responden untuk mencari atau mendapatkan informasi tentang PPID

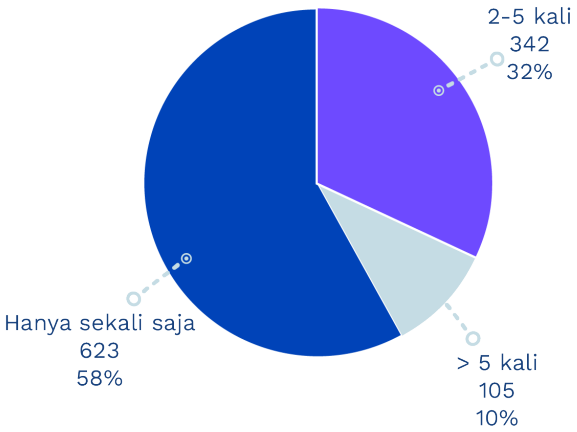


Diagram 2.89 Frekuensi Responden dalam Meminta Informasi Publik ke Kantor Pemerintah secara langsung dalam 6 bulan terakhir

Dari diagram, terlihat persentase responden yang pernah meminta informasi publik ke kantor pemerintahan secara langsung adalah 66,9%, jika dibandingkan dengan tahun 2023, angka ini menurun sebesar 9,9%. Sedangkan yang belum pernah meminta informasi sebanyak 33,1%. Selain jumlah ini, perlu dilihat lebih jauh juga bagaimana frekuensi para responden dalam meminta informasi publik, sebagaimana tercermin dalam diagram berikut:

Dari diagram di atas terlihat, lebih dari setengah responden meminta informasi publik sekali saja (58,2%), angka ini meningkat 4,2% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 54%. Sementara 32% meminta 2 – 5 kali, jika dibandingkan dengan tahun 2023, angka ini menurun 1,4%. Sedangkan 9,8% responden meminta informasi publik lebih dari 5 kali dalam 6 bulan terakhir, jika dibandingkan dengan tahun 2023, angka ini menurun 2,8%.

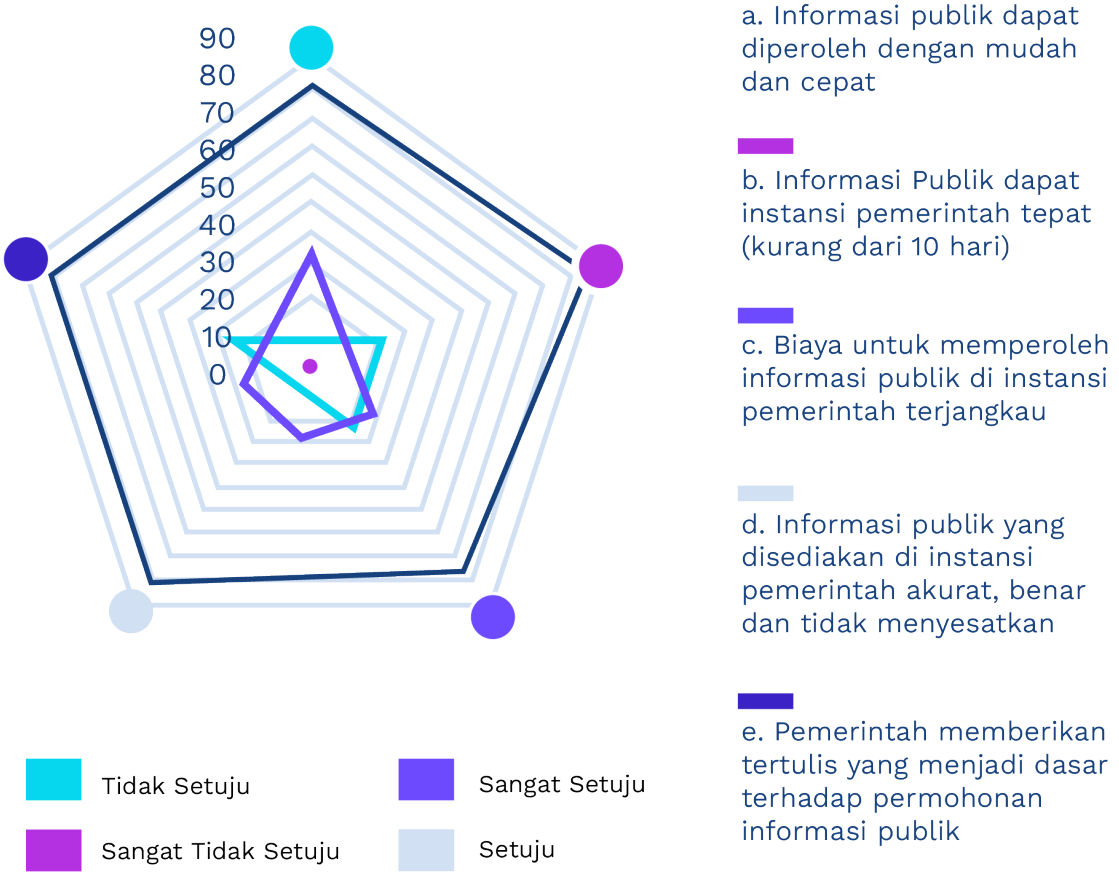
2. Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik

Selain menilai penerimaan informasi, dimensi output juga mencakup bagaimana masyarakat memandang teknis pelayanan informasi publik. Variabel ini melibatkan tiga aspek utama, yaitu: penilaian masyarakat terhadap teknis pelayanan informasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah, tingkat kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi Program Prioritas Nasional yang disampaikan oleh Badan Publik Pemerintah.

Tabel 2.22 Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik oleh Instansi Pemerintah

v

No.	Item	Proporsi (%)			
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Informasi publik dapat diperoleh dengan mudah dan cepat	0.56	5.14	78.41	15.8879
2.	Informasi publik dapat diperoleh dari instansi pemerintah tepat waktu (kurang dari 10 hari)	0.84	11.03	75.98	12.1495
3.	Biaya untuk memperoleh informasi publik di instansi pemerintah terjangkau	1.59	7.76	75.23	15.4206
4.	Informasi publik yang disediakan di instansi pemerintah akurat, benar dan tidak menyesatkan	0.65	5.98	80.75	12.6168
5.	Instansi Pemerintah memberikan penjelasan tertulis yang menjadi dasar penolakan terhadap permohonan informasi publik	1.12	11.96	77.66	9.2523



Berdasarkan tabel 2.....penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik oleh instansi pemerintah, mayoritas masyarakat memberikan penilaian yang positif terhadap berbagai aspek teknis layanan informasi publik. Pada aspek kemudahan dan kecepatan memperoleh informasi, sebanyak 78,41% responden menyatakan “Setuju” dan 15,88% menyatakan “Sangat Setuju,” sehingga total penilaian positif mencapai lebih dari 94%. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa instansi pemerintah telah berhasil menyediakan informasi publik yang mudah diakses dalam waktu yang relatif cepat. Hanya 5,14% yang menyatakan “Tidak Setuju” dan 0,56% menyatakan “Sangat Tidak Setuju,” menunjukkan tingkat ketidakpuasan yang sangat rendah. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah telah menyediakan mekanisme akses informasi yang efisien untuk mayoritas masyarakat.

Penilaian terhadap ketepatan waktu pemberian informasi publik juga menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan 75,98% responden menyatakan “Setuju” dan 12,15% menyatakan “Sangat Setuju,” sehingga total penilaian positif mencapai 88,13%. Namun, proporsi responden yang menyatakan “Tidak Setuju” sebesar 11,03% menjadi salah satu yang tertinggi di antara semua aspek yang dinilai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas masyarakat puas, ada sebagian yang merasa bahwa waktu tunggu untuk memperoleh informasi masih terlalu lama. Pemerintah perlu mengevaluasi proses distribusi informasi untuk memastikan ketepatan waktu lebih konsisten di semua wilayah. Dengan perbaikan ini, tingkat kepuasan terhadap aspek waktu dapat meningkat secara signifikan.

Pada aspek biaya untuk memperoleh informasi publik, sebanyak 75,23% responden menyatakan “Setuju” dan 15,42% menyatakan “Sangat Setuju,” sehingga total penilaian positif mencapai 90,65%. Responden yang menyatakan “Tidak Setuju” hanya 7,76%, dan 1,59% menyatakan “Sangat Tidak Setuju,” menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa biaya yang dikenakan untuk memperoleh informasi publik tergolong terjangkau. Angka ini mengindikasikan bahwa pemerintah telah berhasil memastikan layanan informasi publik tetap inklusif secara ekonomi. Namun, penting untuk tetap mempertahankan standar ini agar masyarakat di berbagai tingkat pendapatan tetap dapat mengakses informasi dengan mudah.

Aspek akurasi informasi mendapatkan penilaian positif tertinggi di antara semua aspek yang dinilai, dengan 80,75% responden menyatakan “Setuju” dan 12,62% menyatakan “Sangat Setuju,” sehingga total penilaian positif mencapai 93,37%. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat secara umum merasa informasi yang disediakan oleh instansi pemerintah akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Tingkat ketidakpuasan terhadap aspek ini juga sangat rendah, dengan hanya 5,98% responden menyatakan “Tidak Setuju” dan 0,65% menyatakan “Sangat Tidak Setuju.” Highlight menarik dari poin ini adalah bahwa akurasi informasi menjadi salah satu keunggulan utama dari layanan informasi publik yang disediakan oleh pemerintah.

Penilaian terhadap pemberian penjelasan tertulis atas penolakan informasi publik mencatat total penilaian positif sebesar 86,91%, dengan 77,66% responden menyatakan “Setuju” dan 9,25% menyatakan “Sangat Setuju.” Namun, tingkat ketidakpuasan untuk aspek ini tergolong lebih tinggi dibandingkan aspek lainnya, dengan 11,96% responden menyatakan “Tidak Setuju” dan 1,12% menyatakan “Sangat Tidak Setuju.” Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada perbaikan dalam memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dan transparan terkait penolakan informasi publik.

Secara keseluruhan, hasil penilaian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa puas terhadap teknis pelayanan informasi publik yang disediakan oleh instansi pemerintah, dengan rata-rata tingkat kepuasan di atas 85%. Kesimpulan dari data ini adalah tingginya penilaian positif terhadap akurasi informasi dan biaya yang terjangkau. Namun, aspek ketepatan waktu dan pemberian penjelasan tertulis terkait penolakan informasi masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Dengan langkah perbaikan yang terarah, pemerintah dapat meningkatkan tingkat kepuasan secara keseluruhan dan menciptakan layanan informasi publik yang lebih inklusif dan berkualitas di seluruh Indonesia.

Tingkat Kepuasan Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi yang Dilaksanakan Instansi Pemerintah

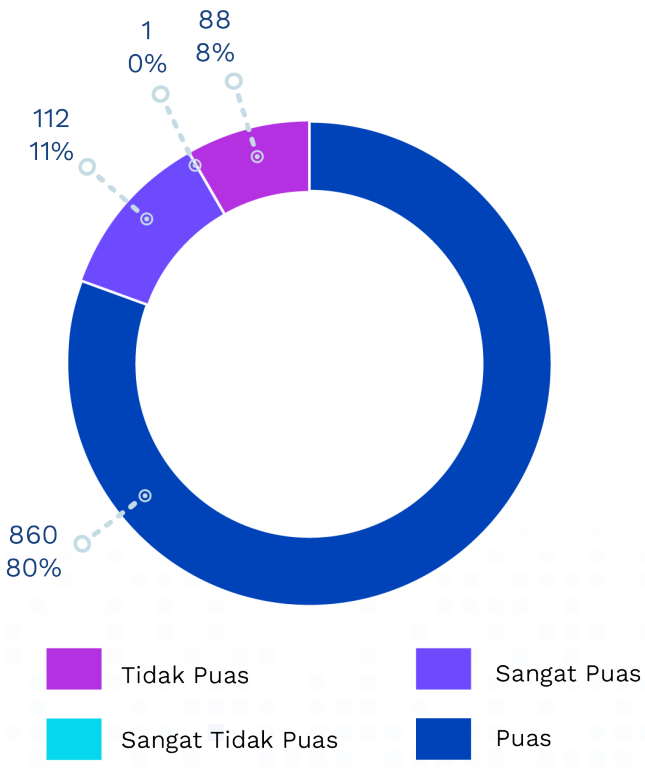


Diagram 2.90 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi yang Dilaksanakan Instansi Pemerintah

Tabel 2.23 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi yang Dilaksanakan Instansi Pemerintah

No.	Provinsi	Tingkat kepuasan
1.	Aceh	58.33
2.	Bali	80.92
3.	Banten	76.67
4.	Bengkulu	71.15
5.	DI. Yogyakarta	76.79
6.	DKI Jakarta	75.96
7.	Gorontalo	79.55
8.	Jambi	73.96
9.	Jawa Barat	77.40
10.	Jawa Tengah	79.05
11.	Jawa Timur	76.68
12.	Kalimantan Barat	76.09
13.	Kalimantan Selatan	71.15
14.	Kalimantan Tengah	72.92
15.	Kalimantan Timur	75.89
16.	Kalimantan Utara	75.00
17.	Kep. Bangka Belitung	75.00
18.	Kepulauan Riau	75.00
19.	Lampung	74.31
20.	Maluku	75.00
21.	Maluku Utara	85.00
22.	Nusa Tenggara Barat	79.17
23.	Nusa Tenggara Timur	70.24
24.	Papua	72.37
25.	Papua Barat	63.89
26	Riau	72.16
27	Sulawesi Barat	75.00
28	Sulawesi Selatan	79.90
29	Sulawesi Tengah	75.00
30	Sulawesi Tenggara	77.50
31	Sulawesi Utara	75.00
32	Sumatera Barat	74.44
33	Sumatera Selatan	79.12
34	Sumatera Utara	72.99
Nasional		**74.96**

Berdasarkan diagram tingkat kepuasan publik terhadap teknis pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, mayoritas masyarakat menunjukkan penilaian yang positif. Sebanyak 80,4% responden menyatakan “Puas” terhadap pelayanan yang diberikan, yang mencerminkan bahwa mayoritas masyarakat merasa layanan informasi publik yang disediakan oleh pemerintah telah memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, 11,4% responden memberikan penilaian “Sangat Puas,” sehingga total kepuasan mencapai lebih dari 91,8%, menunjukkan apresiasi tinggi dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan informasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merasakan kemudahan dan relevansi dalam mengakses informasi yang diberikan oleh pemerintah. Tingginya angka kepuasan ini dapat menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam memenuhi ekspektasi masyarakat terkait layanan informasi.

Namun, masih terdapat 8,2% responden yang menyatakan “Tidak Puas” terhadap teknis pelayanan informasi publik. Meskipun proporsi ini tergolong kecil, angka ini perlu menjadi perhatian karena menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang merasa layanan informasi publik belum optimal. Pemerintah dapat melakukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan ini. Dengan langkah perbaikan yang terfokus, angka ketidakpuasan ini dapat ditekan lebih rendah di masa mendatang.

Jika dilihat secara rinci per provinsi, Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat kepuasan tertinggi sebesar 85%. Angka ini mencerminkan bahwa layanan informasi publik di wilayah tersebut berjalan secara efektif dan responsive serta memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Sebaliknya, Provinsi Aceh mencatat tingkat kepuasan terendah sebesar 58,33%, menunjukkan adanya tantangan

serius dalam pelayanan informasi publik di wilayah tersebut. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan dalam kualitas pelayanan antara wilayah dengan kepuasan tertinggi dan terendah. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan di Aceh, termasuk penyediaan akses informasi yang lebih baik dan pendekatan yang lebih inklusif.

Jika dikategorikan berdasarkan wilayah, tingkat kepuasan masyarakat di wilayah Indonesia Barat menunjukkan variasi yang cukup mencolok. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan kepuasan tertinggi, mencapai 79,12%, sedangkan Aceh mencatat kepuasan terendah dengan 58,33%. Sebagian besar provinsi di wilayah ini berada pada kisaran 70%-75%, yang menunjukkan persepsi positif masyarakat terhadap pelayanan informasi publik, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Di wilayah Indonesia Tengah, Sulawesi Selatan mencatat kepuasan tertinggi dengan angka 79,90%, sementara Nusa Tenggara Timur memiliki tingkat kepuasan terendah sebesar 70,24%. Wilayah ini memiliki distribusi kepuasan yang lebih merata dibandingkan wilayah barat, mencerminkan kualitas layanan yang cenderung lebih stabil di provinsi-provinsi tersebut.

Di wilayah Indonesia Timur, tingkat kepuasan masyarakat menunjukkan rentang yang lebih luas dibandingkan wilayah lainnya. Maluku Utara menempati posisi tertinggi dengan tingkat kepuasan 85%, sedangkan Papua Barat berada di posisi terendah dengan 63,89%. Rata-rata tingkat kepuasan di wilayah ini berada pada kisaran 63%-85%, menunjukkan potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas layanan di daerah tertentu. Wilayah ini membutuhkan pendekatan yang lebih fokus untuk memperbaiki pelayanan di provinsi dengan kepuasan rendah, seperti Papua Barat. Di sisi lain, Maluku Utara dapat dijadikan contoh sukses bagi provinsi lain dalam menerapkan pelayanan informasi publik yang responsif dan berkualitas tinggi.

Secara nasional, rata-rata tingkat kepuasan terhadap pelayanan informasi publik berada pada angka 74,96%, yang menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan antarprovinsi, dengan beberapa mencatat kepuasan yang sangat tinggi, seperti Bali (80,92%), Jawa Tengah (79,05%), dan Sulawesi Selatan (79,90%). Di sisi lain, provinsi seperti Aceh (58,33%) dan Papua Barat (63,89%) mencatat tingkat kepuasan di bawah 65%, menunjukkan adanya tantangan besar dalam pelayanan informasi publik di wilayah tersebut. Hal ini mengindikasikan perlunya pemerataan kualitas layanan di seluruh Indonesia untuk memastikan setiap masyarakat mendapatkan akses informasi yang memadai. Dengan adanya perbedaan ini, diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan pelayanan di daerah yang masih tertinggal.

Tingkat kepercayaan terhadap konten informasi Program Prioritas Nasional dari Badan Publik Pemerintah

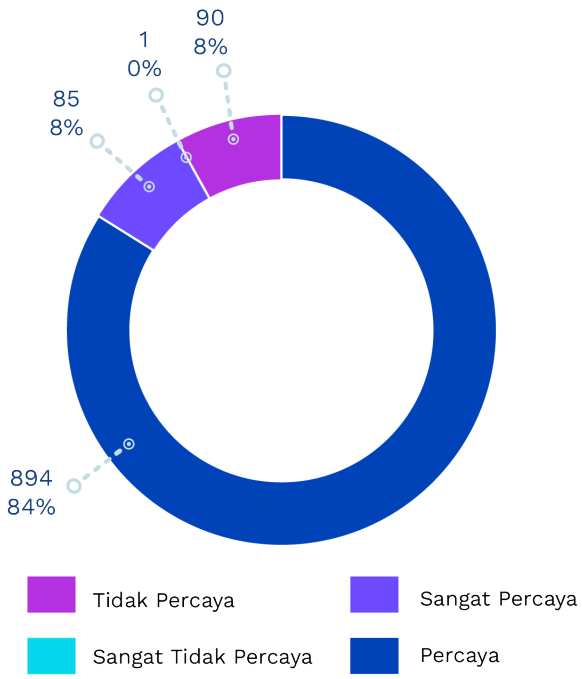


Diagram 2.91 Tingkat kepercayaan terhadap konten informasi Program Prioritas Nasional dari Badan Publik Pemerintah

Tabel 2.24 Tingkat kepercayaan terhadap konten informasi Program Prioritas Nasional dari Badan Publik Pemerintah

No.	Provinsi	Tingkat kepercayaan
1.	Aceh	60.00
2.	Bali	84.21
3.	Banten	75.83
4.	Bengkulu	69.23
5.	DI. Yogyakarta	73.21
6.	DKI Jakarta	73.08
7.	Gorontalo	72.73
8.	Jambi	75.00
9.	Jawa Barat	75.40
10.	Jawa Tengah	77.03
11.	Jawa Timur	76.05
12.	Kalimantan Barat	75.00
13.	Kalimantan Selatan	69.23
14.	Kalimantan Tengah	75.00
15.	Kalimantan Timur	71.43
16.	Kalimantan Utara	68.75
17.	Kep. Bangka Belitung	75.00
18.	Kepulauan Riau	75.00
19.	Lampung	71.53
20.	Maluku	73.08
21.	Maluku Utara	75.00
22.	Nusa Tenggara Barat	79.17
23.	Nusa Tenggara Timur	71.43
24.	Papua	72.37
25.	Papua Barat	75.00
26	Riau	72.73
27	Sulawesi Barat	75.00
28	Sulawesi Selatan	77.45
29	Sulawesi Tengah	70.31
30	Sulawesi Tenggara	72.50
31	Sulawesi Utara	76.47
32	Sumatera Barat	75.00
33	Sumatera Selatan	78.02
34	Sumatera Utara	73.85
Nasional		**73.83**

Aspek ketiga yang menjadi tolok ukur dalam penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik adalah tingkat kepercayaan terhadap konten informasi Program Prioritas Nasional yang disampaikan oleh badan publik pemerintah. Hasil survei menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap konten informasi. Sebanyak 83,6% responden menyatakan "Percaya," dan 7,9% responden bahkan menyatakan "Sangat Percaya." Hasil ini mengindikasikan bahwa lebih dari 90% responden memiliki tingkat kepercayaan positif terhadap informasi yang diberikan oleh badan publik pemerintah. Hal ini juga mencerminkan apresiasi positif yang kuat. Sebaliknya, hanya 8,4% responden yang menyatakan "Tidak Percaya," dan 0,1% responden menyatakan "Sangat Tidak Percaya." Meskipun angka ketidakpercayaan tergolong kecil, upaya peningkatan transparansi dan akurasi informasi tetap diperlukan. Langkah ini penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan mengurangi keraguan di kalangan responden yang belum sepenuhnya percaya.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi Program Prioritas Nasional dari Badan Publik Pemerintah menunjukkan variasi yang cukup signifikan jika dibandingkan antarprovinsi. Bali menjadi provinsi dengan tingkat kepercayaan tertinggi, mencatat angka 84,21%. Hal ini mencerminkan kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi terhadap informasi yang diberikan. Sebaliknya, Aceh memiliki tingkat kepercayaan terendah sebesar 60,00%, menandakan adanya tantangan besar dalam membangun kepercayaan masyarakat di wilayah tersebut. Perbedaan yang signifikan ini menunjukkan perlunya pendekatan strategis untuk meningkatkan kepercayaan di daerah-daerah dengan nilai rendah, seperti Aceh. Dengan penyampaian informasi yang lebih akurat, transparan, dan relevan, pemerintah diharapkan dapat mempersempit kesenjangan tersebut sehingga tingkat kepercayaan masyarakat lebih merata di seluruh Indonesia. Langkah ini juga penting untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses informasi yang dapat dipercaya dan berkualitas.

Berdasarkan pengelompokan wilayah, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi Program Prioritas Nasional menunjukkan pola yang menarik. Di wilayah Indonesia Barat, Sumatera Selatan mencatat tingkat kepercayaan tertinggi sebesar 78,02%, sedangkan Aceh memiliki tingkat kepercayaan terendah sebesar 60,00%. Selanjutnya, di wilayah Indonesia Tengah, Sulawesi Selatan menempati posisi tertinggi dengan tingkat kepercayaan 77,45%, sedangkan Sulawesi Tengah mencatat yang terendah dengan 70,31%. Sementara itu, di wilayah Indonesia Timur, Nusa Tenggara Barat memiliki tingkat kepercayaan tertinggi sebesar 79,17%, sedangkan Kalimantan Utara mencatat tingkat terendah dengan 68,75%.

Secara nasional, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi Program Prioritas Nasional berada pada angka 73,83%. Hal ini mencerminkan hasil yang cukup baik. Beberapa provinsi, seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah, menunjukkan tingkat kepercayaan di atas rata-rata nasional, menggambarkan keberhasilan dalam membangun kepercayaan publik di daerah-daerah tersebut. Di sisi lain, wilayah dengan variasi terbesar ditemukan di Indonesia Timur, dengan rentang kepercayaan yang signifikan antara 68,75% di Kalimantan Utara hingga 79,17% di Nusa Tenggara Barat. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat secara merata, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada wilayah dengan tingkat kepercayaan rendah, seperti Aceh di Indonesia Barat dan Kalimantan Utara di Indonesia Timur.

3. Penilaian Publik terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik

Variabel terakhir yang dinilai dalam dimensi output adalah penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik. Variabel ini terdiri dari dua indikator, yaitu: persepsi publik terhadap akses informasi publik maupun persepsi terhadap kualitas informasi publik yang disediakan oleh pemerintah. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana penilaian dan tingkat kepuasan publik terhadap akses dan kualitas informasi publik yang disediakan oleh pemerintah.

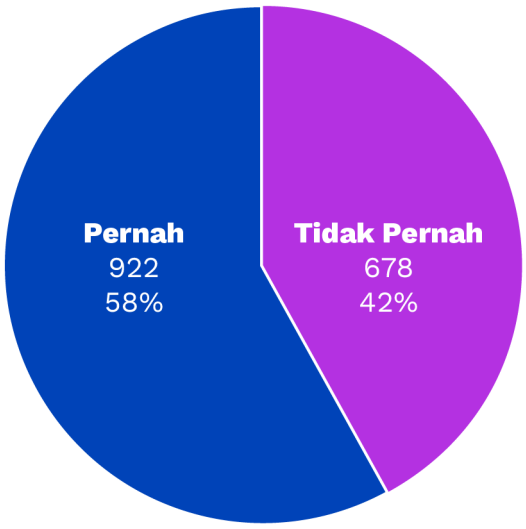


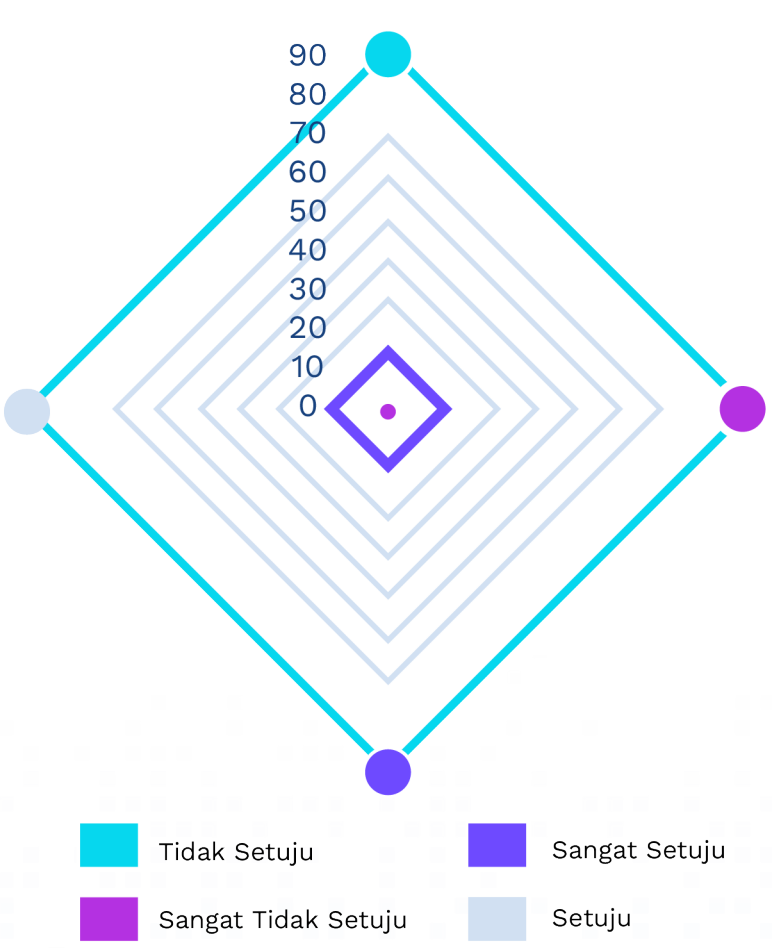
Diagram 2.92 Proporsi Publik dalam Mengakses Informasi Publik yang Disediakan oleh Pemerintah

Hasil survei menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara responden yang telah mengakses informasi publik yang disediakan oleh pemerintah dengan yang belum. Sebanyak 57,6% responden menyatakan pernah mengakses informasi publik, sementara 42,4% responden menyatakan tidak pernah mengaksesnya. Meskipun hanya terdapat perbedaan sebesar 15,2%, hasil ini tetap mengindikasikan bahwa masih ada tantangan dalam meningkatkan aksesibilitas dan kesadaran terhadap informasi publik. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya untuk meminimalisir kesenjangan tersebut, sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari informasi publik yang disediakan oleh pemerintah.

Persepsi Publik terhadap Akses Informasi Publik yang Disediakan oleh Pemerintah

Tabel 2.25 Penilaian Publik terhadap Akses Informasi Publik oleh Instansi Pemerintah

	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
a. Akses informasi publik melalui media komunikasi pemerintah (co. website / buletin milik pemerintah) sangat memadai	0.33	8.79	82.21	8.68
b. Akses informasi publik melalui saluran komunikasi pemerintah (co. pertunjukan rakyat/ akun resmi media sosial pemerintah) mudah	0.43	8.13	82.21	9.22
c. Ketersediaan media komunikasi pemerintah dapat meningkatkan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik	0.22	7.27	84.82	7.7
d. Saluran komunikasi pemerintah dapat menyalurkan aspirasi khususnya dalam proses pembuatan kebijakan publik	0.76	8.57	82.86	7.81



a. Akses informasi Publik melalui media komunikasi pemerintah (co. website/ buletin milik pemerintah) sangat memadai

b. Akses informasi publik melalui saluran komunikasi emerintah (co. pertunjukan rakyat/akun resmi media sosial pemerintah) mudah

c. Ketersediaan media komunikasi pemerintah dapat meningkatkan

d. Saluran komunikasi pemerintah dapat menyalurkan aspirasi khususnya dalam proses pembuatan kebijakan publik

Berdasarkan tabel 2.....penilaian publik terhadap akses informasi publik oleh instansi pemerintah, mayoritas masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap berbagai aspek yang dinilai. Pada aspek akses informasi publik melalui media komunikasi pemerintah, seperti website atau buletin resmi, sebanyak 82,21% responden menyatakan “Setuju” dan 8,68% menyatakan “Sangat Setuju,” sehingga total penilaian positif mencapai 90,89%. Hanya 8,79% responden yang menyatakan “Tidak Setuju” dan 0,33% menyatakan “Sangat Tidak Setuju.” Data ini menunjukkan bahwa media komunikasi pemerintah dinilai cukup memadai oleh mayoritas masyarakat, meskipun masih ada sebagian kecil yang merasa bahwa media ini belum optimal. Pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas media komunikasi untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat yang belum merasa puas.

Pada aspek akses informasi publik melalui saluran komunikasi pemerintah, seperti pertunjukan rakyat atau akun resmi media sosial, hasil yang didapat juga menunjukkan tanggapan positif yang kuat. Sebanyak 82,21% responden menyatakan “Setuju” dan 9,22% menyatakan “Sangat Setuju,” sehingga total penilaian positif mencapai 91,43%. Responden yang menyatakan “Tidak Setuju” hanya 8,13%, dan 0,43% menyatakan “Sangat Tidak Setuju.” Hal ini mengindikasikan bahwa saluran komunikasi pemerintah, terutama media sosial, telah berhasil menjangkau masyarakat secara luas dan efektif. Media sosial resmi pemerintah mendapatkan penilaian “Sangat Setuju” tertinggi di antara semua aspek, menunjukkan bahwa platform digital merupakan alat yang sangat diandalkan oleh masyarakat untuk mengakses informasi publik.

Penilaian terhadap ketersediaan media komunikasi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik mencatat angka “Setuju” tertinggi, yaitu 84,82%, dengan tambahan 7,7% menyatakan “Sangat Setuju.” Total penilaian positif mencapai 92,52%, menunjukkan bahwa masyarakat percaya ketersediaan media komunikasi mampu meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan kebijakan. Tingkat ketidakpuasan tetap rendah, dengan hanya 7,27% responden yang menyatakan “Tidak Setuju” dan 0,22% menyatakan “Sangat Tidak Setuju.” Data ini menjadi bukti bahwa media komunikasi pemerintah memiliki potensi besar untuk mendorong partisipasi publik yang lebih aktif, yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh pemerintah untuk memperkuat keterlibatan masyarakat.t

Pada aspek kemampuan saluran komunikasi pemerintah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, sebanyak 82,86% responden menyatakan “Setuju” dan 7,81% menyatakan “Sangat Setuju.” Total penilaian positif mencapai 90,67%, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa saluran komunikasi yang disediakan pemerintah mampu menjadi medium yang efektif untuk menyampaikan aspirasi mereka. Namun, tingkat ketidakpuasan pada aspek ini sedikit lebih tinggi dibandingkan aspek lain, dengan 8,57% menyatakan “Tidak Setuju” dan 0,76% menyatakan “Sangat Tidak Setuju.” Pemerintah dapat memperbaiki mekanisme saluran komunikasi agar lebih responsif dan inklusif dalam menampung aspirasi masyarakat.

Secara umum, aspek aksesibilitas dan ketersediaan media komunikasi pemerintah secara konsisten mencatat penilaian positif di atas 90%, menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menyediakan informasi publik yang mudah diakses dan relevan. Namun, tingkat ketidakpuasan yang kecil, terutama pada aspek partisipasi publik dan penyaluran aspirasi, mengindikasikan perlunya perbaikan lebih lanjut untuk memastikan semua masyarakat merasa terwakili. Dengan meningkatkan efektivitas saluran komunikasi, pemerintah dapat memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Hal ini akan menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih inklusif dan efektif bagi seluruh masyarakat.

Tingkat Kepuasan Publik terhadap Akses Informasi Publik yang Disediakan oleh Pemerintah

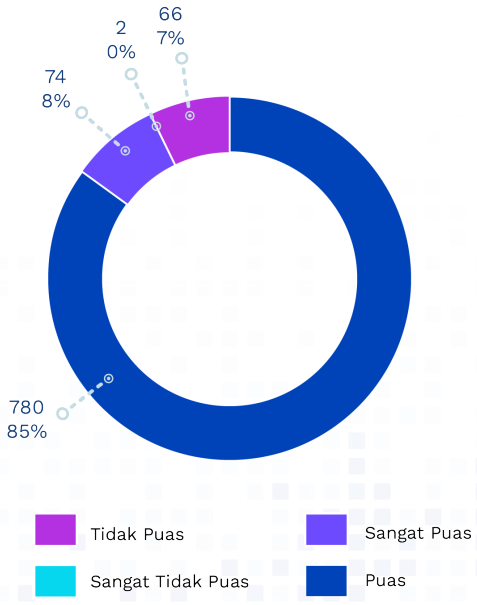


Diagram 2.93 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Akses Informasi Publik yang Disediakan oleh Pemerintah

Berdasarkan Diagram 2....di atas, mayoritas masyarakat menunjukkan kepuasan yang sangat tinggi. Sebanyak 84,6% responden menyatakan "Puas," mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa akses informasi publik yang disediakan telah memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, 8,0% responden menyatakan "Sangat Puas," sehingga total tingkat kepuasan mencapai 92,6%. Angka ini mengindikasikan bahwa pemerintah telah berhasil menyediakan akses informasi yang dirasakan cukup memadai oleh mayoritas masyarakat. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan, mudah diakses, dan memenuhi ekspektasi masyarakat secara luas. Di sisi lain, terdapat 7,2% responden yang menyatakan "Tidak Puas" dan 0,2% responden yang menyatakan "Sangat Tidak Puas." Data ini menunjukkan bahwa meskipun proporsi ketidakpuasan tergolong kecil, masih ada sebagian masyarakat yang merasa bahwa akses informasi publik belum sepenuhnya memadai.

Tabel 2.26 Tingkat Kepuasan Publik terhadap Akses Informasi Publik yang Disediakan oleh Pemerintah

No.	Provinsi	Tingkat kepuasan
1.	Aceh	67.86
2.	Bali	80.15
3.	Banten	68.18
4.	Bengkulu	75.00
5.	DI. Yogyakarta	70.00
6.	DKI Jakarta	76.11
7.	Gorontalo	80.00
8.	Jambi	73.53
9.	Jawa Barat	77.22
10.	Jawa Tengah	76.84
11.	Jawa Timur	75.74
12.	Kalimantan Barat	79.41
13.	Kalimantan Selatan	62.50
14.	Kalimantan Tengah	79.17
15.	Kalimantan Timur	72.37
16.	Kalimantan Utara	75.00
17.	Kep. Bangka Belitung	75.00
18.	Kepulauan Riau	78.57
19.	Lampung	71.88
20.	Maluku	72.22
21.	Maluku Utara	80.00
22.	Nusa Tenggara Barat	78.57
23.	Nusa Tenggara Timur	66.67
24.	Papua	72.73
25.	Papua Barat	71.43
26	Riau	72.06
27	Sulawesi Barat	85.71
28	Sulawesi Selatan	76.09
29	Sulawesi Tengah	73.61
30	Sulawesi Tenggara	73.21
31	Sulawesi Utara	75.00
32	Sumatera Barat	75.00
33	Sumatera Selatan	78.08
34	Sumatera Utara	72.92
Nasional		**74.64**

Selanjutnya hasil studi ini di 34 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata nasional tingkat kepuasan publik terhadap akses informasi publik yang disediakan oleh pemerintah tercatat sebesar 74,64%. Sulawesi Barat mencatat tingkat kepuasan tertinggi di antara semua provinsi, yaitu 85,71%, menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam menyediakan akses informasi publik yang memenuhi harapan masyarakat. Di sisi lain, Kalimantan Selatan mencatat tingkat kepuasan terendah sebesar 62,50%, yang menandakan perlunya peningkatan signifikan di wilayah tersebut. Secara umum, sebagian besar provinsi mencatat tingkat kepuasan di atas atau mendekati rata-rata nasional, menunjukkan bahwa akses informasi publik telah tersedia dengan cukup baik di banyak daerah. Namun, perbedaan antara provinsi dengan kepuasan tertinggi dan terendah menunjukkan adanya kesenjangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Pulau Jawa secara keseluruhan menunjukkan tingkat kepuasan yang relatif stabil. Jawa Barat mencatat kepuasan tertinggi dengan 77,22%, diikuti oleh Jawa Tengah (76,84%) dan DKI Jakarta (76,11%). Meskipun demikian, DI Yogyakarta memiliki tingkat kepuasan lebih rendah dibandingkan provinsi lain di Jawa, yaitu 70,00%, tetapi masih berada di atas provinsi-provinsi dengan kepuasan terendah secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki akses informasi publik yang cukup baik secara umum, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan di beberapa provinsi. Stabilitas di wilayah ini dapat menjadi dasar untuk berbagi praktik terbaik dengan wilayah lain.

Di Pulau Sumatera, hasilnya lebih bervariasi. Sumatera Selatan (78,08%) dan Kepulauan Riau (78,57%) mencatat tingkat kepuasan tertinggi, sementara Aceh (67,86%) dan Lampung (71,88%) memiliki tingkat kepuasan yang lebih rendah. Variasi ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa provinsi berhasil menyediakan akses informasi publik dengan baik, ada provinsi lain di Sumatera yang memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas layanan.

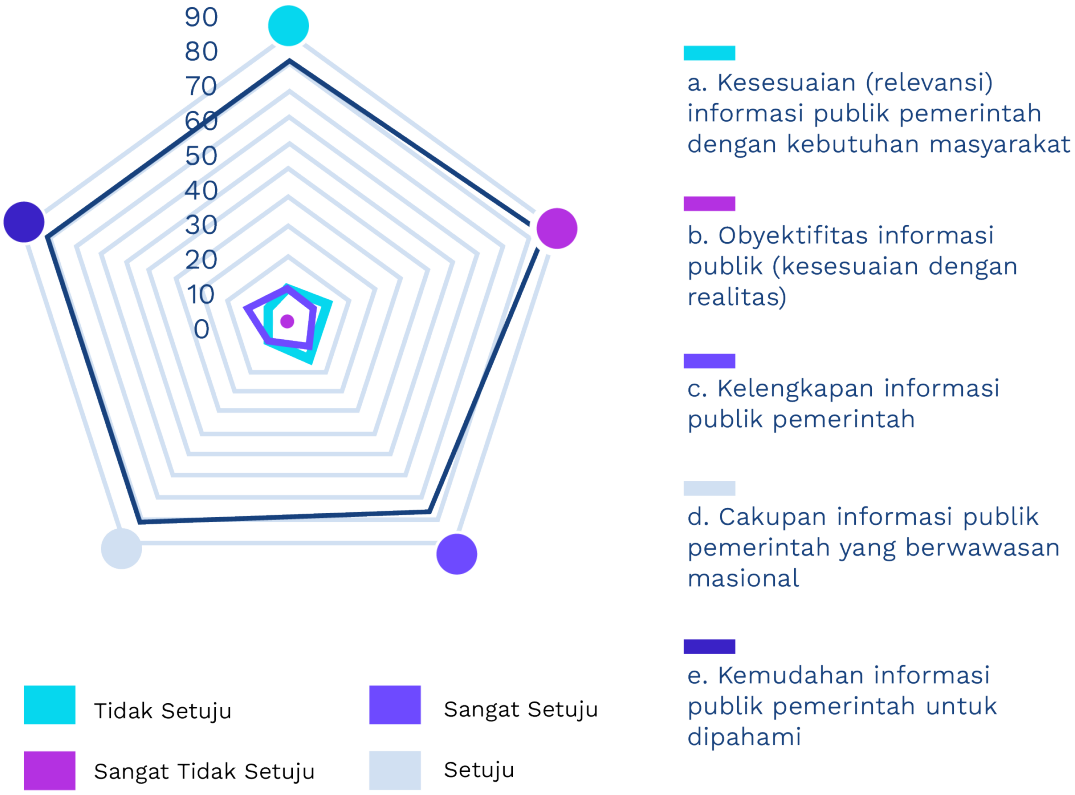
Wilayah Kalimantan menunjukkan variasi yang signifikan, dengan Kalimantan Tengah (79,17%) mencatat tingkat kepuasan tertinggi dan Kalimantan Selatan (62,50%) sebagai yang terendah, sekaligus menjadi tingkat kepuasan terendah di tingkat nasional. Provinsi lain seperti Kalimantan Barat (79,41%) dan Kalimantan Timur (72,37%) menunjukkan hasil yang lebih baik, tetapi tetap ada ruang untuk perbaikan di seluruh wilayah. Hal ini menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan lokal untuk memastikan akses informasi publik yang lebih merata di seluruh Kalimantan.

Di Indonesia Timur, Nusa Tenggara Timur (66,67%) dan Papua Barat (71,43%) mencatat tingkat kepuasan yang lebih rendah dibandingkan provinsi lain di wilayah ini, seperti Nusa Tenggara Barat (78,57%) dan Maluku Utara (80,00%). Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa provinsi di wilayah ini berhasil menyediakan layanan informasi publik dengan baik, masih ada tantangan besar di provinsi lain. Fokus peningkatan layanan dapat diarahkan pada daerah-daerah dengan tingkat kepuasan yang lebih rendah untuk memastikan akses informasi publik yang lebih merata.

Persepsi Publik terhadap Kualitas Informasi Publik yang Disediakan oleh Pemerintah

Tabel 2.27 Penilaian Publik terhadap Kualitas Informasi Publik oleh Instansi Pemerintah

	Sangat Tidak Baik	Tidak Baik	Baik	Sangat Baik
a. Kesesuaian (relevansi) informasi publik pemerintah dengan kebutuhan masyarakat	0.22	9.00	83.19	7.59
b. Obyektifitas informasi publik (kesesuaian dengan realitas)	0.76	12.58	80.37	6.29
c. Kelengkapan informasi publik pemerintah	0.43	10.63	79.93	9.00
d. Cakupan informasi publik pemerintah yang berwawasan nasional	0.43	8.13	83.84	7.59
e. Kemudahan informasi publik pemerintah untuk dipahami	0.43	5.86	83.41	10.30



Penilaian publik terhadap kualitas informasi publik yang disediakan oleh pemerintah menunjukkan hasil yang sangat positif secara keseluruhan. Mayoritas masyarakat menilai bahwa informasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan mereka, dengan 83,19% responden menyatakan "Baik" dan 7,59% menyatakan "Sangat Baik." Namun, masih terdapat 9,22% responden yang merasa informasi publik tidak sesuai dengan kebutuhan, menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan. Objektivitas informasi, atau kesesuaiannya dengan realitas, juga mendapatkan penilaian positif dari 80,37% responden yang menyatakan "Baik" dan 6,29% yang menyatakan "Sangat Baik." Meski demikian, angka ketidakpuasan pada aspek ini lebih tinggi dibandingkan yang lain, dengan 12,58% responden menilai "Tidak Baik," sehingga perlunya peningkatan transparansi dan akurasi informasi untuk meminimalkan persepsi negatif.

Kelengkapan informasi publik dinilai cukup memadai oleh mayoritas responden, dengan 79,93% menyatakan "Baik" dan 9,00% menyatakan "Sangat Baik." Namun, masih ada 11,06% yang menyatakan "Tidak Baik" dan "Sangat Tidak Baik", mengindikasikan perlunya penyediaan data yang lebih komprehensif. Cakupan informasi publik yang berwawasan nasional mendapatkan penilaian paling baik, dengan 83,84% responden menyatakan "Baik" dan 7,59% menyatakan "Sangat Baik." Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang mencakup isu-isu nasional. Ketidakpuasan pada aspek ini tetap rendah, hanya 8,13% yang menilai "Tidak Baik," yang menunjukkan bahwa informasi sudah cukup inklusif bagi sebagian besar masyarakat. Aspek kemudahan informasi untuk dipahami mencatat penilaian tertinggi secara keseluruhan, dengan lebih dari 93% responden memberikan penilaian positif, yang terdiri dari 83,41% menyatakan "Baik" dan 10,30% menyatakan "Sangat Baik," menunjukkan bahwa informasi telah disampaikan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami.

Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan bahwa mayoritas masyarakat merasa puas dengan kualitas informasi publik yang disediakan oleh pemerintah, terutama dalam hal kemudahan, relevansi, dan cakupan informasi. Namun, aspek objektivitas dan kelengkapan masih memerlukan perhatian lebih, mengingat tingkat ketidakpuasan pada kedua aspek ini lebih tinggi dibandingkan aspek lainnya. Pemerintah telah berhasil menunjukkan upaya yang baik dalam menyediakan informasi publik yang relevan, mudah dipahami, dan mencerminkan isu-isu nasional. Dengan memperbaiki aspek yang masih memiliki tingkat ketidakpuasan, kualitas informasi publik dapat lebih ditingkatkan, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap instansi pemerintah.

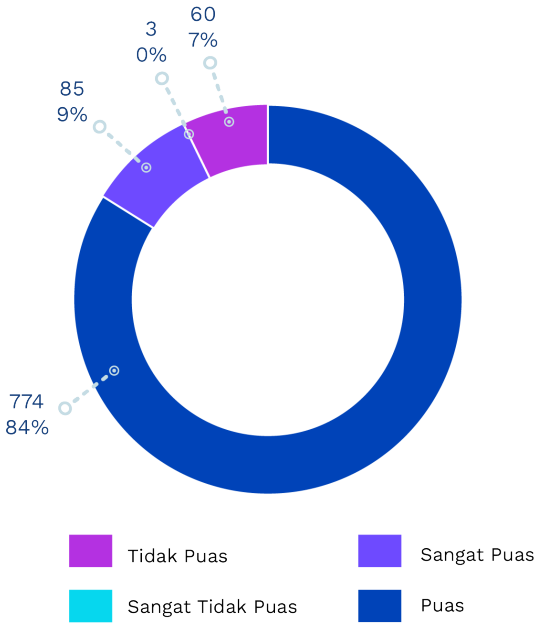


Diagram 2.94 Kepuasan Publik terhadap Kualitas Informasi Publik yang Disediakan oleh Pemerintah

Berdasarkan diagram tingkat kepuasan publik terhadap kualitas informasi publik yang disediakan oleh pemerintah, mayoritas responden menunjukkan penilaian positif. Sebanyak 83,9% responden menyatakan "Puas" terhadap kualitas informasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa informasi yang diberikan telah memenuhi harapan mereka. Selain itu, 9,2% responden memberikan penilaian "Sangat Puas," yang menandakan apresiasi tinggi terhadap layanan informasi publik. Dengan total lebih dari 93% responden merasa puas atau sangat puas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah berhasil dalam menyampaikan informasi yang relevan dan berkualitas. Proporsi yang kecil dari responden yang merasa tidak puas menyoroti bahwa secara keseluruhan, informasi publik dianggap efektif.

Lebih lanjut, hasil survei menunjukkan 6,5% responden menyatakan "Tidak Puas," serta 0,3% responden menyatakan "Sangat Tidak Puas." Data ini menunjukkan bahwa ada sebagian kecil masyarakat yang merasa bahwa kualitas informasi publik belum optimal. Ketidakpuasan ini perlu diperhatikan lebih lanjut karena bisa mencerminkan masalah dalam aksesibilitas, relevansi, atau transparansi informasi di beberapa kalangan masyarakat. Pemerintah perlu menggali lebih dalam untuk memahami alasan ketidakpuasan tersebut dan meningkatkan kualitas informasi di area yang masih kurang memadai. Dengan demikian, semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat yang sama dari informasi publik yang disediakan.

Secara umum, diagram ini menggambarkan tingginya tingkat kepuasan secara keseluruhan, dengan hanya kurang dari 7% responden menyatakan ketidakpuasan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil mencapai tingkat kualitas informasi publik yang cukup baik di mata masyarakat. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik, pemerintah dapat berfokus pada kelompok yang masih merasa tidak puas, dengan meningkatkan relevansi, keakuratan, dan kemudahan akses informasi publik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tingkat kepuasan publik dapat meningkat lebih jauh di masa mendatang.

C. Capaian Indeks Untuk Dimensi Output 34 Provinsi

Data yang ditemukan dalam studi ini digunakan sebagai acuan dalam penghitungan Indeks untuk setiap dimensi. Untuk dimensi Output, skor rata-rata untuk seluruh provinsi berada dalam kategori "Baik" (73,32). Provinsi dengan skor tertinggi pada dimensi Output adalah Ibukota Provinsi Bali, yang memperoleh nilai 80,54 dan masuk dalam kategori "Sangat Baik". Keberhasilan ini menunjukkan pengelolaan informasi publik yang optimal di wilayah tersebut, baik dari segi penerimaan informasi maupun kualitas layanan informasi publik. Sebaliknya, skor terendah pada dimensi Output ditemukan di Ibukota Provinsi Papua, dengan nilai 67,42, yang termasuk dalam kategori "Sedang". Penurunan capaian indeks di Provinsi Papua terutama disebabkan oleh hasil yang sangat rendah pada indikator penerimaan informasi, dengan skor 44,01 (Buruk). Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat Papua terhadap informasi tentang program prioritas nasional masih sangat terbatas. Padahal, indikator lainnya, yaitu penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik serta penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik, justru berada dalam kategori "Sangat Baik" dan "Baik". Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kualitas layanan informasi sudah memadai, tetapi jangkauan dan efektivitas penyebaran informasi masih perlu ditingkatkan. Rincian hasil penghitungan indeks untuk dimensi Output di masing-masing Ibukota Provinsi disajikan dalam Tabel x.xx berikut ini

Tabel 2.28 Capaian Dimensi Output 34 Provinsi

No.	Provinsi	Dimensi Output			Dimensi Output	Kategori
		Penerimaan Informasi	Penilaian Publik Terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik	Penilaian Publik Terhadap Akses Dan Kualitas Informasi Publik		
1.	Bali	65,33	84,68	91,25	80,42	Sangat Baik
2.	Kep. Bangka Belitung	69,68	79,76	87,73	79,06	Baik
3.	DKI Jakarta	64,97	78,91	88,58	77,49	Baik
4.	Jawa Barat	64,94	77,63	88,75	77,11	Baik
5.	Sumatera Selatan	64,91	76,92	88,54	76,79	Baik
6.	Sulawesi Tengah	68,60	72,77	86,53	75,96	Baik
7.	Sulawesi Tenggara	68,96	71,79	85,98	75,58	Baik
8.	Sumatera Barat	63,44	75,00	87,08	75,17	Baik
9.	Kepulauan Riau	59,09	80,36	85,89	75,11	Baik
10.	Nusa Tenggara Timur	66,70	72,96	84,76	74,81	Baik
11.	Maluku Utara	58,17	77,14	86,50	73,94	Baik
12.	Jawa Timur	57,85	76,23	87,67	73,92	Baik
13.	Jawa Tengah	55,14	78,86	87,61	73,87	Baik
14.	DI. Yogyakarta	59,61	76,53	85,25	73,80	Baik
15.	Kalimantan Tengah	57,92	74,70	88,44	73,69	Baik
16.	Lampung	60,59	73,51	86,53	73,54	Baik
17.	Sulawesi Selatan	54,63	77,17	87,50	73,10	Baik
18.	Nusa Tenggara Barat	49,68	81,55	87,86	73,03	Baik
19.	Maluku	57,35	74,45	86,53	72,78	Baik
20.	Gorontalo	56,11	73,38	88,50	72,66	Baik
21.	Papua Barat	67,02	63,89	86,79	72,56	Baik
22.	Jambi	52,75	75,89	87,43	72,02	Baik
23.	Kalimantan Utara	51,56	76,79	87,50	71,95	Baik
24.	Sumatera Utara	56,46	72,41	86,30	71,72	Baik
25.	Sulawesi Utara	50,14	76,05	87,32	71,17	Baik
26	Riau	55,00	72,40	85,92	71,11	Baik
27	Bengkulu	49,54	73,35	89,00	70,63	Baik
28	Kalimantan Barat	44,33	78,57	87,35	70,08	Baik
29	Kalimantan Timur	50,97	72,96	85,92	69,95	Sedang
30	Banten	49,80	74,52	83,18	69,17	Sedang
31	Sulawesi Barat	39,84	76,43	90,00	68,76	Sedang
32	Kalimantan Selatan	53,96	70,05	82,08	68,70	Sedang
33	Aceh	64,48	56,19	82,68	67,78	Sedang
34	Papua	41,40	71,43	86,82	66,55	Sedang
Nasional		**57,38**	**74,86**	**86,93**	**73,06**	**Baik**

Apabila diurutkan berdasarkan pembagian wilayah, 10 provinsi dengan indeks capaian tertinggi dominan terletak di wilayah Barat, mencakup Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. Wilayah Tengah juga menunjukkan kontribusi signifikan seperti di provinsi Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebaliknya, 10 provinsi dengan indeks capaian terendah memberikan hasil yang cukup menarik. Meskipun wilayah Barat memiliki sejumlah provinsi dengan capaian tertinggi, ternyata wilayah ini juga menyumbang beberapa provinsi dengan capaian terendah, seperti Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Bengkulu, dan Riau. Wilayah Tengah juga mencatatkan beberapa provinsi dengan capaian rendah, seperti Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, hanya satu provinsi dari wilayah Timur, yaitu Papua, yang masuk dalam kelompok capaian terendah.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan menarik, terutama terkait penyebab ketimpangan capaian indeks di wilayah Barat yang mencatat provinsi dengan kinerja terbaik sekaligus terburuk. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor spesifik yang memengaruhi capaian indeks di wilayah Barat Indonesia, seperti tingkat kesenjangan akses informasi atau efektivitas strategi komunikasi publik di masing-masing provinsi.

Jika dianalisis lebih mendalam berdasarkan masing-masing variabel, Penerimaan Informasi mencatat hasil paling rendah dengan rata-rata skor 55,92 yang termasuk dalam kategori “Buruk”. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses informasi yang memadai terkait program prioritas nasional.

Sebaliknya, dua variabel lainnya mencatat hasil yang sangat baik. Variabel Akses dan Kualitas Informasi memperoleh skor rata-rata 91,25, yang menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menyediakan informasi yang mudah diakses dan berkualitas bagi masyarakat. Variabel Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik juga mencatat capaian tinggi dengan skor rata-rata 84,68, mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap teknis pelayanan informasi yang diberikan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis, pemerintah perlu mempertahankan keberhasilan pada variabel Akses dan Kualitas Informasi serta Teknis Pelayanan Informasi Publik dengan terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Namun, perhatian lebih perlu diberikan pada variabel Penerimaan Informasi, yang menjadi tantangan utama. Upaya untuk meningkatkan kegiatan diseminasi informasi perlu diprioritaskan, terutama dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap informasi penting, seperti layanan yang disediakan oleh PPID.

Optimalisasi peran humas pemerintah juga menjadi kunci untuk memperluas jangkauan informasi, terutama di provinsi-provinsi dengan capaian indeks yang rendah. Dengan strategi komunikasi yang lebih efektif dan inklusif, pemerintah dapat memastikan bahwa masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, baik di Barat, Tengah, maupun Timur, memiliki akses yang setara terhadap informasi publik.

D. Kesimpulan Dimensi Output

Dimensi Output bertujuan untuk mengukur hasil dari program atau kegiatan pelayanan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pengukuran ini didasarkan pada tiga variabel utama: Penerimaan Informasi, Penilaian Publik terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik, dan Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Penerimaan Informasi mencatat skor capaian yang paling rendah dibandingkan dua variabel lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan responden terhadap program prioritas nasional masih terbatas. Sebaliknya, variabel Penilaian Publik terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik dan variabel Penilaian Publik terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik mencatat skor yang sangat baik dan baik, menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa puas dengan pelayanan informasi yang diberikan.

Dalam variabel Penerimaan Informasi, sebagian besar responden telah menerima informasi mengenai program prioritas nasional, meskipun masih terdapat sejumlah kecil yang belum mendapatkan informasi tersebut. Pengetahuan responden lebih terpusat pada tema-tema pembangunan seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, memperkuat ketahanan ekonomi, serta penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Menariknya, terdapat peningkatan signifikan pada penerimaan informasi tentang pengembangan wilayah, terutama terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Namun, tema-tema pembangunan lainnya, seperti Polhukhankam (politik, hukum, pertahanan, dan keamanan) serta isu-isu lingkungan, masih kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Media yang paling sering digunakan oleh responden untuk mencari informasi tetap

didominasi oleh media elektronik konvensional seperti televisi dan radio, diikuti oleh media digital seperti media sosial, instant messaging, dan portal berita. Namun, pengetahuan masyarakat terkait dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pemanfaatan layanannya masih rendah, menandakan perlunya peningkatan sosialisasi terhadap layanan ini.

Pada variabel ini, mayoritas responden merasa puas dengan layanan informasi yang diberikan oleh pemerintah di daerah masing-masing. Kepuasan tersebut meliputi aspek-aspek seperti kejelasan, kelengkapan, dan kemudahan dalam memperoleh informasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas teknis pelayanan informasi publik sudah cukup baik dan memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian dimensi Output. Sebagian besar responden juga menyatakan puas terhadap akses dan kualitas informasi publik yang disediakan oleh pemerintah. Kepuasan ini mencakup kemudahan dalam mengakses informasi serta mutu informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk meningkatkan capaian dimensi Output, beberapa langkah strategis perlu dilakukan oleh pemerintah. Pertama, diperlukan peningkatan diseminasi informasi dengan memperkuat strategi komunikasi untuk tema-tema pembangunan yang kurang diminati oleh publik, seperti Polhukhankam dan pengembangan wilayah. Hal ini dapat dilakukan melalui diversifikasi saluran komunikasi, peningkatan relevansi pesan, serta perluasan jangkauan informasi ke daerah-daerah yang memiliki akses terbatas. Kedua, peran lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI perlu dioptimalkan dalam penyebaran informasi. Sinergi antara lembaga-lembaga ini dengan media komunikasi konvensional lainnya, seperti pertemuan tatap muka dan kemitraan dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), dapat meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah harus memastikan inklusivitas dalam akses informasi dengan memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan fitur aksesibilitas pada platform digital dan media lainnya sehingga seluruh kelompok masyarakat memiliki akses yang setara terhadap informasi publik. Sosialisasi layanan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga harus lebih intensif agar masyarakat lebih mengenal dan memanfaatkan layanan ini. Peningkatan ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara permintaan informasi dari masyarakat dan penyediaan informasi oleh pemerintah.

Terakhir, meskipun variabel teknis, akses, dan kualitas informasi publik telah mencapai capaian yang baik, upaya peningkatan layanan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari informasi yang disediakan oleh pemerintah. Dengan implementasi langkah-langkah strategis ini, diharapkan kualitas komunikasi publik dapat semakin diperkuat, serta capaian dimensi Output dapat ditingkatkan secara signifikan.



2.4 Dimensi Outcome

A. Pengantar

Dimensi outcome dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak nyata dari pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) yang dilakukan oleh pemerintah. Fokus utama pada dimensi ini adalah mengevaluasi seberapa efektif IKP pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan strategisnya, seperti meningkatkan pemahaman publik tentang hak untuk tahu, mendorong partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan, membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta menjamin pemerataan informasi publik kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pemahaman publik tentang hak untuk tahu merupakan salah satu variabel penting dalam mengevaluasi outcome pengelolaan IKP. Hak untuk tahu mencakup pengetahuan publik tentang jenis-jenis informasi publik yang wajib disediakan oleh badan publik. Partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan juga menjadi fokus penting dalam dimensi outcome. Partisipasi publik yang aktif dan bermakna diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kepercayaan publik terhadap pemerintah merupakan fondasi penting bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Pemerataan informasi publik juga menjadi perhatian utama dalam dimensi ini. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan informasi publik secara merata ke seluruh wilayah dan menjamin bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses informasi tersebut.

Analisis pada dimensi outcome ini diharapkan menghasilkan gambaran yang utuh mengenai efektivitas pengelolaan IKP pemerintah dan dampaknya terhadap publik. Informasi ini sangat penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan meningkatkan strategi pengelolaan IKP mereka agar lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya. Berikut adalah uraian temuan hasil kajian pada dimensi outcome.

B. Capaian Indeks Untuk Dimensi Outcome

Hak untuk tahu merujuk pada hak fundamental individu atau publik untuk memperoleh akses terhadap informasi publik, terutama informasi yang kuasai oleh badan publik negara (kementerian/lembaga/pemerintah daerah). Di Indonesia, hak ini dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945 tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemudian, hak tersebut diterjemahkan ke dalam Pasal 9 – 11 UU KIP yang menjelaskan jenis-jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik, termasuk badan publik negara. Namun, di sisi lain, terdapat juga informasi yang dikategorikan ke dalam informasi yang dikecualikan (Pasal 17 UU KIP). Pemahaman terhadap hak untuk tahu tersebut merupakan modal utama bagi publik untuk memantau dan menilai tindakan serta kebijakan pemerintah, yang pada gilirannya memperkuat partisipasi publik, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Untuk mengukur tingkat pemahaman publik terhadap hak untuk tahu, telah dilakukan survei terhadap 1600 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Pertanyaan yang diajukan mencakup jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan dan disediakan oleh badan publik negara, serta informasi yang dikecualikan. Kemudian, responden menjawab berdasarkan pengetahuan mereka terhadap informasi yang boleh dan yang tidak boleh mereka minta. Jenis-jenis informasi yang ditanyakan adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Publik tentang Hak untuk Tahu (Right To Know)

Hak untuk tahu merujuk pada hak fundamental individu atau publik untuk memperoleh akses terhadap informasi publik, terutama informasi yang kuasai oleh badan publik negara (kementerian/ lembaga/pemerintah daerah). Di Indonesia, hak ini dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945 tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemudian, hak tersebut diterjemahkan ke dalam Pasal 9 – 11 UU KIP yang menjelaskan jenis-jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik, termasuk badan publik negara. Namun, di sisi lain, terdapat juga informasi yang dikategorikan ke dalam informasi yang dikecualikan (Pasal 17 UU KIP). Pemahaman terhadap hak untuk tahu tersebut merupakan modal utama bagi publik untuk memantau dan menilai tindakan serta kebijakan pemerintah, yang pada gilirannya memperkuat partisipasi publik, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Untuk mengukur tingkat pemahaman publik terhadap hak untuk tahu, telah dilakukan survei terhadap 1600 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Pertanyaan yang diajukan mencakup jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan dan disediakan oleh badan publik negara, serta informasi yang dikecualikan. Kemudian, responden menjawab berdasarkan pengetahuan mereka terhadap informasi yang boleh dan yang tidak boleh mereka minta. Jenis-jenis informasi yang ditanyakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.29 Beberapa Jenis Informasi yang Ditanyakan Kepada Responden

Item Informasi	Status (boleh diminta / Ya; tidak boleh diminta / Tidak)
Data laporan keuangan pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya yang sudah diaudit	Ya
Rencana kegiatan pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya yang sedang dan akan dilaksanakan	Ya
Data Anggaran Kegiatan Pemerintah Daerah atau instansi pemerintah lainnya yang meliputi sumber dan jumlahnya	Ya
Meminta informasi daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Ya
Meminta informasi jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya	Ya
Meminta informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri	Tidak
Meminta informasi rinci kekayaan alam yang dikuasai oleh negara	Tidak
Meminta data mengenai rencana awal investasi asing	Tidak
Meminta informasi mengenai korespondensi diplomatik antarnegara	Tidak
Meminta data yang mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	Tidak

Sumber: UU KIP

Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden telah memahami jenis informasi yang boleh mereka dan yang tidak boleh mereka minta kepada badan publik negara. Kondisi ini tergambar dari persentase responden yang lebih banyak menjawab “ya” untuk informasi-informasi yang boleh diminta, dan lebih banyak menjawab “tidak” untuk informasi-informasi yang tidak boleh diminta (lihat Diagram . . . .).

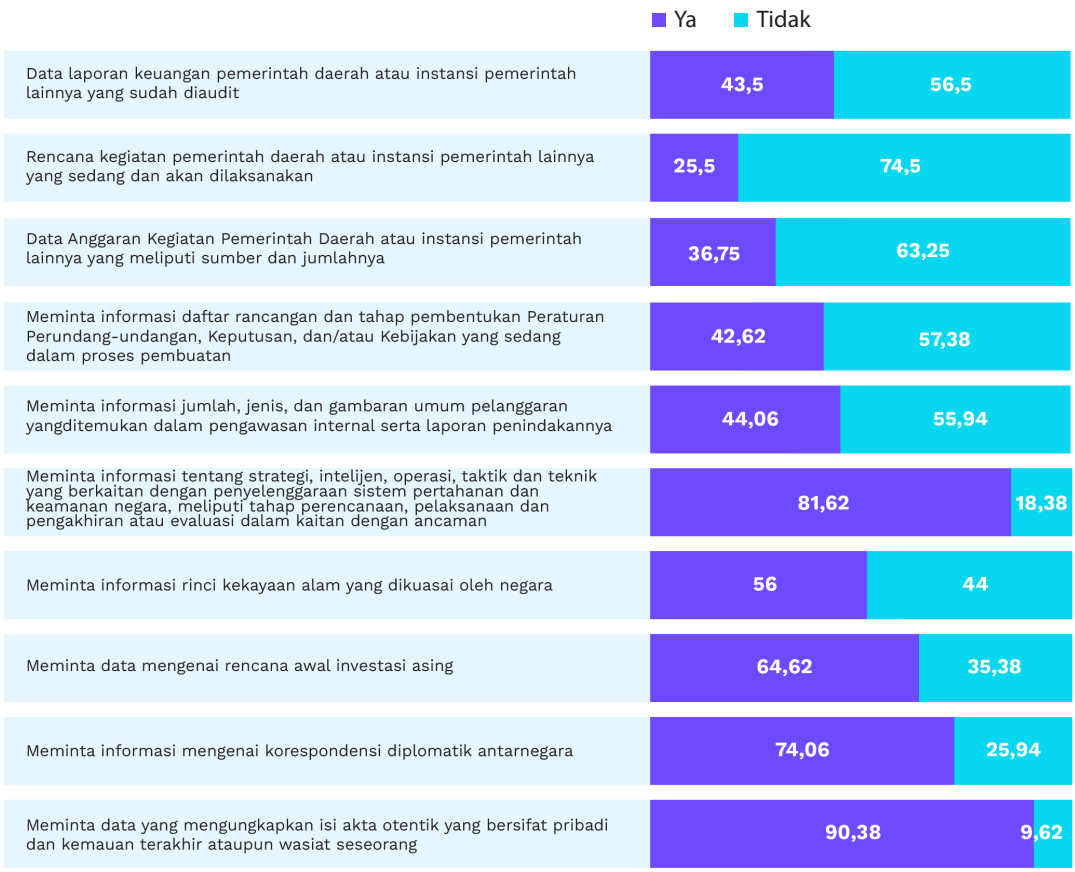


Diagram 2.95 Pemahaman Responden tentang Hak untuk Tahu

Namun, di sisi lain, masih banyak responden yang belum memahami informasi apa saja yang boleh mereka minta, misalnya informasi terkait pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal, sebanyak 44,06% responden menjawab "tidak". Hal yang sama terjadi pada informasi mengenai laporan keuangan (43,50% menjawab tidak), daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan (42,62% menjawab tidak), anggaran kegiatan pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya (36,75% menjawab tidak). Selain itu, informasi yang tidak boleh diminta pun belum dipahami dengan baik oleh responden. Hal ini terlihat dari masih banyaknya responden yang menjawab "ya" pada informasi-informasi mengenai kekayaan alam yang dikuasai negara (44% menjawab ya), dan rencana awal investasi asing (35,38% menjawab ya).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun sebagian besar publik telah memahami hak mereka untuk mengetahui, namun masih ada kesenjangan pemahaman mengenai jenis informasi yang boleh dan tidak boleh diminta. Kondisi ini berimplikasi pada kehidupan demokrasi di Indonesia. Kurangnya pemahaman publik tersebut dapat membuat mereka ragu untuk menuntut transparansi, sehingga mempengaruhi partisipasi aktif dan memperlemah pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

2. Partisipasi Publik Dalam Proses-Proses Kebijakan Pemerintah

Partisipasi dalam proses-proses kebijakan pemerintah mengacu pada keterlibatan aktif publik dalam tahap-tahap pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Partisipasi publik dalam proses kebijakan bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan publik, pemerintah dapat memahami lebih baik persoalan yang ada di lapangan serta mendapatkan legitimasi dalam penerapan kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, partisipasi dipandang sebagai hasil atau outcome dari PIKP yang dilakukan oleh badan publik negara, dengan asumsi bahwa komunikasi yang efektif dari pemerintah dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan publik.

Indikator-indikator yang diukur dalam variabel partisipasi ini meliputi persepsi dan pengalaman responden terkait partisipasi dalam program kebijakan pemerintah melalui ruang digital.



Diagram 2.96 Partisipasi Publik dalam Proses-Proses Kebijakan Pemerintah

Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden menilai bahwa pemerintah telah melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses kebijakan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Namun, masih banyak juga responden yang menilai sebaliknya. Selanjutnya, dari sisi pengalaman, sebagian besar responden belum pernah berpartisipasi dalam proses kebijakan pemerintah, hanya sebagian kecil yang pernah terlibat dalam proses perencanaan (36,62%), pelaksanaan (41,38%), dan evaluasi (31,00%). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi dengan pengalaman publik terkait partisipasi mereka dalam proses kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa upaya pelibatan publik oleh pemerintah belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara luas, sehingga tingkat partisipasi masih rendah. Dengan demikian, aktivitas komunikasi publik pemerintah belum bisa meningkatkan partisipasi publik secara signifikan.

Dalam hal inklusivitas, sebagian besar responden menilai bahwa pemerintah telah menyediakan program khusus bagi perempuan dan/atau kelompok-kelompok rentan lainnya dalam mengakses berbagai bentuk layanan pemerintah (61,62%). Selain itu, mereka juga menganggap bahwa pemerintah telah melibatkan perempuan dan/atau kelompok-kelompok rentan lainnya dalam pembuatan kebijakan terkait perempuan dan/atau kelompok-kelompok rentan lainnya (53,31%). Namun, di sisi lain, sebagian besar responden tidak mengetahui bahwa pemerintah memiliki program literasi digital khusus perempuan dan atau kelompok-kelompok rentan lainnya (55,12%).

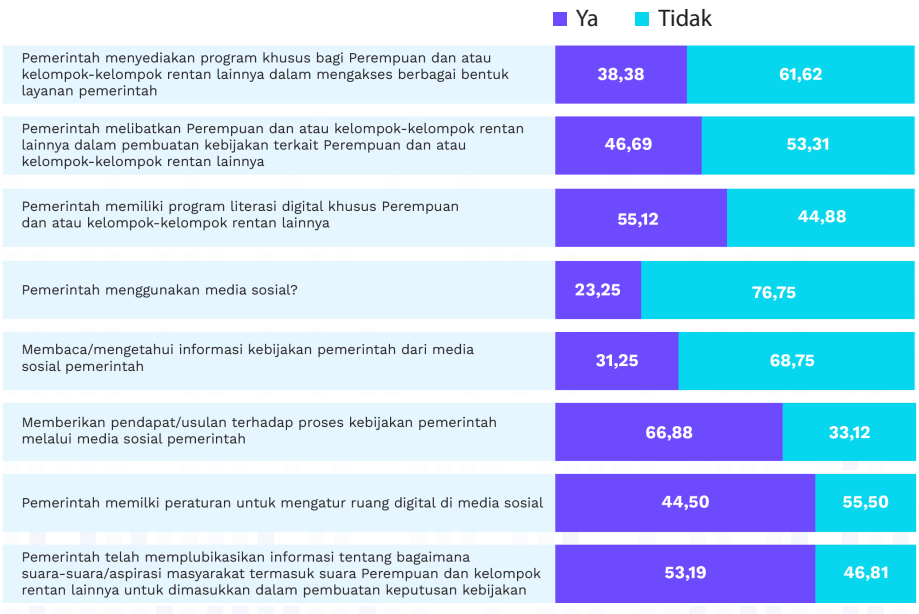


Diagram 2.97 Partisipasi Publik dalam Proses-Proses Kebijakan Pemerintah

Kondisi tersebut bermakna bahwa secara umum, publik menilai pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam menciptakan inklusivitas bagi perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya melalui program khusus dan pelibatan mereka dalam pembuatan kebijakan. Namun demikian, meskipun sudah ada upaya tersebut, informasi terkait program-program tertentu belum tersampaikan secara luas kepada publik, seperti program literasi digital. Hal ini mengindikasikan perlunya komunikasi publik yang lebih baik untuk untuk segmen publik tertentu, terutama perempuan dan atau kelompok-kelompok rentan lainnya, agar mereka lebih mengetahui dan dapat memanfaatkan program-program yang dirancang khusus untuk mereka.

Dalam konteks ruang digital, sebagian besar responden mengetahui bahwa pemerintah menggunakan media sosial (76,75%), dan mereka mendapatkan informasi kebijakan pemerintah dari media sosial pemerintah (68,75%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi saluran komunikasi utama bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi kebijakan kepada publik, dan saluran ini efektif dalam menjangkau sebagian besar publik. Namun, meskipun media sosial berhasil menjangkau sebagian besar publik, masih ada kelompok masyarakat yang tidak terjangkau (31,25%). Kemudian, meskipun pemerintah sudah menggunakan media sosial, platform tersebut belum menjadi saluran yang efektif bagi publik untuk memberikan pendapat/usulan terhadap proses kebijakan, buktinya, hanya 33,12% responden yang pernah memberikan pendapat/usulan terhadap proses kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, untuk mencapai inklusivitas, berbagai strategi alternatif perlu dilakukan, seperti menggunakan beragam saluran komunikasi tradisional

dan konvensional di wilayah tertentu, meningkatkan program literasi digital, atau melibatkan komunitas masyarakat dalam melakukan diseminasi informasi. Selain itu, kegiatan literasi digital perlu ditingkatkan terutama untuk memberikan kesadaran kepada publik bahwa media sosial tidak hanya bermanfaat untuk mendapatkan informasi, tapi juga dapat dimanfaatkan sebagai saluran menyampaikan pendapat atau aspirasi.

Selanjutnya, mayoritas responden mengetahui bahwa pemerintah memiliki peraturan untuk mengatur ruang digital di media sosial (55.5%), tapi hampir separuh dari mereka yang tidak mengetahui hal tersebut (44,5%). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang signifikan mengenai regulasi ruang digital di media sosial. Kesenjangan tersebut berpotensi menimbulkan dampak-dampak yang negatif, seperti pelanggaran yang dilakukan publik secara tidak disengaja di media sosial, kurangnya rasa aman, serta lemahnya pengawasan publik terhadap implementasi regulasi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kampanye kebijakan, terutama yang berkaitan dengan regulasi yang mengatur ruang digital di media sosial.

Kemudian, dari sisi proses kebijakan, lebih dari separuh responden tidak mengetahui apakah suara/aspirasi mereka didengarkan dan diakomodasi ke dalam pembuatan keputusan kebijakan (53,19%). Kondisi ini berpotensi menimbulkan beberapa dampak negatif, seperti penurunan kepercayaan publik, penurunan partisipasi, serta menimbukan ketidakpuasan karena publik merasa pendapat mereka tidak didengar. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan transparansi untuk menunjukkan bagaimana aspirasi masyarakat diakomodasi dalam pembuatan kebijakan, misalnya dalam bentuk laporan. Selain itu, pemerintah juga perlu memanfaatkan platform interaktif untuk meningkatkan kualitas komunikasi dua arah di media sosial, serta untuk memfasilitasi publik dalam memantau dampak pendapat mereka terhadap suatu kebijakan.

Secara nasional, indeks partisipasi dalam proses kebijakan pemerintah menunjukkan hasil yang buruk dengan skor 53,49. Kesenjangan skor terjadi di antara provinsi-provinsi yang dinilai. Hanya empat provinsi yang masuk dalam kategori baik, yaitu Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Sumatera Selatan. Di sisi lain, masih banyak daerah yang indeks partisipasinya masuk dalam kategori buruk (14 provinsi) dan sangat buruk (14 provinsi).

Tabel 2.30 Partisipasi dalam Proses Kebijakan Pemerintah melalui ruang digital dalam 6 bulan terakhir (Januari – Juni 2024)

v

No.	Provinsi	Ruang Digital	Keterangan
1.	Sulawesi Tengah	77.17	Baik
2.	DKI Jakarta	76.61	Baik
3.	Sulawesi Utara	75.00	Baik
4.	Sumatera Selatan	71.36	Baik
5.	Bengkulu	65.63	Sedang
6.	Papua Barat	61.36	Sedang
7.	Kep. Bangka Belitung	60.71	Buruk
8.	Kalimantan Utara	60.00	Buruk
9.	Jawa Barat	59.31	Buruk
10.	Nusa Tenggara Timur	58.33	Buruk
11.	Bali	57.78	Buruk
12.	Kalimantan Barat	56.88	Buruk
13.	Sulawesi Tenggara	56.52	Buruk
14.	Kepulauan Riau	55.36	Buruk
15.	Kalimantan Tengah	55.26	Buruk
16.	Maluku Utara	53.57	Buruk
17.	Maluku	53.41	Buruk
18.	Sulawesi Selatan	53.13	Buruk
19.	Kalimantan Timur	52.88	Buruk
20.	Jawa Tengah	52.40	Buruk
21.	Gorontalo	50.00	Sangat buruk
22.	Sumatera Utara	49.16	Sangat buruk
23.	Nusa Tenggara Barat	49.04	Sangat buruk
24.	Kalimantan Selatan	48.44	Sangat buruk
25.	Jawa Timur	48.29	Sangat buruk
26	Lampung	48.11	Sangat buruk
27	Sumatera Barat	46.93	Sangat buruk
28	Riau	45.52	Sangat buruk
29	DI. Yogyakarta	44.57	Sangat buruk
30	Papua	40.63	Sangat buruk
31	Banten	37.50	Sangat buruk
32	Aceh	36.67	Sangat buruk
33	Jambi	36.18	Sangat buruk
34	Sulawesi Barat	25.00	Sangat buruk
Nasional		**53,49**	**Buruk**



Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pemerintah di Indonesia masih rendah. Partisipasi tersebut tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, dan mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara daerah-daerah dalam hal keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan. Kondisi tersebut menandakan lemahnya fungsi demokrasi di banyak provinsi, yang akan berdampak pada berkurangnya kualitas kebijakan karena tidak mencerminkan aspirasi publik secara luas. Oleh karena itu, Pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo perlu meningkatkan komunikasi dua arah, baik di ruang publik nyata maupun digital, terutama untuk daerah yang indeks partisipasinya buruk dan sangat buruk. Upaya-upaya komunikasi strategis perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi kebijakan dan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi.

3. Dampak Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah

Komunikasi publik yang efektif dapat membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Komunikasi publik memainkan peran kunci dalam menciptakan persepsi positif, meningkatkan legitimasi publik terhadap pemerintah, serta memupuk hubungan yang konstruktif antara pemerintah dengan masyarakat. Berikaitan dengan hal tersebut, bagian ini akan menjelaskan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Berdasarkan hasil survei, sebagain besar responden percaya kepada pemerintah (78,4%) dan sangat percaya (7,4%).

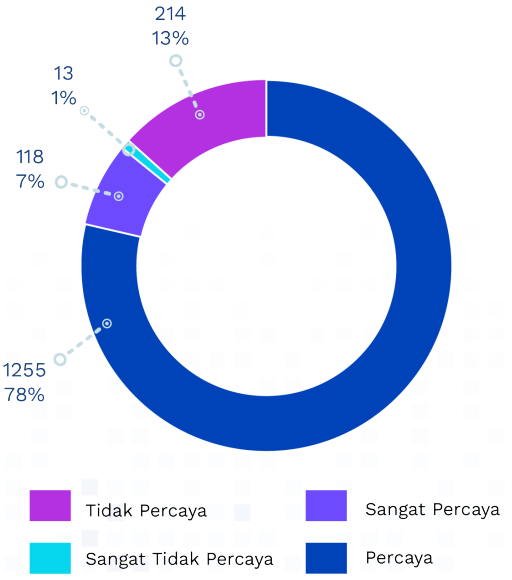
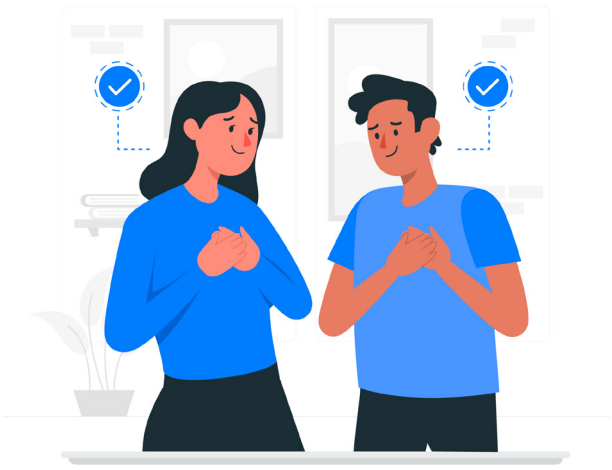


Diagram 2.98 Jumlah Responden menurut Tingkat Kepercayaan terhadap Pemerintah



Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah telah berhasil menciptakan kepercayaan publik. Hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap legitimasi dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Tabel 2.31 Rata-Rata Responden menurut Tingkat Kepercayaan terhadap Pemerintah

v

No.	Provinsi	Skor	Keterangan
1.	Bali	83,33	Sangat baik
2.	Kalimantan Utara	82,5	Sangat baik
3.	Banten	78,41	Baik
4.	Sulawesi Barat	77,94	Baik
5.	Sumatera Selatan	76,7	Baik
6.	Sulawesi Tengah	76,09	Baik
7.	Lampung	75,76	Baik
8.	Jambi	75	Baik
9.	Kalimantan Tengah	75	Baik
10.	Maluku Utara	75	Baik
11.	Sulawesi Utara	75	Baik
12.	Jawa Timur	74,57	Baik
13.	Jawa Tengah	74,28	Baik
14.	Nusa Tenggara Barat	74,04	Baik
15.	Sulawesi Tenggara	73,91	Baik
16.	Maluku	73,86	Baik
17.	Kepulauan Riau	73,21	Baik
18.	Sulawesi Selatan	73,01	Baik
19.	Gorontalo	72,92	Baik
20.	DI. Yogyakarta	72,83	Baik
21.	Papua Barat	72,73	Baik
22.	Kalimantan Timur	72,6	Baik
23.	Kalimantan Barat	72,5	Baik
24.	Jawa Barat	72,06	Baik
25.	Sumatera Barat	71,49	Baik
26	Kep. Bangka Belitung	71,43	Baik
27	Papua	70,83	Sedang
28	Kalimantan Selatan	70,31	Sedang
29	Nusa Tenggara Timur	70	Sedang
30	Bengkulu	69,79	Sedang
31	Sumatera Utara	69,46	Sedang
32	Riau	69,4	Sedang
33	DKI Jakarta	65,73	Sedang
34	Aceh	56,67	Buruk
Nasional		73,19	Baik

Secara nasional, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah tergolong baik (skor 73,19). Penilaian tersebut merata hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan, Provinsi Bali, Kalimantan Utara, dan Banten memperoleh skor sangat baik. Hanya sebagian kecil masyarakat dengan tingkat kepercayaan sedang, yaitu di Papua, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Sumatera Utara, Riau, dan DKI Jakarta. Namun, di sisi lain, terdapat satu provinsi yang masyarakatnya memiliki tingkat kepercayaan rendah atau buruk terhadap pemerintah, yaitu Aceh.

Tingginya tingkat kepercayaan publik secara nasional menjadi indikator positif bahwa pemerintah memiliki legitimasi yang cukup kuat untuk melaksanakan kebijakan yang dapat mendorong stabilitas sosial dan politik. Namun, pendekatan komunikasi khusus perlu dilakukan terhadap daerah dengan tingkat kepercayaan yang rendah dan sedang. Pemerintah perlu mengidentifikasi akar penyebabnya dan mengembangkan strategi untuk membangun kembali kepercayaan publik.

4. Penilaian Publik terhadap Pemerataan Informasi Publik

Pemerataan informasi publik sangat penting untuk meningkatkan kesetaraan publik dalam hal mengakses informasi. Degan informasi yang merata, semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap informasi, termasuk kelompok marginal atau rentan. Upaya ini penting untuk mencegah ketimpangan sosial dan memperkuat inklusivitas. Selain itu, informasi yang merata juga dapat mendukung publik untuk memahami dan terlibat secara aktif dalam proses kebijakan, sehingga pada akhirnya dapat mendorong partisipasi. Di samping itu, pemerataan informasi juga merupakan upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah, medorong kepercayaan publik, serta yang tak kalah penting yaitu sebagai upaya dalam mengurangi disinformasi terutama di daerah yang kurang terjangkau.

Dalam kajian ini, aspek-aspek yang dinilai dalam pemerataan informasi meliputi persepsi responden terhadap perilaku pemerintah yang tidak membeda-bedakan dalam pemberian layanan informasi publik, pemerataan informasi di daerah responden, keterwakilan konten informasi terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, serta persepsi terhadap keamanan data pribadi masyarakat dalam pengelolaan informasi dan komunikasi oleh pemerintah.



Diagram 2.99 Indeks Informasi Publik Terkait Pemenuhan Pemerataan Informasi di Seluruh Indonesia

Berdasarkan hasil studi diketahui, mayoritas responden (80,63%) setuju bahwa pemerintah tidak membedakan dalam pemberian layanan informasi publik. Lebih dari 1.290 responden menyatakan pemerintah memberikan layanan informasi yang sama kepada seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi. Keyakinan ini bahkan diperkuat dengan adanya 10% responden yang menyatakan sangat setuju bahwa pemerintah memberikan layanan informasi yang setara kepada masyarakat.

Meskipun demikian, temuan ini juga menyoroti adanya sebagian responden yang memiliki pandangan berbeda. Mereka tidak setuju (8,62% atau 138 responden) bahwa pemerintah memberikan layanan informasi publik secara merata. Lebih lanjut, sebagian kecil responden (0,8% atau 12 responden) bahkan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut, yang mengindikasikan adanya potensi ketidakpuasan atau pengalaman negatif terkait akses informasi publik. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara umum, publik memandang pemerintah telah bersikap adil dalam menyediakan akses informasi. Namun, adanya sebagian responden yang merasa mendapatkan perlakuan berbeda dalam akses informasi publik perlu menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi publik, tanpa terkecuali.

Dalam hal pemerataan informasi di daerah, Hasil survei menunjukkan optimisme publik terhadap pemerataan distribusi informasi. Mayoritas responden (73,44% atau 1,175 responden) setuju bahwa informasi publik telah terdistribusi secara merata ke seluruh daerah. Keyakinan ini diperkuat dengan 5,88% atau 94 responden yang sangat setuju. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian responden (20,19% atau 323) yang merasa distribusi informasi publik belum merata. Sebagian kecil (0,50% atau 8 responden) bahkan sangat tidak setuju, yang mengindikasikan adanya kesenjangan akses informasi di beberapa daerah.

Tingginya persentase responden yang percaya bahwa distribusi informasi publik merata tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menyebarkan informasi ke berbagai daerah. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam keterbukaan informasi publik. Namun demikian, Pemerintah masih perlu mengidentifikasi daerah atau kelompok masyarakat yang merasa kurang terjangkau untuk memastikan akses yang merata di seluruh daerah.

Mayoritas responden (74,13% atau 1,186 responden) juga setuju bahwa konten informasi publik telah mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Bahkan, 5,94% atau 95 responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Namun, sebagian responden (19,50% atau 312 responden) memiliki pandangan berbeda. Mereka tidak setuju bahwa konten informasi publik telah memenuhi kebutuhan semua kalangan. Sebagian kecil (0,44% atau 7 responden) bahkan sangat tidak setuju, menunjukkan perlunya pemerintah untuk lebih memperhatikan keragaman kebutuhan informasi publik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berhasil menyusun konten informasi publik yang relevan dengan kebutuhan sebagian besar publik atau masyarakat. Hal ini mencerminkan langkah positif dalam upaya menciptakan komunikasi publik yang inklusif. Namun, pemerintah masih perlu menganalisis secara mendalam terhadap kelompok yang merasa kebutuhan informasinya belum terpenuhi, seperti masyarakat marginal, kelompok rentan, atau wilayah dengan akses informasi yang belum memadai.

Dalam hal keamanan data pribadi, mayoritas responden (69,81% atau 1,117 responden) menyatakan setuju bahwa pemerintah telah menjamin keamanan data pribadi mereka. Bahkan, 2,31% responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Namun sebaliknya, sebagian responden (19,31% atau 309 responden) merasa keamanan data pribadi mereka belum terjamin dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dan 2,31% (37 responden) bahkan sangat tidak setuju terhadap jaminan keamanan data pribadi mereka. Kondisi ini mengindikasikan adanya kekhawatiran di kalangan publik terkait perlindungan data pribadi mereka, meskipun persepsi positif masih mendominasi.

Tabel 2.32 Indeks Informasi Publik Terkait Pemenuhan Pemerataan Informasi di Seluruh Indonesia

No.	Provinsi	Pemerataan	Keterangan
1.	Bali	82,22	Sangat baik
2.	Sulawesi Barat	78,31	Baik
3.	Nusa Tenggara Barat	75,72	Baik
4.	Jawa Barat	75,57	Baik
5.	Kalimantan Tengah	75	Baik
6.	DKI Jakarta	74,9	Baik
7.	Jambi	73,85	Baik
8.	Kalimantan Utara	73,75	Baik
9.	Jawa Tengah	73,74	Baik
10.	Kalimantan Timur	73,56	Baik
11.	Sumatera Selatan	73,54	Baik
12.	Kalimantan Barat	73,28	Baik
13.	Papua	73,18	Baik
14.	Sulawesi Utara	72,92	Baik
15.	Sumatera Barat	72,81	Baik
16.	Maluku	72,73	Baik
17.	Jawa Timur	72,32	Baik
18.	Kep. Bangka Belitung	72,32	Baik
19.	Sulawesi Selatan	72,3	Baik
20.	Bengkulu	72,14	Baik
21.	Gorontalo	71,88	Baik
22.	Sulawesi Tengah	71,47	Baik
23.	Sulawesi Tenggara	71,47	Baik
24.	Kalimantan Selatan	70,7	Sedang
25.	Maluku Utara	70,54	Sedang
26	Riau	70,15	Sedang
27	Lampung	68,75	Sedang
28	Banten	68,47	Sedang
29	Sumatera Utara	67,99	Sedang
30	DI. Yogyakarta	66,58	Sedang
31	Papua Barat	66,48	Sedang
32	Nusa Tenggara Timur	65,21	Sedang
33	Kepulauan Riau	64,73	Sedang
34	Aceh	52,08	Buruk
Nasional		**71,49**	**Baik**

Tingginya persentase responden yang merasa data pribadi mereka aman menjadi indikator positif bahwa pemerintah telah melakukan upaya perlindungan yang cukup efektif. Namun, sebagian responden yang merasa tidak aman menunjukkan bahwa masih ada keraguan terhadap sistem keamanan data pribadi. Hal ini menuntut pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan kejelasan mengenai mekanisme perlindungan data pribadi.

Secara nasional, persepsi publik terhadap pemerataan informasi menunjukkan hasil yang baik (skor 71,49). Bahkan, masyarakat di Provinsi Bali menilai bahwa pemerataan informasi yang disebarluaskan oleh pemerintah sangat baik (skor 82,22). Hal ini mencerminkan bahwa mayoritas publik merasa informasi telah tersebar secara merata ke berbagai daerah. Penilaian tersebut terjadi di lebih dari separuh provinsi di Indonesia (22 provinsi menilai baik). Namun demikian, masih ada publik yang menilai bahwa pemerintah belum menyebarluaskan informasi secara merata, yaitu di Aceh (skor 52,08). Sementara itu, 10 (sepuluh) provinsi lainnya berada dalam kategori sedang (lihat tabel . . .). Data ini mengindikasikan bahwa meskipun secara umum upaya pemerataan informasi telah berhasil, namun masih ada tantangan dalam menjangkau semua daerah secara setara.

C. Capaian Indeks Dimensi Outcome

Bagian ini akan menjelaskan hasil pengukuran indeks PIKP khusus untuk dimensi Outcome. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dimensi Outcome ini terdiri atas variabel penilaian publik terhadap pemerataan informasi, pemenuhan hak untuk mengetahui, dan partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah. Kemudian, nilai rata-rata dari tiga variabel tersebut menjadi hasil indeks dimensi outcome secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil pengukuran, indeks dimensi outcome menunjukkan variasi yang signifikan antar provinsi di Indonesia. Sulawesi Utara menonjol dengan skor tertinggi (78,47). Skor tersebut mencerminkan praktik terbaik terkait hasil dari pengelolaan informasi dan komunikasi oleh pemerintah di daerah tersebut. Di sisi lain, Sulawesi Barat mendapatkan nilai terendah (62,87). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan signifikan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik di wilayah tersebut sehingga menghasilkan outcome yang lebih baik. Dari total 34 provinsi, sebanyak 17 provinsi mendapatkan skor di atas rata-rata nasional (di atas 71,18), sementara 17 provinsi lainnya berada di bawah skor nasional (di bawah 71,18). Kondisi ini menunjukkan kesenjangan yang nyata antar daerah.

Beberapa provinsi yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut. Aceh mendapatkan skor yang sangat baik untuk variabel pemenuhan hak untuk mengetahui, tapi mendapatkan skor yang buruk dan sangat buruk untuk dua variabel lainnya. Penilaian publik terhadap pemerataan informasi di Aceh menjadi yang paling buruk dibandingkan provinsi lainnya. Kemudian, Sulawesi Barat memperoleh skor yang baik untuk variabel pemerataan informasi, tapi buruk dalam dua variabel lainnya. Pada intinya, masing-masing provinsi menunjukkan keunggulan dalam variabel tertentu dan kelemahan pada variabel lainnya dalam dimensi outcome.

Variasi hasil indeks dalam dimensi outcome yang signifikan antarprovinsi mencerminkan ketimpangan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Daerah dengan skor rendah memerlukan perhatian lebih untuk memastikan manfaat dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik dirasakan secara merata. Setiap provinsi menunjukkan keunggulan dan kelemahan dalam konteks variabel yang berbeda. Hal ini menuntut pendekatan komunikasi yang spesifik untuk masing-masing daerah. Misalnya, Aceh perlu fokus pada peningkatan pemerataan informasi dan partisipasi, sementara Sulawesi Barat memerlukan perbaikan dalam pemenuhan hak untuk mengetahui dan partisipasi publik. Secara keseluruhan, dimensi outcome menggambarkan hasil yang baik, yaitu dengan rata-rata skor nasional 71,18. Meskipun demikian, beberapa provinsi perlu meningkatkan kinerja untuk memastikan hasil dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik dapat dirasakan manfaatnya oleh publik.

D. Kesimpulan Dimensi Outcome

Dimensi outcome mengungkapkan beberapa temuan penting terkait dampak dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik oleh pemerintah sebagai berikut:

- Pemahaman publik tentang hak untuk tahu sudah relatif baik, namun masih terdapat kesenjangan dalam memahami jenis informasi yang dapat diakses atau tidak oleh publik.

- Partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan masih relatif rendah. Namun, persepsi publik terhadap upaya pemerintah dalam melibatkan masyarakat dinilai positif atau baik.

- Media sosial menjadi saluran komunikasi utama bagi pemerintah dalam melakukan aktivitas komunikasi dan penyebaran informasi, tapi perlu

Tabel 2.33 Capaian Indeks Dimensi Outcome menurut Provinsi

No.	Provinsi	Dimensi Outcome			Dimensi Outcome	Kategori
		Penilaian Publik Terhadap Pemerataan Informasi	Pemenuhan Hak Untuk Mengetahui	Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Pemerintah		
1.	Sulawesi Utara	72,92	87,50	75,00	78,47	Baik
2.	Papua Barat	66,48	95,45	67,05	76,33	Baik
3.	Sulawesi Tengah	71,47	80,43	76,63	76,18	Baik
4.	Jawa Barat	75,57	87,16	65,69	76,14	Baik
5.	Bali	82,22	75,56	70,56	76,11	Baik
6.	DKI Jakarta	74,90	79,74	71,17	75,27	Baik
7.	Kalimantan Timur	73,56	89,44	62,74	75,25	Baik
8.	Nusa Tenggara Timur	65,21	95,83	64,17	75,07	Baik
9.	Bengkulu	72,14	84,78	67,71	74,88	Baik
10.	Kalimantan Barat	73,28	86,54	64,69	74,84	Baik
11.	Maluku Utara	70,54	85,71	64,29	73,51	Baik
12.	Sumatera Selatan	73,54	72,60	74,03	73,39	Baik
13.	Maluku	72,73	82,35	63,64	72,91	Baik
14.	Kalimantan Tengah	75,00	78,33	65,13	72,82	Baik
15.	Jawa Tengah	73,74	80,93	63,34	72,67	Baik
16.	Lampung	68,75	86,72	61,93	72,47	Baik
17.	Kep. Bangka Belitung	72,32	78,57	66,07	72,32	Baik
18.	Sulawesi Selatan	72,30	77,78	63,07	71,05	Baik
19.	Kalimantan Selatan	70,70	82,69	59,38	70,92	Baik
20.	Sumatera Utara	67,99	83,98	59,31	70,43	Baik
21.	Riau	70,15	83,59	57,46	70,40	Baik
22.	Sulawesi Tenggara	71,47	73,75	65,22	70,14	Baik
23.	DI. Yogyakarta	66,58	84,78	58,70	70,02	Baik
24.	Papua	73,18	80,77	55,73	69,89	Sedang
25.	Jawa Timur	72,32	75,79	61,43	69,85	Sedang
26	Nusa Tenggara Barat	75,72	68,27	61,54	68,51	Sedang
27	Jambi	73,85	76,04	55,59	68,49	Sedang
28	Aceh	52,08	100,00	46,67	66,25	Sedang
29	Sumatera Barat	72,81	64,77	59,21	65,60	Sedang
30	Kalimantan Utara	73,75	50,00	71,25	65,00	Sedang
31	Kepulauan Riau	64,73	64,29	64,29	64,43	Sedang
32	Gorontalo	71,88	58,33	61,46	63,89	Sedang
33	Banten	68,47	64,39	57,95	63,60	Sedang
34	Sulawesi Barat	78,31	58,82	51,47	62,87	Sedang
Nasional		**71,49**	**78,70**	**63,34**	**71,18**	**Baik**

dilakukan optimalisasi agar lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi publik.

- Publik memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, tapi tetap perlu terus ditingkatkan, terutama terhadap masyarakat di daerah yang tingkat kepercayaannya kepada pemerintah rendah atau sedang.
- Pemerataan informasi publik sudah relatif baik, namun masih terdapat kesenjangan akses informasi di beberapa provinsi.
- Publik secara umum merasa aman dengan jaminan perlindungan data pribadi oleh pemerintah.

Kemudian, terkait capaian indeks pada dimensi outcome setiap provinsi, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- Terdapat variasi skor yang signifikan antar provinsi, dengan 17 provinsi memiliki skor di atas rata-rata nasional, dan 17 lainnya di bawah rata-rata nasional.
- Beberapa provinsi menunjukkan kinerja yang baik dalam dimensi tertentu, namun perlu perbaikan pada dimensi lainnya.
- Masih terdapat beberapa provinsi yang perlu perhatian khusus untuk meningkatkan outcome dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik oleh pemerintah.

E. Kesimpulan Dimensi Input – Proses – Output – Outcome

Studi Indeks PIKP tahun 2024 merupakan studi pengukuran pengelolaan IKP instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah serta persepsi dan penilaian masyarakat terhadap pengelolaan IKP tersebut. Dengan pendekatan indikator komposit, indeks PIKP terdiri dari empat dimensi: Input, Proses, Output dan Outcome. Dimensi Input dan Proses merupakan kegiatan manajemen pengelolaan IKP mulai dari perencanaan, produksi, hingga eksekusi kegiatan IKP baik di Kementerian Lembaga (K/L) dan Dinas Kominfo di tingkat Provinsi. Sementara Dimensi Output dan Outcome merupakan pengukuran yang terdiri persepsi dan penilaian masyarakat terhadap program dan kegiatan PIKP. Konteks informasi publik dalam Indeks PIKP tahun 2024 ini adalah Program Prioritas Nasional tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 84 Tahun 2023 yang terdiri dari 39 Program Prioritas Nasional.

Studi Indeks PIKP menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data secara survei. Kuesioner disusun dengan pendekatan normatif yaitu peraturan dan praktik yang berlaku seputar PIKP. Dengan kata lain, studi ini tidak bertujuan untuk untuk menguji sebuah teori ataupun hipotesis. Pendekatan pengumpulan data dilakukan secara berbeda baik di unit pelaksana PIKP dan masyarakat. Survei terhadap instansi pemerintah dilakukan secara self-administered questionnaires. Sementara survei yang dilakukan ke masyarakat dilakukan secara wawancara tatap muka oleh para enumerator yang berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional serta mitra Badan Pusat Statistik. Uji validitas dan realibitas dilakukan terhadap dimensi Output dan Outcome dengan skala pengukuran ordinal.

Pemilihan responden yang dilakukan baik instansi pemerintah maupun masyarakat dilakukan dengan pendekatan yang berbeda. Responden instansi pemerintah baik pusat dan daerah dipilih secara purposif yakni pihak yang memiliki fungsi dan otoritas dalam unit pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Di tingkat Pusat, PIKP merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap Kementerian dan Lembaga. Dalam pengaturan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Organisasi dan Tata-kerja masing-masing K/L, tugas pokok dan fungsi PIKP diberikan dan umumnya dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat (Humas) atau Biro Komunikasi Publik atau Pusat Penerangan atau unit kerja dengan nomenklatur sejenisnya di lingkungan K/L masing-masing. Partisipasi instansi pemerintah di tahun 2024 mencapai 67 K/L dan 34 Dinas Kominfo provinsi.

Sementara, untuk pemilihan responden masyarakat dilakukan dengan cara multistage random sampling (untuk pemilihan lokasi) dan metode random proportionate-to-size (untuk menentukan jumlah responden di setiap lokasi). Populasi yang menjadi target adalah penduduk di 34 ibu kota provinsi, khususnya yang berusia 15–64 usia. Ukuran sampel dengan level kepercayaan 95% dan margin of error 2,45 menghasilkan jumlah responden sebanyak 1.600 orang.

Skor Indeks PIKP tahun 2024 secara gabungan nasional adalah 71,79 (kategori “Baik”) atau meningkat sebesar 2,04 poin dari skor gabungan nasional tahun 2024. Skor dimensi Input merupakan skor tertinggi sepanjang pelaksanaan studi Indeks PIKP sejak tahun 2019, skor input tahun 2024 sebesar 79,63 (kategori “Baik”). Sementara skor dimensi Proses sebesar 63,31 (kategori “Sedang”), skor dimensi Output adalah 73,06 (kategori “Baik”), serta skor dimensi Outcome adalah 71,79 (kategori “Baik”).

Pada dimensi Input Indeks PIKP tahun 2024 skor gabungan antara K/L dan Dinas Kominfo tingkat Provinsi menunjukkan angka masing-masing sebesar 80,89 dan 78,37 (kategori “Sangat Baik dan Baik”). Skor ini merupakan skor tertinggi bila dibandingkan dengan skor dimensi Input Indeks PIKP tahun-tahun sebelumnya. Baik di pusat maupun di daerah, variabel bahan informasi pada dimensi Input memiliki skor terendah bila dibandingkan dengan variabel lainnya. Artinya, unit pelaksana PIKP belum sepenuhnya menyusun bahan informasi terkait Program Prioritas Nasional tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara tugas pokok dan fungsi unit pelaksana, atau antara wewenang dan Program Prioritas Nasional.

Dimensi Proses Indeks PIKP tahun 2024 skor gabungan antara K/L dan Dinas Kominfo tingkat Provinsi menunjukkan angka masing-masing sebesar 65,85 dan 60,77 (kategori “sedang”). Temuan menarik dari dimensi Proses adalah adanya persamaan variabel dengan skor terendah antara unit pelaksana PIKP di pusat maupun di daerah. Di pusat, variabel pelaksanaan memiliki skor 56,56 (kategori “buruk”). Demikian juga di daerah, variabel pelaksanaan juga memiliki skor 51,43 (kategori “buruk”). Hal tersebut mungkin disebabkan oleh rendahnya penyusunan bahan informasi terkait program prioritas pemerintah oleh K/L dan Dinas Kominfo yang ditandai dengan rendahnya skor variabel penyusunan bahan informasi terkait program prioritas pemerintah pada dimensi Input.

Sementara skor dimensi Output Indeks PIKP tahun 2024 secara nasional sebesar 73,06 (tergolong “Baik”). Variabel terendah dari Dimensi Output adalah variabel Penerimaan Informasi dengan skor 57,38 (kategori “Buruk”). Variabel penerimaan informasi ini bukan hanya sekadar frekuensi penerimaan informasi program prioritas saja, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh perilaku mengakses informasi baik dari media massa tradisional (co. TV, radio, media cetak), media internet (co, media sosial, media online, dan sejenisnya), maupun media atau petugas informasi yang disediakan oleh pemerintah (co. PPID). Masyarakat tidak sepenuhnya mengandalkan kanal pemerintah atau petugas informasi dari pemerintah untuk memperoleh informasi tentang program prioritas pemerintah. Sumber informasi semakin beragam dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Terakhir, skor dimensi Outcome Indeks PIKP tahun 2024 sebesar 71,18 (kategori “Baik”). Variabel dengan skor terendah pada dimensi ini adalah variabel partisipasi publik dalam proses kebijakan pemerintah dengan skor 63,34 (kategori “Sedang”). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi publik memerlukan dukungan tidak saja dari kinerja PIKP yangn dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi juga dukungan faktor-faktor lainnya di luar pemerintah.



Transparasi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik yang efektif tidak hanya dilaksanakan melalui penyebaran masif informasi tentang program-program prioritas pemerintah melalui media elektronik dan media digital, tetapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah serta pembangunan nasional



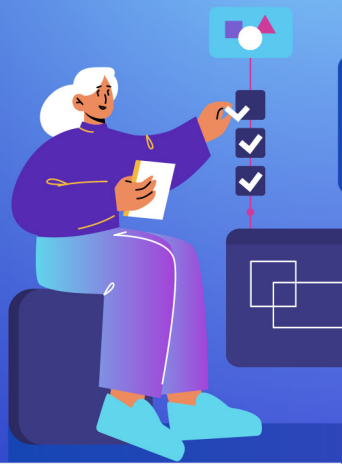
BAB 3

REFLEKSI ATAS INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2024



BAB 3

Refleksi Atas Indeks PIKP 2024





3.1 Perbandingan Indeks PIKP tahun 2019, 2021, 2022, 2023, dan 2024

Pengukuran pengelolaan IKP melalui studi Indeks PIKP, sejak awal, disusun dengan berdasarkan indikator gabungan perspektif manajemen (tata kelola) yang dikerjakan unit pelaksana IKP di lembaga pemerintah serta perspektif masyarakat sebagai penerima hasil tata Kelola IKP. Studi Indeks PIKP tidak menunjukkan hubungan sebab akibat antara dimensi Input-Proses dengan Output-Outcome.

Selama kurun waktu pelaksanaan studi indeks PIKP dari tahun ke tahun, atensi ditujukan pada temuan skor indeks yang menjadi perhatian khusus cukup berbeda-beda. Temuan studi Indeks PIKP tahun 2019 adalah perlunya upaya perbaikan dimensi Input dan Proses baik bagi unit pelaksana fungsi IKP di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Studi Indeks PIKP tahun 2021 menunjukkan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak untuk tahu (*rights to know*).

Di tahun 2022, Studi Indeks PIKP menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada dimensi Input terutama dari variabel bahan informasi di instansi pemerintah. Temuan pada studi Indeks PIKP tahun 2023 adalah perhatian ditujukan pada variabel pelaksanaan pada Dimensi Proses di K/L serta bagaimana pengelolaan IKP dapat memberikan dampak tidak saja pada jangka pendek yakni penilaian masyarakat terhadap akses (penerimaan), kualitas, pelayanan informasi pemerintah dalam konteks program prioritas

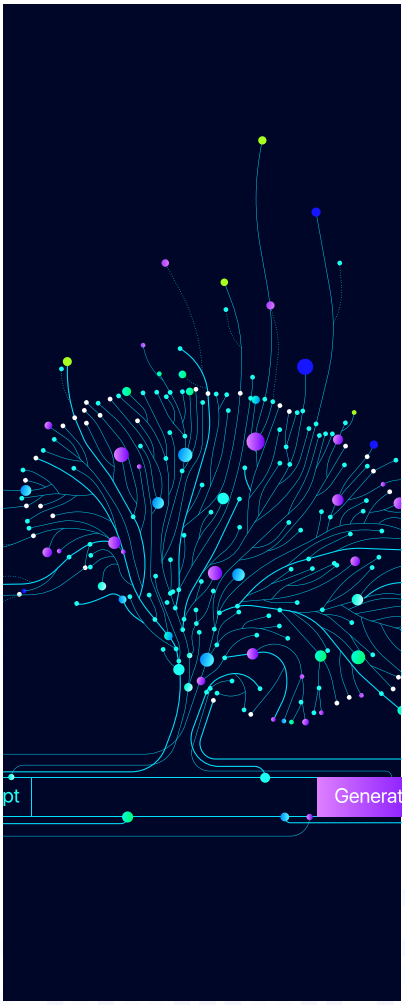


nasional. Tetapi juga berdampak pada jangka panjang yaitu peningkatan pemahaman publik akan haknya terhadap informasi, indikator partisipasi dalam proses kebijakan pemerintah, serta indikator persepsi terhadap pemerataan informasi di tengah lingkungan informasi yang berlimpah dengan adanya media sosial ataupun aplikasi digital lainnya. Di tahun 2024 masalah manajemen komunikasi publik (dimensi Proses) muncul kembali dan menunjukkan kelemahan-kelemahan K/L dan Dinas Kominfo dalam pengelolaan IKP.

Tabel 3.1 Hasil Indeks PIKP tahun 2019, 2021, 2022, 2023 dan 2024

Indeks PIKP	2019	2021	2022	2023	2024
Input					
Anggaran	54,41	60,63	71,71	82,44	87,98
Bahan informasi	62,37	51,39	58,99	65,95	65,82
Media dan saluran komunikasi	66,75	74,83	81,77	82,42	80,47
Sarana dan prasarana	71,16	75,43	80,56	78,40	84,25
Nasional	63,67	65,57	73,11	77,30	79,63
Proses					
Pengumpulan data dan informasi	53,23	50,18	60,46	65	61,13
Perencanaan	73,08	81,78	71,26	67,68	72,78
Pelaksanaan	42,94	71,75	59,92	61,81	53,99
Monitoring dan evaluasi	34,87	65,68	69,29	66,89	65,35
Nasional	51,03	67,35	65,23	65,34	63,31
Output					
Agenda publik*	66,90	70,5	50,82	55,9	57,38
Kepuasan terhadap layanan IKP	72,66	51.9	-	-	-
Akses dan Kualitas Informasi**	-	-	74,27	75,8	86,93
Teknis Pelayanan Informasi Publik**	-	-	74,78	87,3	74,86
Nasional	69,78	61,20	66,62	73	73,06
Outcome					
Hak untuk Tahu	65.70	55,50	52,45	62,78	78,70
Partisipasi dalam proses kebijakan publik	65.90	49,30	54,39	53,57	63,34
Keadilan informasi***	-	66,40	-	-	-
Pemerataan Informasi**	-	-	73,38	73,77	71,49
Nasional	65,80	57,07	60,07	63,37	71,18
Skor Gabungan Nasional	62,57	62.80	66.26	69,75	71,79

* istilah "Agenda publik" mengalami penyesuaian menjadi "Penerimaan Informasi" pada studi PIKP tahun 2023
** subvariabel tambahan di Indeks PIKP tahun 2022
*** subvariabel tambahan di Indeks PIKP tahun 2021



3.2. Implikasi Hasil Pengukuran

Studi ini juga dilaksanakan bertepatan di tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana salah satu sasaran dan indikator bidang komunikasi adalah "penguatan tata Kelola komunikasi dan informasi publik". Pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah penguatan tata kelola IKP sudah tercapai. Studi Indeks PIKP memang tidak didesain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun skor Indeks PIKP dapat memberikan setidaknya tren tata kelola IKP secara obyektif.

Dari tahun ke tahun pelaksanaan indeks PIKP, dimensi Input menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik. Bahkan di tahun 2024 ini, skor dimensi INPUT secara nasional meningkat menjadi 79,63 atau naik sekitar dua poin bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya badan publik pemerintah di pusat maupun di daerah khususnya unit pelaksana PIKP telah melakukan perbaikan baik dari sisi anggaran, bahan informasi, media dan saluran komunikasi serta sarana dan prasarana. Meski demikian, skor dimensi PROSES secara nasional di tahun 2024 ini mengalami penurunan yakni dengan skor 63,3 atau turun sekitar dua poin dari skor Indeks PIKP 2023.

Dimensi INPUT dan PROSES merupakan data empiris kinerja pengelolaan IKP di badan pemerintah baik pusat (K/L) maupun daerah (Dinas Kominfo tingkat provinsi). Dimensi INPUT mencerminkan ketersediaan anggaran, bahan informasi, sarana dan prasarana pendukung kegiatan serta media dan saluran komunikasi. Sementara dimensi PROSES mencerminkan pelaksanaan kegiatan penyebaran atau diseminasi informasi. Salah satu poin penting yang perlu di-*highlight* adalah turunnya skor variabel Pengumpulan data dan informasi serta variabel Pelaksanaan pada dimensi Proses mengalami penurunan masing-masing dari 65 dan 61,81 di tahun 2023 menjadi 61,13 (Sedang") dan 53,99 (Buruk) di tahun 2024. Pengumpulan data dan informasi serta pelaksnaan kegiatan pengelolaan IKP dengan kategori "Buruk" ini akan membatasi kemampuan untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap situasi atau publik yang menjadi fokus. Tanpa pemahaman yang baik tentang karakteristik, kebutuhan atau masalah yang ada, pengambil keputusan mungkin tidak dapat merumuskan strategi atau kebijakan yang tepat.

Skor variabel Pengumpulan data dan informasi serta variabel Pelaksanaan pada dimensi Proses yang mengalami penurunan ini kontras dengan peningkatan pada skor variabel Perencanaan pada dimensi yang sama yaitu dari 67,68 di tahun 2023 menjadi 72,78 di tahun 2024. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa perencanaan program/ kegiatan komunikasi publik baik di K/L maupun di Dinas Kominfo tidak mendapatkan dukungan data dan informasi yang memadai. Kecendrungan ini menunjukkan semakin meningkatnya kebutuhan akan perangkat pendukung yang memudahkan pengumpulan data dan informasi berupa sistem informasi layanan monitoring isu publik yang memungkinkan berbagi pakai untuk satuan kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan di kementerian/lembaga dan Dinas Kominfo.

Dalam setiap laporan indeks PIKP menunjukkan skor kinerja instansi pemerintah baik pusat, K/L maupun dinas Kominfo tingkat provinsi khususnya pada dimensi Input dan Proses. Tentu hasil skor ini bukan menunjukkan instansi mana yang terbaik atau sebaliknya yang terburuk dalam PIKP. Skor ini hanya bersifat kuantitatif yang tentu tidak bisa dimaknai secara mendalam. Ada perlu upaya peniliaian kualitatif untuk menjelaskan mengapa skor tersebut tinggi atau rendah. Adanya kecenderungan yang cukup konsisten dari hasil Indeks PIKP yaitu skor dimensi Input yang tinggi tidak serta merta membuat skor dimensi Proses menjadi tinggi juga.

Dimensi Output dan Outcome yang mengukur persepsi masyarakat secara langsung terhadap pengelolaan IKP. Pada temuan skor dimensi Output, persepsi masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi terus membaik dan bahkan meningkat signifikan di tahun 2024. Tetapi, persepsi masyarakat terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik tidak begitu baik khususnya di tahun 2024 yang mengalami penurunan signifikan. Hal ini menunjukkan terjdinya penurunan profesionalisme SDM pelaksana PIKP, yang mungkin disebabkan oleh terjadinya rotasi dan mutasi SDM di lingkungan instansi K/L dan Dinas Kominfo. Untuk mengatasi masalah ini salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah pengembangan kapasitas SDM yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan, misalnya melalui bimbingan teknis, pelatihan keterampilan, pemagangan, dan pendidikan lanjut. Sementara pada skor dimensi Outcome pada Indeks PIKP tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni dari 63,37 di tahun 2023 menjadi 71,18. skor variabel Partisipasi dalam proses kebijakan publik menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2024 bila dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa

kinerja PIKP pada dimensi Proses belum tentu menimbulkan terjadinya peningkatan kinerja pada dimensi Outcome dan peningkatan partisipasi publik bisa saja disebabkan oleh variabel-variabel lain di luar kinerja K/L dan Dinas Kominfo, seperti peningkatan dimensi pengetahuan dalam HDI 2024, meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2023, dan peran media sosial.

3.3 Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Secara nasional, kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik pada tahun 2024 termasuk kategori "BAIK". Kinerja tersebut dicapai dengan dukungan dari dimensi INPUT, OUTPUT, dan OUTCOME. Kinerja dari dimensi PROSES berada pada tingkat "SEDANG";

2. Secara nasional, hasil pengukuran 2019-2024 menunjukkan adanya peningkatan kinerja PIKP dari tahun ke tahun. Kecuali kinerja dimensi PROSES yang terus mengalami penurunan sejak 2022, kinerja semua dimensi PIKP pada tahun 2019-2024 selalu berada pada kategori "BAIK" dengan skor yang cenderung terus meningkat;

3. Aktivitas manajemen komunikasi publik (riset, perencanaan, pelaksanaan, dan Monev) selama ini kurang mendapatkan perhatian dari K/L dan Dinas Kominfo Provinsi. Kinerja PIKP untuk dimensi PROSES masih perlu ditingkatkan.

Untuk meningkatkan kinerja dimensi PROSES, disarankan agar instansi pelaksana fungsi PIKP bersifat lebih *strategic, data-driven, and proactive,* melalui:

1. Pemanfaatan Riset:
a. Mengembangkan strategi komunikasi yang jelas (tujuan, target khalayak, pesan-pesan kunci, taktik dan saluran);
b. Meningkatkan pemanfaatan data dan data analytics untuk memonitor dampak, melakukan penyesuaian strategi, dan memahami sentiment khalayak;

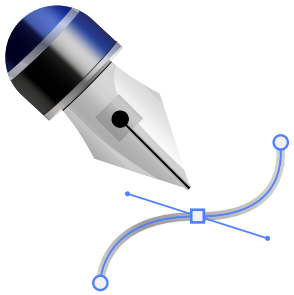
Untuk meningkatkan kinerja dimensi PROSES, disarankan agar instansi pelaksana fungsi PIKP bersifat lebih strategic, data-driven, and proactive, melalui:

2. Peningkatan Kualitas Perencanaan Program Kegiatan:
a. Menyusun rencana (termasuk bahan) program/ kegiatan komunikasi REGULER jangka pendek (weekly, monthly), menengah (quarterly), dan panjang (yearly) secara sistematis dan berbasis data;
b. Menyusun rencana komunikasi SITUASIONAL (termasuk komunikasi krisis) untuk mempertahankan kredibilitas organisasi dalam situasi sulit dan penuh tantangan;
penyesuaian strategi, dan memahami sentiment khalayak;

3. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan:
a. Meningkatkan komunikasi dua arah untuk mendapatkan feedback dari khalayak, mengidentifikasi isu-isu yang muncul, serta memperkuat hubungan dan mempertahankan komunikasi yang terbuka;
b. Menginterintegrasikan penggunaan berbagai saluran dan media (*integrated communication*) untuk mempertahankan *unified voice* and message (narasi tunggal), menghindari informasi dan pesan-pesan yang saling bertentangan, dan meningkatkan engagement khalayak;
c. Memberdayakan komunikasi internal dengan memanfaatkan saluran-saluran internal, menjadikan karyawan sebagai duta organisasi, kepemimpinan komunikasi yang lebih profesional;
d. Meningkatkan pemanfaatan pemasaran konten dan *storytelling* melalui cerita-cerita dan konten audio dan/atau visual yang menarik tentang organisasi agar pesan-pesan organisasi lebih sesuai dengan kepentingan, nilai-nilai, dan kebutuhan khalayak dan gampang diingat (*memorable*);
e. Melaksanakan *media relations* yang lebih proaktif untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang baik dengan wartawan dan media agar komunikasi publik lebih efektif;
f. Melakukan investasi SDM melalui pelatihan-pelatihan staf dan pimpinan, seperti pelatihan juru bicara, keterampilan komunikasi, dan sensitivitas budaya untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Ingat: *Effective communication starts with well-trained staff;*

4. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi:
a. Mengumpulkan *feedback* dari *stakeholders*, dan penyesuaian strategi komunikasi berbasis hasil;'
b. Melaksanakan riset dampak dan audit komunikasi

DAFTAR PUSTAKA



Azwar S. (2012) Reliabilitas dan validitas. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Chakrabartty, S. N. (2017). Composite Index: Methods and Properties. *Journal of Applied Quantitative Methods*, 12(2).

Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik. (2021). *Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2021.* Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital.

Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik. (2022). *Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2022.* Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital

ERTÜRK, K. Ö. (2015). The Role and Importance of "Public Information" in Political Public Relations. *ZfWt (Zeitschrift Für Die Welt Der Türken / Journal of World of Turks)*, 7(1), 25–41.

Grimmelikhuijsen, S. G., & Meijer, A. J. (2014). The effects of transparency on the perceived trustworthiness of a government organization: Evidence from an online experiment. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 24, 137–157.

Hair, J., Hult, G., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2014). A Primer On Partial Least Square Structural Equation Modeling (Pls-Sem). London: Sage Lee, Y., & Schachter, H. L. (2019). Exploring the Relationship between Trust in Government and Citizen Participation. International Journal of Public Administration, 42(5), 405-416.

Macnamara, J. (2018). Evaluation of Communication Key concepts, principles and theories. *Evaluating Public Communication: Exploring New Models, Standards and Best Practice,* Routledge.

Mansoor, A., Abd Wahab, S., & Jahan, S. (2021). Stimulation of innovative behavior through inclusive leaders and engaged workers. Verslas Teorija ir Praktika, 22(2), 249-255. DOI: 10.3846/btp.2021.13363.

Pasquier, M. (2017). Communication of and for Public Services. *The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe,* 441-458. Springer Nature.

Puslitbang Aptika dan IKP. (2019). *Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2019*. Badan Litbang SDM Kominfo

Raaphorst, N., & Van de Walle, S. (2020). Trust, Fairness, and Signaling: Studying the Interaction Between Officials and Citizens. *The Handbook of Public Sector Communication,* pp. 59–70.

Valle-Cruz, D., Alejandro Ruvalcaba-Gomez, E., Sandoval-Almazan, R., & Ignacio Criado, J. (2019). *A Review of Artificial Intelligence in Government and its Potential from a Public Policy Perspective. Proceedings of the 20th Annual International Conference on Digital Government Research,* 91–99. https://doi.org/10.1145/3325112.3325242

Van de Walle, S., & Bouckaert, G. (2007). Perceptions of productivity and performance in Europe and the USA. *International Journal of Public Administration,* 30, 1–18.

Van Ryzin, G. G. (2011). Outcomes8process, and trust of civil servants. *Journal of Public Administration Research and Theory,* 21, 745–760.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

Sumber website

Human Development Index 2024
https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2024/11/15/2296/indonesias-human-development-index--hdi--in-2024-reached-75-02--an-increase-of-0-63-points-or-0-85-percent-compared-to-the-previous-year-which-was-74-39-.html yang diakses pada 18 Desember 2024

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VEd0V05FTjBaRVJuYzA1bVkwcHlhVk5KUjJGTlVUMDkjMw==/indeks-pembangunan-literasi-masyarakat-dan-unsur-penyusunnya-menurut-provinsi.html?year=2023 yang diakses pada 18 Desember 2024

LAMPIRAN I

SUMBER DATA PRIMER

Data komponen Indeks PIKP dikumpulkan dengan sumber dan cara sebagai berikut:

a. Data untuk Dimensi INPUT dan PROSES dikumpulkan dari 67 (enam puluh tujuh) Biro Humas/Komunikasi Publik/Pusat Penerangan di K/L dan 34 (tiga puluh empat) Dinas Kominfo Provinsi sebagai unit-unit pelaksana fungsi pelayanan informasi dan kehumasan di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, masing-masing instansi terlebih dahulu diminta mengisi form Daftar Pertanyaan sebelum diundang menghadiri sosialisasi dan/atau diwawancari secara mendalam untuk tujuan melengkapi dan mengkonfirmasi jawaban dan data yang telah dituliskan dalam Daftar Pertanyaan tersebut;
b. Data untuk Dimensi OUTPUT dan OUTCOME dikumpulkan melalui survei sampel pada masyarakat di Ibukota Provinsi (34 kota). Proses pemilihan lokasi ditentukan berdasarkan sistem acak (*multistage random sampling*) mulai dari pemilihan kecamatan hingga kelurahan. Sementara penentuan jumlah sampel di masing-masing lokasi penelitian yang terpilih, dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah populasi di tingkat Kecamatan serta jumlah penduduk menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan dan bidang pekerjaan formal atau informal.

Tabel 1. Lokasi Penelitian dan Ukuran Sampel Responden Indeks PIKP 2024

No	Ibukota Prov.	Kecamatan	Sample Kelurahan	Jumlah Responden	Jumlah Responden Disablilitas	Jumlah Responden Non Disabilitas
1	Banda Aceh	Meuraxa (16)	Pie	15	1	14
			Punge Jurong			
			Deah Baro			
		Kuta Raja (6)	Gampong Pande			
2	Medan	Medan Tuntungan (9)	Baru Ladang Bambu	149	15	134
			Sidomulyo			
		Medan Belawan (6)	Belawan Bahagia			
		Medan Helvetia (7)	Helvetia Tengah			
			Helvetia			
		Medan Baru (6)	Babura			
3	Padang	Lubuk Kilangan (7)	Indarung	57	6	51
			Beringin			
		Pauh (9)	Limau Manis			

No	Ibukota Prov.	Kecamatan	Sample Kelurahan	Jumlah Responden	Jumlah Responden Disablilitas	Jumlah Responden Non Disabilitas
			Limau Manis Selatan			
4	Pekanbaru	Marpoyan Damai (6)	Wonorejo	67	7	60
		Lima Puluh (4)	Sekip			
		Rumbai Barat (6)	Maharani			
5	Tanjung Pinang	Tanjungpinang Timur (5)	Pinang Kencana	14	1	13
6	Jambi	Danau Teluk (5)	Pasir Panjang	38	4	34
		Palayangan (6)	Arab Melayu			
7	Bengkulu	Kampung Melayu (7)	Kandang	24	2	22
		Muara Bangkahulu (7)	Bentiring Permai			
8	Palembang	Gandus (5)	Gandus	103	10	93
		Jakabaring (5)	Silaberanti			
		Alang-Alang Lebar (4)	Talang Kelapa			
		Seberang Ulu I (5)	5 Ulu			
9	Pangkalpinang	Taman Sari (5)	Opas Indah	14	1	13
		Gabek (6)	Gabek Satu			
10	Bandar Lampung	Panjang (8)	Ketapang	66	7	59
			Pidada			
		Teluk Betung Selatan (6)	Gunung Mas			
		Teluk Betung Barat (5)	Sukarame II			
		Kedamaian (7)	Tanjung Baru			
			Kalibalau Kencana			
11	Jakarta Pusat	Johar Baru (4)	Kampung Rawa	62	6	56
		Sawah Besar (5)	Gunung Sahari Utara			
12	Serang	Kasemen (10)	Banten	44	4	40
			Terumbu			
13	Kota Bandung	Regol (7)	Pungkur	153	15	138
			Ciseureuh			

No	Ibukota Prov.	Kecamatan	Sample Kelurahan	Jumlah Responden	Jumlah Responden Disablilitas	Jumlah Responden Non Disabilitas
		Ujungberung (5)	Pasirwangi			
		Mandalajati (4)	Karangpamulang			
		Sumur Bandung (4)	Braga			
		Babakan Ciparay (6)	Sukahaji			
		Buah Batu (4)	Sekejati			
14	Kota Semarang	Semarang Selatan (10)	Mugassari	104	10	94
			Lamper Tengah			
		Banyumanik (11)	Sumurboto			
			Tinjomoyo			
		Genuk (13)	Karangroto			
			Banjardowo,			
			Terboyo Kulon			
15	Yogyakarta	Jetis (3)	Bumijo	23	2	21
		Gedongtengen (2)	Sosromenduran			
		Ngampilan (2)	Notoprajan			
16	Surabaya	Wiyung (4)	Wiyung	175	18	157
		Semampir (5)	Wonokusumo			
		Jambangan (4)	Kebonsari			
		Gubeng (6)	Mojo			
		Tambaksari (8)	Tambaksari			
			Dukuh Setro			
		Simokerto (5)	Kapasan			
17	Denpasar	Denpasar Timur (5)	Penatih	45	4	41
18	Mataram	Sandubaya (7)	Mandalika	26	3	23
19	Kupang	Kelapa Lima (5)	Oesapa Selatan	30	3	27
20	Pontianak	Pontianak Tenggara (4)	Bansir Laut	40	4	36

No	Ibukota Prov.	Kecamatan	Sample Kelurahan	Jumlah Responden	Jumlah Responden Disablilitas	Jumlah Responden Non Disabilitas
21	Palangkaraya	Jekan Raya (4)	Palangka	19	2	17
22	Banjarbaru	Landasan Ulin (4)	Guntung Manggis	16	2	14
23	Samarinda	Sungai Pinang (5)	Sungai Pinang Dalam	52	5	47
		Samarinda Utara (8)	Lempake			
			Sempaja Utara			
24	Bulungan	Tanjung Palas Tengah (3)	Tanjung Buka	10	1	9
		Tanjung Palas Utara (6)	Panca Agung			
25	Manado	Sario (7)	Ranotana	27	3	24
		Bunaken	Bailang			
26	Gorontalo	Kota Utara (6)	Wangkaditi Barat	12	1	11
		Dumbo Raya (6)	Bugis			
27	Palu	Palu Barat (6)	Ujuna	23	2	21
		Mantikulore (8)	Lasoani			
28	Mamuju	Kaluku (14)	Kalukku	17	2	15
			Kalukku Barat			
			Pammulukang			
		Simboro dan Kepulauan (8)	Sumare			
29	Makassar	Panakkukang (11)	Pandang	88	9	79
			Karuwisi Utara			
		Biringkanaya (11)	Pai			
			Berua			
		Bantoala (12)	Baraya			
			Tompo Balang			
			Bantoala Tua			
30	Kendari	Kambu (4)	Mokoau	23	2	21
		Kendari (9)	Jati Mekar			
			Kassilampe			
31	Sofifi (Tidore)	Tidore Selatan (8)	Tongowai	7	1	6
		Tidore Utara (14)	Ome			
			Gubu Kusuma			
			Afa Afa			

No	Ibukota Prov.	Kecamatan	Sample Kelurahan	Jumlah Responden	Jumlah Responden Disablilitas	Jumlah Responden Non Disabilitas
21	Palangkaraya	Jekan Raya (4)	Palangka	19	2	17
22	Banjarbaru	Landasan Ulin (4)	Guntung Manggis	16	2	14
23	Samarinda	Sungai Pinang (5)	Sungai Pinang Dalam	52	5	47
		Samarinda Utara (8)	Lempake			
			Sempaja Utara			
24	Bulungan	Tanjung Palas Tengah (3)	Tanjung Buka	10	1	9
		Tanjung Palas Utara (6)	Panca Agung			
25	Manado	Sario (7)	Ranotana	27	3	24
		Bunaken	Bailang			
26	Gorontalo	Kota Utara (6)	Wangkaditi Barat	12	1	11
		Dumbo Raya (6)	Bugis			
27	Palu	Palu Barat (6)	Ujuna	23	2	21
		Mantikulore (8)	Lasoani			
28	Mamuju	Kaluku (14)	Kalukku	17	2	15
			Kalukku Barat			
			Pammulukang			
		Simboro dan Kepulauan (8)	Sumare			
29	Makassar	Panakkukang (11)	Pandang	88	9	79
			Karuwisi Utara			
		Biringkanaya (11)	Pai			
			Berua			
		Bantoala (12)	Baraya			
			Tompo Balang			
			Bantoala Tua			
30	Kendari	Kambu (4)	Mokoau	23	2	21
		Kendari (9)	Jati Mekar			
			Kassilampe			
31	Sofifi (Tidore)	Tidore Selatan (8)	Tongowai	7	1	6
		Tidore Utara (14)	Ome			
			Gubu Kusuma			
			Afa Afa			

No	Ibukota Prov.	Kecamatan	Sample Kelurahan	Jumlah Responden	Jumlah Responden Disablilitas	Jumlah Responden Non Disabilitas
32	Ambon	Sirimau (14)	Batu Merah	22	2	20
			Galala			
			Batu Meja			
33	Manokwari	Manokwari Barat	Manokwari timur	11	1	10
			Soribo			
		Warmare (31)	Aiwow			
			Dindey			
			Indisey			
			Meny			
			Nimbay			
			Subsay			
34	Jayapura	Heram	Wena	24	2	22
				1600	**158**	**1442**

Tabel 2. Jumlah Sampel menurut Pendidikan Terakhir yang ditamatkan

No	Ibukota Prov.	Jumlah Responden	Tingkat Pendidikan Responden		
			Rendah	Sedang	Tinggi
1	Banda Aceh	15	0	1	0
			1	6	3
			0	1	0
			1	1	1
2	Medan	149	4	4	1
			1	4	0
			4	25	4
			13	32	14
			6	14	7
			1	12	3
3	Padang	57	6	10	5
			2	1	0
			4	5	2
			7	10	5
4	Pekanbaru	67	10	18	9
			6	12	6
			3	3	0
5	Tanjung Pinang	14	5	6	3
6	Jambi	38	6	6	2

No	Ibukota Prov.	Jumlah Responden	Tingkat Pendidikan Responden		
			Rendah	Sedang	Tinggi
			12	10	2
7	Bengkulu	24	6	5	1
			4	5	3
8	Palembang	103	1	9	1
			7	4	3
			1	14	37
			18	6	2
9	Pangkalpinang	14	3	3	1
			2	3	2
10	Bandar Lampung	66	5	1	0
			10	7	2
			2	2	1
			6	4	1
			5	4	3
			6	5	2
11	Jakarta Pusat	62	12	18	4
			7	14	7
12	Serang	44	22	6	1
			14	1	0
13	Kota Bandung	153	6	2	3
			6	10	2
			14	4	3
			10	9	7
			2	1	4
			19	9	0
			16	8	18
14	Kota Semarang	104	6	5	3
			5	9	4
			3	6	6
			8	7	3
			13	8	2

No	Ibukota Prov.	Jumlah Responden	Tingkat Pendidikan Responden		
			Rendah	Sedang	Tinggi
			7	7	1
			1	0	0
15	Yogyakarta	23	3	4	2
			2	3	2
			2	3	2
16	Surabaya	175	6	7	4
			36	16	3
			3	5	3
			13	19	10
			6	8	3
			8	9	3
			6	6	1
17	Denpasar	45	14	20	11
18	Mataram	26	14	9	3
19	Kupang	30	4	14	12
20	Pontianak	40	14	16	10
21	Palangkaraya	19	4	8	7
22	Banjarbaru	16	6	7	3
23	Samarinda	52	12	13	5
			5	3	8
			4	1	1
24	Bulungan	10	4	1	1
			3	1	0
25	Manado	27	2	5	2

No	Ibukota Prov.	Jumlah Responden	Tingkat Pendidikan Responden		
			Rendah	Sedang	Tinggi
			10	7	1
26	Gorontalo	12	1	1	1
			5	3	1
27	Palu	23	3	5	1
			3	7	4
28	Mamuju	17	2	1	1
			1	1	0
			1	1	0
			7	2	0
29	Makassar	88	5	2	11
			2	3	0
			2	9	9
			0	4	29
			2	2	1
			1	1	0
			2	3	0
30	Kendari	23	3	5	2
			2	2	1
			1	6	1
31	Sofifi (Tidore)	7	0	1	0
			1	1	1
			1	0	0
			1	1	0
32	Ambon	22	9	1	5
			0	0	0
			2	4	1
33	Manokwari	11	8	1	2
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
34	Jayapura	24	7	12	5

Sumber data utama dari Dimensi Input dan Proses didapat dari kuesioner yang diisi oleh pimpinan dan/atau pegawai di satuan kerja pelayanan informasi dan

kehumasan di instansi K/L serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi. Tata cara pengumpulan kuesioner dilakukan secara online dengan terlebih dahulu dilakukan *coaching* pengisian kuesioner secara daring pada tanggal dan 5 Agustus 2024 untuk 67 Kementerian/Lembaga dan 34 Dinas Kominfo provinsi.

Sementara verifikasi data yang telah diinput K/L dan Dinas Kominfo melalui surveymonkey.com dilakukan pada tanggal 3 September 2024 untuk Dinas Kominfo provinsi. Sedangkan verifikasi data K/L dilakukan pada 25 September 2024.

Adapun satuan kerja pelayanan informasi dan kehumasan di instansi Kementerian/ Lembaga yang berpartisipasi dalam studi ini ada 67 K/L, yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. Kementerian Pertanian
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Kementerian Agama
5. Kejaksaan Agung
6. Kementerian Perhubungan
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga
8. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
9. Kementerian Sosial
10. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS
11. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
12. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
13. Lembaga Ketahanan Nasional
14. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
15. Kementerian Pertahanan
16. Kementerian Keuangan
17. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
18. Mahkamah Konstitusi
19. Badan Intelijen Negara
20. Kementerian Perindustrian
21. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22. Badan Pemeriksa Keuangan
23. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
24. Tentara Nasional Indonesia
25. Komisi Pemilihan Umum
26. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
27. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
28. Kementerian Perdagangan
29. Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia
30. Komisi Yudisial
31. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
32. Arsip Nasional
33. Badan Narkotika Nasional
34. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
35. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

36. Kementerian Dalam Negeri
37. Kementerian Ketenagakerjaan
38. Kepolisian Republik Indonesia
39. Badan Siber dan Sandi Negara
40. Kementerian Sekretariat Negara
41. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
42. Kementerian Kelautan dan Perikanan
43. Kementerian Kesehatan
44. Sekretariat Kabinet
45. Mahkamah Agung
46. Ombudsman
47. Badan Kepegawaian Negara
48. Komisi Pemberantasan Korupsi
49. Kementerian Luar Negeri
50. Badan Riset dan Inovasi Nasional
51. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
52. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
53. Perpustakaan Nasional
54. Kementerian Hukum dan HAM
55. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
56. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
57. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
58. Badan Pusat Statistik
59. Lembaga Administrasi Negara
60. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
61. Badan Standardisasi Nasional
62. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
63. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
64. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
65. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
66. Badan Keamanan Laut
67. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Sementara untuk responden Dinas Kominfo terdiri dari 34 Provinsi yang berpartisipasi dalam studi Indeks PIKP 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Dinas Kominfo Provinsi beserta Tipe Kelembagaan

No	Dinas Kominfo Provinsi	Tipe	No	Dinas Kominfo Provinsi	Tipe
1	Aceh	A	18	Kepulauan Riau	A
2	Bali	A	19	Lampung	A
3	Banten	B	20	Maluku	A
4	Bengkulu	A	21	Maluku Utara	B
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	A	22	Nusa Tenggara Barat	A

6	DKI Jakarta	A	23	Nusa Tenggara Timur	A
7	Gorontalo	B	24	Papua	A
8	Jambi	A	25	Papua Barat	B
9	Jawa Barat	A	26	Riau	A
10	Jawa Tengah	A	27	Sulawesi Barat	A
11	Jawa Timur	A	28	Sulawesi Selatan	A
12	Kalimantan Barat	A	29	Sulawesi Tengah	A
13	Kalimantan Tengah	A	30	Sulawesi Tenggara	A
14	Kalimantan Timur	A	31	Sulawesi Utara	B
15	Kalimantan Selatan	A	32	Sumatera Barat	A
16	Kalimantan Utara	A	33	Sumatera Selatan	A
17	Kepulauan Bangka Belitung	B	34	Sumatera Utara	A

LAMPIRAN II

PERHITUNGAN INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2024

Untuk perhitungan indeks setiap dimensi dalam laporan ini didasarkan pada skor setiap item. Setiap item, memiliki metode pengukuran yang berbeda. Seperti contoh untuk item Jawaban Ya dan Tidak diukur dengan skor 1 dan 0, sedangkan beberapa item diukur dengan skor 1 – 4.

Untuk mengatasi perbedaan skoring ini dilakukan perhitungan persentase dengan formulasi:

$$Skor\ Item = \frac{Pilihan\ jawaban}{Skor\ maksimum} \times 100\%$$

Dengan skor total diperoleh dengan mengambil nilai rata-ratanya

$$Skor\ Dimensi = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^{K} SkorItem_k$$

Sedangkan untuk mengantisipasi adanya skor yang ekstreme tinggi ataupun extreme rendah, dilakukan perhitungan skor quartile seperti untuk item anggaran dengan interval skor sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai Skor Berdasarkan Kuartil

Kategori	Nilai Skor
$Skor < Kuartile\ 1$	25%
$Kuartile\ 1 < Skor < Kuartile\ 2$	50%
$Kuartile\ 2 < Skor < Kuartile\ 3$	75%
$Skor > Kuartile\ 3$	100%

- Perhitungan indeks didasarkan pada nilai proporsi dari setiap dimensi.
- Untuk indikator yang dinilai dengan skala 1: YA, dan skala 0: TIDAK, maka perhitungan indeks diformulasikan sebagai berikut: Indeks= Jumlah yang menjawab YA / Jumlah sampel
- Untuk item dengan skala jawaban 1 – 4, maka perhitungan indeks dilakukan dengan cara sebagai berikut: Indeks = Jumlah Skor/ (4 x Jumlah sampel)
- Setiap dimensi diasumsikan memiliki tingkat kepentingan yang sama begitu juga dengan setiap item penyusunnya.
- Sumber daya manusia (SDM) tidak dimasukkan dalam perhitungan indeks
- Nominal untuk anggaran tidak diperhatikan hanya ada atau tidak anggaran yang digunakan dalam penyusunan indeks
- Untuk program prioritas nasional, nilai 100 diberikan jika sama dengan lebih dari 15 program dipilih dengan ketentuan sebagai berikut:

  - Jika tidak ada nilai = 0
  - Jika 1-4 = 20
  - Jika 5-9 = 40

- Jika 10-6 = 60
- Jika 11-15 = 80
- Jika > 15 = 100

Tabel 5. Kodifikasi dan Konversi Skala 0-100

Keterangan	Nilai	Konversi
Tidak	0	0
Ya	1	100
Tidak Pernah	0	0
Hanya sekali saja	1	25
2 kali	2	50
3 kali	3	75
> 3 kali	4	100
Sangat Tidak Puas	1	25
Tidak Puas	2	50
Puas	3	75
Sangat Puas	4	100

Tabel 6. Variabel dan Pembobotan @Dimensi

Dimensi	Variabel	Indikator Variabel	Jumlah Indikator	Bobot
Input	1. Anggaran	3	13	25%
	2. Bahan Informasi	6		
	3. Sarana dan Presarana	2		
	4. Media dan Saluran Komunikasi	2		
Proses	5. Pengumpulan Data	3	20	25%
	6. Perencanaan	5		

	7. Pelaksanaan	9		
	8. Monitoring dan Evaluasi	3		
Output	9. Penerimaan Informasi	4	8	25%
	10. Penilaian Publik Terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik	4		
	11. Penilaian Publik Terhadap Pemerataan Informasi Publik	1		
	12. Penilaian Publik Terhadap Akses Dan Kualitas Informasi Publik	2		
Outcome	13. Pemenuhan Hak Untuk Mengetahui (*Rights To Know*)	1	4	25%
	14. Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Pemerintah	1		

LAMPIRAN III

Daftar Indikator Indeks PIKP Tahun 2024

DIMENSI INPUT	
1. Variabel Anggaran	
1	Ketersediaan anggaran program/kegiatan IKP tahun 2024 (total)
2	Ketersediaan anggaran untuk perencanaan program/ kegiatan terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik
3	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik

4	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan monitoring opini dan aspirasi publik
5	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan monitoring informasi kebijakan dan penetapan agenda prioritas komunikasi
6	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
7	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan pengelolaan media komunikasi publik
8	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan pelayanan informasi publik
9	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan layanan hubungan media
10	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan
11	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan manajemen komunikasi krisis
12	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan penguatan sumber daya komunikasi publik
13	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/ kegiatan bidang IKP lainnnya
2. Variabel Bahan Informasi	
1	Ketersediaan bahan informasi terkait 39 Program Prioritas Nasional tahun 2024 yang tertuang dalam RKP 2023
2	Ketersediaan bahan informasi terkait Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L dan Renstra Daerah tahun 2020-2024
3	Ketersediaan bahan informasi selain Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L dan Renstra Daerah tahun 2020-2024
4	Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media
5	Penyampaian data dan informasi terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala
6	Ketersediaan bahan informasi (termasuk narasi tunggal) yang berasal daridari Kementerian Kominfo
3. Variabel Sarana dan Prasarana	
1	Ketersediaan infrastruktur Komunikasi dan Informasi yang terdiri dari: • Ruang desk layanan informasi atau bilik PPID • Nomor telepon • Kotak saran atau formulir aduan • Layanan khusus untuk pemohon informasi penyandang disabilitas • Layanan aduan berbasis elektronik • *Website* layanan PPID • *Virtual meeting platform* • Berlangganan media berita online (surat kabar elektronik, majalah elektronik) • Layanan akses internet gratis (co. media center) • *Data centre*

	• Mobil keliling (co. penerangan mobile/ penmob) • Call center • Radiogram • Lainnya:
2	Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang terdiri dari: • *Broadband wireless* • Perangkat komputer • *Router* • *Access point* • Aplikasi berbasis *big data* untuk memonitor media • Lainnya:_____
3	Ketersediaan pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP
4. Variabel Media dan Saluran Komunikasi	
1	Ketersediaan media cetak konvensional
2	Ketersediaan media elektronik konvensional
3	Pertemuan tatap muka dengan publik (sarasehan, forum, diskusi publik, seminar, gerai pameran)
4	Komunitas Informasi Masyarakat (contoh : Kelompok Pertunjukan rakyat, Komunitas content creator, komunitas/organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dll)
5	Pertemuan tatap muka dengan awak media (konferensi pers, media briefing, media visit/tour)
6	Ketersediaan akun resmi Media Sosial *(Channel Youtube* Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dsb)
7	Ketersediaan *Widget*
8	Ketersediaan *Instant Messaging*
9	Ketersediaan *Website*
10	Ketersediaan *Email*
11	Jumlah media partner (cetak, elektronik maupun Daring) yang dimiliki oleh Dinas Kominfo
DIMENSI PROSES	
1. Variabel Pengumpulan Data dan Informasi	
1	Pengumpulan data dan informasi dengan melibatkan instansi eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan IKP
2	Pengumpulan data dan informasi melalui penyerapan aspirasi publik
3	Pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset dari organisasi atau instansi lain
2. Variabel Perencanaan	
1	Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan
2	Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan

3	Ketersediaan dokumen perencanaan program/kegiatan tahun 2024 (co. proposal, TOR, RAB, program kerja tahunan)
4	Perencanaan kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada khususnya segmen: ● Kelompok masyarakat penyandang disabilitas ● Kelompok masyarakat lanjut usia ● Kelompok masyarakat perempuan ● Kelompok masyarakat anak-anak ● Kelompok masyarakat lainnya, sebutkan
5	Perencanaan kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada khususnya segmen publik di wilayah: ● Kelompok masyarakat di wilayah 3T ● Kelompok masyarakat di wilayah pedesaan ● Kelompok masyarakat di wilayah perkotaan ● Kelompok masyarakat di wilayah lainnya, sebutkan
3. Variabel Pelaksanaan	
1	Frekuensi kegiatan penyebarluasan informasi Program Prioritas Nasional tahun 2024 (39 item)
2	Penyebarluasan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah
3	Frekuensi pelaksanakan koordinasi dengan Kementerian Kominfo dalam enam bulan terakhir (Januari – Juni 2024)
4	Frekuensi kegiatan penyebarluasan informasi melalui saluran atau media: ● Media Cetak Konvensional (co. koran atau majalah) ● Media Elektronik Konvensional (co. TV, radio) ● Pertunjukan Rakyat ● Pertemuan tatap muka dengan publik (sarasehan, forum, diskusi publik, seminar, gerai pameran) ● Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok komunitas lainnya ● Pertemuan tatap muka dengan awak media (konferensi pers, media briefing, media visit/tour) ● Forum Bakohumas ● Meja Informasi PPID ● GPRTV ● Akun Resmi Media Sosial (co. Channel Youtube, Instagram/ IG Live TV, Facebook, Twitter) ● Widget ● Instant messaging ● Website ● Email ● Fitur Khusus untuk Penyandang Disabilitas ● Media atau saluran lainnya
6	Frekuensi kegiatan Kerjasama dengan unit kerja internal K/L/D

7	Frekuensi kegiatan Kerjasama dengan unit kerja eksternal K/L/D • Lembaga Legislatif Daerah • Lembaga Yudikatif • Perusahaan/ Asosiasi Industri • Asosiasi profesi / Kelompok masyarakat • Kelompok akademisi / universitas • Perwakilan Pemerintah Lainnya • Pemangku Kepentingan Lainnya yang mendukung pelayanan informasi dan kehumasan • Lembaga pemerintah maupun non pemerintah skala internasional, sebutkan
8	Frekuensi kegiatan komunikasi publik terkait UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008
9	Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Publik berdasarkan UU KIP • Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala • Informasi yang wajib diumumkan secara serta – merta • Informasi yang wajib tersedia setiap saat • Pengumuman Tentang Layanan Informasi Publik
10	Pelaksanaan kegiatan komunikasi publik yang memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat: • Kelompok masyarakat penyandang disabilitas • Kelompok masyarakat lanjut usia • Kelompok masyarakat perempuan • Kelompok masyarakat anak-anak • Kelompok masyarakat lainnya, sebutkan
11	Pelaksanaan kegiatan komunikasi publik yang memperhatikan kebutuhan informasi pada khususnya segmen publik di wilayah: • Kelompok masyarakat di wilayah 3T • Kelompok masyarakat di wilayah pedesaan • Kelompok masyarakat di wilayah perkotaan • Kelompok masyarakat di wilayah lainnya, sebutkan
4. Variabel Monitoring dan Evaluasi	
1	Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan IKP
2	Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi media terkait liputan hasil pelaksanaan program/kegiatan
3	Ketersediaan dokumen “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi” pelaksanaan program/kegiatan
Variabel Tambahan	
1	Lembaga menghasilkan program inovasi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik
2	Individu/lembaga pernah mendapatkan penghargaan di bidang Kehumasan
DIMENSI OUTPUT	

1. Penerimaan Informasi	
1	Penerimaan informasi tentang 39 Program Prioritas Nasional 766tahun 2024 (RKP 2024)
2	Media yang digunakan sebagai sumber informasi tentang Program Prioritas Nasional • Media cetak konvensional (co. koran atau majalah) • Media elektronik konvensional (co. TV, radio) • TVRI • RRI • Pertemuan tatap muka dengan publik (sarasehan, forum, diskusi publik, seminar, gerai pameran) • Majelis Talim, pertemuan di tempat ibadah, Karang Taruna, Komunitas Informasi Masyarakat, Komunitas Pertunjukan Rakyat, Komunitas *content creator*, dll) • Penyuluh, penerangan/layanan informasi keliling • *Channel Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok dll* • *Whatsapp, Telegram, LINE,* dsb • detik, kompas.com, tribun.com, radar.com, kumparan, tirto, dsb) • *Email* • Fitur Khusus untuk Penyandang Disabilitas • Lainnya
3	Pemahaman masyarakat terkait istilah PPID (Pelayanan Informasi)
4	Pengalaman masyarakat meminta informasi publik ke kantor pemerintah
2. Penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik	
1	**Penilaian** • Informasi dapat diperoleh dengan mudah dan cepat • Informasi dapat diperoleh dari instansi pemerintah tepat waktu • Biaya untuk memperoleh informasi terjangkau • Informasi yang disediakan akurat, benar dan tidak menyesatkan • Memberikan penjelasan tertulis apabila ada penolakan terhadap permohonan informasi
2	Tingkat kepuasan terhadap teknis pelayanan informasi
3	Tingkat kepercayaan terhadap konten informasi
3. Penilaian Publik terhadap pemerataan informasi publik	
1	Penilaian • Tidak membedakan dalam memberikan layanan • Distribusi informasi tersebar secara merata • Konten informasi telah mewakili kebutuhan lapisan masyarakat • Data pribadi terjamin keamanannya
4. Variabel Penilaian Publik terhadap akses dan kualitas informasi publik	
1	Penilaian terhadap akses informasi publik

	• Melalui media komunikasi pemerintah (co. Website/buletin milik pemerintah) memdai • Melalui saluran komunikasi pemerintah (co. Pertunjukan rakyat/ akun resmi media sosial pemerintah) mudah • Melalui media komunikasi pemerintah dapat meningkatkan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan • Saluran komunikasi pemerintah menyalurkan aspirasi dalam proses pembuatan kebijakan
2	Tingkat kepuasan terhadap akses informasi publik
3	Penilaian terhadap kualitas informasi publik • Kesesuaian informasi dengan kebutuhan masyarakat • Obyektifitas informasi • Kelengkapan informasi • Cakupan informasi publik • Kemudahan informasi publik
4	Tingkat kepuasan terhadap kualitas informasi
DIMENSI OUTCOME	
1. Variabel Pemahaman Publik tentang Hak untuk Tahu (*Rights to Know*) Pemahaman tentang hak atas tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam meminta informasi publik	
1	Meminta data laporan keuangan pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya
2	Meminta Rencana Aksi pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya
3	Meminta data Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumahnya
4	Meminta informasi daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
5	Meminta informasi jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya
6	Meminta informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri
7	Meminta informasi rinci kekayaan alam yang dikuasai oleh negara
8	Meminta data mengenai rencana awal investasiasi
9	Meminta informasi mengenai korespondensi diplomatik antarnegara
10	Meminta data yang mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
2. Variabel Partisipasi Publik dalam proses kebijakan pemerintah **Pengalaman masyarakat berpartisipasi dalam proses kebijakan Pemerintah**	

1	Terlibat dalam proses perencanaan kebijakan pemerintah
2	Terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan pemerintah
3	Terlibat dalam proses evaluasi kebijakan pemerintah
4	Partisipasi dalam proses perencanaan kebijakan
5	Partisipasi dalam proses pelaksanaan kebijakan
6	Partisipasi dalam proses evaluasi kebijakan
7	Pengetahuan tentang pemerintah menyediakan program khusus bagi perempuan atau kelompok-kelompok rentan dalam mengakses layanan pemerintah
8	Pengetahuan tentang pemerintah melibatkan perempuan atau kelompok-kelompok rentan dalam membuat kebijakan terkait perempuan atau kelompok – kelompok rentan
9	Pengetahuan tentang pemerintah memiliki program literasi digital khusus perempuan dan atau kelompok – kelompok rentan lainnya
10	Pengetahuan pemerintah menggunakan media sosial
11	Pengetahuan informasi kebijakan pemerintah dari media sosial pemerintah
12	Memberikan pendapat/usulan terhadap proses kebijakan pemerintah dari media sosial
13	Pengetahuan pemerintah memiliki peraturan untuk mengatur ruang digital di media sosial
14	Penilaian telah mempublikasikan informasi tentang bagaimana suara/aspirasi masyarakat termasuk suara perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk dimasukan ke dalam oembuatan kebutusan kebijakan
15	Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah

LAMPIRAN IV

SKOR INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2024

DIMENSI INPUT - SURVEI KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2024

No	Kementerian	Dimensi Input				Dimensi Input	Kategori
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana dan Prasarana	Media dan Saluran Komunikasi		
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	100,00	99,63	100,00	100,00	99,91	Sangat Baik
2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	100,00	97,07	100,00	100,00	99,27	Sangat Baik

No	Kementerian	Dimensi Input				Dimensi Input	Kategori
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana dan Prasarana	Media dan Saluran Komunikasi		
3	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	100,00	94,69	100,00	100,00	98,67	Sangat Baik
4	Kementerian Komunikasi dan Informatika	87,50	87,18	100,00	100,00	93,67	Sangat Baik
5	Kementerian Pertanian	100,00	83,42	100,00	90,91	93,58	Sangat Baik
6	Kementerian Sekretariat Negara	100,00	88,37	94,44	90,91	93,43	Sangat Baik
7	Komisi Pemberantasan Korupsi	100,00	73,63	100,00	100,00	93,41	Sangat Baik
8	Lembaga Administrasi Negara	100,00	88,00	94,44	90,91	93,34	Sangat Baik
9	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	100,00	72,44	100,00	100,00	93,11	Sangat Baik
10	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	100,00	88,55	100,00	81,82	92,59	Sangat Baik
11	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100,00	90,38	94,44	81,82	91,66	Sangat Baik
12	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	100,00	83,70	88,89	90,91	90,87	Sangat Baik
13	Kementerian Perdagangan	100,00	85,39	94,44	81,82	90,41	Sangat Baik
14	Kepolisian Republik Indonesia	100,00	60,90	100,00	100,00	90,22	Sangat Baik
15	Kementerian Ketenagakerjaan	100,00	68,82	100,00	90,91	89,93	Sangat Baik
16	Kementerian Kesehatan	100,00	81,78	83,33	90,91	89,00	Sangat Baik
17	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	100,00	78,57	94,44	81,82	88,71	Sangat Baik
18	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	100,00	81,09	88,89	81,82	87,95	Sangat Baik
19	Kementerian Keuangan	100,00	68,13	100,00	81,82	87,49	Sangat Baik
20	Badan Riset dan Inovasi Nasional	100,00	64,01	94,44	90,91	87,34	Sangat Baik
21	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	87,50	83,61	94,44	81,82	86,84	Sangat Baik
22	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	100,00	88,55	94,44	63,64	86,66	Sangat Baik

No	Kementerian	Dimensi Input				Dimensi Input	Kategori
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana dan Prasarana	Media dan Saluran Komunikasi		
23	Kementerian Luar Negeri	87,50	80,68	94,44	81,82	86,11	Sangat Baik
24	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	100,00	64,61	88,89	90,91	86,10	Sangat Baik
25	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	75,00	80,22	88,89	100,00	86,03	Sangat Baik
26	Badan Kepegawaian Negara	100,00	85,71	94,44	63,64	85,95	Sangat Baik
27	Perpustakaan Nasional	100,00	79,85	72,22	90,91	85,75	Sangat Baik
28	Komisi Pemilihan Umum	100,00	73,76	88,89	72,73	83,84	Sangat Baik
29	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	100,00	65,06	77,78	90,91	83,44	Sangat Baik
30	Kementerian Perhubungan	62,50	81,50	88,89	100,00	83,22	Sangat Baik
31	Kementerian Sosial	100,00	73,26	77,78	81,82	83,21	Sangat Baik
32	Ombudsman	100,00	56,32	94,44	81,82	83,15	Sangat Baik
33	Mahkamah Konstitusi	100,00	67,86	88,89	72,73	82,37	Sangat Baik
34	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	87,50	69,05	88,89	81,82	81,81	Sangat Baik
35	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100,00	67,54	77,78	81,82	81,78	Sangat Baik
36	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	100,00	56,00	88,89	81,82	81,68	Sangat Baik
37	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	75,00	65,93	94,44	90,91	81,57	Sangat Baik
38	Komisi Yudisial	75,00	61,26	88,89	100,00	81,29	Sangat Baik
39	Kementerian Dalam Negeri	100,00	64,15	94,44	63,64	80,56	Sangat Baik
40	Kementerian Perindustrian	100,00	54,76	88,89	72,73	79,09	Baik
41	Kementerian Agama	100,00	30,13	94,44	90,91	78,87	Baik
42	Kementerian Hukum dan HAM	100,00	69,96	77,78	63,64	77,84	Baik

No	Kementerian	Dimensi Input				Dimensi Input	Kategori
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana dan Prasarana	Media dan Saluran Komunikasi		
43	Badan Pemeriksa Keuangan	100,00	42,08	77,78	90,91	77,69	Baik
44	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	87,50	44,23	83,33	90,91	76,49	Baik
45	Arsip Nasional	75,00	60,71	77,78	90,91	76,10	Baik
46	Kementerian Pertahanan	100,00	62,50	77,78	63,64	75,98	Baik
47	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	87,50	63,32	88,89	63,64	75,84	Baik
48	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	87,50	83,15	66,67	63,64	75,24	Baik
49	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	75,00	52,34	88,89	81,82	74,51	Baik
50	Sekretariat Kabinet	87,50	89,29	66,67	54,55	74,50	Baik
51	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	87,50	72,02	83,33	54,55	74,35	Baik
52	Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia	87,50	47,44	88,89	72,73	74,14	Baik
53	Kementerian Pemuda dan Olahraga	100,00	38,19	72,22	81,82	73,06	Baik
54	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS	75,00	64,51	83,33	63,64	71,62	Baik
55	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100,00	36,90	66,67	81,82	71,35	Baik
56	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	87,50	87,45	55,56	54,55	71,26	Baik
57	Lembaga Ketahanan Nasional	75,00	66,80	66,67	72,73	70,30	Baik
58	Badan Siber dan Sandi Negara	75,00	37,00	83,33	81,82	69,29	Sedang
59	Badan Standardisasi Nasional	75,00	67,86	61,11	72,73	69,17	Sedang
60	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	75,00	59,84	77,78	63,64	69,06	Sedang
61	Mahkamah Agung	87,50	25,18	88,89	72,73	68,57	Sedang
62	Badan Narkotika Nasional	75,00	46,43	77,78	72,73	67,98	Sedang

No	Kementerian	Dimensi Input				Dimensi Input	Kategori
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana dan Prasarana	Media dan Saluran Komunikasi		
63	Kejaksaan Agung	62,50	7,23	88,89	90,91	62,38	Sedang
64	Badan Keamanan Laut	62,50	46,02	66,67	72,73	61,98	Sedang
65	Tentara Nasional Indonesia	87,50	21,43	72,22	63,64	61,20	Sedang
66	Badan Pusat Statistik	62,50	21,43	88,89	45,45	54,57	Buruk
67	Badan Intelijen Negara	62,50	40,93	55,56	45,45	51,11	Buruk
Nasional 2024		**90,67**	**66,27**	**86,15**	**80,46**	**80,89**	**Sangat Baik**

DIMENSI INPUT - SURVEI DINAS KOMINFO PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Dimensi Input				Dimensi Input	Kategori
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana dan Prasarana	Media dan Saluran Komunikasi		
1	Banten	100,00	85,44	94,44	100,00	94,97	Sangat Baik
2	DKI Jakarta	100,00	96,06	83,33	90,91	92,58	Sangat Baik
3	Sulawesi Utara	100,00	66,21	100,00	100,00	91,55	Sangat Baik
4	Sumatera Utara	87,50	81,32	94,44	100,00	90,82	Sangat Baik
5	Bali	100,00	80,68	100,00	81,82	90,62	Sangat Baik
6	Riau	100,00	72,94	94,44	90,91	89,57	Sangat Baik
7	Jawa Timur	87,50	82,69	88,89	90,91	87,50	Sangat Baik
8	Jawa Barat	100,00	78,57	88,89	81,82	87,32	Sangat Baik
9	Kepulauan Bangka Belitung	75,00	87,23	94,44	90,91	86,89	Sangat Baik

No	Kementerian	Dimensi Input				Dimensi Input	Kategori
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana dan Prasarana	Media dan Saluran Komunikasi		
63	Kejaksaan Agung	62,50	7,23	88,89	90,91	62,38	Sedang
64	Badan Keamanan Laut	62,50	46,02	66,67	72,73	61,98	Sedang
65	Tentara Nasional Indonesia	87,50	21,43	72,22	63,64	61,20	Sedang
66	Badan Pusat Statistik	62,50	21,43	88,89	45,45	54,57	Buruk
67	Badan Intelijen Negara	62,50	40,93	55,56	45,45	51,11	Buruk
Nasional 2024		**90,67**	**66,27**	**86,15**	**80,46**	**80,89**	**Sangat Baik**

DIMENSI INPUT - SURVEI DINAS KOMINFO PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Dimensi Input				Dimensi Input	Kategori
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana dan Prasarana	Media dan Saluran Komunikasi		
1	Banten	100,00	85,44	94,44	100,00	94,97	Sangat Baik
2	DKI Jakarta	100,00	96,06	83,33	90,91	92,58	Sangat Baik
3	Sulawesi Utara	100,00	66,21	100,00	100,00	91,55	Sangat Baik
4	Sumatera Utara	87,50	81,32	94,44	100,00	90,82	Sangat Baik
5	Bali	100,00	80,68	100,00	81,82	90,62	Sangat Baik
6	Riau	100,00	72,94	94,44	90,91	89,57	Sangat Baik
7	Jawa Timur	87,50	82,69	88,89	90,91	87,50	Sangat Baik
8	Jawa Barat	100,00	78,57	88,89	81,82	87,32	Sangat Baik
9	Kepulauan Bangka Belitung	75,00	87,23	94,44	90,91	86,89	Sangat Baik

No	Provinsi	Dimensi Input				Dimensi Input	Kategori
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana dan Prasarana	Media dan Saluran Komunikasi		
10	Jawa Tengah	100,00	70,79	83,33	90,91	86,26	Sangat Baik
11	Kalimantan Timur	100,00	78,57	83,33	81,82	85,93	Sangat Baik
12	Sulawesi Selatan	87,50	89,74	83,33	81,82	85,60	Sangat Baik
13	Lampung	87,50	72,30	83,33	90,91	83,51	Sangat Baik
14	Kalimantan Selatan	87,50	66,03	88,89	90,91	83,33	Sangat Baik
15	Sumatera Barat	100,00	82,14	77,78	72,73	83,16	Sangat Baik
16	Aceh	87,50	61,54	94,44	81,82	81,33	Sangat Baik
17	Kalimantan Barat	87,50	70,42	77,78	81,82	79,38	Baik
18	Papua	62,50	62,50	88,89	100,00	78,47	Baik
19	Sulawesi Barat	62,50	73,12	94,44	81,82	77,97	Baik
20	Jambi	75,00	65,38	83,33	81,82	76,38	Baik
21	Sumatera Selatan	87,50	56,09	77,78	81,82	75,80	Baik
22	Nusa Tenggara Barat	75,00	89,65	83,33	54,55	75,63	Baik
23	Sulawesi Tengah	87,50	57,14	66,67	90,91	75,55	Baik
24	Daerah Istimewa Yogyakarta	75,00	63,55	88,89	72,73	75,04	Baik
25	Kalimantan Utara	87,50	65,20	72,22	72,73	74,41	Baik
26	Sulawesi Tenggara	75,00	59,75	77,78	81,82	73,59	Baik
27	Kalimantan Tengah	87,50	55,40	66,67	72,73	70,57	Baik
28	Gorontalo	62,50	64,29	72,22	81,82	70,21	Baik

No	Provinsi	Dimensi Input				Dimensi Input	Kategori
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana dan Prasarana	Media dan Saluran Komunikasi		
29	Bengkulu	87,50	7,51	88,89	90,91	68,70	Sedang
30	Kepulauan Riau	87,50	47,99	66,67	54,55	64,17	Sedang
31	Maluku	75,00	44,23	72,22	63,64	63,77	Sedang
32	Nusa Tenggara Timur	75,00	37,50	61,11	63,64	59,31	Buruk
33	Maluku Utara	75,00	36,13	61,11	45,45	54,42	Buruk
34	Papua Barat	75,00	14,29	66,67	45,45	50,35	Buruk
Nasional 2024		**85,29**	**65,36**	**82,35**	**80,48**	**78,37**	**Baik**

DIMENSI PROSES - SURVEI KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2024

No	Kementrian	Dimensi Proses				Dimensi Proses	Kategori
		Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi		
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	100,00	100,00	77,43	100,00	94,36	Sangat Baik
2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	100,00	100,00	76,50	100,00	94,13	Sangat Baik
3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	100,00	100,00	71,41	100,00	92,85	Sangat Baik
4	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	100,00	95,00	75,35	100,00	92,59	Sangat Baik
5	Badan Kepegawaian Negara	100,00	100,00	68,67	100,00	92,17	Sangat Baik

No	Kementrian	Dimensi Proses				Dimensi Proses	Kategori
		Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi		
6	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	100,00	85,00	74,15	100,00	89,79	Sangat Baik
7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	100,00	85,00	69,06	100,00	88,51	Sangat Baik
8	Kementerian Ketenagakerjaan	100,00	85,00	66,09	100,00	87,77	Sangat Baik
9	Kementerian Perindustrian	100,00	90,00	55,40	100,00	86,35	Sangat Baik
10	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	75,00	93,75	75,39	100,00	86,03	Sangat Baik
11	Komisi Pemberantasan Korupsi	91,67	90,00	60,69	100,00	85,59	Sangat Baik
12	Badan Riset dan Inovasi Nasional	75,00	90,00	74,04	100,00	84,76	Sangat Baik
13	Badan Siber dan Sandi Negara	83,33	87,50	65,63	100,00	84,11	Sangat Baik
14	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	75,00	90,00	69,48	100,00	83,62	Sangat Baik
15	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100,00	80,00	69,21	83,33	83,14	Sangat Baik
16	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	75,00	90,00	65,74	100,00	82,69	Sangat Baik
17	Kementerian Perhubungan	83,33	77,50	69,29	100,00	82,53	Sangat Baik
18	Kementerian Dalam Negeri	75,00	100,00	53,09	100,00	82,02	Sangat Baik
19	Kementerian Komunikasi dan Informatika	100,00	71,25	55,21	100,00	81,61	Sangat Baik
20	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	100,00	78,75	63,43	83,33	81,38	Sangat Baik
21	Komisi Pemilihan Umum	91,67	100,00	65,28	66,67	80,90	Sangat Baik
22	Lembaga Administrasi Negara	66,67	82,50	73,73	100,00	80,72	Sangat Baik
23	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	100,00	90,00	73,69	50,00	78,42	Baik

No	Kementrian	Dimensi Proses				Dimensi Proses	Kategori
		Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi		
24	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	100,00	90,00	68,09	50,00	77,02	Baik
25	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	58,33	85,00	64,31	100,00	76,91	Baik
26	Kementerian Pertahanan	66,67	100,00	40,28	100,00	76,74	Baik
27	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	75,00	90,00	44,33	91,67	75,25	Baik
28	Kementerian Keuangan	83,33	90,00	74,23	50,00	74,39	Baik
29	Kementerian Sekretariat Negara	58,33	95,00	76,16	66,67	74,04	Baik
30	Komisi Yudisial	83,33	66,25	61,92	83,33	73,71	Baik
31	Kementerian Sosial	100,00	85,00	76,85	25,00	71,71	Baik
32	Ombudsman	66,67	90,00	60,84	66,67	71,04	Baik
33	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	66,67	68,75	45,95	100,00	70,34	Baik
34	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	41,67	65,00	66,13	100,00	68,20	Sedang
35	Badan Intelijen Negara	58,33	70,00	61,11	83,33	68,19	Sedang
36	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	66,67	85,00	68,94	50,00	67,65	Sedang
37	Kementerian Perdagangan	58,33	65,00	62,00	83,33	67,17	Sedang
38	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	33,33	76,25	58,72	100,00	67,08	Sedang
39	Kepolisian Republik Indonesia	41,67	90,00	30,32	100,00	65,50	Sedang

No	Kementrian	Dimensi Proses				Dimensi Proses	Kategori
		Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi		
24	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	100,00	90,00	68,09	50,00	77,02	Baik
25	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	58,33	85,00	64,31	100,00	76,91	Baik
26	Kementerian Pertahanan	66,67	100,00	40,28	100,00	76,74	Baik
27	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	75,00	90,00	44,33	91,67	75,25	Baik
28	Kementerian Keuangan	83,33	90,00	74,23	50,00	74,39	Baik
29	Kementerian Sekretariat Negara	58,33	95,00	76,16	66,67	74,04	Baik
30	Komisi Yudisial	83,33	66,25	61,92	83,33	73,71	Baik
31	Kementerian Sosial	100,00	85,00	76,85	25,00	71,71	Baik
32	Ombudsman	66,67	90,00	60,84	66,67	71,04	Baik
33	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	66,67	68,75	45,95	100,00	70,34	Baik
34	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	41,67	65,00	66,13	100,00	68,20	Sedang
35	Badan Intelijen Negara	58,33	70,00	61,11	83,33	68,19	Sedang
36	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	66,67	85,00	68,94	50,00	67,65	Sedang
37	Kementerian Perdagangan	58,33	65,00	62,00	83,33	67,17	Sedang
38	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	33,33	76,25	58,72	100,00	67,08	Sedang
39	Kepolisian Republik Indonesia	41,67	90,00	30,32	100,00	65,50	Sedang

No	Kementrian	Dimensi Proses				Dimensi Proses	Kategori
		Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi		
40	Badan Narkotika Nasional	50,00	81,25	55,59	75,00	65,46	Sedang
41	Kementerian Hukum dan HAM	58,33	46,25	51,20	100,00	63,94	Sedang
42	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	75,00	63,75	44,83	58,33	60,48	Sedang
43	Kementerian Luar Negeri	100,00	52,50	35,73	50,00	59,56	Buruk
44	Mahkamah Agung	66,67	80,00	41,78	33,33	55,45	Buruk
45	Kementerian Pemuda dan Olahraga	58,33	38,75	42,13	75,00	53,55	Buruk
46	Badan Standardisasi Nasional	33,33	51,25	61,69	66,67	53,23	Buruk
47	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	58,33	56,25	46,49	50,00	52,77	Buruk
48	Perpustakaan Nasional	58,33	52,50	41,74	58,33	52,73	Buruk
49	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	58,33	73,75	59,65	16,67	52,10	Buruk
50	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	33,33	52,50	44,41	75,00	51,31	Buruk
51	Kementerian Agama	33,33	77,50	68,56	25,00	51,10	Buruk
52	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS	25,00	55,00	45,60	75,00	50,15	Buruk
53	Kementerian Kesehatan	16,67	100,00	58,10	25,00	49,94	Sangat Buruk
54	Sekretariat Kabinet	50,00	71,25	48,73	25,00	48,74	Sangat Buruk
55	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	16,67	77,50	46,18	50,00	47,59	Sangat Buruk
56	Lembaga Ketahanan Nasional	75,00	27,50	43,98	33,33	44,95	Sangat Buruk

No	Kementrian	Dimensi Proses				Dimensi Proses	Kategori
		Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi		
57	Badan Keamanan Laut	33,33	55,00	32,52	50,00	42,71	Sangat Buruk
58	Kementerian Pertanian	8,33	41,25	41,98	75,00	41,64	Sangat Buruk
59	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	33,33	50,00	51,39	25,00	39,93	Sangat Buruk
60	Mahkamah Konstitusi	25,00	67,50	24,46	41,67	39,66	Sangat Buruk
61	Arsip Nasional	8,33	65,00	52,66	16,67	35,67	Sangat Buruk
62	Kejaksaan Agung	16,67	47,50	44,48	33,33	35,50	Sangat Buruk
63	Badan Pemeriksa Keuangan	33,33	27,50	48,73	25,00	33,64	Sangat Buruk
64	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	16,67	46,25	46,57	25,00	33,62	Sangat Buruk
65	Badan Pusat Statistik	0,00	35,00	33,22	50,00	29,55	Sangat Buruk
66	Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia	25,00	22,50	39,39	25,00	27,97	Sangat Buruk
67	Tentara Nasional Indonesia	33,33	5,00	9,45	25,00	18,20	Sangat Buruk
Nasional 2024		**63,43**	**73,02**	**56,56**	**70,40**	**65,85**	**Sedang**

DIMENSI PROSES - SURVEI DINAS KOMINFO PROVINSI TAHUN 2024

No	Provinsi	Dimensi Proses				Dimensi Proses	Kategori
		Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi		
1	DKI Jakarta	91,67	100,00	75,62	100,00	91,82	Sangat Baik
2	Sumatera Utara	91,67	100,00	73,07	100,00	91,18	Sangat Baik
3	Banten	91,67	93,75	68,29	100,00	88,43	Sangat Baik
4	Kalimantan Barat	83,33	95,00	63,73	100,00	85,52	Sangat Baik
5	Jawa Timur	100,00	65,00	73,23	100,00	84,56	Sangat Baik
6	Riau	66,67	100,00	64,04	100,00	82,68	Sangat Baik
7	Jawa Barat	83,33	71,25	55,56	100,00	77,53	Baik
8	Kalimantan Selatan	83,33	87,50	60,57	75,00	76,60	Baik
9	Sulawesi Selatan	100,00	63,75	45,68	83,33	73,19	Baik
10	Jawa Tengah	83,33	78,75	53,13	75,00	72,55	Baik
11	Kalimantan Timur	66,67	90,00	65,28	66,67	72,15	Baik
12	Bali	83,33	70,00	72,07	58,33	70,93	Baik
13	Maluku	75,00	100,00	46,99	58,33	70,08	Baik
14	Sumatera Selatan	83,33	57,50	52,93	83,33	69,27	Sedang
15	Jambi	58,33	82,50	68,09	66,67	68,90	Sedang
16	Kepulauan Bangka Belitung	91,67	72,50	29,71	75,00	67,22	Sedang
17	Nusa Tenggara Timur	66,67	100,00	49,38	50,00	66,51	Sedang
18	Daerah Istimewa Yogyakarta	50,00	100,00	53,40	50,00	63,35	Sedang
19	Kepulauan Riau	66,67	70,00	54,44	50,00	60,28	Sedang

No	Provinsi	Dimensi Proses				Dimensi Proses	Kategori
		Pengumpulan Data	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring dan Evaluasi		
20	Sumatera Barat	50,00	70,00	70,14	50,00	60,03	Sedang
21	Papua	100,00	85,00	28,63	25,00	59,66	Buruk
22	Sulawesi Utara	50,00	83,75	58,76	33,33	56,46	Buruk
23	Kalimantan Utara	33,33	70,00	49,07	66,67	54,77	Buruk
24	Lampung	41,67	72,50	41,44	50,00	51,40	Buruk
25	Bengkulu	33,33	27,50	36,15	100,00	49,25	Sangat Buruk
26	Aceh	33,33	95,00	58,41	0,00	46,69	Sangat Buruk
27	Nusa Tenggara Barat	25,00	43,75	52,78	50,00	42,88	Sangat Buruk
28	Sulawesi Tengah	16,67	65,00	34,84	25,00	35,38	Sangat Buruk
29	Sulawesi Barat	25,00	52,50	35,80	25,00	34,58	Sangat Buruk
30	Gorontalo	8,33	46,25	40,66	41,67	34,23	Sangat Buruk
31	Maluku Utara	25,00	50,00	36,77	25,00	34,19	Sangat Buruk
32	Kalimantan Tengah	25,00	40,00	32,68	25,00	30,67	Sangat Buruk
33	Sulawesi Tenggara	8,33	31,25	29,59	41,67	27,71	Sangat Buruk
34	Papua Barat	8,33	36,25	17,71	0,00	15,57	Sangat Buruk
Nasional 2024		**58,82**	**72,54**	**51,43**	**60,29**	**60,77**	**Sedang**

DIMENSI OUTPUT - SURVEI MASYARAKAT TAHUN 2024

No	Provinsi	Dimensi Output			Dimensi Output	Kategori
		Penerimaan Informasi	Penilaian Publik Terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik	Penilaian Publik Terhadap Akses Dan Kualitas Informasi Publik		
1	Bali	65,33	84,68	91,25	80,42	Sangat Baik
2	Kep. Bangka Belitung	69,68	79,76	87,73	79,06	Baik
3	DKI Jakarta	64,97	78,91	88,58	77,49	Baik
4	Jawa Barat	64,94	77,63	88,75	77,11	Baik
5	Sumatera Selatan	64,91	76,92	88,54	76,79	Baik
6	Sulawesi Tengah	68,60	72,77	86,53	75,96	Baik
7	Sulawesi Tenggara	68,96	71,79	85,98	75,58	Baik
8	Sumatera Barat	63,44	75,00	87,08	75,17	Baik
9	Kepulauan Riau	59,09	80,36	85,89	75,11	Baik
10	Nusa Tenggara Timur	66,70	72,96	84,76	74,81	Baik
11	Maluku Utara	58,17	77,14	86,50	73,94	Baik
12	Jawa Timur	57,85	76,23	87,67	73,92	Baik
13	Jawa Tengah	55,14	78,86	87,61	73,87	Baik
14	Dl. Yogyakarta	59,61	76,53	85,25	73,80	Baik
15	Kalimantan Tengah	57,92	74,70	88,44	73,69	Baik
16	Lampung	60,59	73,51	86,53	73,54	Baik
17	Sulawesi Selatan	54,63	77,17	87,50	73,10	Baik
18	Nusa Tenggara Barat	49,68	81,55	87,86	73,03	Baik

No	Provinsi	Dimensi Output			Dimensi Output	Kategori
		Penerimaan Informasi	Penilaian Publik Terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik	Penilaian Publik Terhadap Akses Dan Kualitas Informasi Publik		
19	Maluku	57,35	74,45	86,53	72,78	Baik
20	Gorontalo	56,11	73,38	88,50	72,66	Baik
21	Papua Barat	67,02	63,89	86,79	72,56	Baik
22	Jambi	52,75	75,89	87,43	72,02	Baik
23	Kalimantan Utara	51,56	76,79	87,50	71,95	Baik
24	Sumatera Utara	56,46	72,41	86,30	71,72	Baik
25	Sulawesi Utara	50,14	76,05	87,32	71,17	Baik
26	Riau	55,00	72,40	85,92	71,11	Baik
27	Bengkulu	49,54	73,35	89,00	70,63	Baik
28	Kalimantan Barat	44,33	78,57	87,35	70,08	Baik
29	Kalimantan Timur	50,97	72,96	85,92	69,95	Sedang
30	Banten	49,80	74,52	83,18	69,17	Sedang
31	Sulawesi Barat	39,84	76,43	90,00	68,76	Sedang
32	Kalimantan Selatan	53,96	70,05	82,08	68,70	Sedang
33	Aceh	64,48	56,19	82,68	67,78	Sedang
34	Papua	41,40	71,43	86,82	66,55	Sedang
Nasional		**57,38**	**74,86**	**86,93**	**73,06**	**Baik**

DIMENSI OUTCOME - SURVEI MASYARAKAT TAHUN 2024

No	Provinsi	Dimensi Outcome			Dimensi Outcome	Kategori
		Penilaian Publik Terhadap Pemerataan Informasi	Pemenuhan Hak Untuk Mengetahui	Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Pemerintah		
1	Sulawesi Utara	72,92	87,50	75,00	78,47	Baik
2	Papua Barat	66,48	95,45	67,05	76,33	Baik
3	Sulawesi Tengah	71,47	80,43	76,63	76,18	Baik
4	Jawa Barat	75,57	87,16	65,69	76,14	Baik
5	Bali	82,22	75,56	70,56	76,11	Baik
6	DKI Jakarta	74,90	79,74	71,17	75,27	Baik
7	Kalimantan Timur	73,56	89,44	62,74	75,25	Baik
8	Nusa Tenggara Timur	65,21	95,83	64,17	75,07	Baik
9	Bengkulu	72,14	84,78	67,71	74,88	Baik
10	Kalimantan Barat	73,28	86,54	64,69	74,84	Baik
11	Maluku Utara	70,54	85,71	64,29	73,51	Baik
12	Sumatera Selatan	73,54	72,60	74,03	73,39	Baik
13	Maluku	72,73	82,35	63,64	72,91	Baik
14	Kalimantan Tengah	75,00	78,33	65,13	72,82	Baik
15	Jawa Tengah	73,74	80,93	63,34	72,67	Baik
16	Lampung	68,75	86,72	61,93	72,47	Baik
17	Kep. Bangka Belitung	72,32	78,57	66,07	72,32	Baik
18	Sulawesi Selatan	72,30	77,78	63,07	71,05	Baik

No	Provinsi	Dimensi Outcome			Dimensi Outcome	Kategori
		Penilaian Publik Terhadap Pemerataan Informasi	Pemenuhan Hak Untuk Mengetahui	Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Pemerintah		
19	Kalimantan Selatan	70,70	82,69	59,38	70,92	Baik
20	Sumatera Utara	67,99	83,98	59,31	70,43	Baik
21	Riau	70,15	83,59	57,46	70,40	Baik
22	Sulawesi Tenggara	71,47	73,75	65,22	70,14	Baik
23	Dl. Yogyakarta	66,58	84,78	58,70	70,02	Baik
24	Papua	73,18	80,77	55,73	69,89	Sedang
25	Jawa Timur	72,32	75,79	61,43	69,85	Sedang
26	Nusa Tenggara Barat	75,72	68,27	61,54	68,51	Sedang
27	Jambi	73,85	76,04	55,59	68,49	Sedang
28	Aceh	52,08	100,00	46,67	66,25	Sedang
29	Sumatera Barat	72,81	64,77	59,21	65,60	Sedang
30	Kalimantan Utara	73,75	50,00	71,25	65,00	Sedang
31	Kepulauan Riau	64,73	64,29	64,29	64,43	Sedang
32	Gorontalo	71,88	58,33	61,46	63,89	Sedang
33	Banten	68,47	64,39	57,95	63,60	Sedang
34	Sulawesi Barat	78,31	58,82	51,47	62,87	Sedang
Nasional		**71,49**	**78,70**	**63,34**	**71,18**	**Baik**

LAMPIRAN V

DIMENSI INPUT - PERBANDINGAN SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 KEMENTERIAN/LEMBAGA

No	Kementerian/ Lembaga non Kementerian	Variabel pada Dimensi Input																				Skor Dimensi Input				
		Anggaran					Bahan Informasi					Sarana & Prasarana					Media & Saluran Komunkasi									
		2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024
1	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	70,83	94,23	76,92	75,00	87,50	63,33	95,06	72,63	93,75	44,23	75,00	86,67	73,68	78,95	83,33	81,25	90	75,00	90	90,91	72,6	91,49	74,56	84,42	76,49
2	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	25,00	100	61,54	100	100	100	97,18	55,38	76,75	56,00	75,00	80	73,68	89,47	88,89	81,25	86,67	83,33	90	81,82	70,31	90,96	68,49	89,06	81,68
3	Badan Riset dan Inovasi Nasional		62,50	100	70,83	100		92,00	82,31	98,75	64,01		100	89,47	94,74	94,44		96,67	66,67	100	90,91		87,79	84,61	91,08	87,34
4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		85,58	92,30	100	100		84,94	95,00	95,00	90,38		86,67	89,47	89,47	94,44		93,33	100	100	81,82		87,63	94,2	96,12	91,66
5	Kementerian Kelautan dan Perikanan	83,33	87,50	92,30	100	100	83,33	100	77,62	93,00	99,63	87,50	80	100	94,74	100	90	80,83	87,50	100	100	86,04	87,08	89,36	96,93	99,91
6	Kementerian Agama	70,83	73,08	61,54	66,67	100	36,67	94,59	37,50	25,00	30,13	68,75	86,67	68,42	0	94,44	25,00	80	54,17	0	90,91	50,31	83,58	55,41	22,92	78,87
7	Sekretariat Kabinet	33,33	60,58	69,23	100	87,50	46,67	99,53	95,00	93,75	89,29	31,25	86,67	73,68	73,68	66,67	32,50	83,33	83,33	45,00	54,55	35,94	82,53	80,31	78,11	74,50
8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	87,50	56,73	100	95,83	100	100	100	100	100	97,07	87,50	86,67	94,74	89,47	100	81,25	86,67	100	100	100	89,06	82,52	98,68	96,33	99,27
9	Kementerian Pertanian	100	75,00	100	100	100	80	92,00	90,71	85,00	83,42	93,75	93,33	100	94,74	100	93,75	68,33	100	87,50	90,91	91,88	82,17	97,68	91,81	93,58
10	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	64,58	69,23	100	100	100	83,33	66,12	77,63	90	72,44	81,25	93,33	100	89,47	100	81,25	96,67	91,67	82,50	100	77,6	81,34	92,32	90,49	93,11
11	Kementerian Perindustrian	54,17	85,58	92,31	100	100	63,33	69,88	91,08	97,50	54,76	68,75	80	84,21	89,47	88,89	87,50	86,67	91,67	90	72,73	68,44	80,53	89,82	94,24	79,09
12	Perpustakaan Nasional	47,92	48,08	100	91,67	100	40	85,18	73,71	77,00	79,85	6,25	86,67	84,21	89,47	72,22	37,50	100	91,67	95,00	90,91	32,92	79,98	87,4	88,29	85,75
13	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	33,33	54,81	92,31	95,83	100	43,33	91,53	89,04	91,25	88,55	75,00	80	84,21	73,68	94,44	81,25	90	91,67	100	63,64	58,23	79,08	89,31	90,19	86,66
14	Badan Kepegawaian Negara		73,08	53,85	-	100		68,00	58,14		85,71		86,67	78,95		94,44		86,67	79,17				78,6	67,53		85,95

No	Kementerian/ Lembaga non Kementerian	Variabel pada Dimensi Input																				Skor Dimensi Input				
		Anggaran					Bahan Informasi					Sarana & Prasarana					Media & Saluran Komunkasi									
		2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024
																					63,64					
15	Ombudsman RI	62,50	58,65	76,92	75,00	100	93,33	61,88	30	60,25	56,32	75,00	93,33	94,70	89,47	94,44	35,00	100	91,67	100	81,82	66,46	78,47	73,33	81,18	83,15
16	Kementerian Ketenagakerjaan	31,25	67,31	92,31	95,83	100	56,67	68,94	68,46	91,00	68,82	68,75	80	89,47	94,74	100	87,50	96,67	95,83	80	90,91	61,04	78,23	86,52	90,39	89,93
17	Badan Standardisasi Nasional		87,50	84,62	83,33	75,00		100	45,13	42,50	67,86		66,67	63,16	84,21	61,11		58,33	58,33	45,00	72,73		78,13	62,81	63,76	69,17
18	Kementerian Keuangan		42,31			100		88,71			68,13		86,67			100		86,67			81,82		76,09			87,49
19	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	52,08	56,73	92,30	95,83	100	60	63,29	70,86	78,75	65,06	81,25	86,67	89,47	78,95	77,78	71,25	93,33	95,83	87,50	90,91	66,15	75,01	87,12	85,26	83,44
20	Kementerian Dalam Negeri		62,50	100	100	100		63,06	77,01	95,00	64,15		100	94,74	89,47	94,44		74,17	87,50	82,50	63,64		74,93	89,81	91,74	80,56
21	Kementerian Komunikasi dan Informatika		52,88	100	87,50	87,50		71,06	76,92	37,50	87,18		80	89,47	78,95	100		93,33	100	35,00	100		74,32	91,6	59,74	93,67
22	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		92,31	92,30	95,83	100		24,00	63,81	90	83,70		80	89,47	89,47	88,89		96,67	91,67	100	90,91		73,24	84,32	93,83	90,87
23	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	66,67	75,96	69,23	91,67	100	83,33	94,35	37,50	66,25	64,61	62,50	46,67	78,95	78,95	88,89	35,00	76,67	83,33	80	90,91	61,88	73,41	67,25	79,22	86,10
24	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	87,50	42,31	84,62	91,67	87,50	63,33	67,76	82,69	93,75	63,32	62,50	100	89,47	84,21	88,89	81,25	80	91,67	57,50	63,64	73,65	72,52	87,11	81,78	75,84
25	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	47,92	34,62	46,15	79,17	100	83,33	95,00	59,90	75,00	78,57	68,75	73,33	73,68	84,21	94,44	51,25	86,67	91,67	85,00	81,82	62,81	72,4	67,85	80,84	88,71
26	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	68,75	71,15	92,31	95,83	100	83,33	28,47	69,42	72,25	88,55	87,50	93,33	94,74	100	100	57,50	86,67	91,67	77,50	81,82	74,27	69,91	87,03	86,4	92,59
27	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	47,92	73,08	100	95,83	87,50	50	47,53	80,80	94,25	72,02	75,00	73,33	78,95	89,47	83,33	87,50	85,00	54,16	100	54,55	65,11	69,73	78,48	94,89	74,35
28	Kementerian Kesehatan	64,58	48,08	92,31	100	100	93,33	51,06	75,99	75,50	81,78	81,25	86,67	94,74	84,21	83,33	93,75	90	100	100	90,91	83,23	68,95	90,76	89,93	89,00
29	Kementerian Perdagangan		94,23	84,61	87,50	100		30,24	64,19	43,75	85,39		80	84,21	94,74	94,44		70,83	79,16	90	81,82		68,83	78,05	79	90,41
30	Kementerian Sosial		56,73	92,30	75,00	100		65,88	67,98	78,25	73,26		60	47,37	84,21	77,78		90	79,16	42,50	81,82		68,15	71,71	69,99	83,21

No	Kementerian/ Lembaga non Kementerian	Variabel pada Dimensi Input																				Skor Dimensi Input				
		Anggaran					Bahan Informasi					Sarana & Prasarana					Media & Saluran Komunkasi									
		2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024
31	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		67,31	69,23	79,17	87,50		38,12	67,85	78,75	87,45		86,67	68,42	68,42	55,56		80	87,50	35,00	54,55		68,02	73,25	65,33	71,26
32	Kementerian Luar Negeri	75,00	74,04	100	100	87,50	86,67	25,65	56,89	74,00	80,68	62,50	80	89,47	94,74	94,44	93,75	90	95,83	95,00	81,82	79,48	67,42	85,55	90,93	86,11
33	Arsip Nasional	100	92,31	69,23	79,17	75,00	53,33	25,65	65,67	26,25	60,71	87,50	86,67	84,21	73,68	77,78	73,75	65,00	70,83	75,00	90,91	78,65	67,41	72,49	63,53	76,10
34	Badan Pemeriksa Keuangan		75,00	100	95,83	100		30,82	3,75	80	42,08		80	78,95	78,95	77,78		83,33	37,50	65,00	90,91		67,29	55,05	79,95	77,69
35	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	41,67	71,15	84,62	91,67	75,00	66,67	35,29	75,22	83,50	65,93	81,25	73,33	89,47	89,47	94,44	61,25	85,71	91,67	95,00	90,91	62,71	66,37	85,25	89,91	81,57
36	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	83,33	60,58	61,53	54,17	75,00	73,33	28,24	85,38	37,50	80,22	87,50	86,67	94,74	84,21	88,89	87,50	90	54,16	80	100	82,92	66,37	73,96	63,97	86,03
37	Kementerian Investasi/BKPM	33,33	49,04		87,50	87,50	73,33	69,41		90	83,15	81,25	60		84,21	66,67	51,25	86,67		95,00	63,64	59,79	66,28		89,18	75,24
38	Kepolisian Republik Indonesia		35,58	69,23	100	100		69,52	33,21	0	60,90		66,67	94,74	94,74	100		90	100	40	100		65,44	74,29	58,68	90,22
39	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas		59,62	84,61	70,83	75,00		48,00	45,00	63,50	64,51		73,33	78,95	84,21	83,33		80	37,50	42,50	63,64		65,24	61,52	65,26	71,62
40	Kementerian Pemuda dan Olahraga		60,58	84,61	79,17	100		34,82	77,05	47,50	38,19		73,33	78,95	78,95	72,22		86,67	100	80	81,82		63,85	85,15	71,4	73,06
41	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	100	42,31	84,61	83,33	87,50	76,67	40,47	64,61	88,75	83,61	81,25	86,67	84,21	94,74	94,44	93,75	83,33	87,50	90	81,82	87,92	63,19	80,24	89,21	86,84
42	Kementerian Sekretariat Negara	87,50	38,46	100	100	100	100	100	91,25	93,75	88,37	68,75	80	73,68	73,68	94,44	41,25	33,33	45,83	45,00	90,91	74,38	62,95	77,69	78,11	93,43
43	Kementerian Perhubungan	64,58	44,23	92,30	75,00	62,50	73,33	57,18	74,83	77,75	81,50	81,25	66,67	78,95	63,16	88,89	81,25	83,33	95,83	90	100	75,1	62,85	85,48	76,48	83,22
44	Kejaksaan Agung		28,85	53,84	70,83	62,50		28,47	52,01	25,00	7,23		93,33	94,74	78,95	88,89		93,33	91,66	85,00	90,91		61	73,07	64,95	62,38
45	Badan Siber dan Sandi Negara		58,65	61,53	79,17	75,00		57,65	45,70	41,50	37,00		86,67	73,68	73,68	83,33		40	41,66	35,00	81,82		60,74	55,65	57,34	69,29

No	Kementerian/ Lembaga non Kementerian	Variabel pada Dimensi Input																				Skor Dimensi Input				
		Anggaran					Bahan Informasi					Sarana & Prasarana					Media & Saluran Komunkasi									
		2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024
46	Badan Narkotika Nasional	45,83	50,96	46,15	87,50	75,00	63,33	68,00	88,75	88,75	46,43	75,00	40	52,63	73,68	77,78	75,00	80	83,33	85,00	72,73	64,79	59,74	67,72	83,73	67,98
47	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	47,92	77,88	53,84	83,33	100	73,33	45,41	73,55	78,25	67,54	43,75	80	89,47	68,42	77,78	75,00	33,33	91,66	47,50	81,82	60	59,16	77,14	69,38	81,78
48	Lembaga Administrasi Negara	52,08	45,19	100	83,33	100	30	26,59	65,70	86,25	88,00	62,50	73,33	84,21	84,21	94,44	61,25	86,67	66,66	75,00	90,91	51,46	57,95	79,15	82,2	93,34
49	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	0	53,85	53,84	66,67	75,00	50	23,53	65,67	59,50	59,84	75,00	73,33	68,42	57,89	77,78	75,00	76,67	87,50	30	63,64	50	56,84	68,86	53,52	69,06
50	Komisi Pemberantasan Korupsi		46,15	76,92	95,83	100		23,76	74,03	88,75	73,63		93,33	94,74	84,21	100		61,67	62,50	75,00	100		56,23	77,05	85,95	93,41
51	Kementerian Hukum dan HAM		44,23	69,23	100	100		36,94	78,36	75,75	69,96		80	94,74	89,47	77,78		60,83	45,83	77,50	63,64		55,5	72,04	85,68	77,84
52	Komisi Pemilihan Umum		22,12	69,23	95,83	100		22,82	43,04	30	73,76		86,67	94,74	84,21	88,89		85,71	95,83	100	72,73		54,33	75,71	77,51	83,84
53	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	93,75	45,19	61,54	66,67	87,50	63,33	20,94	56,41	74,50	69,05	50	60	68,42	78,95	88,89	87,50	90	87,50	95,00	81,82	73,65	54,03	68,47	78,78	81,81
54	Badan Pengawas Tenaga Nuklir		72,12			0,00		22,86					33,33					76,67					51,24			
55	Sekretariat Wakil Presiden		36,54			0,00		23,53					60					73,33					48,35			
56	Dewan Pertimbangan Presiden	6,25	82,69			0,00	40	33,41				75,00	40				38,75	33,33				40	47,36			
57	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	22,92	49,04	46,15	66,67	100	50	24,94	65,06	48,00	36,90	50	86,67	78,95	78,95	66,67	41,25	26,67	29,16	37,50	81,82	41,04	46,83	54,83	57,78	71,35
58	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme		48,08	100	100	100		34,12	68,71	93,75	94,69		33,33	78,95	94,74	100		70	79,16	95,00	100		46,38	81,71	95,87	98,67
59	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	58,33	29,81	92,30	95,83	100	30	29,65	64,71	62,50	81,09	56,25	80	84,21	73,68	88,89	35,00	40	87,50	47,50	81,82	44,9	44,86	82,18	69,88	87,95
60	Kementerian Pertahanan	16,67	40,38	76,92	54,17	100	73,33	21,65	68,36	70	62,50	81,25	73,33	84,21	68,42	77,78	93,75	42,50	95,83	55,00	63,64	66,25	44,47	81,33	61,9	75,98
61	Badan Pusat Statistik		42,31	46,15	70,83	62,50		26,67	32,59	16,25	21,43		80	63,16	78,95	88,89		26,67	70,83	20	45,45		43,91	53,19	46,51	54,57

No	Kementerian/ Lembaga non Kementerian	Variabel pada Dimensi Input																				Skor Dimensi Input				
		Anggaran					Bahan Informasi					Sarana & Prasarana					Media & Saluran Komunkasi									
		2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024
62	Badan Intelijen Negara		12,50	7,69	50	62,50		63,06	77,50	85,00	40,93		66,67	100	100	55,56		32,14	95,83	100	45,45		43,59	70,26	83,75	51,11
63	Lembaga Ketahanan Nasional	75,00	24,04	30,76	66,67	75,00	43,33	30,12	88,10	96,25	66,80	56,25	53,33	57,89	73,68	66,67	45,00	55,00	83,33	62,50	72,73	54,9	40,62	65,03	74,78	70,30
64	LPP TVRI		12,50					57,14										50					29,91			
65	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	64,58					80					87,50					93,75					81,46				
66	Badan Tenaga Nuklir Nasional	83,33					56,67					75,00					93,75					77,19				
67	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	93,75					96,67					43,75					71,25					76,36				
68	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	33,33					73,33					68,75					81,25					64,17				
69	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI	62,50		53,84	70,83	75,00	70		53,46	8,75	52,34	62,50		73,68	73,68	88,89	48,75		83,33	47,50	81,82	60,94		66,08	50,19	74,51
70	Tentara Nasional Indonesia					87,50	76,67				21,43	75,00				72,22	81,25				63,64	58,23				61,20
71	Mahkamah Konstitusi	29,17		100	87,50	100	80		5,00	87,25	67,86	62,50		94,74	73,68	88,89	51,25		58,33	57,50	72,73	55,73		64,52	76,48	82,37
72	Badan Ekonomi Kreatif	68,75				0,00	40				0,00	18,75					41,25					42,19				
73	Mahkamah Agung			84,61	87,50	87,50			5,00	25,00	25,18			89,47	84,21	88,89			54,17	57,50	72,73	18,33		58,31	63,55	68,57
74	Badan Keamanan Laut			23,10	62,50	62,50	73,33		10	22,50	46,02			52,63	63,16	66,67			75,00	70	72,73			40,18	54,54	61,98
75	Komisi Yudisial			38,50	79,17	75,00			32,50	38,75	61,26			84,21	84,21	88,89			54,17	65,00	100			52,33	66,78	81,29
76	Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia			69,23	83,33	87,50			3,75	52,50	47,44			78,95	68,42	88,89			83,33	75,00	72,73			58,82	69,81	74,14
		56,16	**58,37**	**76,68**	**85,09**	**90,67**	**67,52**	**55,96**	**62,89**	**68,86**	**66,77**	**67,29**	**76,15**	**82,48**	**81,33**	**86,15**	**66,94**	**75,98**	**79,62**	**72,89**	**80,46**	**64,48**	**66,61**	**75,42**	**77,04**	**80,89**

DIMENSI INPUT - PERBANDINGAN SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2019, 2021, 2022, 2023, 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI

No	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi	Variabel Dimensi Input																				Skor Dimensi Input				
		Anggaran					Bahan Informasi					Sarana & Prasarana					Media & Saluran Komunikasi									
		2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	41,7	65,38	76,9	87,50	87,50	63,3	29,53	70,2	76,25	61,54	93,8	93,33	100	100	94,44	100	76,67	91,7	90,00	81,82	74,7	80,21	84,7	88,44	94,97
2	Bali	54,2	100	100	75,00	100	60	66,05	35	70,00	80,68	87,5	100	94,7	94,44	100	87,5	93,33	95,8	90,00	81,82	72,3	73,26	81,4	82,36	92,58
3	Banten	93,8	48,08	76,9	91,67	100	63,3	80,47	68,3	85,75	85,44	87,5	93,33	84,2	83,33	94,44	87,5	86,67	100	100	100	83,03	73,26	82,4	90,19	91,55
4	Bengkulu	29,2	38,46	53,8	75,00	87,50	33,3	23,72	17,5	50,00	7,51	43,8	73,33	47,4	83,33	88,89	81,3	80	83,3	100	90,91	46,9	70,14	50,5	77,08	90,82
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	62,5	69,23	53,8	66,67	75,00	36,7	24,65	72,9	71,50	63,55	87,5	93,33	94,7	94,44	88,89	100	90	75	72,50	72,73	71,68	69,44	74,1	76,28	90,62
6	DKI Jakarta	54,2	69,23	84,6	91,67	100	86,7	73,72	50,8	75,00	96,06	68,8	73,33	78,9	83,33	83,33	81,3	86,67	100	100	90,91	72,75	83,33	78,6	87,5	89,57
7	Gorontalo	87,5	38,46	30,8	62,50	62,50	50	60,23	38,8	78,00	64,29	87,5	100	89,5	88,89	72,22	35	87,5	91,7	100	81,82	65	44,44	62,7	82,35	87,50
8	Jambi	75	63,46	46,2	70,83	75,00	73,3	21,4	13,8	31,25	65,38	56,3	20	42,1	72,22	83,33	18,8	80	87,5	85,00	81,82	55,85	58,68	47,4	64,83	87,32
9	Jawa Barat	41,7	75,96	84,6	70,83	100	56,7	44,65	78,7	100	78,57	100	86,67	94,7	100	88,89	63,8	93,33	91,7	100	81,82	65,55	97,22	87,4	92,71	86,89
10	Jawa Tengah	100	83,65	84,6	91,67	100	70	76,28	77,8	86,75	70,79	87,5	86,67	94,7	94,44	83,33	87,5	83,33	91,7	90,00	90,91	86,25	94,44	87,2	90,72	86,26
11	Jawa Timur	58,3	57,69	61,5	79,17	87,50	63,3	60	79	81,25	82,69	68,8	73,33	73,7	88,89	88,89	93,8	49,17	58,3	90,00	90,91	71,05	64,58	68,1	84,83	85,93
12	Kalimantan Barat	64,6	56,73	69,2	79,17	87,50	60	25,58	21,3	92,50	70,42	81,3	73,33	73,7	77,78	77,78	47,5	51,67	83,3	65,00	81,82	63,35	56,25	61,9	78,61	85,60
13	Kalimantan Selatan	29,2	50,96	69,2	87,50	87,50	60	80	93	100	66,03	81,3	73,33	84,2	94,44	88,89	57,5	49,17	62,5	70,00	90,91	57	87,5	77,2	87,99	83,51
14	Kalimantan Tengah	60,4	63,46	69,2	87,50	87,50	30	21,86	70	58,50	55,40	81,3	73,33	78,9	77,78	66,67	57,5	70	95,8	85,00	72,73	57,3	45,14	78,5	77,19	83,33
15	Kalimantan Timur	47,9	85,58	92,3	95,83	100	96,7	60	18,8	63,75	78,57	93,8	73,33	89,5	83,33	83,33	81,3	86,67	95,8	95,00	81,82	79,93	43,75	74,1	84,48	83,16
16	Kalimantan Utara	29,2	25,96	30,8	58,33	87,50	36,7	24,19	78,5	89,75	65,20	68,8	66,67	78,9	83,33	72,22	18,8	70	75	75,00	72,73	38,38	63,54	65,8	76,6	81,33
17	Kep. Bangka Belitung	35,4	84,62	38,5	75,00	75,00	60	45,35	72,6	85,00	87,23	68,8	86,67	89,5	94,44	94,44	67,5	83,33	100	90,00	90,91	57,93	51,04	75,1	86,11	79,38
18	Kepulauan Riau	70,8	50,96	69,2	83,33	87,50	73,3	33,02	63,2	92,50	47,99	68,8	80	73,7	77,78	66,67	45	41,67	79,2	70,00	54,55	64,48	68,4	71,3	80,9	78,47

No	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi	Variabel Dimensi Input																				Skor Dimensi Input				
		Anggaran					Bahan Informasi					Sarana & Prasarana					Media & Saluran Komunikasi									
		2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024
19	Lampung	62,5	71,15	100	83,33	87,50	50	33,95	77,6	69,75	72,30	68,8	93,33	100	88,89	83,33	51,3	90	100	100	90,91	58,15	73,96	94,4	85,49	77,97
20	Maluku	6,3	75,96	30,8	66,67	87,50	53,3	27,44	77,7	27,50	44,23	93,8	53,33	68,4	66,67	72,22	68,8	73,33	87,5	80,00	63,64	55,55	45,14	66,1	60,21	76,38
21	Maluku Utara	29,2	29,81	38,5	66,67	75,00	43,3	22,56	25	25,00	36,13	37,5	40	47,4	50,00	61,11	32,5	51,67	37,5	80,00	45,45	35,63	44,79	37,1	55,42	75,80
22	Nusa Tenggara Barat	41,7	98,08	53,8	83,33	75,00	63,3	64,19	90	43,75	89,65	43,8	93,33	84,2	88,89	83,33	47,5	86,67	91,7	60,00	54,55	49,08	82,64	79,9	68,99	75,63
23	Nusa Tenggara Timur	66,7	58,65	61,5	79,17	75,00	46,7	98,14	74,4	35,00	37,50	81,3	93,33	84,2	83,33	61,11	81,3	90	79,2	47,50	63,64	69	77,78	74,8	61,25	75,55
24	Papua	-	42,31	84,6	66,67	75,00	-	38,6	67,2	10,00	62,50	-	86,67	89,5	77,78	88,89	-	45,83	58,3	45,00	100	-	48,96	74,9	49,86	75,04
25	Papua Barat	-	16,35	69,2	83,33	62,50	-	93,49	0	45,00	14,29	-	6,67	36,8	50,00	66,67	-	35,83	33,3	70,00	45,45	-	44,1	34,9	62,08	74,41
26	Riau	22,9	88,46	53,8	79,17	75,00	20	23,26	35	35,00	72,94	25	93,33	78,9	83,33	94,44	81,3	80	91,7	95,00	90,91	37,3	71,88	64,9	73,13	73,59
27	Sulawesi Barat	-	49,04	46,2	70,83	100	-	20	43,7	93,75	73,12	-	80	31,6	77,78	94,44	-	73,33	79,2	77,50	81,82	-	11,46	50,1	79,97	70,57
28	Sulawesi Selatan	41,7	90,38	61,5	79,17	62,50	53,3	63,72	41,3	25,00	89,74	81,3	80	89,5	94,44	83,33	63,8	80	87,5	100	81,82	60,03	82,64	69,9	74,65	70,21
29	Sulawesi Tengah	-	60,58	100	83,33	87,50	-	22,79	85	80,00	57,14	-	53,33	100	100	66,67	-	66,67	70,8	75,00	90,91	-	63,19	89	84,58	68,70
30	Sulawesi Tenggara	58,3	83,65	53,8	79,17	87,50	70	23,26	13,8	37,50	59,75	81,3	73,33	68,4	83,33	77,78	61,3	90	91,7	95,00	81,82	67,73	37,85	56,9	73,75	64,17
31	Sulawesi Utara	56,3	48,08	92,3	100	75,00	53,3	24,42	92,4	59,50	66,21	68,8	53,33	73,7	88,89	100	81,3	73,33	83,3	100	100	64,93	53,13	85,4	87,1	63,77
32	Sumatera Barat	22,9	50,96	92,3	95,83	100	60	75,81	33,8	87,75	82,14	87,5	80	89,5	72,22	77,78	47,5	80	91,7	85,00	72,73	54,48	55,21	76,8	85,2	59,31
33	Sumatera Selatan	93,8	71,15	76,9	87,50	100	43,3	61,4	8,8	7,50	56,09	93,8	60	78,9	72,22	77,78	87,5	45,83	79,2	80,00	81,82	79,6	72,22	60,9	61,81	54,42
34	Sumatera Utara	41,7	75,96	61,5	79,17	87,50	86,7	48,14	87,5	73,25	81,32	75	80	89,5	88,89	94,44	81,3	83,33	91,7	95,00	100	71,18	91,32	82,5	84,08	50,35
Total Nasional		**52,65**	**62,90**	**66,73**	**79,78**	**85,29**	**57,22**	**46,82**	**55,10**	**63,03**	**65,36**	**75,03**	**74,70**	**78,63**	**83,50**	**82,35**	**66,57**	**73,68**	**82,72**	**83,90**	**80,48**	**62,87**	**64,14**	**70,79**	**77,55**	**78,37**

DIMENSI PROSES - PERBANDINGAN INDEKS PIKP 2019, 2021, 2022, 2023, 2024

KEMENTERIAN/LEMBAGA

No	Kementerian/ Lembaga non Kementerian	Variabel pada Dimensi Proses																				Skor Dimensi Proses				
		Indeks Pengumpulan Data dan Informasi					Indeks Perencanaan					Indeks Pelaksanaan					Indeks Monitoring & Evaluasi									
		2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024
1	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	33,33	33,33	66,67	77,78	58,33	93,75	66,67	36,70	76,67	73,75	26,67	87,50	67,10	46,23	59,65	42,86	77,78	33,33	22,22	16,67	49,15	66,32	50,95	55,72	52,10
2	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	100	77,78	77,78	77,78	58,33	87,50	91,67	80	91,67	85,00		100	25,50	74,01	64,31	53,57	100	100	77,78	100	60,27	92,36	70,81	80,31	76,91
3	Badan Riset dan Inovasi Nasional		100	66,67	66,67	75,00		100	91,70	73,33	90,00		75,00	83,40	91,88	74,04		77,78	100	88,89	100		88,19	85,43	80,19	84,76
4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		100	66,67	88,89	66,67		100	100	80	85,00		100	79,20	81,11	68,94		55,56	100	66,67	50,00		88,89	86,47	79,17	67,65
5	Kementerian Kelautan dan Perikanan	83,33	100	66,67	88,89	100	93,75	100	91,70	90	100	37,33	100	82,70	94,31	77,43	25,00	100	100	100	100	59,85	100	85,25	93,3	94,36
6	Kementerian Agama	33,33	33,33	66,67	33,33	33,33	75,00	83,33	75,00	0	77,50	20	62,50	48,10	40,79	68,56	25,00	33,33	55,56	100	25,00	38,33	53,13	61,34	43,53	51,10
7	Sekretariat Kabinet	25	55,56	77,78	100	50,00	87,50	91,67	100	100	71,25	13,33	100	79,40	100	48,73	35,71	88,89	100	100	25,00	40,39	84,03	89,31	100	48,74
8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	100	100	100	100	100	50	100	100	100	100	34,67	100	94,50	93,97	76,50	42,86	100	100	100	100	56,88	100	98,63	98,49	94,13
9	Kementerian Pertanian	100	55,56	100	100	8,33	93,75	83,33	91,70	90	41,25	97,33	87,50	95,90	90,47	41,98	46,43	100	100	77,78	75,00	84,38	81,6	96,88	89,56	41,64
10	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	66,67	77,78	66,67	77,78	75,00	93,75	100	83,30	81,67	93,75	14,67	100	61,20	91,19	75,39	39,29	88,89	100	88,89	100	53,6	91,67	77,8	84,88	86,03
11	Kementerian Perindustrian	75	66,67	88,89	100	100	100	100	85,00	75,00	90,00	42,67	87,50	79,30	73,49	55,40	46,43	100	88,89	100	100	66,03	88,54	85,52	87,12	86,35
12	Perpustakaan Nasional		66,67	66,70	77,78	58,33	37,50	91,67	75,00	60	52,50	13,33	75,00	77,00	70,07	41,74	39,29	66,67	33,33	33,33	58,33	22,53	75	63	60,29	52,73
13	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	50	55,56	100	100	75,00	43,75	75,00	95,00	90	90,00	25,33	62,50	85,90	68,76	65,74	50	77,78	100	100	100	42,27	67,71	95,22	89,69	82,69
14	Badan Kepegawaian Negara		100	44,44		100		100	78,30		100		87,50	41,40		68,67		77,78	100		100		91,32	66,05		92,17

No	Kementerian/ Lembaga non Kementerian	Variabel pada Dimensi Proses																				Skor Dimensi Proses				
		Indeks Pengumpulan Data dan Informasi					Indeks Perencanaan					Indeks Pelaksanaan					Indeks Monitoring & Evaluasi									
		2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024
15	Ombudsman RI	50	100	55,56	77,78	66,67	100	100	91,70	85,00	90,00	6,67	75,00	56,50	48,47	60,84	25,00	100	100	77,78	66,67	45,42	93,75	75,92	72,26	71,04
16	Kementerian Ketenagakerjaan	50	55,56	77,78	77,78	100	87,50	83,33	91,70	90	85,00	14,67	87,50	84,70	68,40	66,09	39,29	33,33	77,78	55,56	100	47,87	64,93	82,98	72,93	87,77
17	Badan Standardisasi Nasional		33,33	77,78	66,67	33,33		66,67	30	45,00	51,25		62,50	47,50	49,52	61,69		33,33	55,56	88,89	66,67		48,96	52,7	62,52	53,23
18	Kementerian Keuangan		66,67			83,33		100			90,00		12,50			74,23		33,33			50,00		53,13			74,39
19	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	83,33	33,33	55,56	77,78	100	93,75	66,67	75,00	65,00	85,00	25,33	75,00	71,60	76,62	69,06	35,71	33,33	100	100	100	59,53	52,08	75,55	79,85	88,51
20	Kementerian Dalam Negeri		55,56	88,89	100	75,00		91,67	100	100	100		87,50	91,50	44,72	53,09		77,78	88,89	100	100		78,13	92,31	86,18	82,02
21	Kementerian Komunikasi dan Informatika		55,56	100	66,67	100		83,33	81,70	21,67	71,25		100	84,90	9,87	55,21		33,33	100	33,33	100		68,06	91,65	32,88	81,61
22	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		55,56	11,10	100	100		83,33	83,30	90	85,00		100	72,10	85,09	74,15		100	100	22,22	100		84,72	66,65	74,33	89,79
23	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	33,33	22,22	44,44	55,56	100	100	83,33	65,00	65,00	78,75	33,33	75,00	74,80	73,33	63,43	46,43	77,78	33,33	33,33	83,33	53,27	64,58	54,4	56,8	81,38
24	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	41,67	66,67	44,44	88,89	58,33	93,75	100	75,00	73,33	56,25	21,33	87,50	68,60	80,24	46,49	25,00	77,78	66,67	77,78	50,00	45,44	82,99	63,67	80,06	52,77
25	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	33,33	100	33,33	88,89	75,00	93,75	41,67	36,70	26,67	90,00	61,33	37,50	42,60	48,33	69,48	35,71	100	100	44,44	100	56,03	69,79	53,15	52,08	83,62
26	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	66,67	88,89	100	88,89	100	87,50	100	100	86,67	90,00	26,67	75,00	68,80	63,90	73,69	32,14	66,67	77,78	88,89	50,00	53,25	82,64	86,64	82,09	78,42
27	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	66,67	66,67	77,78	88,89	41,67	93,75	83,33	48,30	95,00	65,00	98,67	75,00	52,20	64,12	66,13	42,86	33,33	33,33	66,67	100	75,49	64,58	52,91	78,67	68,20
28	Kementerian Kesehatan	75	88,89	100	66,67	16,67	87,50	100	100	75,00	100	46,67	100	85,90	43,51	58,10	46,43	100	77,78	100	25,00	63,9	97,22	90,92	71,29	49,94
29	Kementerian Perdagangan		66,67	66,67	66,67	58,33		83,33	95,00	81,67	65,00		62,50	80,60	56,99	62,00		100	100	88,89	83,33		78,13	85,56	73,55	67,17
30	Kementerian Sosial		77,78	77,78	100	100		75,00	83,30	90	85,00		100	85,40	88,10	76,85		88,89	100	100	25,00		85,42	86,62	94,53	71,71
31	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		77,78	66,67	66,67	100		83,33	91,70	81,67	80,00		75,00	82,50	89,12	69,21		88,89	66,67	66,67	83,33		81,25	76,87	76,03	83,14

No	Kementerian/ Lembaga non Kementerian	Variabel pada Dimensi Proses																				Skor Dimensi Proses				
		Indeks Pengumpulan Data dan Informasi					Indeks Perencanaan					Indeks Pelaksanaan					Indeks Monitoring & Evaluasi									
		2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024
32	Kementerian Luar Negeri	83,33	77,78	100	100	100	100	91,67	100	100	52,50	20	100	74,10	92,76	35,73	39,29	33,33	33,33	33,33	50,00	60,66	75,69	76,87	81,52	59,56
33	Arsip Nasional	41,67	33,33	55,56	77,78	8,33	93,75	83,33	83,30	76,67	65,00	26,67	75,00	78,40	43,56	52,66	28,57	77,78	66,67	66,67	16,67	47,67	67,36	71	66,17	35,67
34	Badan Pemeriksa Keuangan		100	33,33	44,44	33,33		100	13,30	21,67	27,50		100	12,50	39,13	48,73		100	22,22	55,56	25,00		100	20,36	40,2	33,64
35	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	58,33	77,78	77,78	77,78	33,33	87,50	91,67	86,70	76,67	50,00	94,67	87,50	77,60	65,00	51,39	35,71	66,67	33,33	77,78	25,00	69,05	80,9	68,85	74,31	39,93
36	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	75	55,56	66,67	100	75,00	87,50	91,67	60	70	90,00	20	75,00	73,80	51,75	44,33	39,29	88,89	100	100	91,67	55,45	77,78	75,11	80,44	75,25
37	Kementerian Investasi/BKPM	25	33,33		100	33,33	87,50	83,33		63,33	76,25	30,67	87,50		76,25	58,72	28,57	33,33		100	100	42,94	59,38		84,89	67,08
38	Kepolisian Republik Indonesia		44,44	66,67	100	41,67		100	91,70	86,67	90,00		37,50	76,40	42,41	30,32		100	55,56	100	100		70,49	72,57	82,27	65,50
39	Kementerian Sekretariat Negara		11,11	100	55,56	25,00		50	85,00	58,33	55,00		37,50	63,10	33,61	45,60		33,33	33,33	33,33	75,00		32,99	70,36	45,21	50,15
40	Kementerian Pemuda dan Olahraga		44,44	77,78	66,67	58,33		83,33	53,30	61,67	38,75		87,50	77,50	65,16	42,13		55,56	44,44	77,78	75,00		67,71	63,26	67,82	53,55
41	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	83,33	77,78	100	77,78	100	100	100	100	100	100	46,67	100	63,80	65,42	71,41	53,57	100	100	100	100	70,89	94,44	90,96	85,8	92,85
42	Kementerian Sekretariat Negara	50	66,67	77,78	100	58,33	87,50	100	95,00	100	95,00	64,00	100	93,80	100	76,16	35,71	100	100	100	66,67	59,3	91,67	91,64	100	74,04
43	Kementerian Perhubungan	66,67	100	55,56	77,78	83,33	93,75	100	90	90	77,50	58,67	75,00	39,70	51,67	69,29	46,43	55,56	77,78	100	100	66,38	82,64	65,75	79,86	82,53
44	Kejaksaan Agung		55,56	44,44	88,89	16,67		100	53,30	73,33	47,50		100	32,10	40,17	44,48		88,89	33,33	88,89	33,33		86,11	40,79	72,82	35,50
45	Badan Siber dan Sandi Negara		11,11	33,33	55,56	83,33		75,00	70	45,00	87,50		62,50	23,60	27,41	65,63		33,33	33,33	33,33	100		45,49	40,07	40,32	84,11
46	Badan Narkotika Nasional	91,67	33,33	66,67	88,89	50,00	12,50	91,67	76,70	76,67	81,25	8,00	62,50	72,80	54,60	55,59	17,86	100	66,67	66,67	75,00	32,51	71,88	70,7	71,71	65,46
47	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan	66,67	22,22	66,67	55,56	16,67	87,50	66,67	83,30	73,33	46,25	21,33	87,50	84,90	56,29	46,57	57,14	33,33	66,67	44,44	25,00	58,16	52,43	75,39	57,41	33,62
48	Lembaga Administrasi Negara	83,33	11,11	11,11	66,67	66,67	93,75	66,67	91,70	70	82,50	17,33	75,00	44,90	80,24	73,73	25,00	33,33	77,78	88,89	100	54,85	46,53	56,37	76,45	80,72
49	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	75	22,22	0	0	16,67	100	50	5,00	51,67	77,50	28,00	12,50	23,70	23,88	46,18	10,71	55,56	88,89	33,33	50,00	53,43	35,07	29,4	27,22	47,59

No	Kementerian/ Lembaga non Kementerian	Variabel pada Dimensi Proses																				Skor Dimensi Proses				
		Indeks Pengumpulan Data dan Informasi					Indeks Perencanaan					Indeks Pelaksanaan					Indeks Monitoring & Evaluasi									
		2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024
50	Komisi Pemberantasan Korupsi		33,33	100	77,78	91,67		75,00	91,70	56,67	90,00		100	83,70	37,69	60,69		44,44	88,89	100	100		63,19	91,07	68,03	85,59
51	Kementerian Hukum dan HAM		77,78	33,33	66,67	58,33		91,67	75,00	81,67	46,25		62,50	37,20	56,45	51,20		33,33	66,67	66,67	100		66,32	53,04	67,86	63,94
52	Komisi Pemilihan Umum		33,33	44,44	11,11	91,67		83,33	75,00	56,67	100		62,50	58,70	61,22	65,28		33,33	33,33	55,56	66,67		53,13	52,87	46,14	80,90
53	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	50	55,56	55,56	66,67	100	93,75	91,67	85,00	45,00	90,00	26,67	87,50	43,40	49,84	68,09	35,71	55,56	11,11	44,44	50,00	51,53	72,57	48,76	51,49	77,02
54	Badan Pengawas Tenaga Nuklir		0					58,33					25,00					33,33					29,17			
55	Sekretariat Wakil Presiden		22,22					41,67					75,00					55,56					48,61			
56	Dewan Pertimbangan Presiden	75	100				75,00	83,33				66,67	62,50				17,86	33,33				58,63	69,79			
57	Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	66,67	11,11	33,33	11,11	66,67	93,75	91,67	95,00	46,67	68,75	18,67	75,00	55,40	18,62	45,95	21,43	88,89	100	100	100	50,13	66,67	70,94	44,1	70,34
58	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme		11,11	77,78	66,67	100		83,33	73,30	85,00	95,00		62,50	59,10	83,88	75,35		77,78	55,56	100	100		58,68	66,45	83,89	92,59
59	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	25	100	100	77,78	75,00	81,25	100	91,70	46,67	63,75	10,67	62,50	65,90	43,26	44,83	35,71	77,78	88,89	22,22	58,33	38,16	85,07	86,61	47,48	60,48
60	Kementerian Pertahanan	75	22,22	55,56	0	66,67	93,75	75,00	86,70	25,00	100	30,67	75,00	65,50	49,19	40,28	46,43	100	100	66,67	100	61,46	68,06	76,93	35,21	76,74
61	Badan Pusat Statistik		0	0	66,67	0,00		66,67	46,70	60	35,00		12,50	28,20	16,80	33,22		55,56	66,67	22,22	50,00		33,68	35,37	41,42	29,55
62	Badan Intelijen Negara		88,89	100	100	58,33		75,00	100	90	70,00		75,00	85,30	72,30	61,11		100	100	100	83,33		84,72	96,32	90,57	68,19
63	Lembaga Ketahanan Nasional	25	33,33	33,33	55,56	75,00	81,25	41,67	13,30	31,67	27,50	21,33	12,50	73,20	58,20	43,98	32,14	100	66,67	33,33	33,33	39,93	46,88	46,64	44,69	44,95
64	LPP TVRI		0					0					12,50					33,33					11,46			
65	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	100					100					97,33					42,86					85,05				
66	Badan Tenaga Nuklir Nasional	41,67					68,75					16,00					46,43					43,21				
67	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	66,67					100					42,67					46,43					63,94				
68	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	41,67					100					25,33					21,43					47,11				

No	Kementerian/ Lembaga non Kementerian	Variabel pada Dimensi Proses																				Skor Dimensi Proses				
		Indeks Pengumpulan Data dan Informasi					Indeks Perencanaan					Indeks Pelaksanaan					Indeks Monitoring & Evaluasi									
		2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024
69	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia / BNP2TKI	100		55,56	33,33	33,33	87,50		100	56,67	52,50	25,33		53,90	34,48	44,41	28,57		77,78	88,89	75,00	60,35		71,8	53,34	51,31
70	Tentara Nasional Indonesia	58,33				33,33	100				5,00	92,00				9,45	42,86				25,00	73,3				18,20
71	Mahkamah Konstitusi	41,67		77,78	77,78	25,00	87,50		85,00	73,33	67,50	25,33		46,40	46,58	24,46	28,57		33,33	66,67	41,67	45,77		60,63	66,09	39,66
72	Badan Ekonomi Kreatif	41,67					75,00															37,98				0,00
73	Mahkamah Agung RI			44,44	88,89	66,67			100	73,33	80,00	6,67		51,50	58,58	41,78	28,57		77,78	33,33	33,33	0		68,42	63,53	55,45
74	Badan Keamanan Laut			22,22	66,67	33,33			53,30	45,00	55,00			35,50	39,22	32,52			66,67	33,33	50,00			44,44	46,06	42,71
75	Komisi Yudisial			66,67	55,56	83,33			63,30	55,00	66,25			48,10	66,70	61,92			33,33	66,67	83,33			52,86	60,98	73,71
76	Sekretariat Jenderal MPR RI			33,33	55,56	25,00			43,10	65,00	22,50			25,10	17,97	39,39			55,56	66,67	25,00			39,33	51,3	27,97
Nasional		**59,04**	**56,25**	**64,06**	**73,09**	**63,43**	**84,31**	**82,68**	**77,32**	**69,82**	**73,02**	**34,07**	**74,02**	**63,74**	**59,80**	**56,56**	**35,49**	**69,27**	**72,57**	**71,35**	**70,40**	**53,23**	**70,56**	**69,42**	**68,51**	**65,85**

DIMENSI PROSES - PERBANDINGAN SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2019, 2021, 2022, 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI

No.	Dinas Kominfo Provinsi	Variabel Dimensi Proses																				Skor Dimensi Input				
		Indeks Pengumpulan Data dan Informasi					Indeks Perencanaan					Indeks Pelaksanaan					Indeks Monitoring dan Evaluasi									
		2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	66,7	55,56	55,6	100	33,33	66,7	100	95	90	95,00	24,3	87,5	69,2	66,24	58,41	27,8	77,78	100	100	0	46,4	80,21	79,94	89,06	46,69
2	Bali	88,9	44,44	66,7	88,89	83,33	66,7	83,33	68,4	60	70,00	90,5	87,5	58,2	79,14	72,07	62,5	77,78	88,9	66,67	58,33	77,1	73,26	70,53	73,67	70,93
3	Banten	44,4	33,33	77,8	55,56	91,67	55,6	83,33	65	55	93,75	86,5	87,5	51,7	62,55	68,29	50	88,89	100	55,56	100	59,1	73,26	73,63	57,17	88,43
4	Bengkulu	22,2	55,56	11,1	100	33,33	33,3	75	48,3	81,67	27,50	89,2	50	11,6	81,97	36,15	33,3	100	55,6	77,78	100	44,5	70,14	31,64	85,35	49,25
5	D.I. Yogyakarta	66,7	66,67	77,8	55,56	50,00	77,8	91,67	73,3	73,33	100	40,5	75	67,4	62,77	53,40	33,3	44,44	66,7	77,78	50,00	54,6	69,44	71,29	67,36	63,35
6	DKI Jakarta	77,8	66,67	100	100	91,67	77,8	100	85	80	100	62,2	100	68,2	74,89	75,62	62,5	66,67	77,8	22,22	100	70,1	83,33	82,74	69,28	91,82
7	Gorontalo	22,2		33,3	0,00	8,33	44,4	50	46,7	43,33	46,25	48,6	50	68,9	59,99	40,66	27,8	77,78	33,3	66,67	41,67	35,8	44,44	45,55	42,5	34,23
8	Jambi	33,3	44,44	55,6	55,56	58,33	77,8	100	55	70	82,50	50	12,5	20,8	52,50	68,09	33,3	77,78	100	55,56	66,67	48,6	58,68	57,85	58,4	68,90
9	Jawa Barat	88,9	88,89	55,6	100	83,33	77,8	100	100	80	71,25	28,4	100	86,9	90,46	55,56	62,5	100	33,3	100	100	64,4	97,22	68,94	92,61	77,53
10	Jawa Tengah	77,8	77,78	77,8	66,67	83,33	77,8	100	85	85	78,75	73	100	79,4	84,27	53,13	33,3	100	88,9	88,89	75,00	65,5	94,44	82,76	81,21	72,55
11	Jawa Timur	22,2	66,67	88,9	77,78	100	77,8	83,33	46,7	78,33	65,00	81,1	75	53,7	78,56	73,23	29,2	33,33	66,7	88,89	100	52,6	64,58	63,97	80,89	84,56
12	Kalimantan Barat	22,2	33,33	44,4	44,44	83,33	55,6	83,33	21,7	65	95,00	67,6	75	41,6	91,17	63,73	11,1	33,33	33,3	100	100	39,1	56,25	35,75	75,15	85,52
13	Kalimantan Selatan	55,6	88,89	55,6	77,78	83,33	66,7	83,33	90	100	87,50	82,4	100	80,9	93,62	60,57	44,4	77,78	100	100	75,00	62,3	87,5	81,6	92,85	76,60
14	Kalimantan Tengah	33,3	11,11	44,4	44,44	25,00	44,4	41,67	58,3	81,67	40,00	62,2	50	57,4	65,88	32,68	22,2	77,78	22,2	55,56	25,00	40,5	45,14	45,59	61,89	30,67
15	Kalimantan Timur	100	22,22	33,3	77,78	66,67	66,7	25	40	60	90,00	47,3	50	47,4	41,41	65,28	45,8	77,78	100	66,67	66,67	64,9	43,75	55,19	61,46	72,15
16	Kalimantan Utara	22,2	33,33	33,3	44,44	33,33	44,4	100	95	90	70,00	32,4	87,5	48,4	55,12	49,07	11,1	33,33	33,3	77,78	66,67	27,6	63,54	52,52	66,84	54,77
17	Kep. Bangka Belitung	44,4	0	77,8	55,56	91,67	33,3	83,33	86,7	68,33	72,50	67,6	87,5	66	86,49	29,71	50	33,33	55,6	88,89	75,00	48,8	51,04	71,51	74,82	67,22
18	Kep. Riau	22,2	44,44	33,3	22,22	66,67	66,7	75	58,3	53,33	70,00	60,8	87,5	61,3	46,10	54,44	50	66,67	88,9	66,67	50,00	49,9	68,4	60,46	47,08	60,28

No.	Dinas Kominfo Provinsi	Variabel Dimensi Proses																				Skor Dimensi Input				
		Indeks Pengumpulan Data dan Informasi					Indeks Perencanaan					Indeks Pelaksanaan					Indeks Monitoring dan Evaluasi									
		2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024
19	Lampung	66,7	100	77,8	55,56	41,67	66,7	100	83,3	73,33	72,50	8,1	62,5	91,1	68,30	41,44	50	33,33	100	33,33	50,00	47,9	73,96	88,04	57,63	51,40
20	Maluku	22,2	0	55,6	55,56	75,00	77,8	100	50	81,67	100	6,8	25	40,9	59,63	46,99	0	55,56	66,7	33,33	58,33	26,7	45,14	53,28	57,55	70,08
21	Maluku Utara	0	33,33	0	0,00	25,00	55,6	50	13,3	13,33	50,00	54,1	62,5	8,2	3,28	36,77	0	33,33	0	0	25,00	27,4	44,79	5,39	4,15	34,19
22	Nusa Tenggara Barat	66,7	66,67	100	77,78	25,00	77,8	100	73,3	63,33	43,75	67,6	75	59,7	68,98	52,78	16,7	88,89	66,7	66,67	50,00	57,2	82,64	74,93	69,19	42,88
23	Nusa Tenggara Timur	77,8	44,44	88,9	33,33	66,67	77,8	91,67	95	65	100	62,2	75	70,9	74,82	49,38	33,3	100	77,8	44,44	50,00	62,8	77,78	83,14	54,4	66,51
24	Papua		33,33	77,8	22,22	100		66,67	81,7	31,67	85,00		62,5	73,6	21,61	28,63		33,33	77,8	0	25,00		48,96	77,71	18,87	59,66
25	Papua Barat		22,22	11,1	11,11	8,33		58,33	5	5	36,25		62,5	11,3	36,15	17,71		33,33	0	0	0,00		44,1	6,85	13,07	15,57
26	Riau	0	33,33	55,6	55,56	66,67	44,4	91,67	91,7	78,33	100	0	62,5	63,9	63,45	64,04	12,5	100	100	100	100	14,2	71,88	77,78	74,34	82,68
27	Sulawesi Barat		0	22,2	22,22	25,00		0	30	56,67	52,50		12,5	27	67,74	35,80		33,33	66,7	44,44	25,00		11,46	36,48	47,77	34,58
28	Sulawesi Selatan	100	100	55,6	33,33	100	66,7	100	83,3	56,67	63,75	47,3	75	66,7	63,19	45,68	50	55,56	55,6	33,33	83,33	66	82,64	65,29	46,63	73,19
29	Sulawesi Tengah		22,22	100	100	16,67		100	78,3	68,33	65,00		75	80,3	99,14	34,84		55,56	100	100	25,00		63,19	89,65	91,87	35,38
30	Sulawesi Tenggara	0	22,22	22,2	22,22	8,33	44,4	83,33	53,3	53,33	31,25	24,3	12,5	22,4	37,62	29,59	33,3	33,33	33,3	33,33	41,67	25,5	37,85	32,81	36,63	27,71
31	Sulawesi Utara	11,1	33,33	88,9	88,89	50,00	33,3	83,33	83,3	51,67	83,75	9,5	62,5	76,4	77,70	58,76	33,3	33,33	100	33,33	33,33	21,8	53,13	87,15	62,9	56,46
32	Sumatera Barat	44,4	33,33	33,3	77,78	50,00	66,7	66,67	51,7	73,33	70,00	25,7	87,5	57,4	75,24	70,14	27,8	33,33	22,2	100	50,00	41,1	55,21	41,16	81,59	60,03
33	Sumatera Selatan	55,6	44,44	33,3	22,22	83,33	55,6	100	38,3	55	57,50	55,4	100	44,9	14,55	52,93	40,3	44,44	44,4	55,56	83,33	51,7	72,22	40,25	36,83	69,27
34	Sumatera Utara	66,7	77,78	88,9	88,89	91,67	77,8	100	86,7	86,67	100	98,6	87,5	71,6	65,39	73,07	40,3	100	88,9	88,89	100	70,8	91,32	84,01	82,46	91,18
Nasional		**47,41**	**44,12**	**56,87**	**56,86**	**58,82**	**61,86**	**80,88**	**65,19**	**65,54**	**72,54**	**51,81**	**69,49**	**56,04**	**63,82**	**51,43**	**34,25**	**62,09**	**66,02**	**62,42**	**60,29**	**48,83**	**64,14**	**61,04**	**62,16**	**60,77**

DIMENSI OUTPUT - PERBANDINGAN SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 MASYARAKAT

No.	Provinsi	Variabel pada Dimensi Output															Skor Dimensi Output				
		Agenda Publik/Penerimaan Informasi					Penilaian Publik Terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik					Penilaian Publik Terhadap Akses dan Kualitas Informasi									
		2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	20
1	Aceh	55,5	87,1	66,67	71,83	64,48	76,8	72,2	79,17	76,39	56,19	-	-	77,55	88,98	82,68	66,15	79,65	74,46	79,07	67
2	Bali	76,4	70,7	60,28	53,54	65,33	75,8	78,7	84,81	71,76	84,68	-	-	85,9	86,33	91,25	76,1	74,7	77	70,54	80
3	Banten		50,6	48,84	54,57	49,80		44,2	77,58	76,09	74,52	-	-	75,39	87,05	83,18		47,4	67,27	72,57	69
4	Bengkulu		61,4	61,33	71,50	49,54		60	69,44	75,87	73,35	-	-	74,5	88,21	89,00		60,7	68,43	78,53	70
5	DI. Yogyakarta	68,7	91,2	41,67	60,06	59,61	75	54,2	79,28	77,68	76,53	-	-	74,74	88,11	85,25	71,85	72,7	65,23	75,28	73
6	DKI Jakarta	66,3	52,5	67,65	60,27	64,97	65,5	11,8	75,08	79,67	78,91	-	-	75,06	89,33	88,58	65,9	32,15	72,6	76,42	77
7	Gorontalo	71,6	62,2	75,56	58,59	56,11	75	93,3	87,04	73,54	73,38	-	-	88,33	85,42	88,50	73,3	77,75	83,64	72,52	72
8	Jambi		64,1	48,78	52,56	52,75		55	74,05	73,58	75,89	-	-	75,1	87,12	87,43		59,55	65,98	71,09	72
9	Jawa Barat	55,2	67,5	36,15	61,92	64,94	69,7	55,6	72,8	75,53	77,63	-	-	70,1	87,29	88,75	62,45	61,55	59,68	74,91	77
10	Jawa Tengah	72,2	78,8	49,78	68,60	55,14	78,6	82,4	77,07	79,14	78,86	-	-	74,78	88,61	87,61	75,4	80,6	67,21	78,78	73
11	Jawa Timur	70,6	64,8	55,67	75,82	57,85	76,8	49,2	77,16	77,83	76,23	-	-	76,14	88,9	87,67	73,7	57	69,66	80,85	73
12	Kalimantan Barat	58,6	89,4	70	57,28	44,33	70	95	77,36	77,05	78,57	-	-	77,29	87,12	87,35	64,45	92,2	74,88	73,82	70
13	Kalimantan Selatan	60,7	86,8	49,17	45,56	53,96	71	67,5	68,26	73,93	70,05	-	-	66,15	85,41	82,08	65,85	77,15	61,19	68,3	68
14	Kalimantan Tengah		61,5	81,25	47,18	57,92		26,7	76,39	74,72	74,70	-	-	75,91	86,04	88,44		44,1	77,85	69,31	73
15	Kalimantan Timur	55,1	70,7	37,25	68,53	50,97	69,3	25,5	74,62	74,84	72,96	-	-	73,16	86,8	85,92	62,2	48,1	61,68	76,72	69
16	Kalimantan Utara		46,4	66,67	40,61	51,56		62,5	82,72	75,42	76,79	-	-	81,02	89,02	87,50		54,45	76,8	68,35	71
17	Kep. Bangka Belitung	74,9	78,4	50	74,38	69,68	68,8	50	74,4	76,28	79,76	-	-	74,7	87,75	87,73	71,85	64,2	66,37	79,47	79
18	Kepulauan Riau		70,3	66,67	41,92	59,09		50	73,21	73,99	80,36	-	-	70,83	87,5	85,89		60,15	70,24	67,8	75

No.	Provinsi	Variabel pada Dimensi Output															Skor Dimensi Output				
		Agenda Publik/Penerimaan Informasi					Penilaian Publik Terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik					Penilaian Publik Terhadap Akses dan Kualitas Informasi									
		2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	20
19	Lampung	68,5	55,3	21,46	55,68	60,59	71,9	39,7	74,85	73,65	73,51	-	-	74,66	86,79	86,53	70,2	47,5	56,99	72,04	73
20	Maluku	82,7	57,5	48,48	33,33	57,35	76,3	36,4	72,6	74,96	74,45	-	-	74,53	87,69	86,53	79,5	46,95	65,2	65,33	72
21	Maluku Utara	62	49,3	53,85	42,73	58,17	65,3	7,7	77,35	76,81	77,14	-	-	69,39	85,23	86,50	63,65	28,5	66,86	68,25	73
22	Nusa Tenggara Barat	71,2	78,2	43,59	81,10	49,68	74,7	38,5	75	76,67	81,55	-	-	74,04	88,87	87,86	72,95	58,35	64,21	82,21	73
23	Nusa Tenggara Timur	81,4	91,3	65,52	68,97	66,70	81	58,6	72,8	79,45	72,96	-	-	75,86	89,13	84,76	81,2	74,95	71,39	79,18	74
24	Papua		78,5	33,33	25,97	41,40		42,9	69,58	76,04	71,43	-	-	69,25	86,23	86,82		60,7	57,39	62,75	66
25	Papua Barat		79,2	33,33	42,85	67,02		18,2	71,72	76,04	63,89	-	-	79,92	87,27	86,79		48,7	61,66	68,72	72
26	Riau		74,7	48,43	59,97	55,00		48,1	72,06	75,08	72,40	-	-	69,65	87,72	85,92		61,4	63,38	74,26	71
27	Sulawesi Barat	53,6	64,5	37,25	37,03	39,84	66,5	29,4	69,28	76,04	76,43	-	-	69,12	86,93	90,00	60,05	46,95	58,55	66,67	68
28	Sulawesi Selatan	63,3	70,8	52,43	63,36	54,63	71,9	59,6	71,75	74,09	77,17	-	-	69,43	85,82	87,50	67,6	65,2	64,54	74,42	73
29	Sulawesi Tengah	64,6	72,6	40,58	44,09	68,60	74,3	43,5	72,58	75,18	72,77	-	-	70,38	87,01	86,53	69,45	58,05	61,18	68,76	75
30	Sulawesi Tenggara	82,7	71,5	33,33	35,63	68,96	77,4	66,7	76,32	79,4	71,79	-	-	73,61	89,2	85,98	80,05	69,1	61,09	68,08	75
31	Sulawesi Utara	74	86	35,71	57,27	50,14	73,2	50	71,13	77,28	76,05	-	-	71,95	89,2	87,32	73,6	68	59,6	74,59	71
32	Sumatera Barat	62,7	74	65,5	68,99	63,44	70,3	57,9	76,36	76,12	75,00	-	-	77,7	85,36	87,08	66,5	65,95	73,19	76,82	75
33	Sumatera Selatan	69	62,9	41,5	57,58	64,91	73,2	44,1	67,57	76,56	76,92	-	-	67,18	85,41	88,54	71,1	53,5	58,75	73,18	76
34	Sumatera Utara	50,7	74,9	40,31	61,84	56,46	68	59,5	71,02	70,67	72,41	-	-	71,72	84,37	86,30	59,35	67,2	61,02	72,29	71
Nasional		**66,89**	**70,46**	**50,82**	**55,92**	**55,92**	**57,38**	**72,65**	**51,02**	**74,78**	**74,86**	**-**	**-**	**74,27**	**87,27**	**86,93**	**69,78**	**60,74**	**66,62**	**73,00**	**73**

DIMENSI OUTCOME - PERBANDINGAN SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 MASYARAKAT

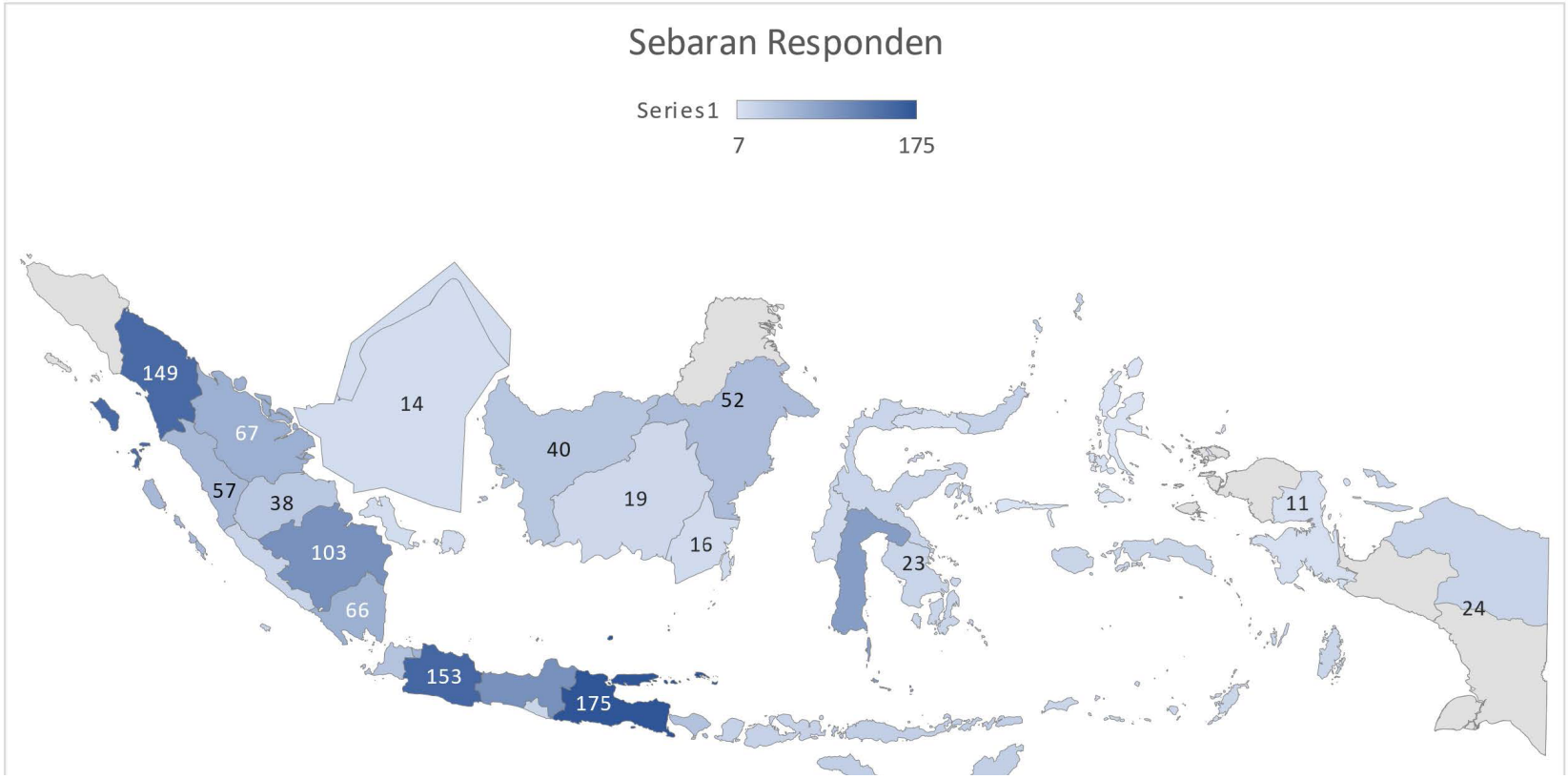
No.	Provinsi	Variabel Dimensi Outcome															Skor Dimensi Outcome				
		Indeks Pemenuhan Hak Tahu/*Rights to Know*					Indeks Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan					Indeks Pemerataan Informasi									
		2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	62,1	85,3	58,33	90,67	100,00	60,4	84,4	40,97	40,83	46,67	-	72,93	78,47	78,33	52,08	61,25	66,98	59,26	69,94	66,25
2	Bali	75	46,7	58,09	62,22	75,56	72,9	100	73,94	58,89	70,56	-	58,08	84,22	74,17	82,22	73,95	49,86	72,08	65,09	76,11
3	Banten		70,6	65,81	75,24	64,39		69,5	45,64	56,85	57,95	-	62,65	74,13	74,26	68,47		41,85	61,86	68,78	63,60
4	Bengkulu		59,1	71,2	78,26	84,78		77,7	68,5	70,11	67,71	-	70,88	70	71,38	72,14		63,26	69,9	73,25	74,88
5	DI. Yogyakarta	78,7	40,6	73,75	90,43	84,78	59,3	94,9	54,17	49,46	58,70	-	63,53	73,61	74,18	66,58	69	61,84	67,18	71,36	70,02
6	DKI Jakarta	55	69,1	63,09	45,54	79,74	53,8	64,3	78,31	59,04	71,17	-	59,43	70,16	75,29	74,90	54,4	40,41	70,52	59,96	75,27
7	Gorontalo	55,3	61,5	12,67	65	58,33	66,7	75,9	43,33	42,71	61,46	-	64,18	95,83	71,35	71,88	61	39,49	50,61	59,69	63,89
8	Jambi		71,7	52,2	27,03	76,04		56,3	50,91	52,03	55,59	-	73,88	73,68	73,82	73,85		57,99	58,93	50,96	68,49
9	Jawa Barat	54,2	56,7	56,88	72,43	87,16	60,9	75	46,02	59,54	65,69	-	67,98	70,51	74,20	75,57	57,55	51,53	57,8	68,72	76,14
10	Jawa Tengah	76,5	43	61,2	81,19	80,93	72,7	84,1	51	60,4	63,34	-	69,25	73,44	78,40	73,74	74,6	69,78	61,88	73,33	72,67
11	Jawa Timur	68,8	80,2	29,79	61,85	75,79	68,6	54,5	45,28	55,56	61,43	-	65,98	76,22	78,03	72,32	68,7	48,33	50,43	65,15	69,85
12	Kalimantan Barat	54,2	63	55	73,5	86,54	58,3	63,6	75	53,44	64,69	-	65,95	77,71	69,53	73,28	56,25	78,55	69,24	65,49	74,84
13	Kalimantan Selatan	50,7	69,4	74	81,54	82,69	66,5	49,5	55,31	51,6	59,38	-	66,4	67,29	72,28	70,70	58,6	67,93	65,53	68,47	70,92
14	Kalimantan Tengah		64,6	60	50	78,33		57,7	85,16	56,94	65,13	-	75	71,35	75,35	75,00		51,63	72,17	60,76	72,82
15	Kalimantan Timur	79,2	65,7	66,86	72,55	89,44	65	56,3	46,81	62,99	62,74	-	66,08	73,04	71,81	73,56	72,1	52,33	62,24	69,12	75,25
16	Kalimantan Utara		53,4	35,56	66	50,00		62,4	70,83	46,25	71,25	-	56,28	79,17	75,00	73,75	67,1	54,13	61,85	62,42	65,00
17	Kep. Bangka Belitung	70	63,5	63,57	87,69	78,57	64,2	36,6	54,46	75,96	66,07	-	70,98	76,79	70,19	72,32	71,4	68,13	64,94	77,95	72,32

No.	Provinsi	Variabel Dimensi Outcome															Skor Dimensi Outcome				
		Indeks Pemenuhan Hak Tahu/*Rights to Know*					Indeks Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan					Indeks Pemerataan Informasi									
		2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024	2019	2021	2022	2023	2024
18	Kepulauan Riau		58,5	60	38,57	64,29		49,8	58,93	49,11	64,29	-	75,9	72,32	73,66	64,73		52,57	63,75	53,78	64,43
19	Lampung	68,6	57,2	61,92	58,61	86,72	74,2	48,2	37,5	60,94	61,93	-	71,1	74,66	72,66	68,75	75,55	45,8	58,03	64,07	72,47
20	Maluku	79,2	44,1	20,45	48,57	82,35	71,9	57,9	72,73	41,67	63,64	-	68,48	75,76	73,21	72,73	59,2	40,83	56,31	54,48	72,91
21	Maluku Utara	54,2	43,6	29,23	70	85,71	64,2	62,5	51,92	48,96	64,29	-	65,85	72,76	71,88	70,54	73,7	62,72	51,3	63,61	73,51
22	Nusa Tenggara Barat	87,1	60,4	68,08	63,2	68,27	60,3	21,4	51,44	53	61,54	-	68,53	72,6	74,75	75,72	83,45	66,74	64,04	63,65	68,51
23	Nusa Tenggara Timur	89,5	71,8	58,97	78,62	95,83	77,4	19,1	53,45	48,28	64,17	-	72,2	72,56	80,39	65,21	83,45	66,43	61,66	69,09	75,07
24	Papua		61,1	55,24	48,33	80,77		18,8	57,14	40,63	55,73	-	70,23	70,24	74,74	73,18		72,31	60,87	54,57	69,89
25	Papua Barat		60,5	62,73	51,67	95,45		26,1	39,77	47,92	67,05	-	64,2	70,45	73,44	66,48		66,3	57,65	57,67	76,33
26	Riau		48,4	38,87	42,33	83,59		43,1	53,07	72,08	57,46	-	59,3	69,5	71,15	70,15		47,7	53,81	61,85	70,40
27	Sulawesi Barat	60	51,9	49,41	40	58,82	70,8	27,1	47,79	37,5	51,47	-	70,23	64,46	70,57	78,31	65,4	68,58	53,89	49,36	62,87
28	Sulawesi Selatan	60	53,4	32,81	65,35	77,78	61,5	30,4	43,68	51,16	63,07	-	67,08	68,21	71,00	72,30	60,75	60,96	48,23	62,5	71,05
29	Sulawesi Tengah	65,5	56,5	65,22	44,35	80,43	80,4	9,8	44,02	42,93	76,63	-	67,93	72,64	73,37	71,47	72,95	64,84	60,63	53,55	76,18
30	Sulawesi Tenggara	95,8	53	59,52	45,71	73,75	79,8	16,2	54,17	44,64	65,22	-	65,2	70,83	77,98	71,47	87,8	56,87	61,51	56,11	70,14
31	Sulawesi Utara	65	28,9	48,57	80,74	87,50	75,8	34	41,07	63,43	75,00	-	71	70,83	76,85	72,92	70,4	69,27	53,49	73,67	78,47
32	Sumatera Barat	53,8	43,8	33,16	85,45	64,77	56,3	10,2	55,92	70,91	59,21	-	62,38	75,95	69,43	72,81	55,05	54,79	55,01	75,27	65,60
33	Sumatera Selatan	81,1	29,8	45,39	40,81	72,60	66,7	32	46,81	41,41	74,03	-	66,23	64,83	76,96	73,54	73,9	45,14	52,34	53,06	73,39
34	Sumatera Utara	56,1	46,8	35,62	51,14	83,98	60	7,5	54,33	54,36	59,31	-	64,28	70,7	68,41	67,99	58,05	57,53	53,55	57,97	70,43
Nasional		**67,82**	**56,88**	**52,45**	**62,78**	**78,70**	**66,74**	**49,32**	**54,39**	**53,57**	**63,34**	**-**	**67,04**	**73,38**	**73,77**	**71,49**	**67,91**	**57,75**	**60,07**	**63,37**	**71,18**

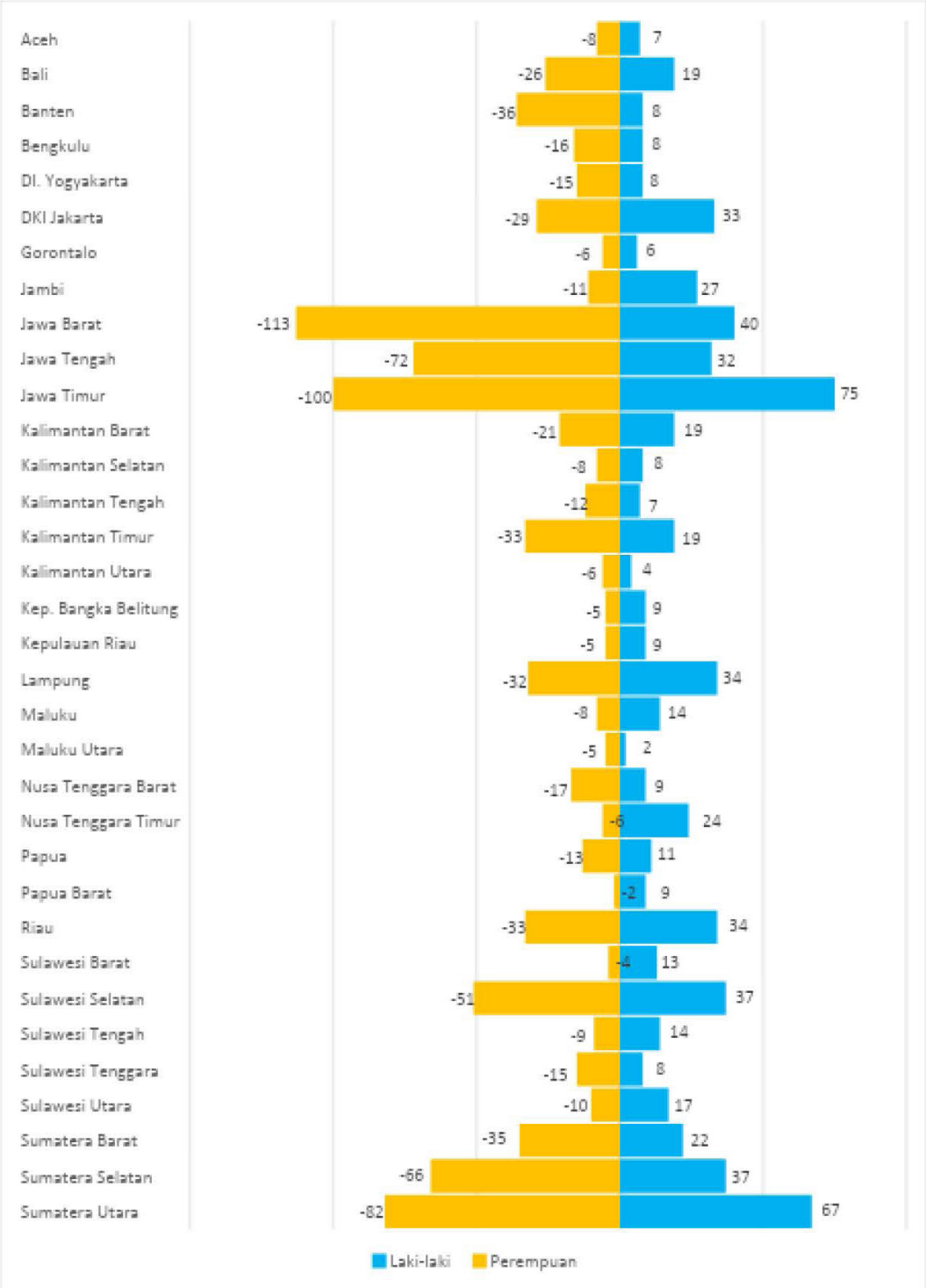
LAMPIRAN V
DATA PELENGKAP

GAMBARAN DEMOGRAFIS RESPONDEN MASYARAKAT

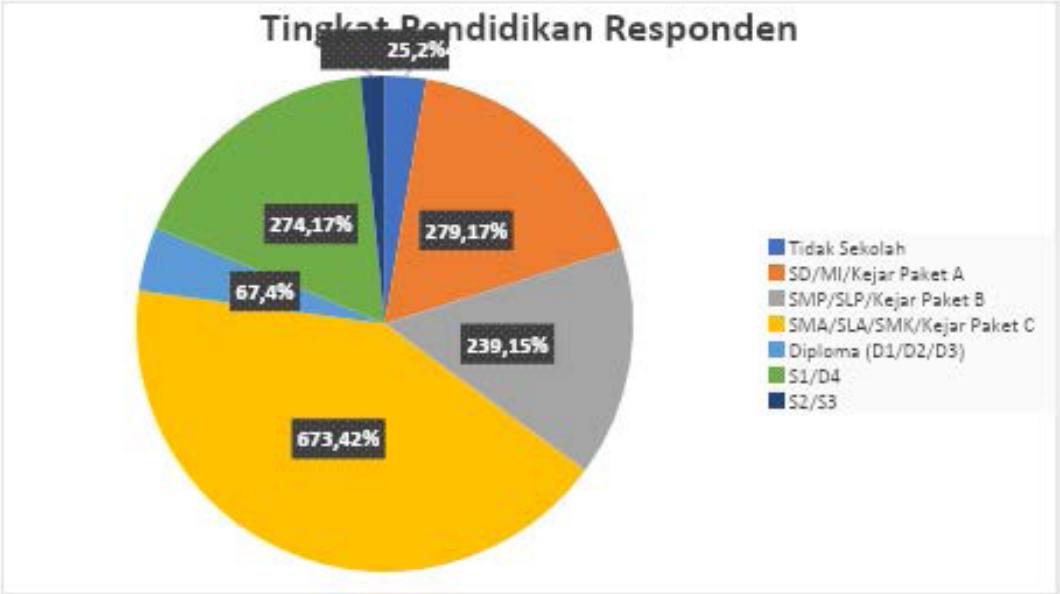
Sebaran Responden Masyarakat Tahun 2024



a. Profile Jenis Kelamin Responden Tahun 2024



b. Profile Tingkat Pendidikan Responden Tahun 2024



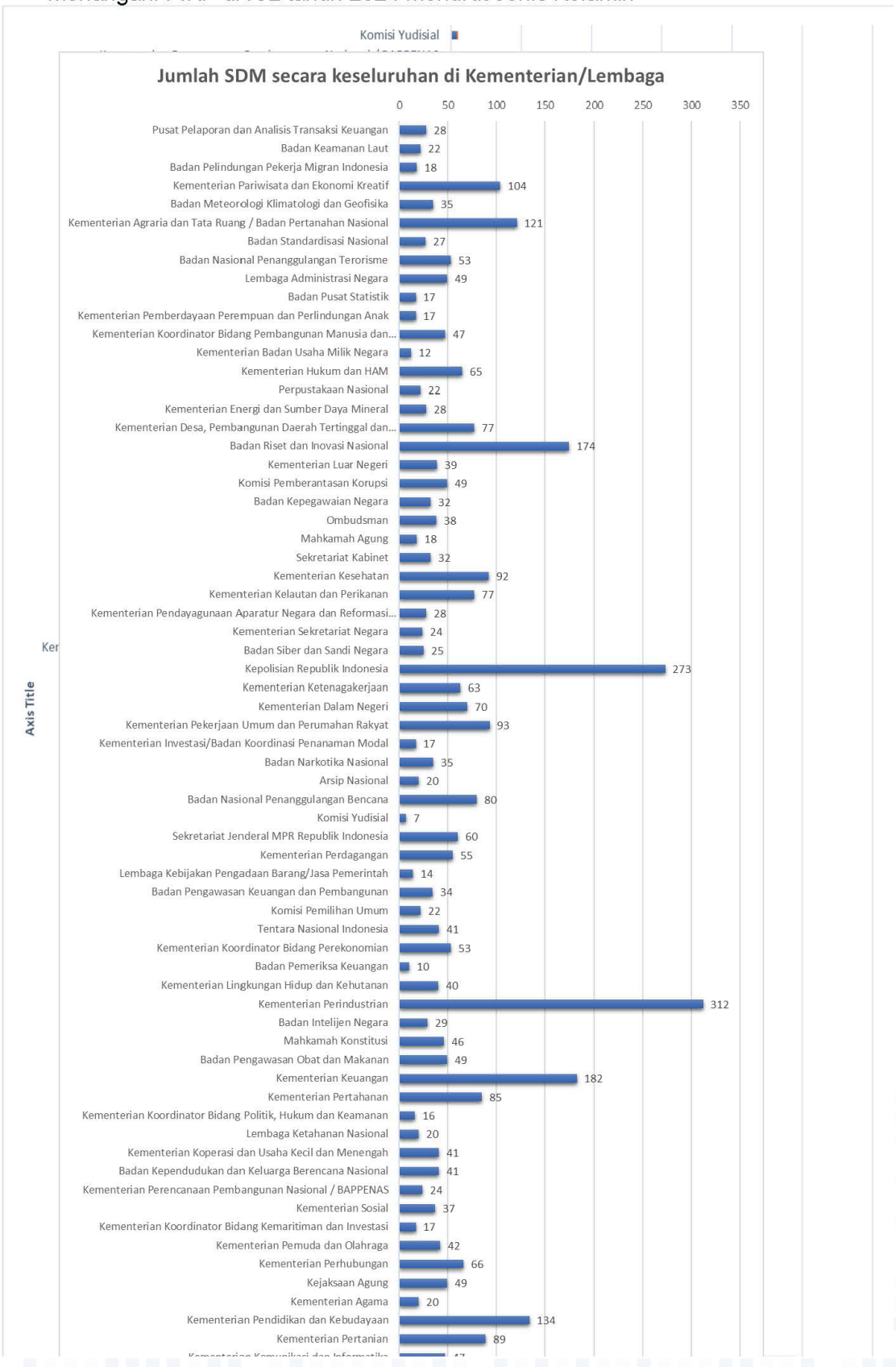
LAMPIRAN VI

SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PIKP

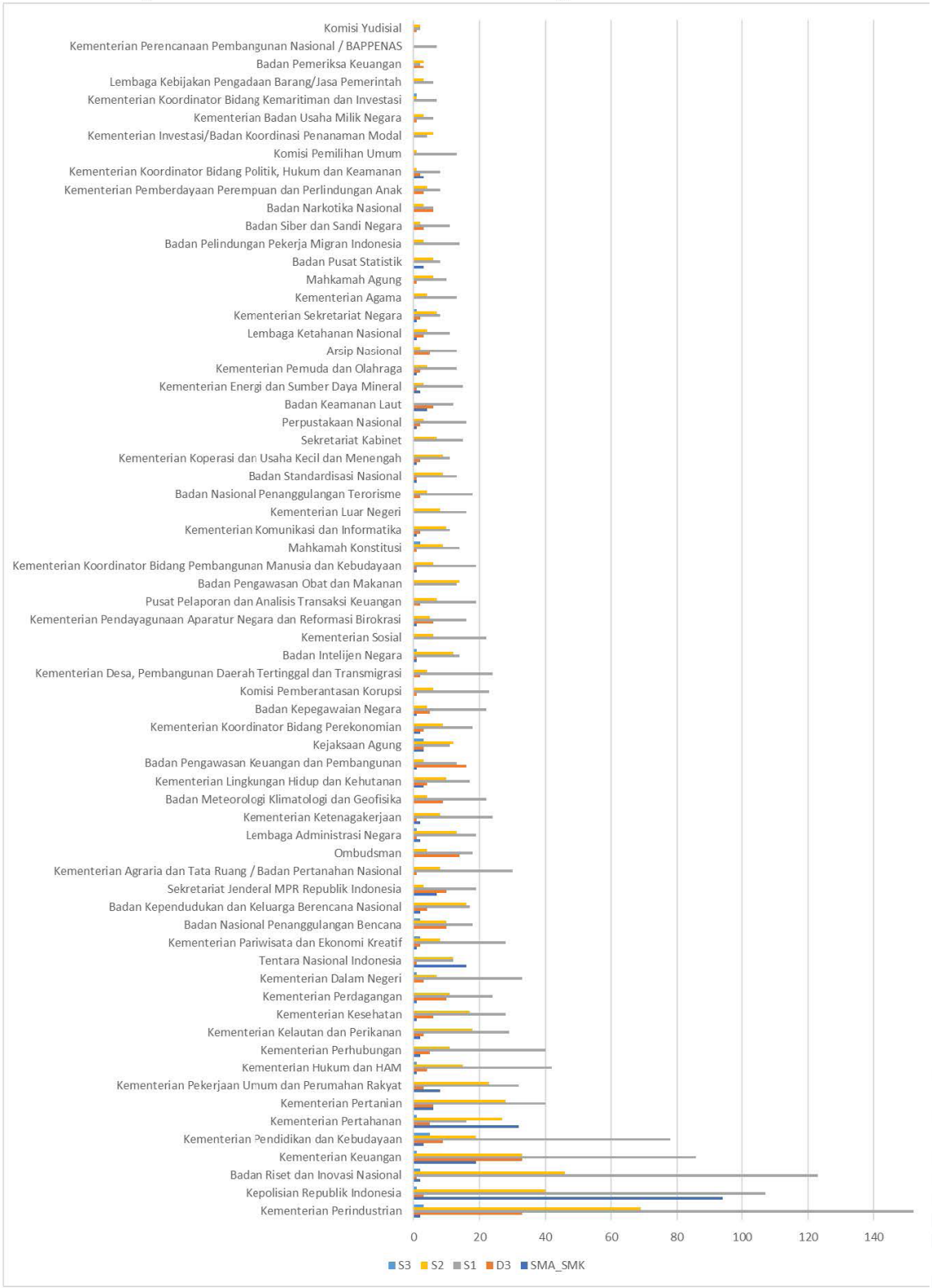
1. Sumber Daya Manusia yang di Satuan Kerja yang menangani Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Kementerian/Lembaga

a. Jumlah Sumber Daya Manusia PIKP di 67 K/L tahun 2024

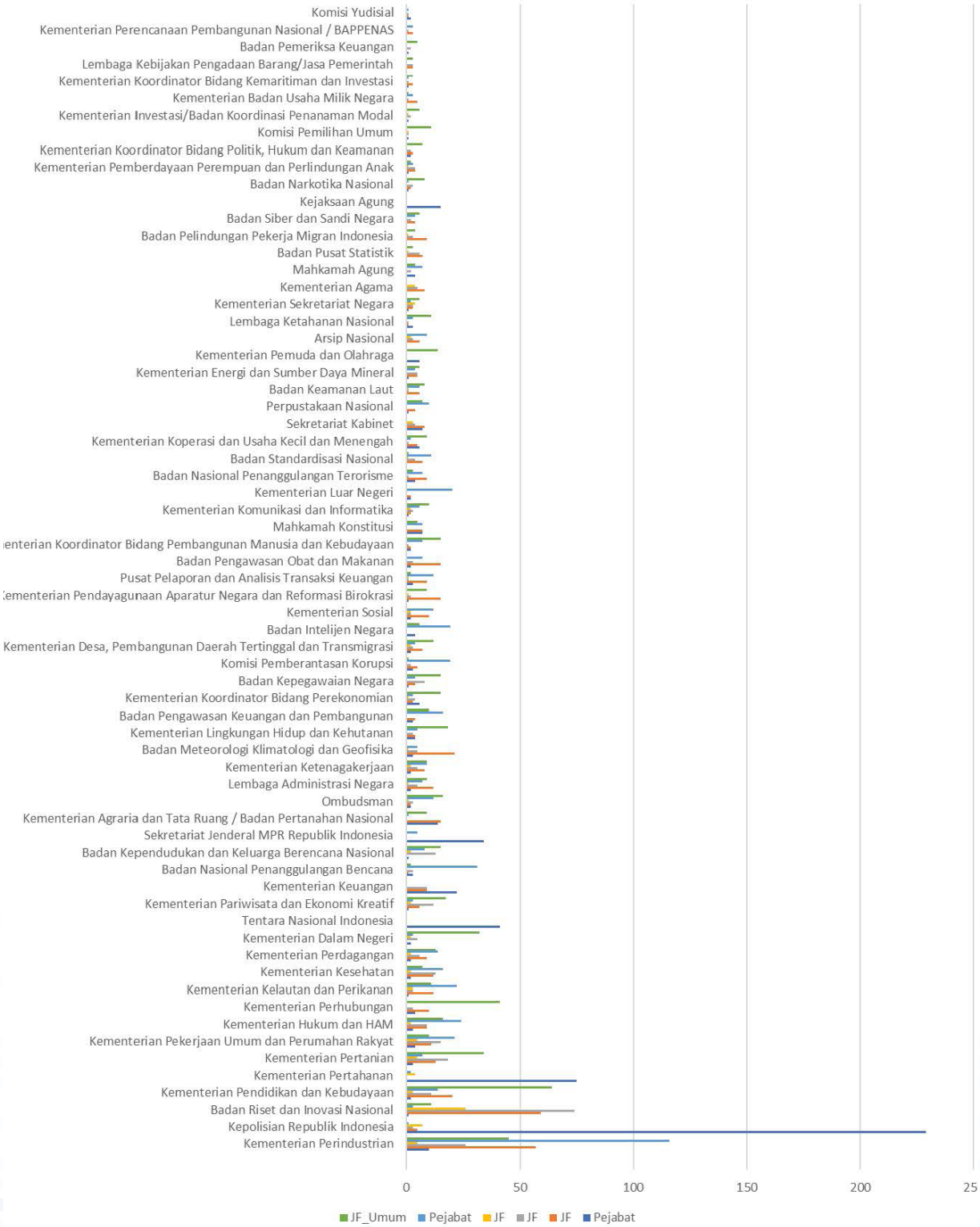
b. Profil ASN & TNI/POLRI (PNS & PPPK) di lingkungan Satuan Kerja yang menangani PIKP di K/L tahun 2024 menurut Jenis Kelamin



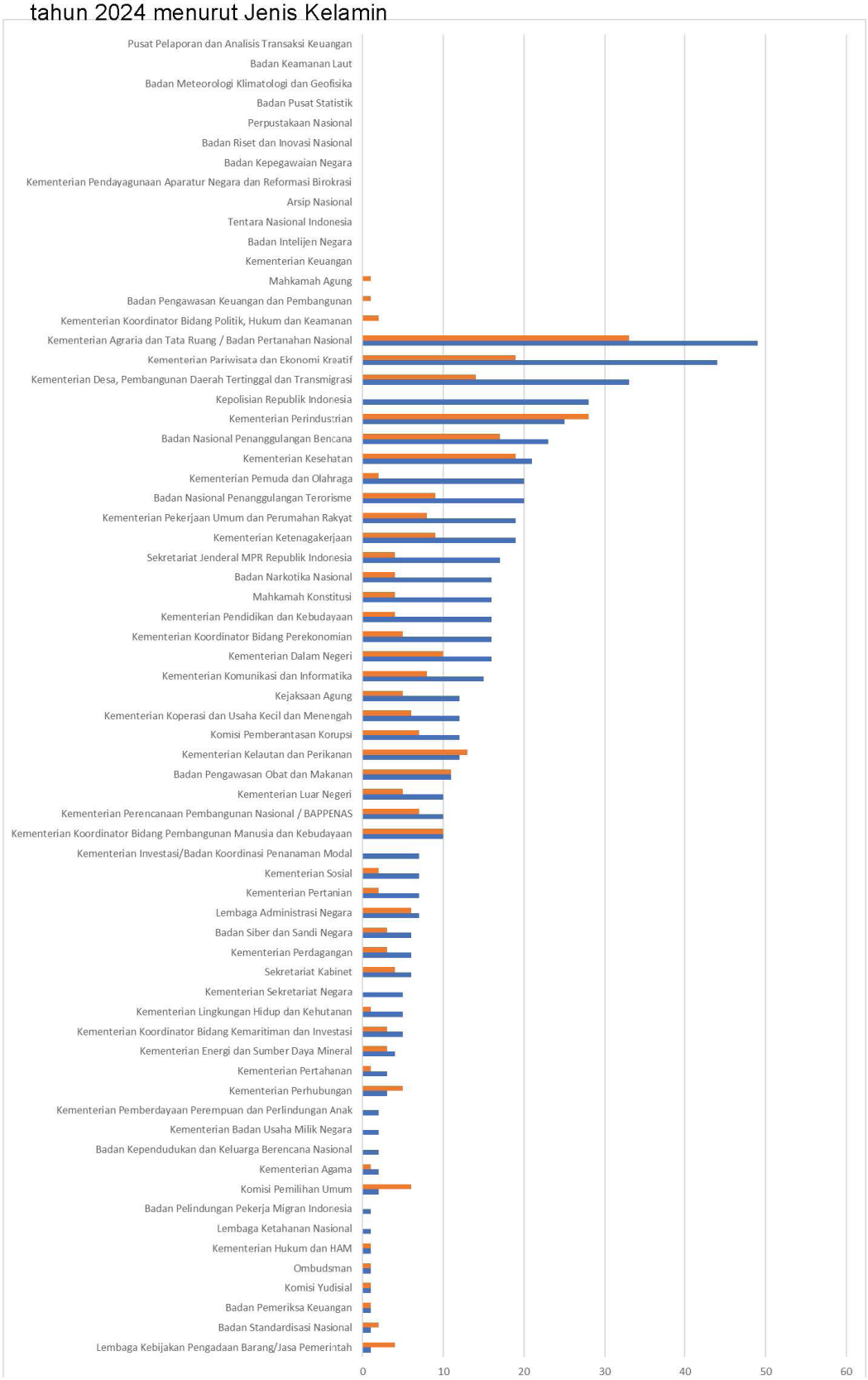
c. Profil ASN & TNI/POLRI (PNS & PPPK) di lingkungan Satuan Kerja yang menangani PIKP di K/L menurut tahun 2024 Tingkat Pendidikan



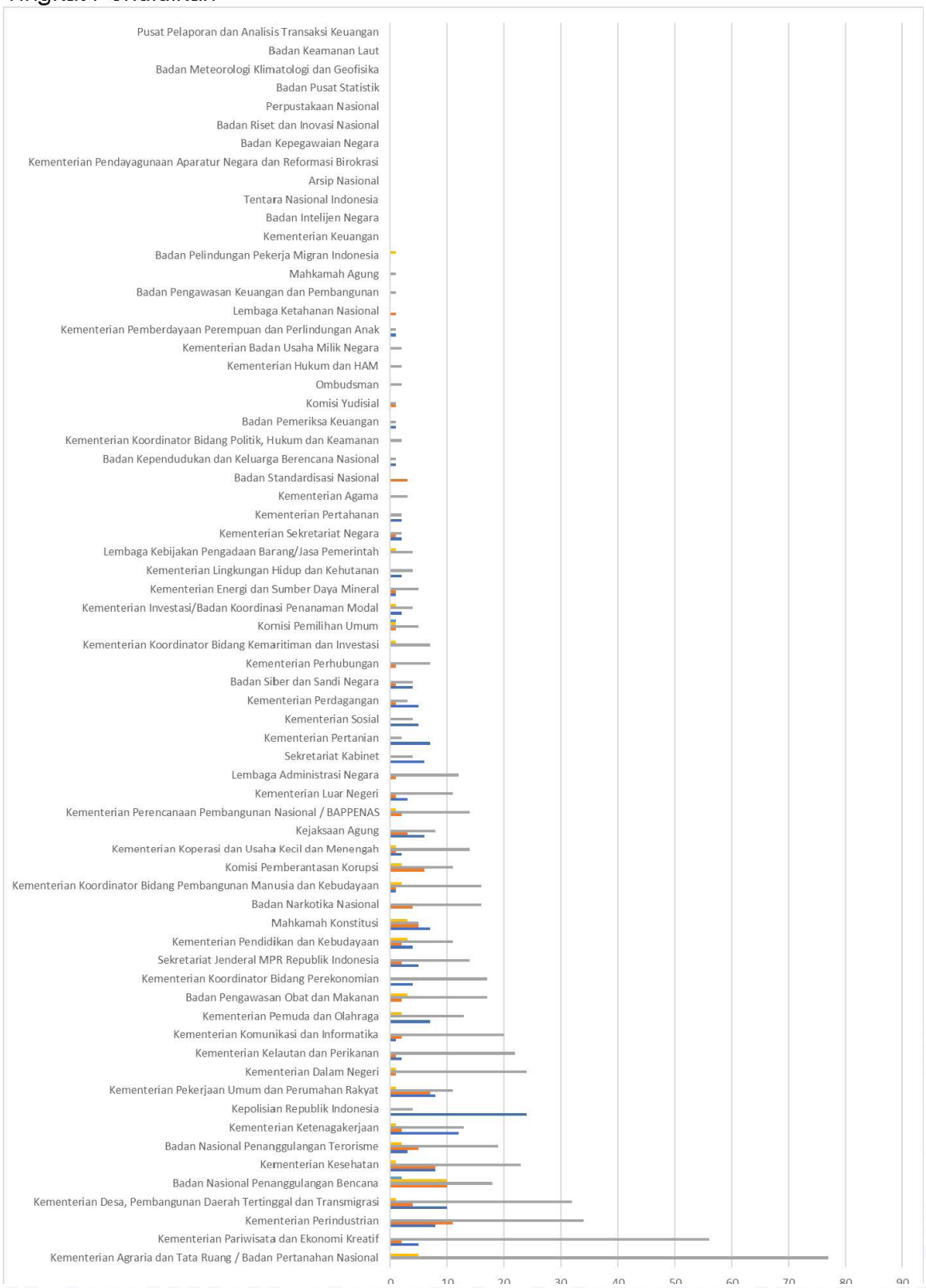
d. Profil ASN & TNI/POLRI (PNS & PPPK) di lingkungan Satuan Kerja yang menangani PIKP di K/L tahun 2024 menurut Jabatan



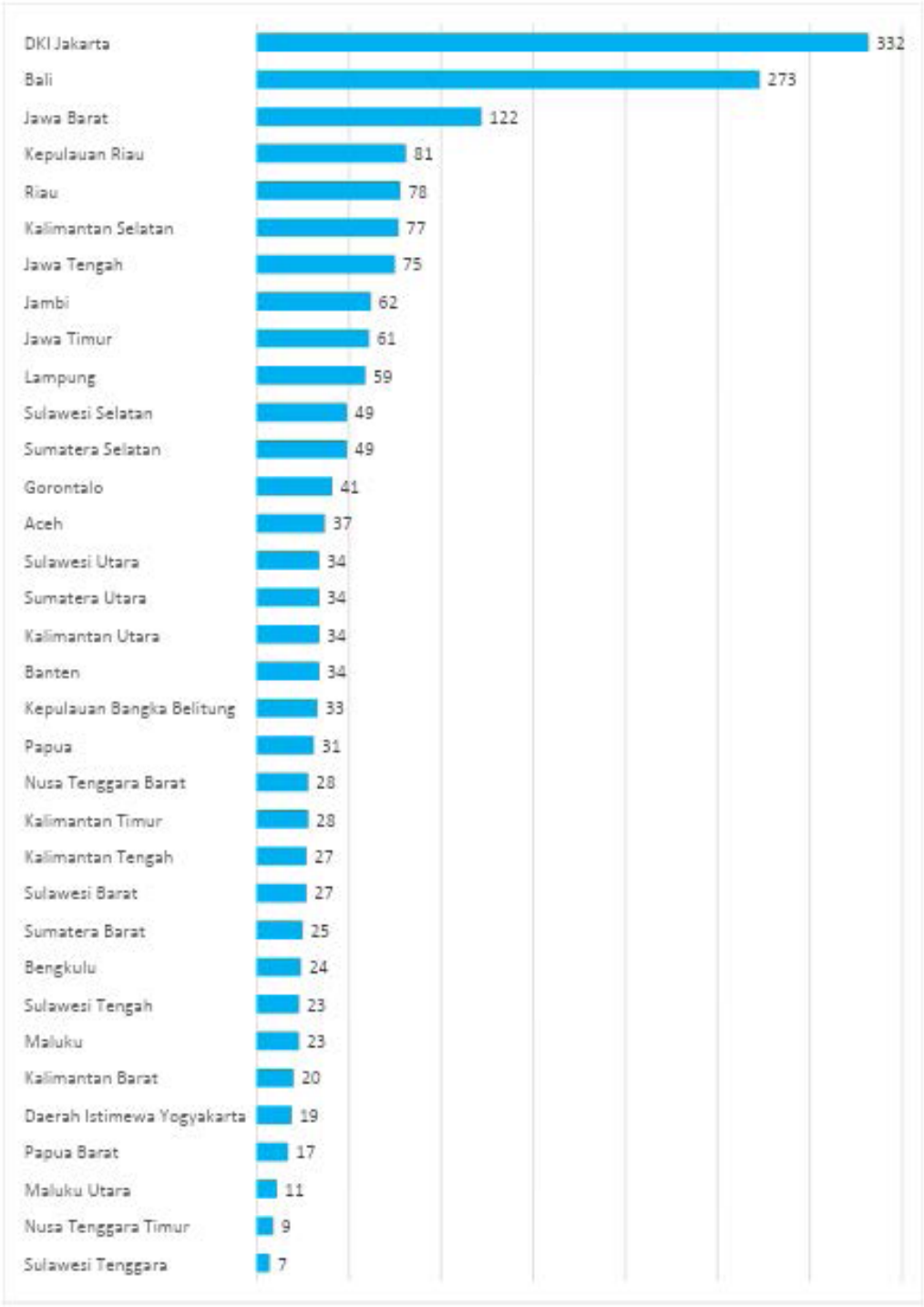
e. Profil Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (pegawai kontrak, tenaga ahli, outsourcing) di lingkungan Satuan Kerja yang menangani PIKP di K/L tahun 2024 menurut Jenis Kelamin



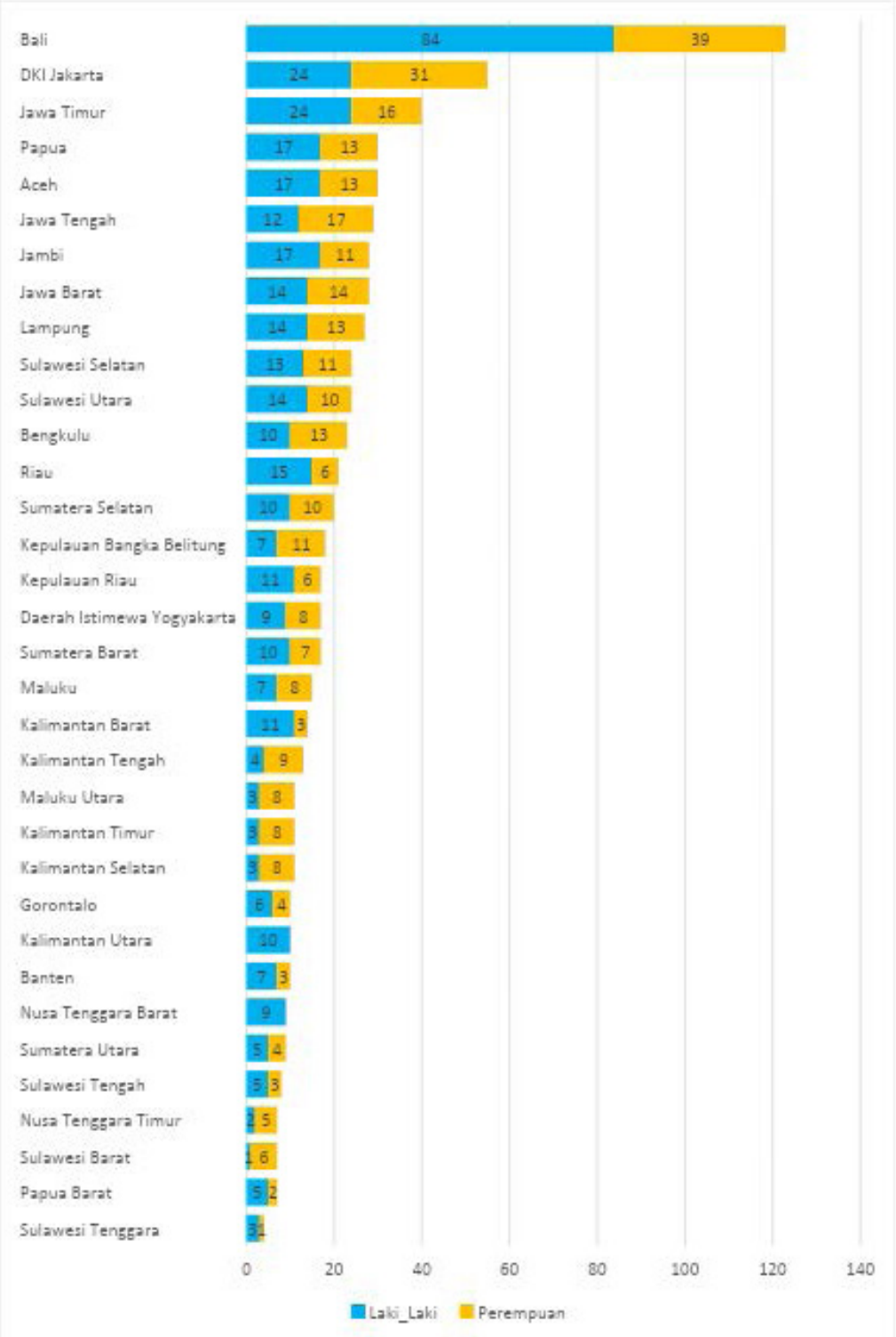
f. Profil Pegawai Pemerintah Non ASN (pegawai kontrak, tenaga ahli, outsourcing) di lingkungan Satuan Kerja yang menangani PIKP di K/L tahun 2023 menurut Tingkat Pendidikan



2. Sumber Daya Manusia yang menangani Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Dinas Kominfo Provinsi
    a. Jumlah seluruh pegawai di 34 Dinas Kominfo Provinsi yang menangani PIKP tahun 2024



b. Profil ASN (PNS & PPPK) di lingkungan Satuan Kerja yang menangani PIKP di Dinas Kominfo tahun 2024 menurut Jenis Kelamin


Bali 84 39
DKI Jakarta 24 31
Jawa Timur 24 16
Papua 17 13
Aceh 17 13
Jawa Tengah 12 17
Jambi 17 11
Jawa Barat 14 14
Lampung 14 13
Sulawesi Selatan 13 11
Sulawesi Utara 14 10
Bengkulu 10 13
Riau 15 6
Sumatera Selatan 10 10
Kepulauan Bangka Belitung 7 11
Kepulauan Riau 11 6
Daerah Istimewa Yogyakarta 9 8
Sumatera Barat 10 7
Maluku 7 8
Kalimantan Barat 11 3
Kalimantan Tengah 4 9
Maluku Utara 3 8
Kalimantan Timur 3 8
Kalimantan Selatan 3 8
Gorontalo 6 4
Kalimantan Utara 10
Banten 7 3
Nusa Tenggara Barat 9
Sumatera Utara 5 4
Sulawesi Tengah 5 3
Nusa Tenggara Timur 1 5
Sulawesi Barat 1 6
Papua Barat 5 2
Sulawesi Tenggara 3 1
0 20 40 60 80 100 120 140
Laki_Laki
Perempuan

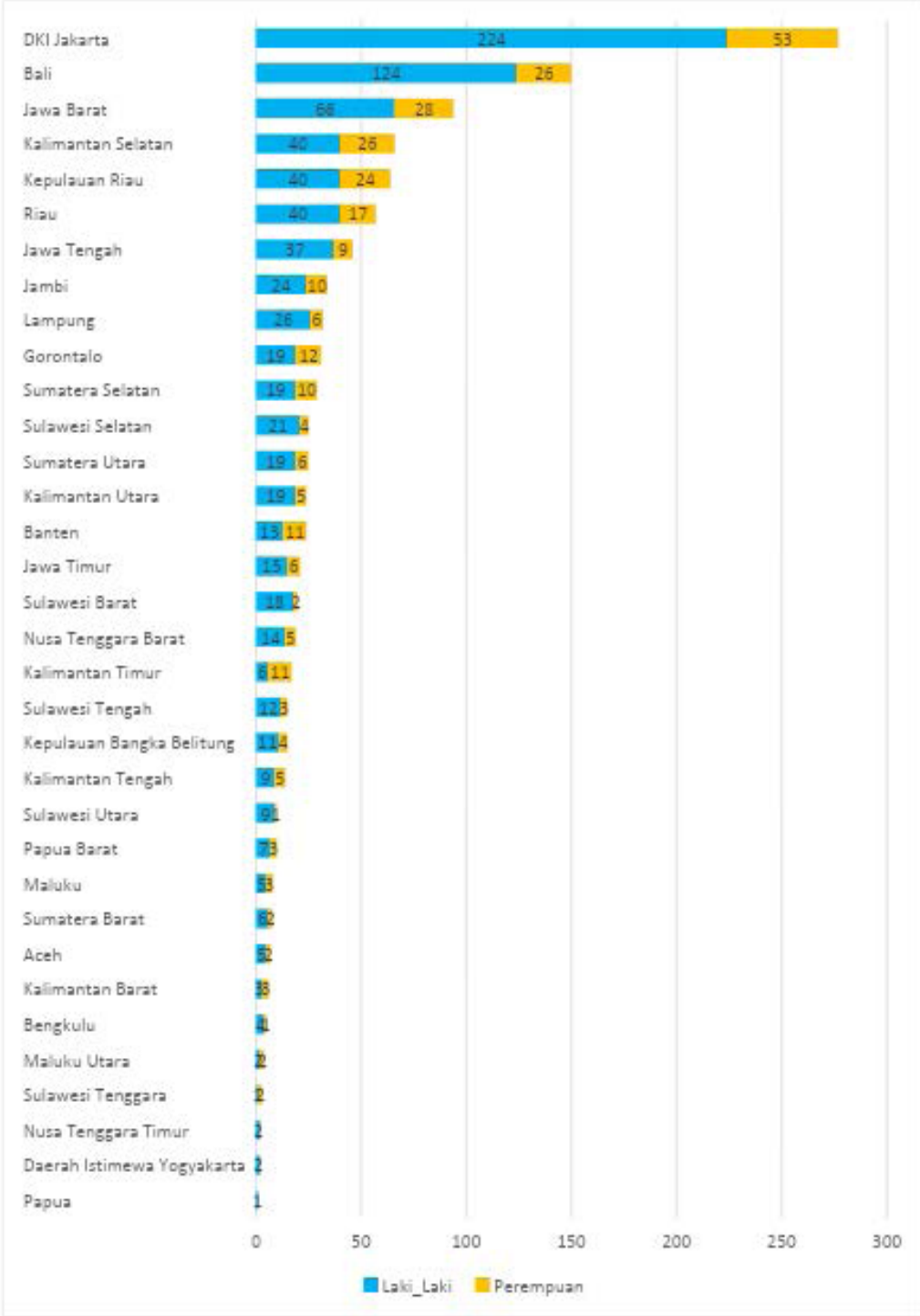
c. Profil ASN (PNS & PPPK) di lingkungan Satuan Kerja yang menangani PIKP di Dinas Kominfo tahun 2024 menurut Tingkat Pendidikan



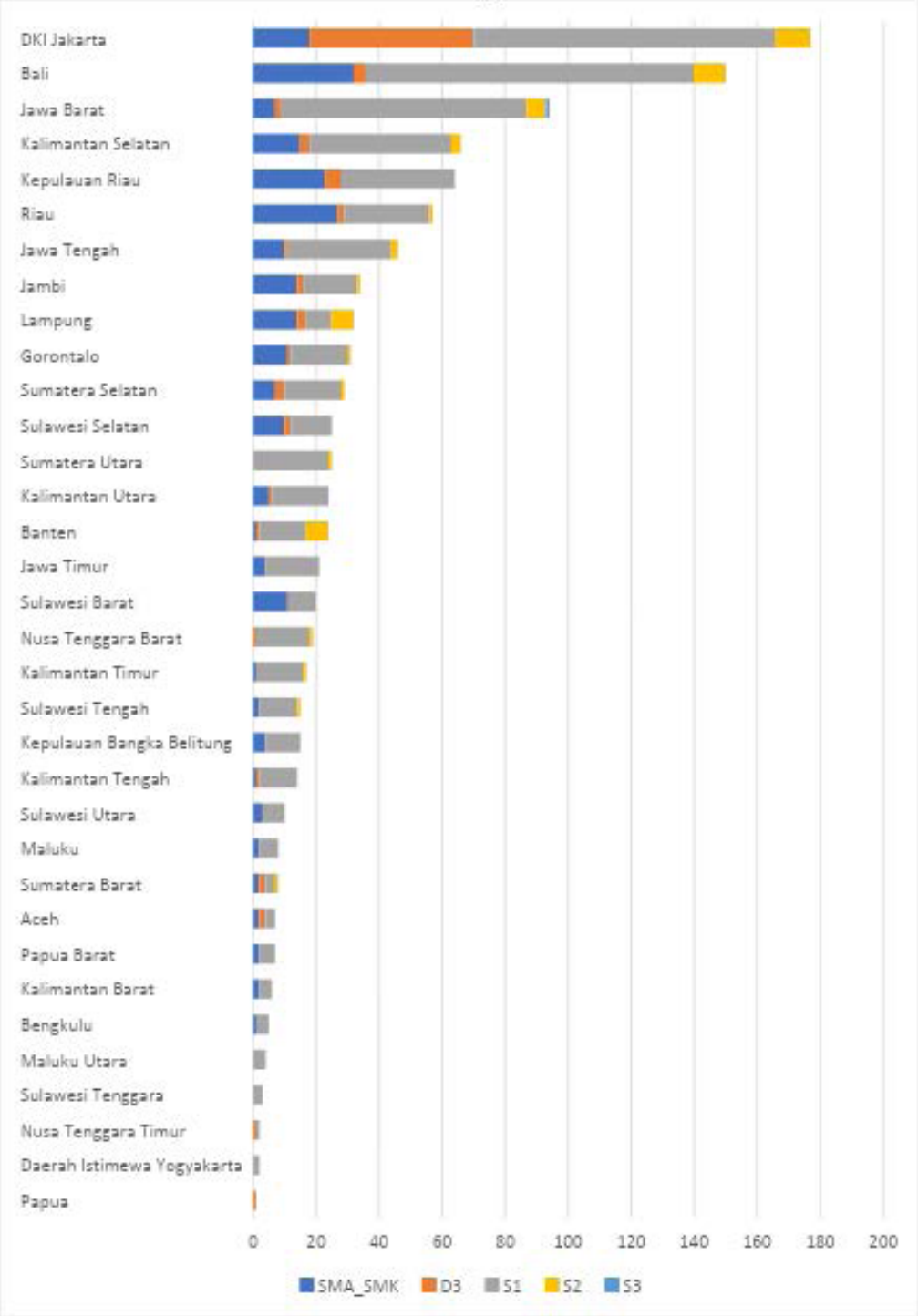
d. Profil ASN (PNS & PPPK) di lingkungan Satuan Kerja yang menangani PIKP di Dinas Kominfo tahun 2024 menurut Jabatan



e. Profil Pegawai Pemerintah Non ASN (pegawai kontrak, tenaga ahli, outsourcing) di lingkungan Satuan Kerja yang menangani PIKP di Dinas Kominfo tahun 2024

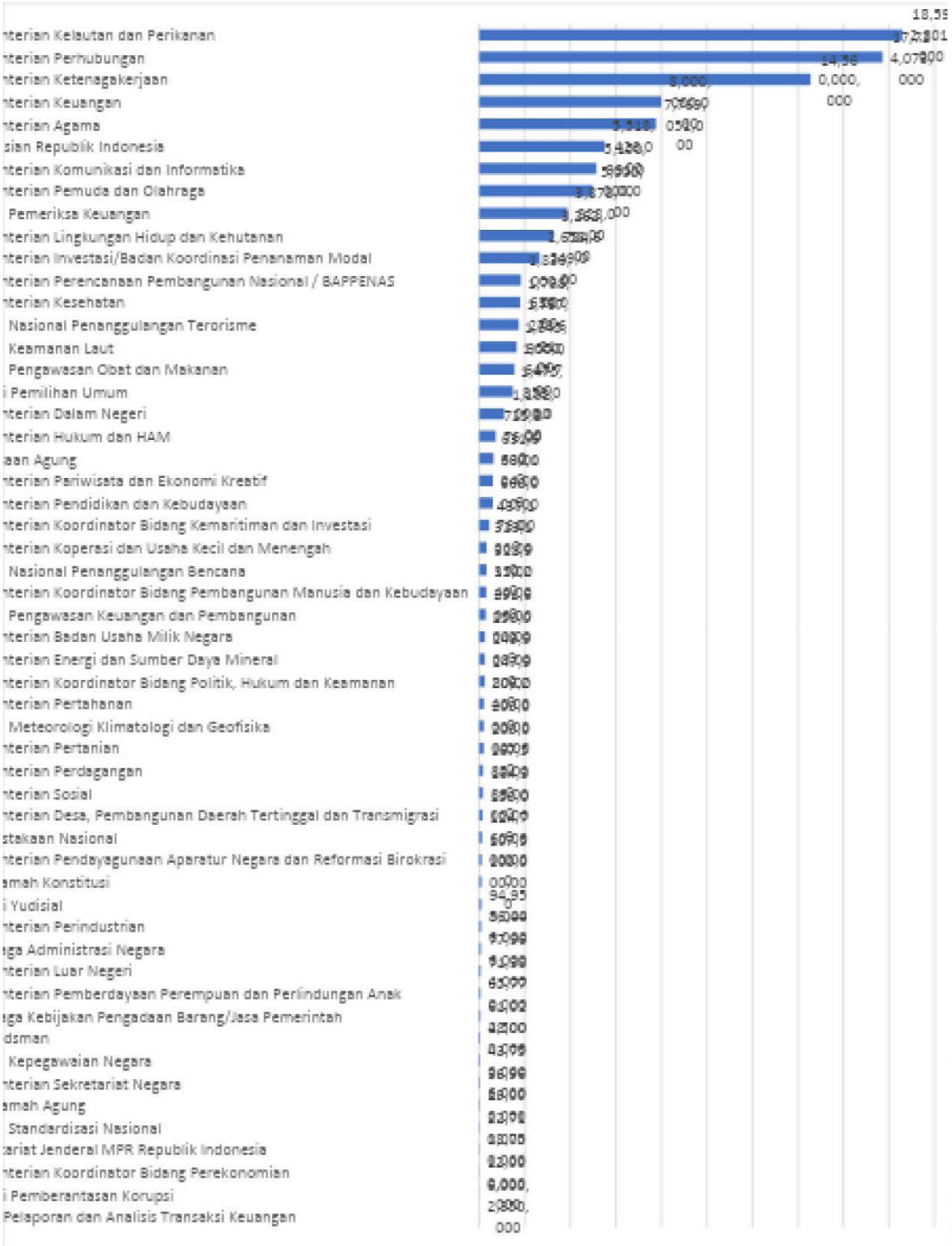


f. Profil Pegawai Pemerintah Non ASN (pegawai kontrak, tenaga ahli, *outsourcing*) di lingkungan Satuan Kerja yang menangani PIKP di Dinas Kominfo tahun 2024 menurut Tingkat Pendidikan



3. Alokasi Anggaran PIKP di Kementerian/Lembaga dan Dinas Kominfo Provinsi

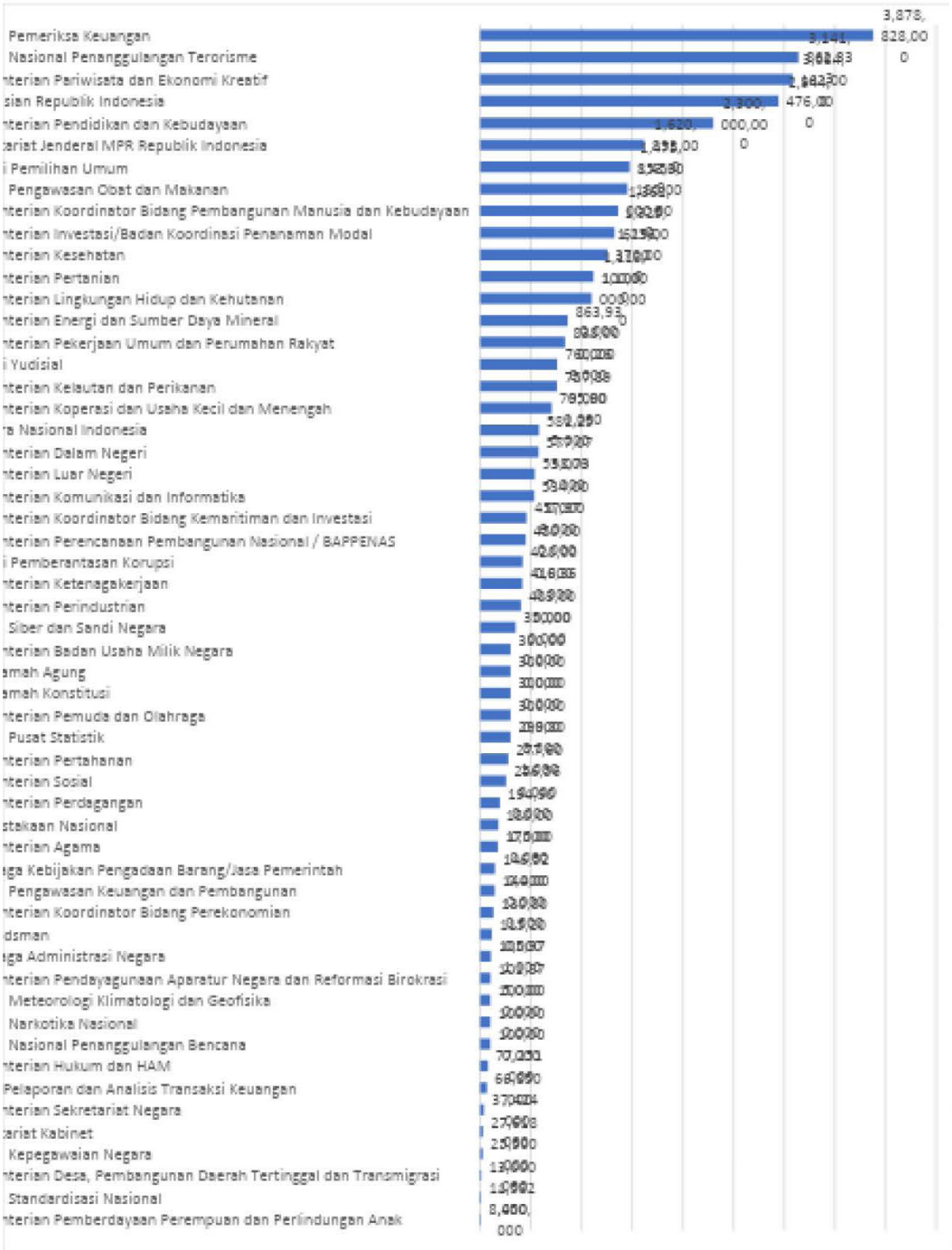
a. Ketersediaan anggaran perencanaan program/kegiatan PIKP di Kementerian/Lembaga



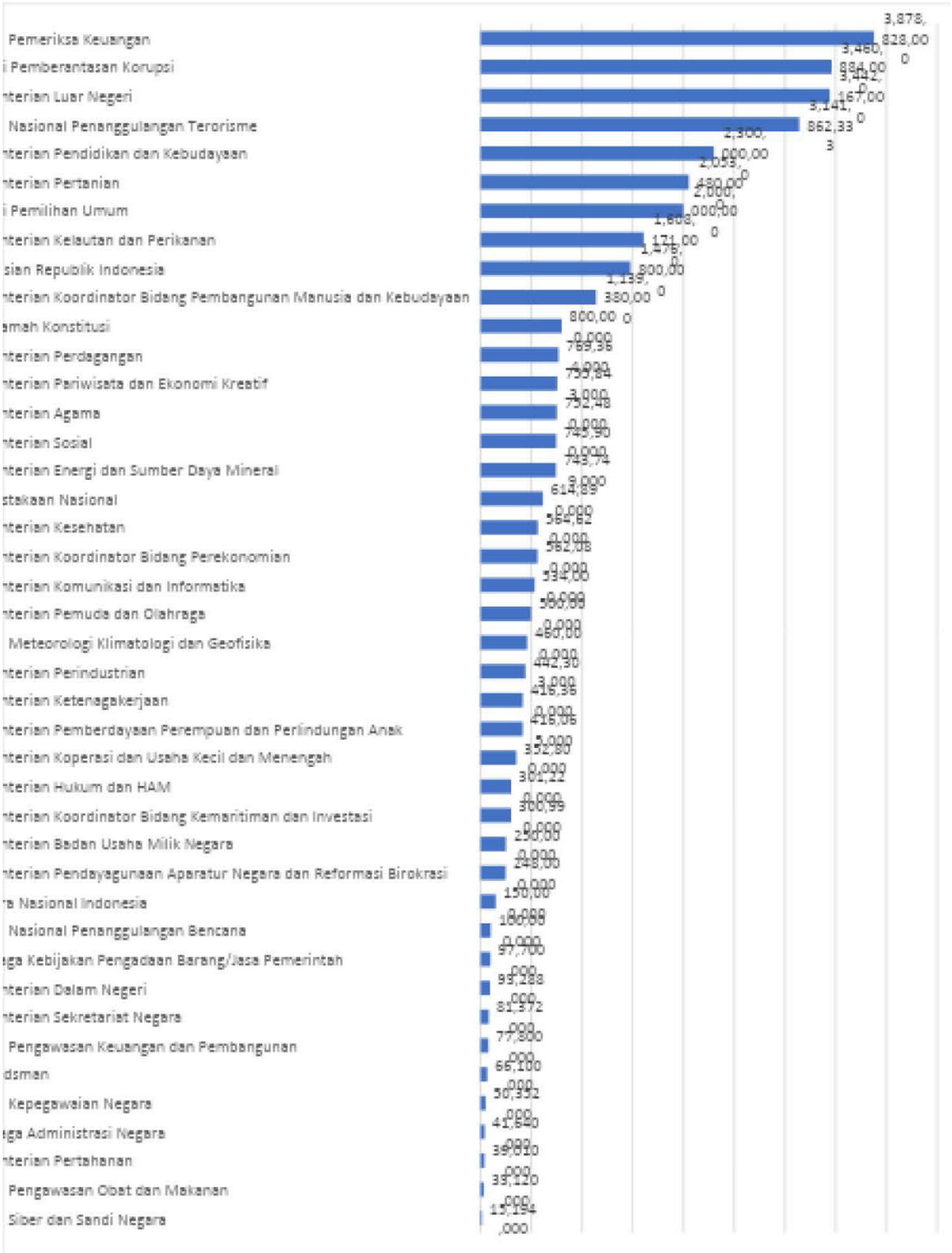
b. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik di K/L



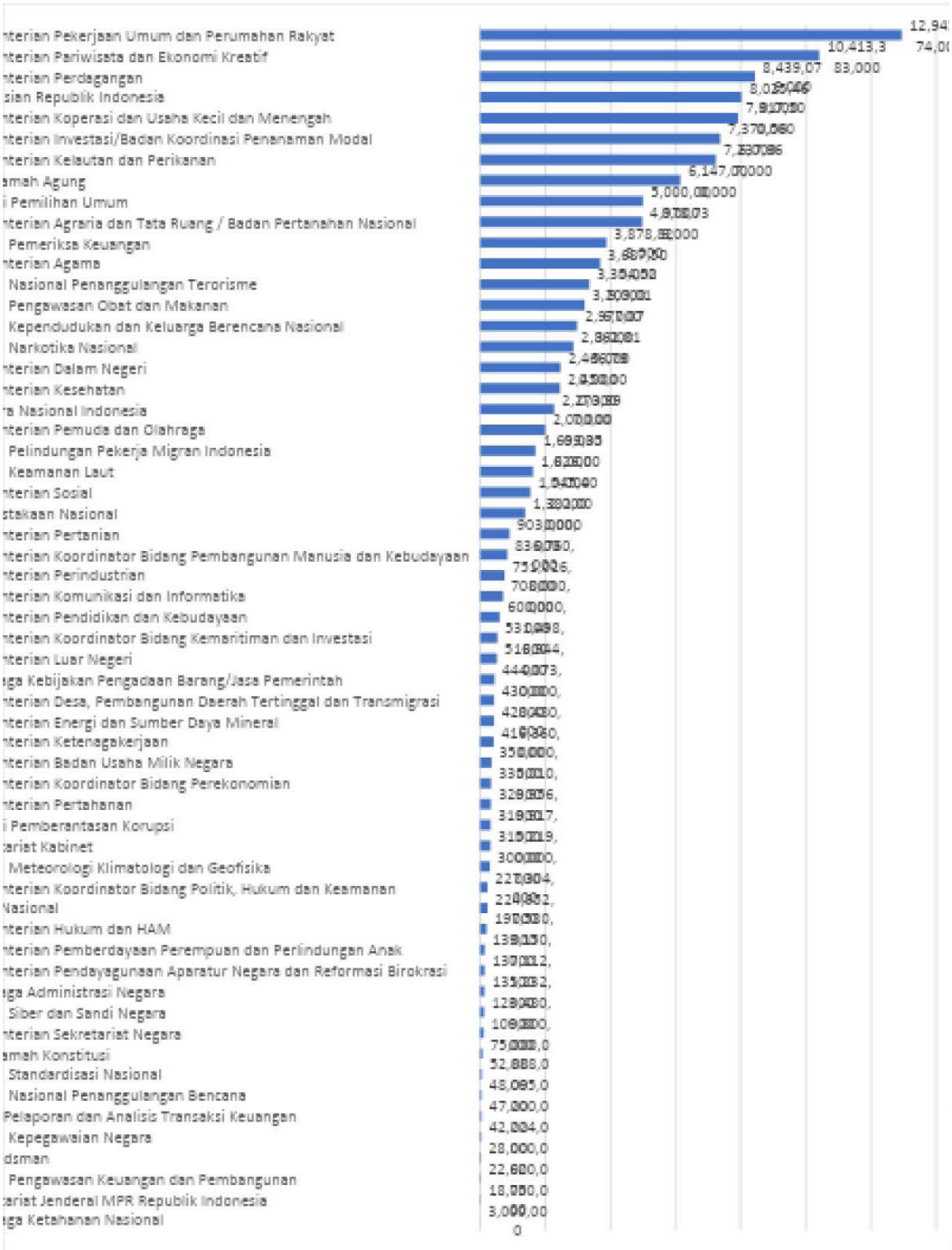
c. Ketersediaan anggaran untuk untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring opini dan aspirasi publik di K/L



d. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring informasi kebijakan dan evaluasi serta penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah di K/L



e. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik di K/L



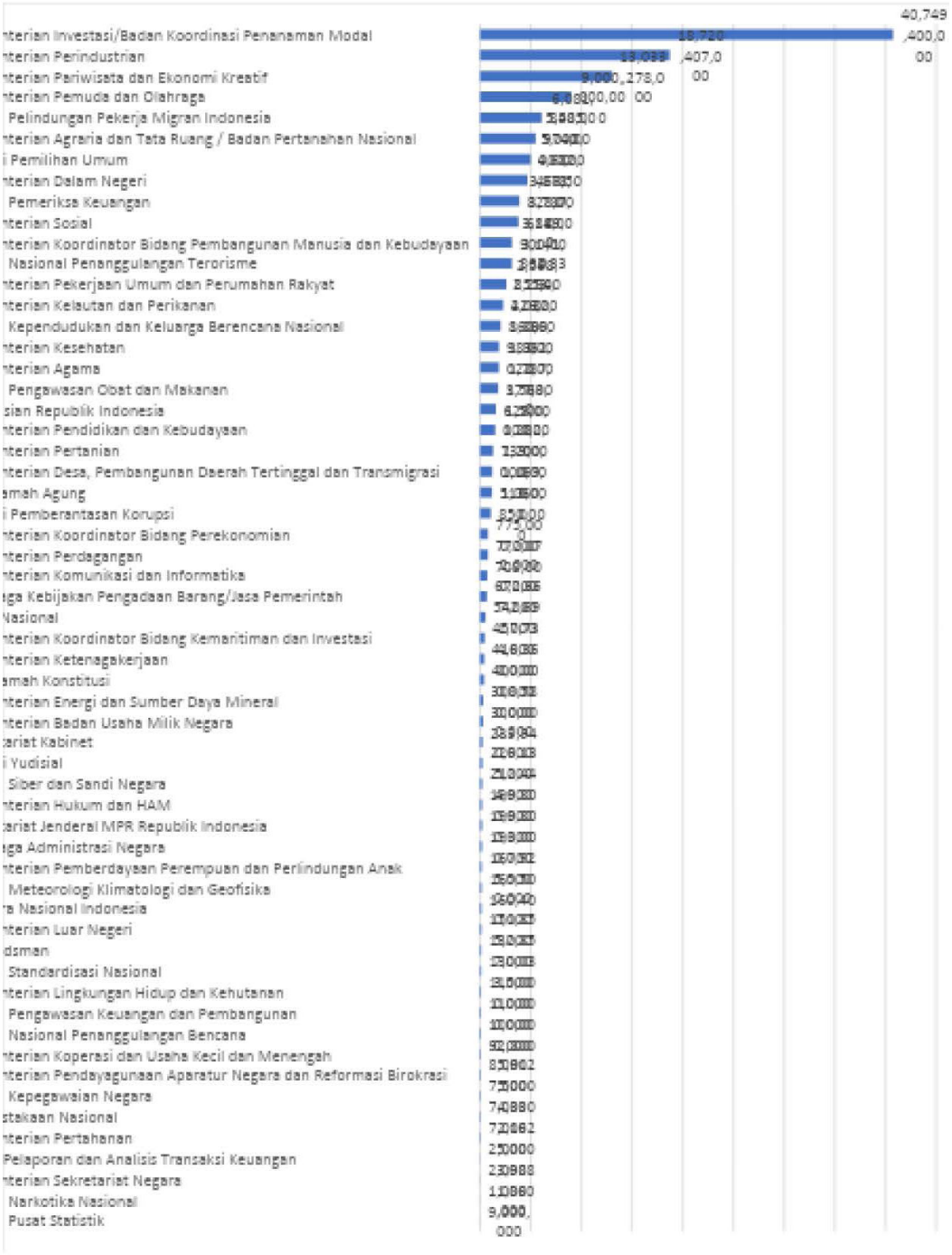
f. Ketersediaan anggaran untuk Pelaksanaan program/kegiatan untuk pelaksanaan program/ kegiatan pengelolaan media komunikasi publik di K/L



g. Ketersediaan anggaran untuk Pelaksanaan program/kegiatan untuk pelaksanaan program/ kegiatan pelayanan informasi publik di K/L



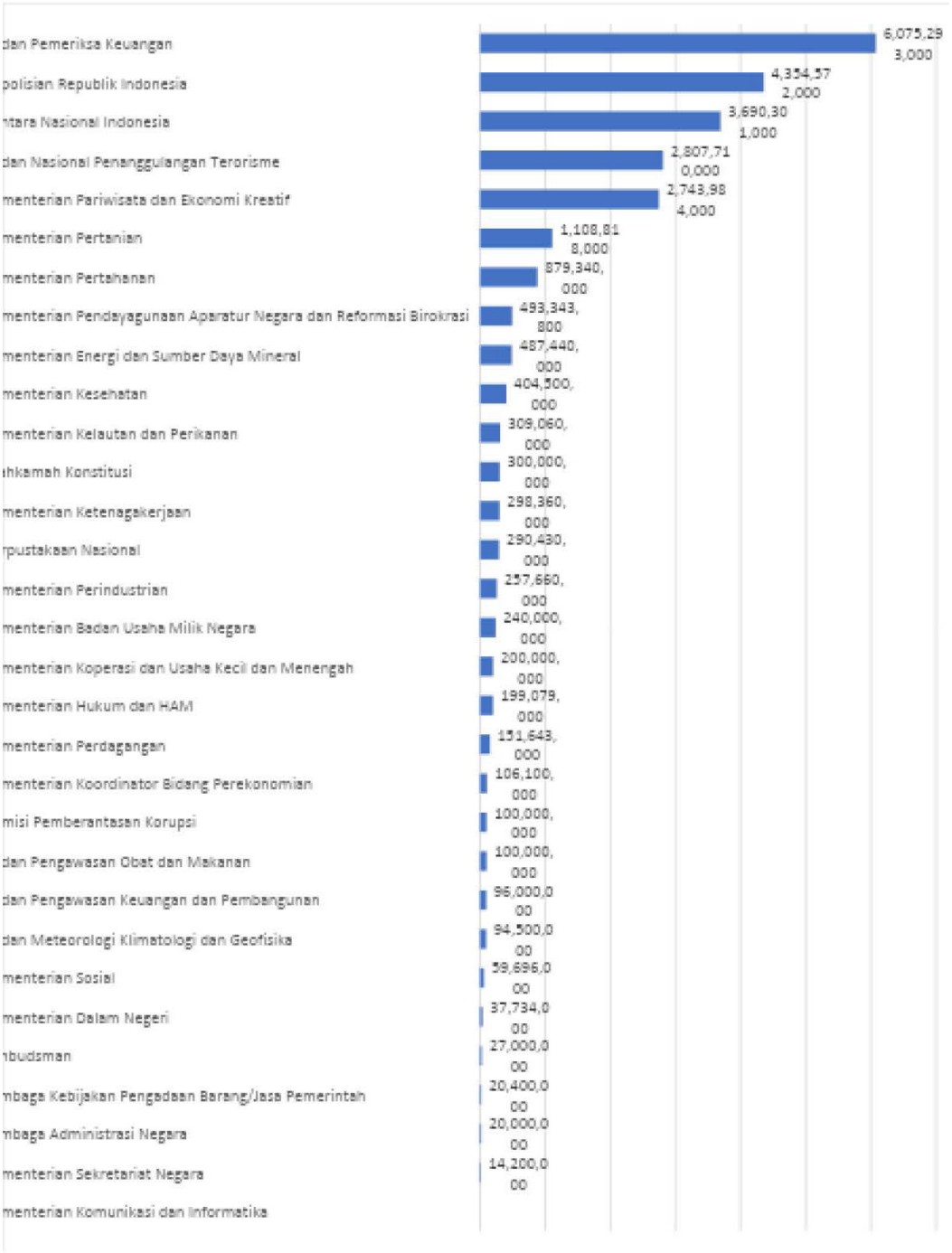
h. Ketersediaan anggaran untuk Pelaksanaan program/kegiatan untuk pelaksanaan program/kegiatan layanan hubungan media di K/L



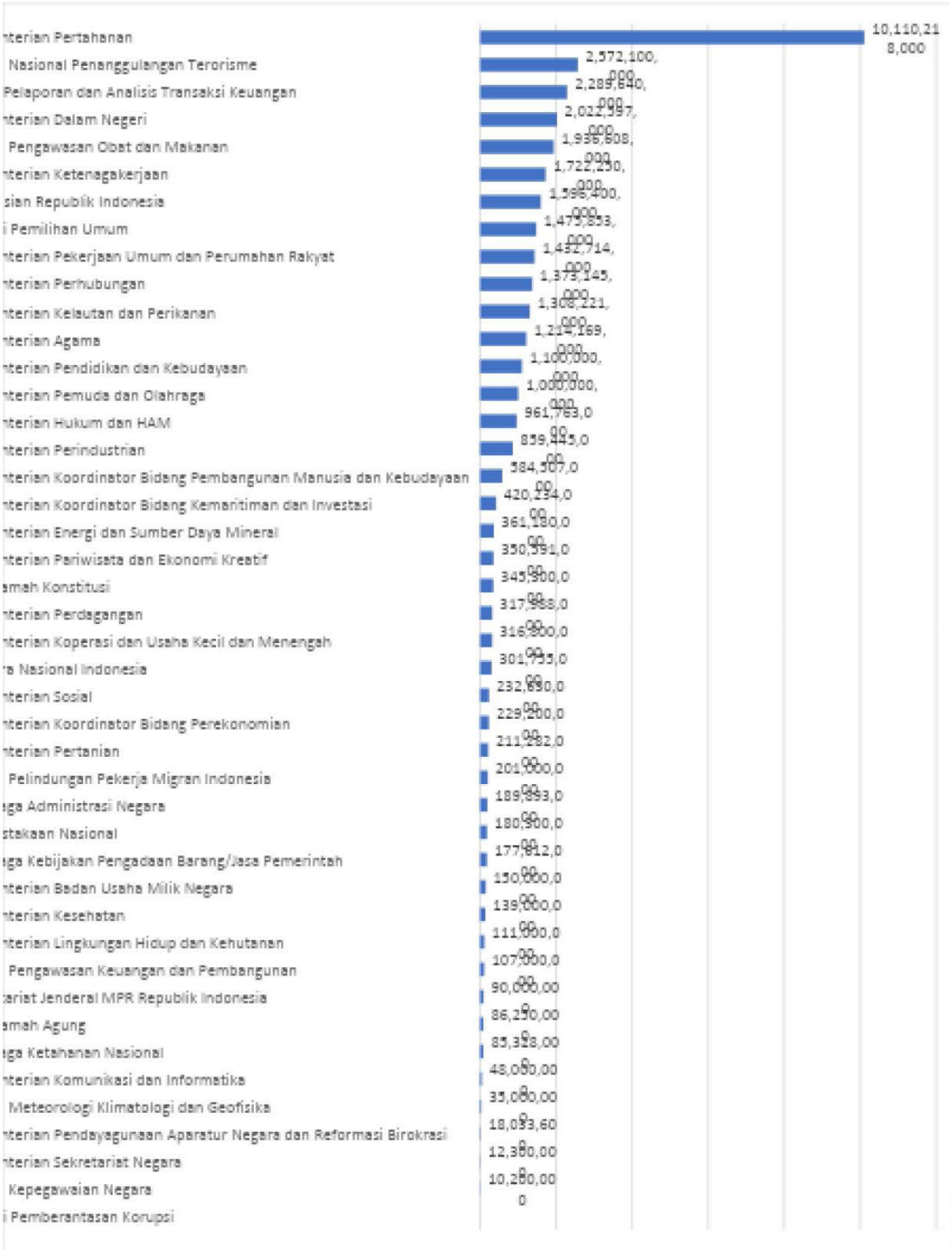
i. Ketersediaan anggaran untuk Pelaksanaan program/kegiatan untuk pelaksanaan program/ kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan di K/L



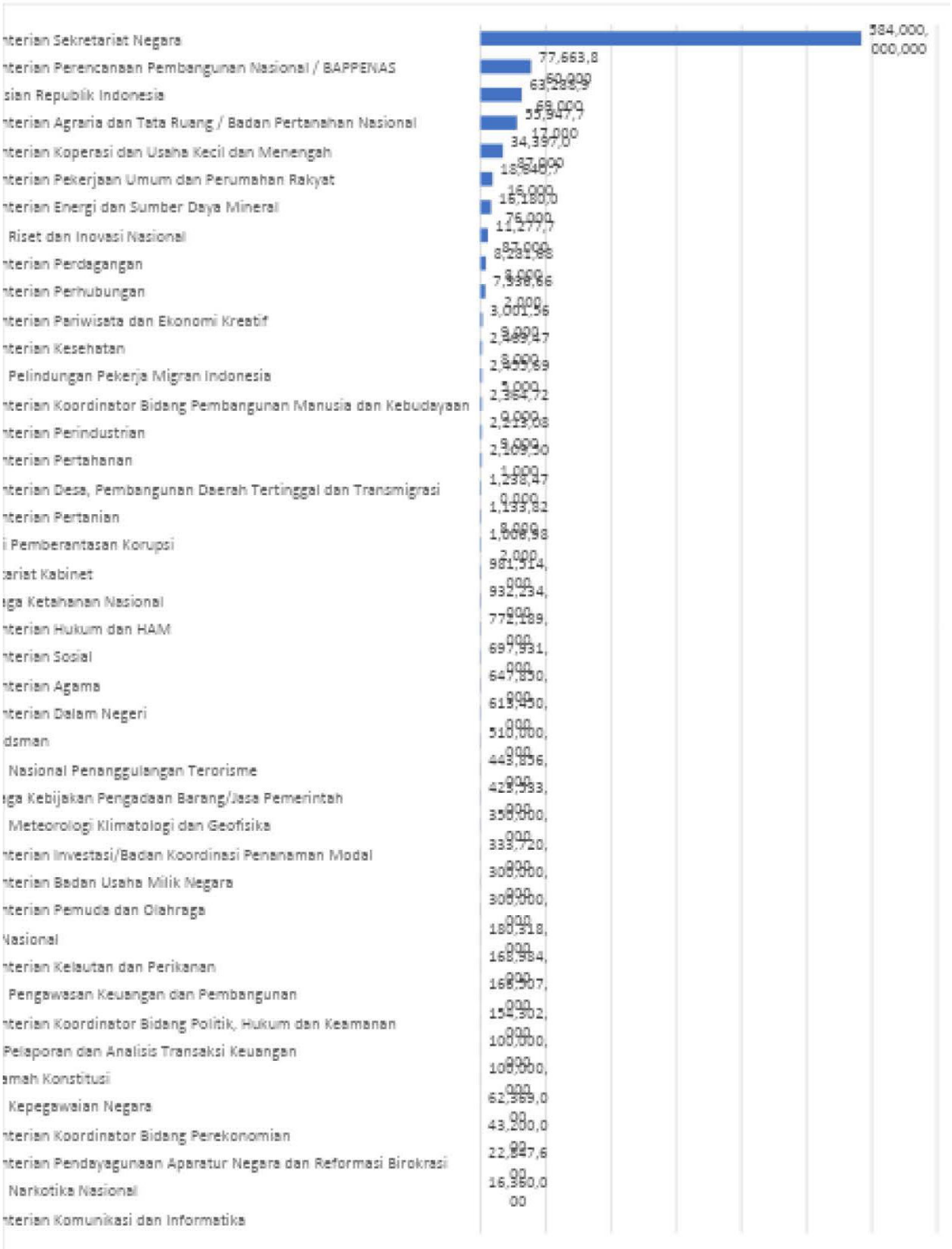
j. Ketersediaan anggaran untuk Pelaksanaan program/kegiatan untuk Pelaksanaan program/ kegiatan manajemen komunikasi krisis di K/L



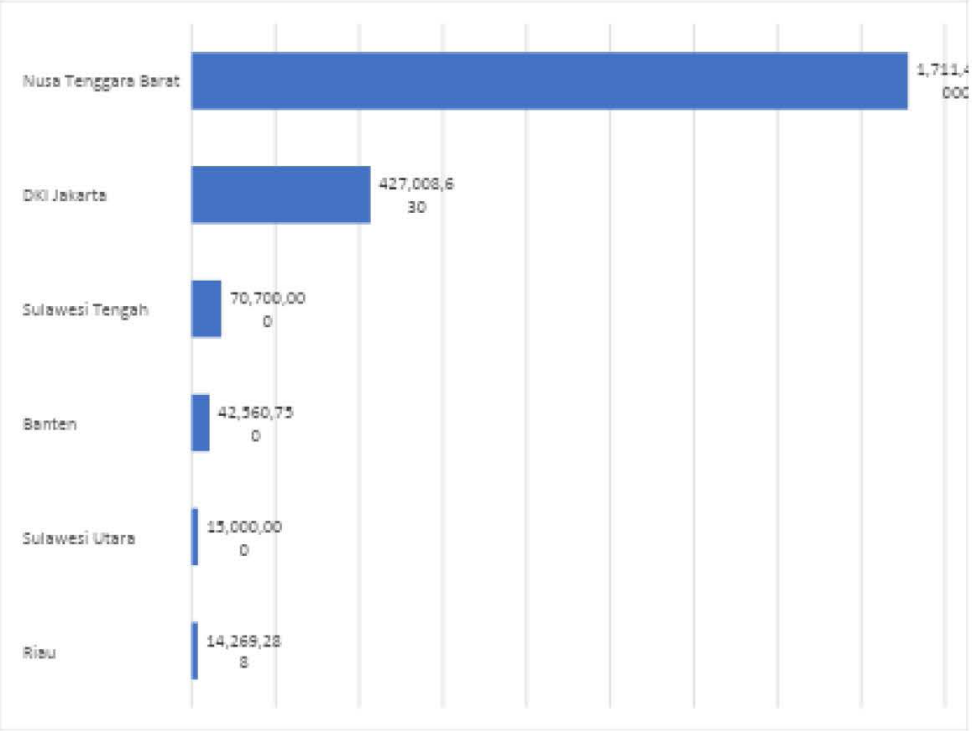
k. Ketersediaan anggaran untuk Pelaksanaan program/kegiatan untuk Pelaksanaan program/ kegiatan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik di K/L



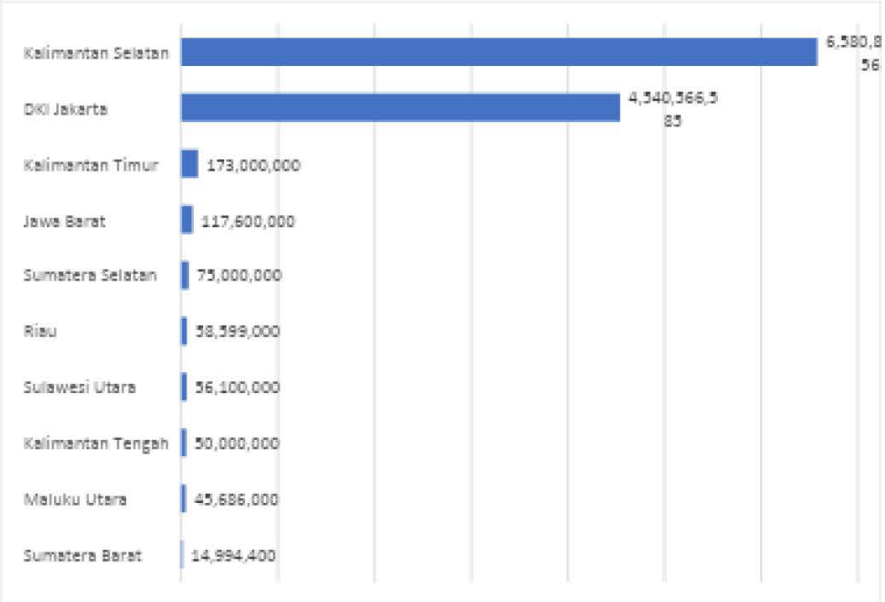
I. Ketersediaan anggaran untuk Pelaksanaan program/kegiatan untuk Pelaksanaan program/ kegiatan bidang IKP lainnya di K/L



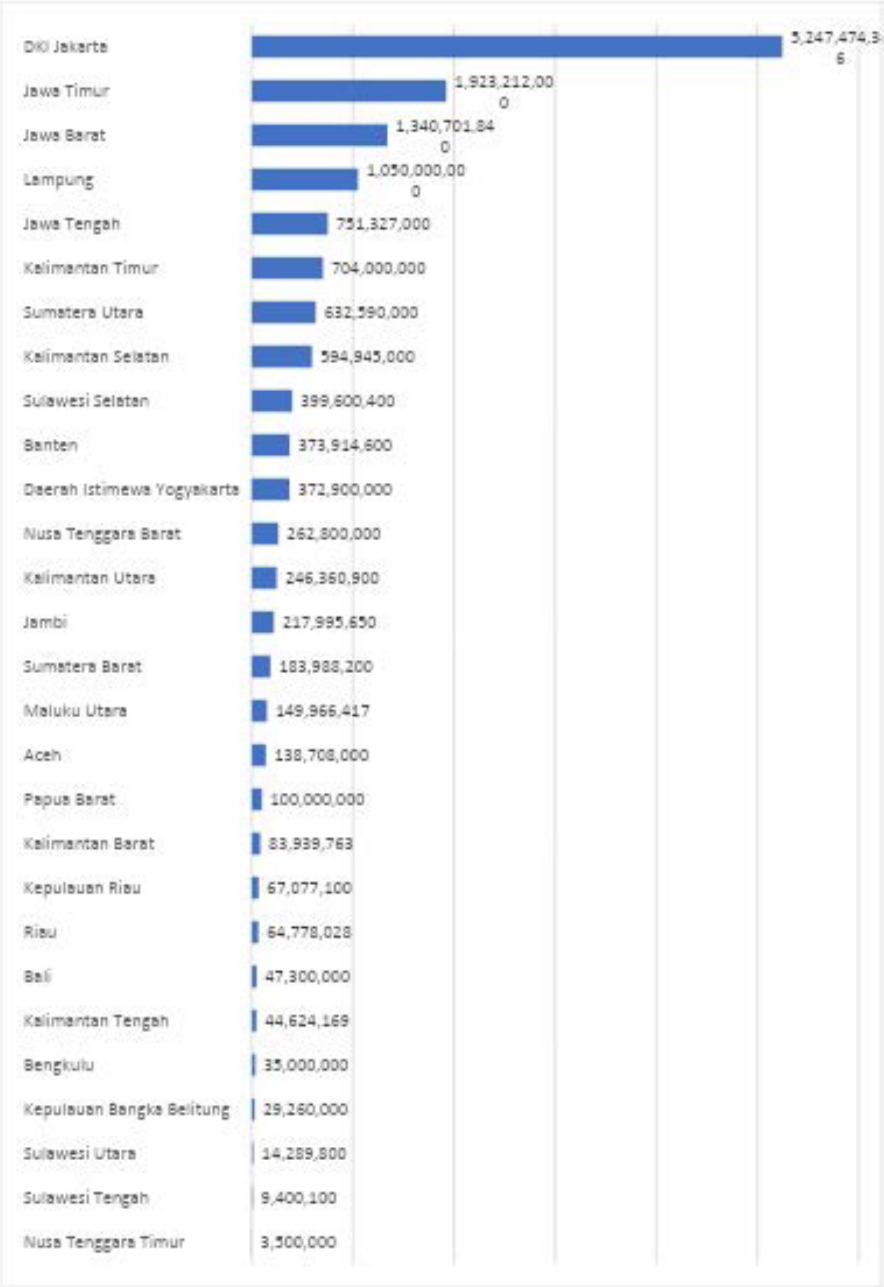
1. Rincian Alokasi Anggaran untuk Program/Kegiatan PIKP di Dinas Kominfo Provinsi tahun 2024
   a. Ketersediaan anggaran perencanaan Program/Kegiatan PIKP di Dinas Komnfo Provinsi



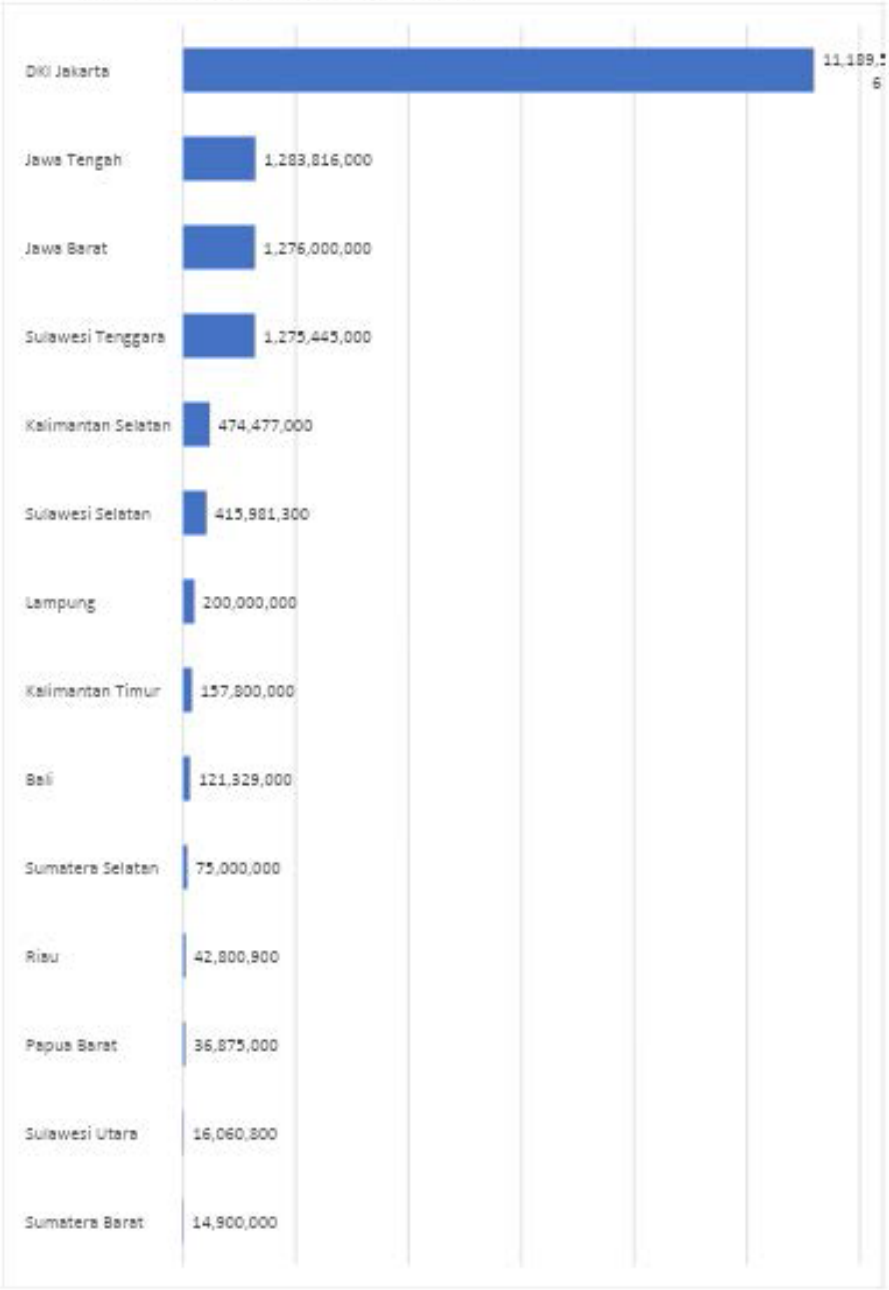
b. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik



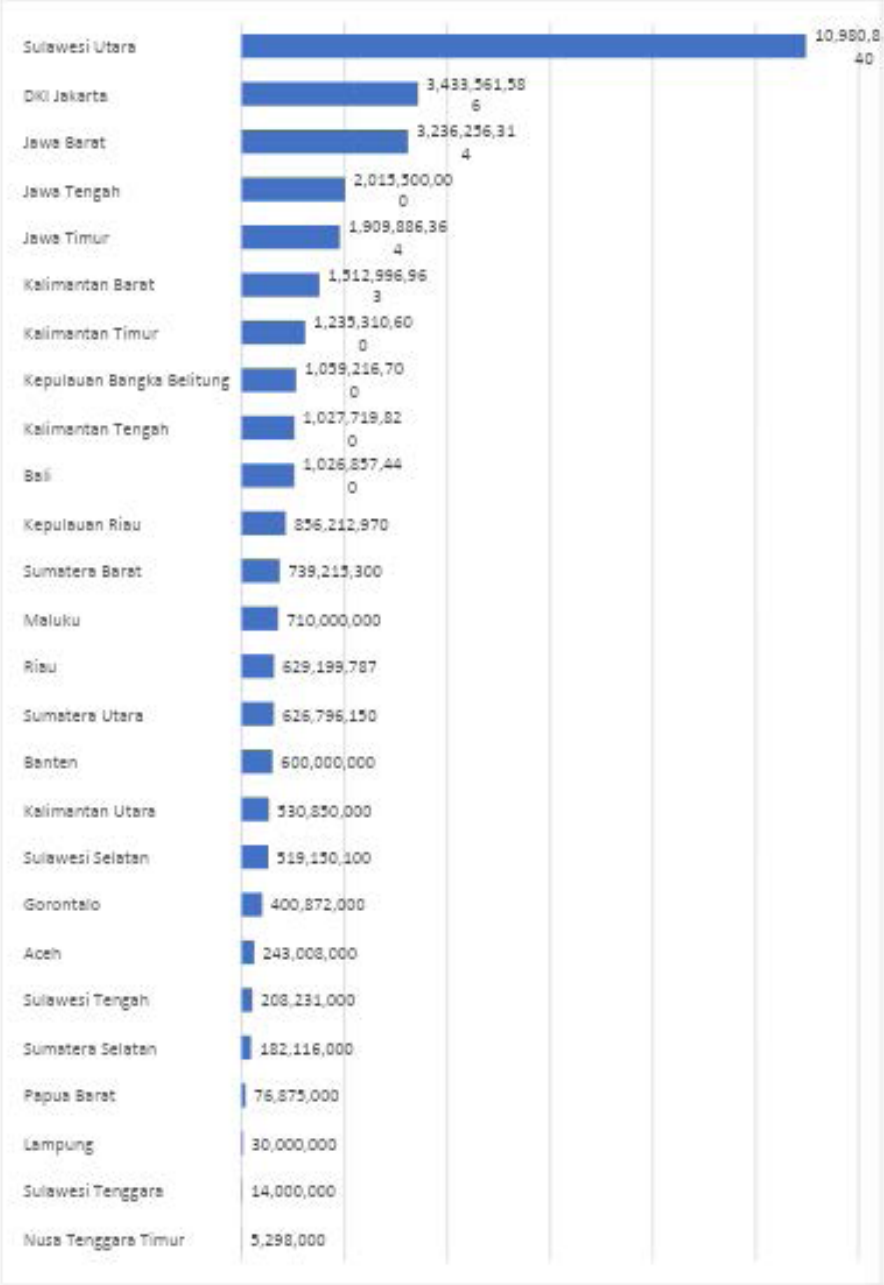
c. Ketersediaan anggaran untuk untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring opini dan aspirasi publik



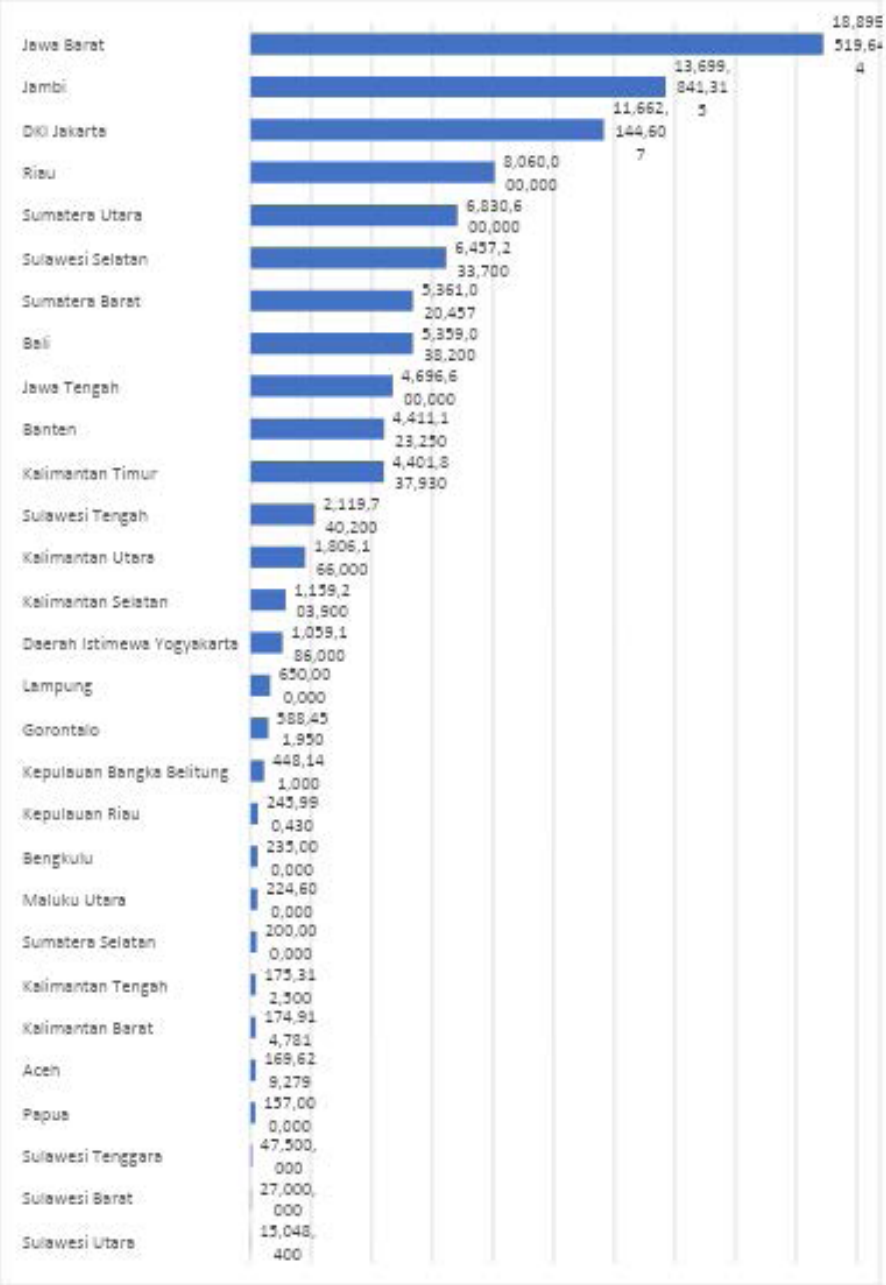
d. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring informasi kebijakan dan evaluasi serta penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah



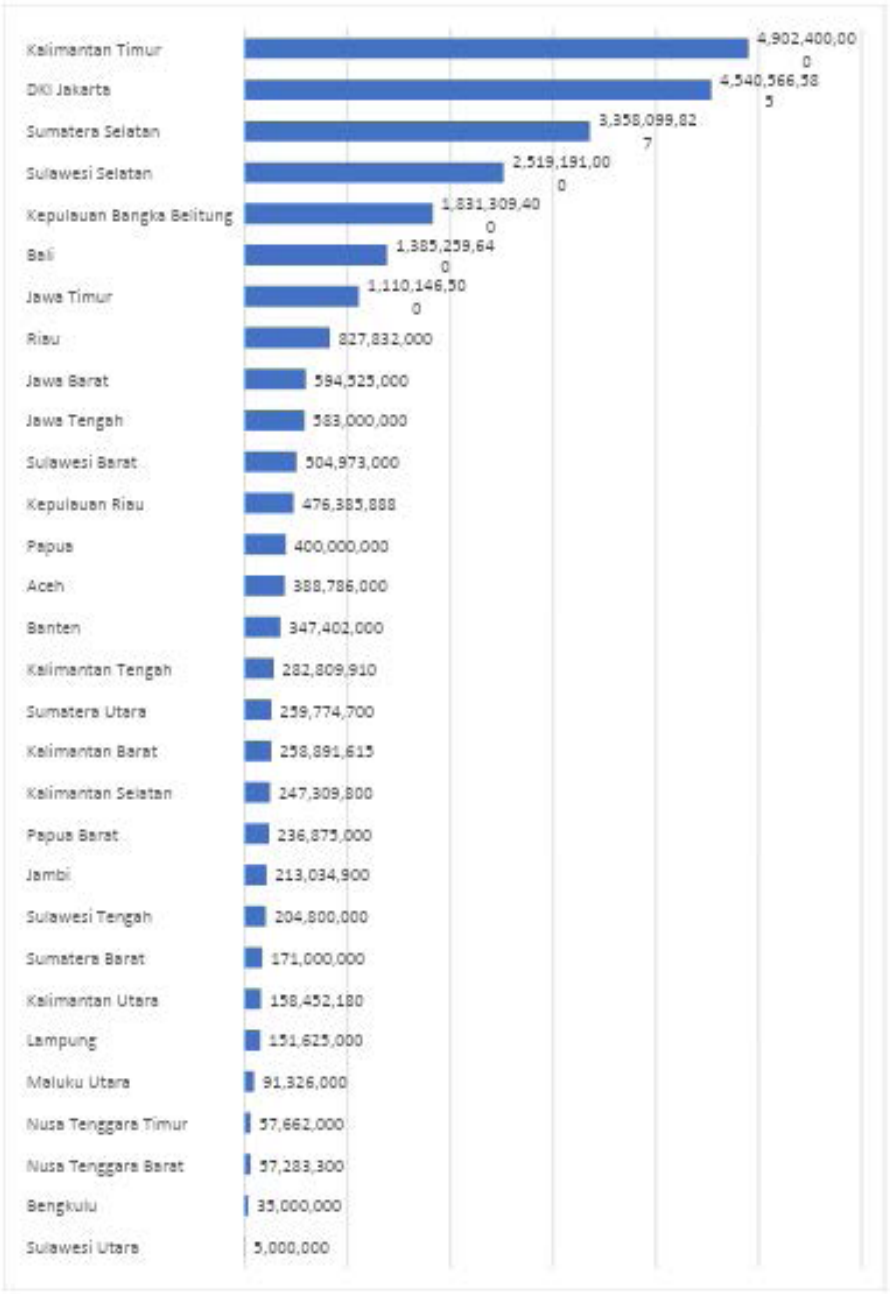
e. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik



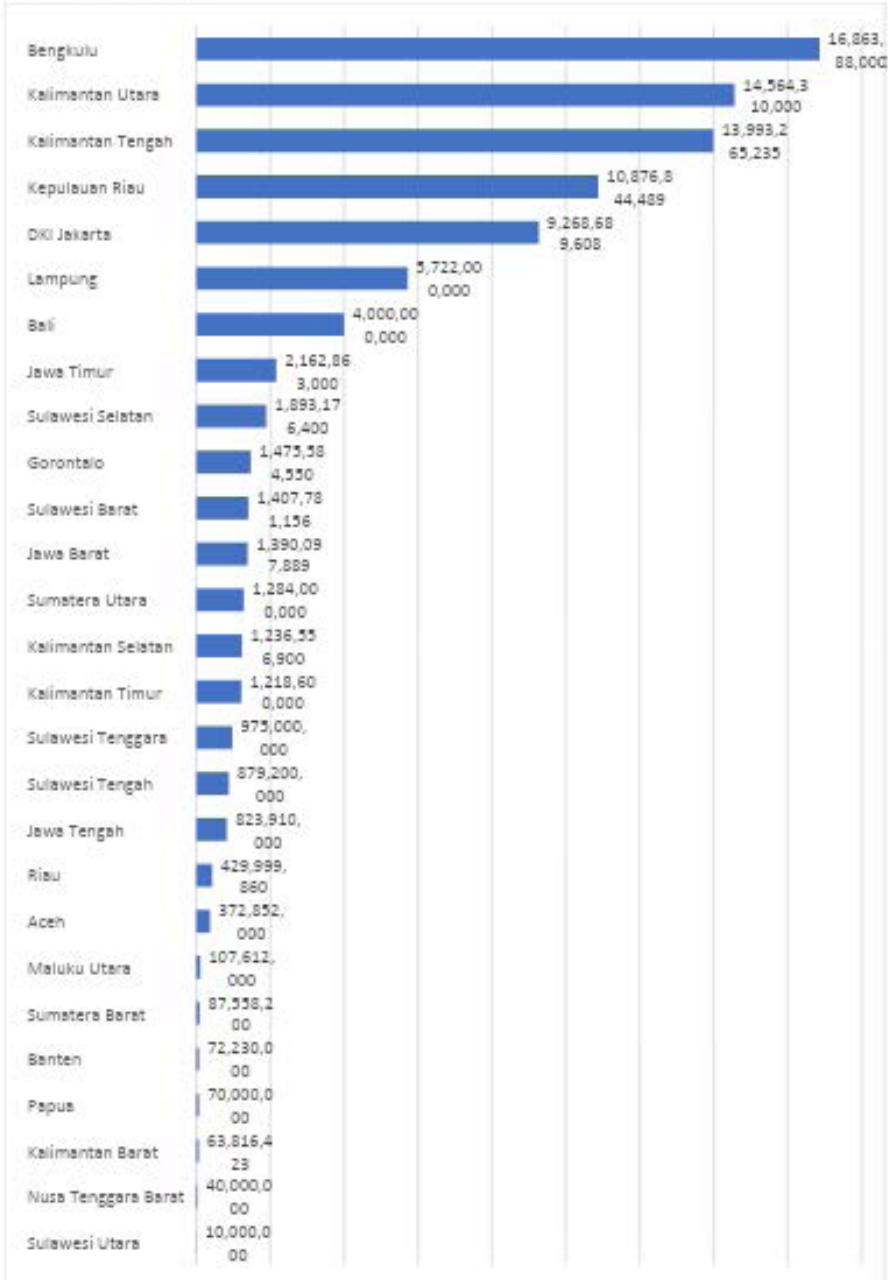
f. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan media komunikasi publik



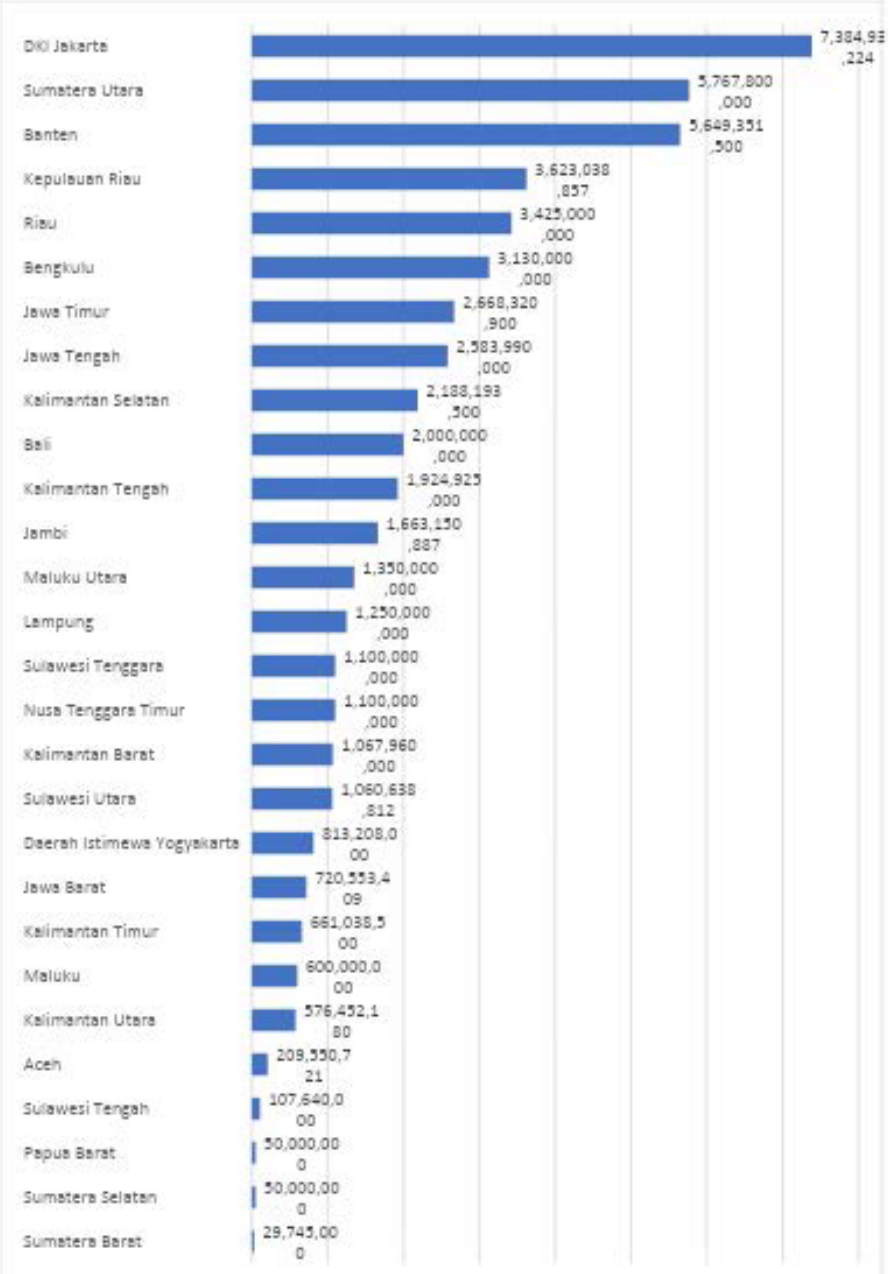
g. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan pelayanan Informasi publik



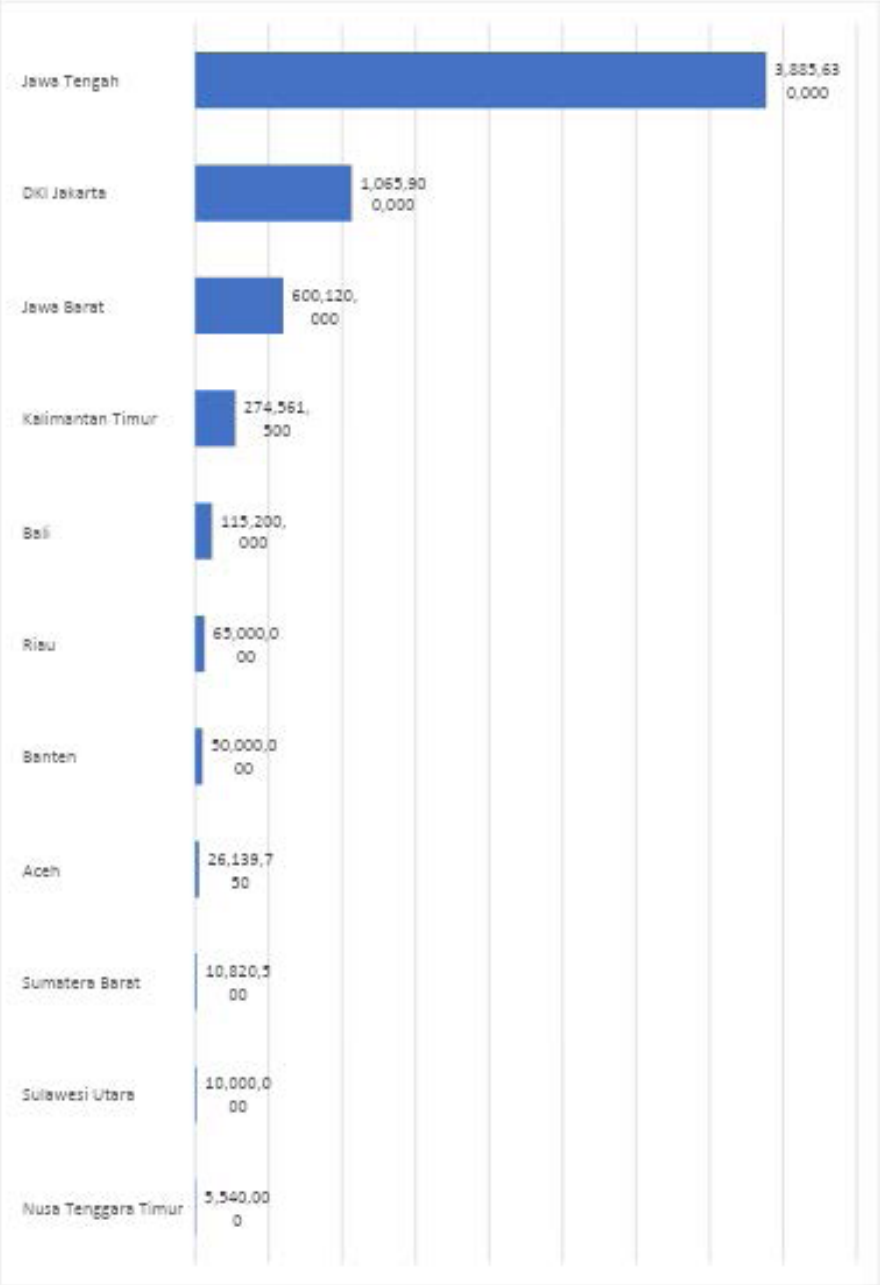
h. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan layanan hubungan media



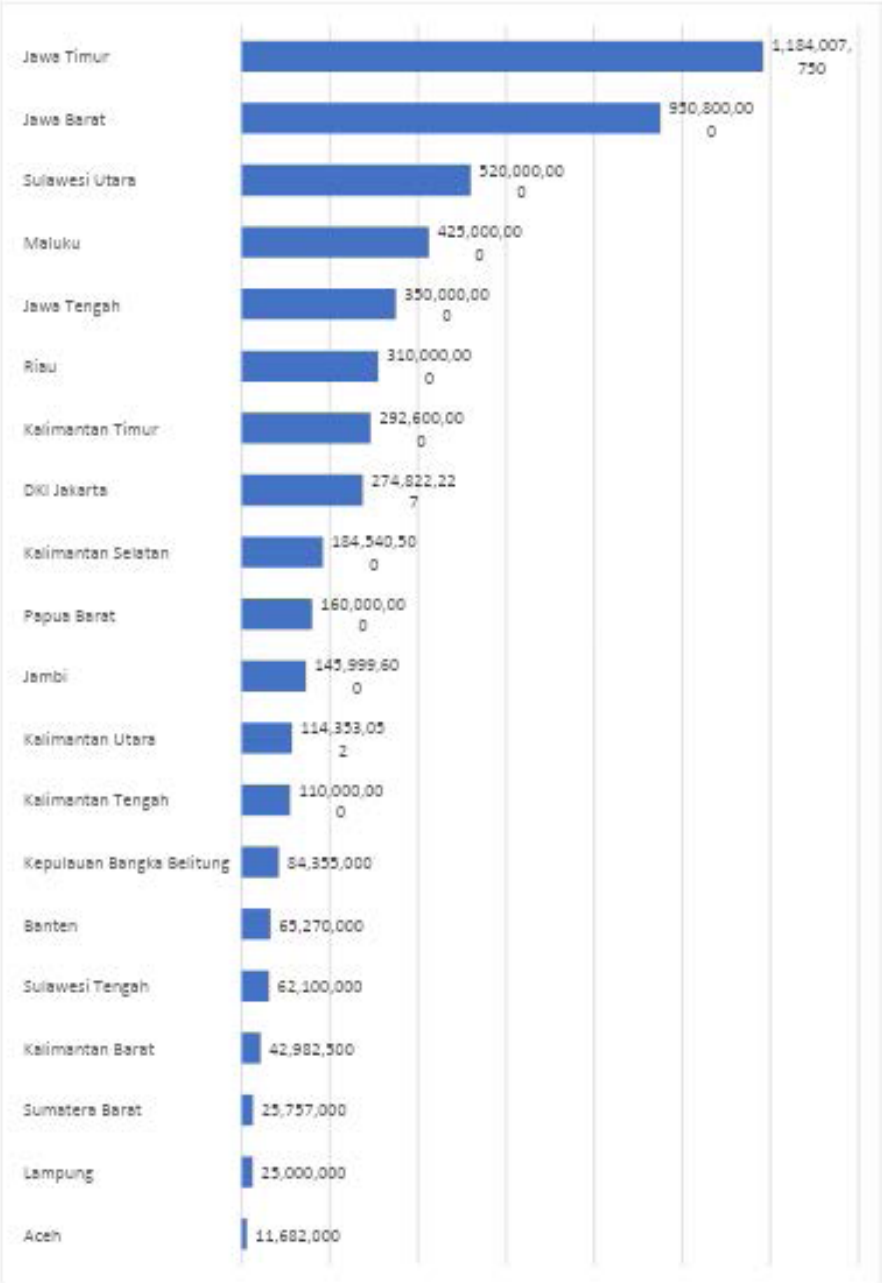
i. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan



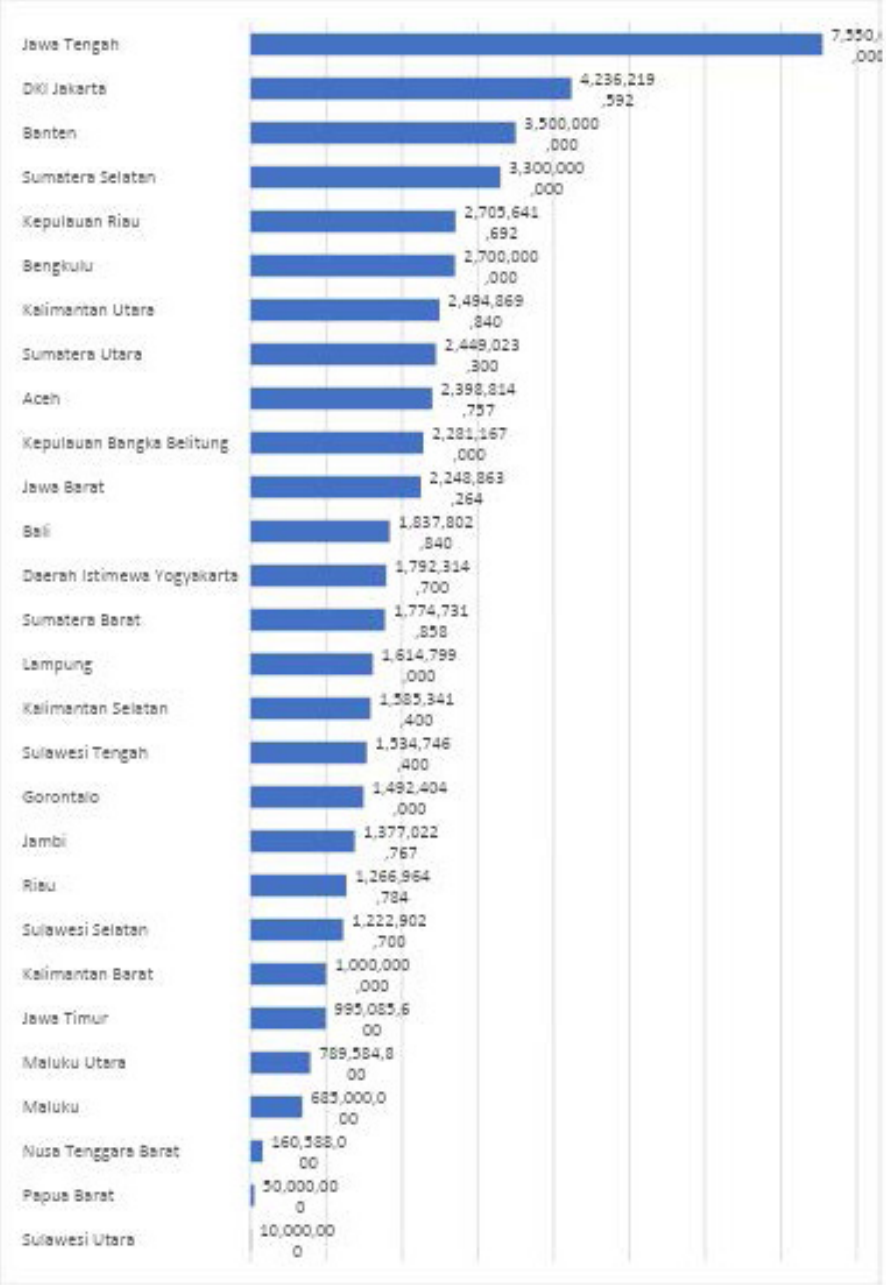
j. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan manajemen komunikasi krisis

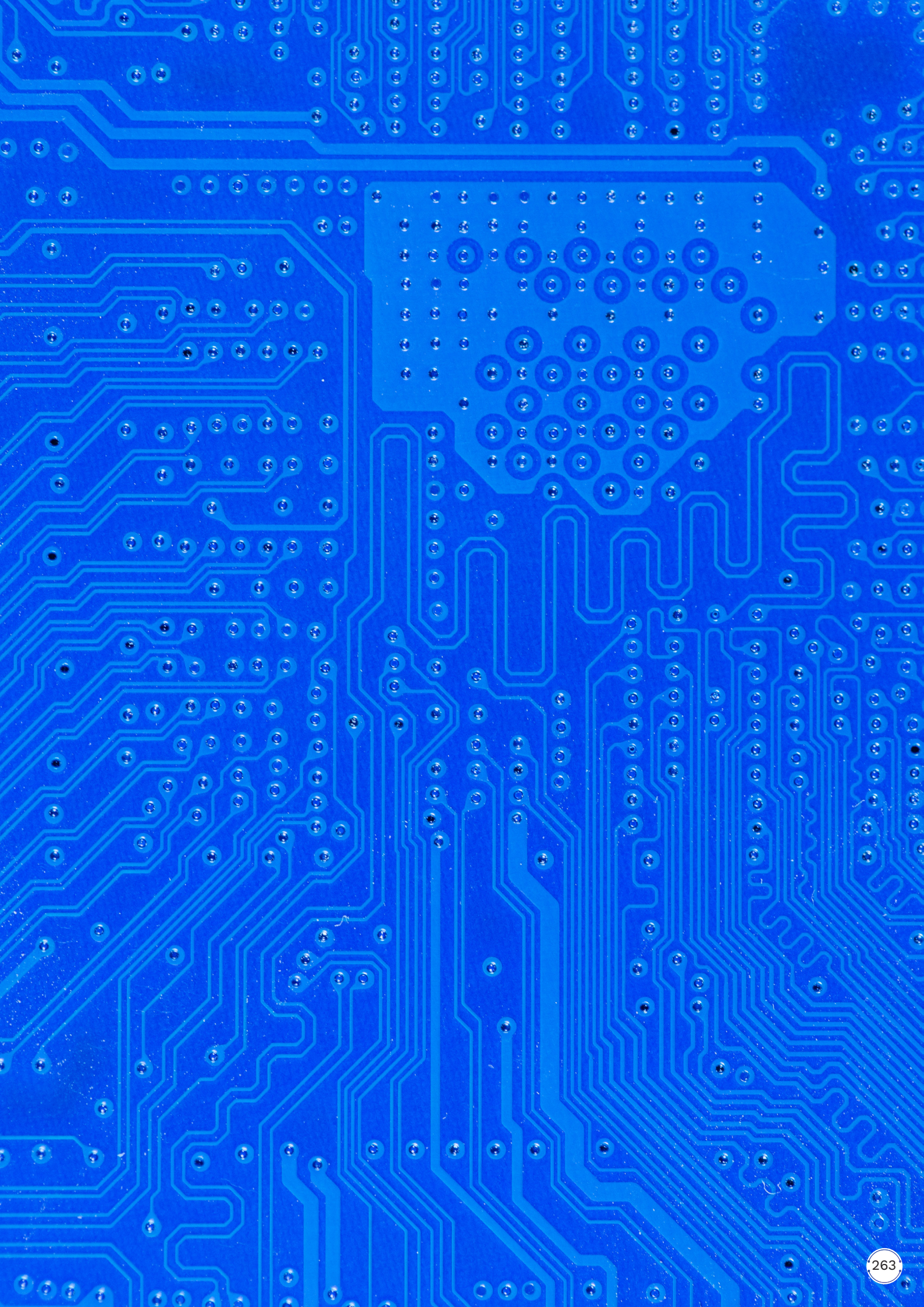


k. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik



I. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan IKP lainnya





KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2024

Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media



www.komdigi.go.id (021) 3504024 humas@mail.kominfo.go.id
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110